BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

BADAN PUSAT STATISTIK

Mencatat UNTUK MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat

Editor:
M. Alie Humaedi,
Dian Karinawati Imron, dan
Agus Pramono

LIPI

Mencatat UNTUK
MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2023 oleh Penerbit BRIN.

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id.

Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).
Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mencatat UNTUK MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat

Editor:
M. Alie Humaedi,
Dian Karinawati Imron, &
Agus Pramono

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pusat Riset Kesejahteraan, Sosial, Desa, dan Konektivitas

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat/M. Alie Humaedi, Dian Karinawati Imron, & Agus Pramono–Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

xxxiv + 424 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-8052-93-6 (no.jil.lengkap)
978-623-8052-95-0 (jil.2)
978-623-8052-97-4 (no.jil.lengkap PDF)
978-623-8052-99-8 (jil.2 PDF)

1. Sensus Penduduk
2. Regsosek
3. Pendataan Kuantitatif
4. Survei

304.609598

Copy editor : I Made Dwi Setiadi & Sarah Fairuz
Proofreader : Emsa Ayudia Putri & Sonny Heru Kusuma
Penata isi : Hilda Yunita & Meita Safitri
Desainer Sampul : Gustaf Wijaya & Meita Safitri

Cetakan Pertama : September 2023

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id
Penerbit BRIN
@penerbit_brin
penerbit_brin

Riset dan penerbitan buku ini atas dukungan:
Badan Pusat Statistik (the Central Bureau of Statistics)
Jl. Dr. Sutomo 6–8 Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
E-mail: bpshq@bps.go.id
Website: www.bps.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

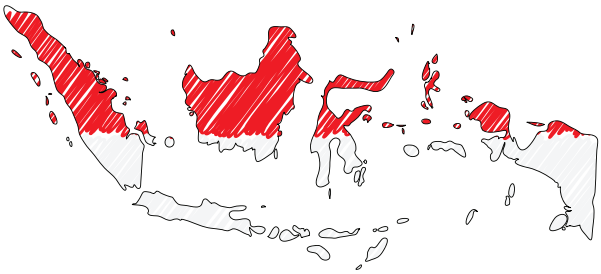

Persembahan

Mereka yang membutuhkan data
untuk kebaikan umat manusia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

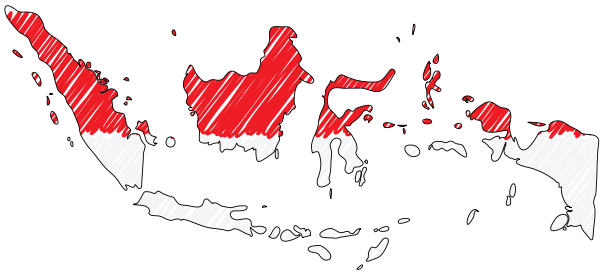

Peta Konteks Cerita

SERI 2
(Indonesia Tengah - Barat)
1. Balikpapan, Kalimantan Timur
2. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
3. Mempawah, Kalimantan Barat
4. Sampang, Jawa Timur
5. Surakarta, Jawa Tengah
6. Indramayu, Jawa Barat
7. Lampung Selatan, Lampung
8. Sabang dan Aceh Besar, Aceh
9. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

SERI 1 (Indonesia Tengah - Timur)
1. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
2. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
3. Wajo, Sulawesi Selatan
4. Gorontalo, Gorontalo
5. Donggala, Sulawesi Tengah
6. Manokwari, Papua Barat
7. Ternate, Maluku Utara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

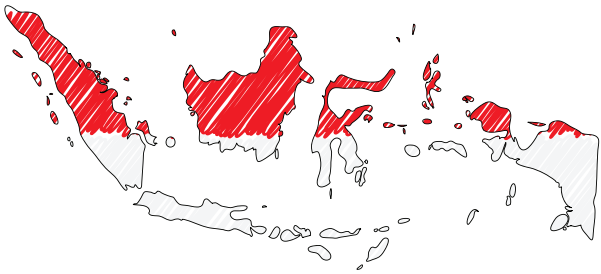

Daftar Isi

Halaman Persembahan v
Peta Konteks Cerita vii
Daftar Gambar xi
Daftar Tabel xvii
Pengantar Penerbit xix
Kata Pengantar Sekretaris Utama BPS RI xxi
Kata Pengantar Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN xxv
Prakata xxix
Ucapan Terima Kasih xxxiii

#1 Kesemestaan dalam Data: Kekuatan Narasi Emik Sembilan Amatan 1
M. Alie Humaedi

#2 Mencacah di Kota Balikpapan: Sekelumit Kisah dari Kota Terpadat di Kalimantan Timur 23
Nurbaety Setram & Lindawati

#3 Mendata Indonesia "Bumi Handep Hapakat" Kawasan Lumbung Pangan Nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah 53
Rosita Novi Andari & Kurnia Suci Indraningsih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

#4 Proses Registrasi Sosial Ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat 93
Eliana Sidipurwanty & Yumantoko

#5 Menelisik Simpang Regsosek di Kabupaten Sampang: Refleksi Kualitatif 127
Nyi R Irmayani & Pratiwi

#6 Merefleksikan Makna Pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta 169
Nuzul Solekhah & Rachmini Saparita

#7 Registrasi Sosial Ekonomi di Indramayu: Memahami Kemiskinan dengan Kelindan Persoalan Sosial di Wilayah Agraris–Maritim 229
Nurul Hilmiati & Dian Karinawati Imron

#8 Mendata Lampung, Menemukan Potensi 273
Slamet Rahmat Topo Susilo & Habibullah

#9 Dari Km 0 (Nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna di Balik Data 307
Eko Wahyono & Badrun Susantyo

#10 Tanah Bertuah Negeri Beradat: Kabupaten Serdang Bedagai 349
Ririn Purba & Fedrickson Haradongan 349

#11 Jejaring Makna dan Impresi Nilai: Merajut Simpul Pembelajaran Regsosek 389
Dian Karinawati Imron 389

Lampiran Biodata Kepala BPS Kabupaten/Kota 395
Glosarium 401
Tentang Editor 407
Tentang Penulis 411
Indeks 421

Buku ini tidak diperjualbelikan.

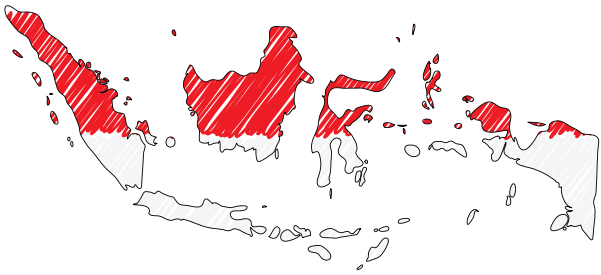

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Peta Kota Balikpapan	25
Gambar 2.2	Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota	26
Gambar 2.3	Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	27
Gambar 2.4	Pemandangan Pemukiman di di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat	28
Gambar 2.5	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Regsosek di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur	34
Gambar 2.6	Petugas Lapangan, Babinsar, dan Sekretaris Lurah Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat bersama dengan Tim BPS-BRIN	40
Gambar 2.7	Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	48
Gambar 2.8	Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Damai	49
Gambar 2.9	Pemandangan Kediaman Ibu AS	49
Gambar 2.10	Pemandangan Kediaman Ibu HS	50
Gambar 3.1	Peta Kabupaten Pulang Pisau	54
Gambar 3.2	Peta Wilkerstat Desa Pangkoh Hulu	57
Gambar 3.3	Hasil Monitoring Regsosek Provinsi Kalimantan Tengah pada Website Regsosek BPS Pusat per 4 November 2022	66

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 3.4 Hasil monitoring Regsosek Provinsi Kalimantan Tengah pada website google data studi BPS Provinsi Kalimantan Tengah per 6 November 2022. 66
Gambar 3.5 Profil Petugas Lapangan Regsosek Kabupaten Pulang Pisau 71
Gambar 4.1 Posisi Kabupaten Mempawah 94
Gambar 4.2 Diskusi dengan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat 96
Gambar 4.3 Peta Desa Sungai Bakau Besar Laut 99
Gambar 4.4 Tambak di Desa 101
Gambar 4.5 Seorang ibu rumah tangga mengeluhkan air laut masuk kerumah. 102
Gambar 4.6 Tantangan Petugas dalam Mendata 110
Gambar 4.7 Suasana Pendataan 120
Gambar 4.8 Suasana Pendataan 120
Gambar 5.1 Peta Kabupaten Sampang 129
Gambar 5.2 Aktivitas sore penduduk nelayan Desa Dharma Tanjung yang berjualan ikan. 130
Gambar 5.3 Aktivitas sore penduduk nelayan Desa Dharma Tanjung mengambil ikan dari melaut 132
Gambar 5.4 Pemukiman Rumah-Rumah Nelayan 132
Gambar 5.5 MCK warga terbengkalai dan pengelolaan sampah yang kurang sehat di Desa Dharma Tanjung. 133
Gambar 5.6 Pemukiman Petani, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang 135
Gambar 5.7 Lahan Pertanian Warga di Daerah Pertanian, Desa Dharma Tanjung 135
Gambar 5.8 Petik Laut Desa Dharma Tanjung 137
Gambar 5.9 Proses Diskusi PPL, PML, Koordinator Kecamatan bersama Tim dari BRIN 146
Gambar 5.10 PPL sedang melakukan pendataan 156
Gambar 5.11 Medan yang dilalui untuk menuju desa bagian Utara (kiri) dan proses unggah data aplikasi kedua (kanan) 159
Gambar 6.1 Peta Kelurahan Semanggi dan Mojo, Surakarta 173

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 6.2 Peta Kota Surakarta 174
Gambar 6.3 Berbagai informasi Regsosek yang tersebar di masyarakat 180
Gambar 6.4 Malam Pendataan Regsosek 29 Oktober 2022 di Kota Surakarta 181
Gambar 6.5 PPL didampingi PML dan Peneliti BRIN saat mendata Regsosek secara *door to door*..... 182
Gambar 6.6 Pertemuan Peneliti BRIN bersama Kepala BPS Kota Surakarta, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Pusat 187
Gambar 6.7 Koordinasi untuk berkomunikasi dengan pemangku wilayah..... 188
Gambar 6.8 Konsolidasi Mitra BPS Kota Surakarta dalam Penentuan Strategi Pendataan Regsosek 188
Gambar 6.9 Peneliti BRIN, BPS Pusat, Provinsi dan Kota Surakarta 189
Gambar 6.10 Peneliti BRIN mendapat penjelasan pelaksaaan Regsosek dari BPS. 190
Gambar 6.11 Peninjauan pelaksanaan Regsosek di Kelurahan Semanggi..... 191
Gambar 6.12 Informasi Regsosek dan Program Pembangunan di Kota Surakarta di TV Lokal..... 191
Gambar 6.13 Bersama Ketua RW 01 dan Kader PKK Kelurahan Mojo 193
Gambar 6.14 Perumahan yang disiapkan Pemerintah Kota Surakarta bagi Warga Kampung Harmoni..... 195
Gambar 6.15 Tempat Rekreasi Warga Kampung Harmoni 196
Gambar 6.16 Berkumpul di Depan Benteng Keraton Kasunanan Surakarta..... 199
Gambar 6.17 Berbagai Peninggalan Kerajaan yang diabadikan di Museum Keraton Kasunanan Surakarta..... 200
Gambar 6.18 Pendataan di Keraton Surakarta..... 201
Gambar 6.19 Tampilan Sistem Infomasi Regsosek melalui *Dashboard Monitoring*..... 205
Gambar 6.20 Sistem informasi Regsosek Solo yang dibangun sendiri oleh BPS Kota Surakarta 206

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 6.21 Tempat Tinggal di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kota Surakarta. 207
Gambar 6.22 BP bersama staf BPS dan peneliti BRIN saat bertugas mendata Regsosek 213
Gambar 7.1 Kabupaten Indramayu 231
Gambar 7.2 Bentangan Lahan Pertanian di Kabupaten Indramayu..... 231
Gambar 7.3 Salah satu sudut Desa Dadap, sebuah desa nelayan di Kecamatan Juntinyuat..... 232
Gambar 7.4 Rumah-rumah di Kecamatan Juntinyuat 237
Gambar 7.5 PML dan PPL berdikusi terkait pendataan 245
Gambar 7.6 Pengumpulan Berkas Registrasi oleh Para PML..... 245
Gambar 7.7 Petugas BPS kabupaten melakukan seleksi administrasi untuk tenaga *entry data* 246
Gambar 7.8 Seleksi Petugas *Entry Data* untuk Kecepatan dan Ketepatan Mengetik dan Spesifikasi Laptop..... 247
Gambar 8.1 Peta Kabupaten Lampung Selatan..... 276
Gambar 8.2 Pendataan Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan. 282
Gambar 8.3 Pencanangan Desa Cantik di Kabupaten Lampung Selatan 287
Gambar 8.4 Rakor Pendataan Awal Regsosek 2022..... 288
Gambar 8.5 Proses Pemeriksaan Kuesioner oleh PML..... 291
Gambar 8.6 Pak Jokowi sedang mencoba Motor Pustaka. 294
Gambar 8.7 Aktivitas Motor Pustaka..... 295
Gambar 8.8 PPL Diundang Pak Jokowi 297
Gambar 8.9 Pak Sugeng sebagai Petugas PPL Regsosek 299
Gambar 8.10 Kondisi Rumah Bu Yuliani dari Luar..... 304
Gambar 9.1 Bersama tim Regsosek Kab. Aceh Besar menuju Pulau Aceh (P. Breuh) menggunakan kapal motor (kapal kayu)..... 310
Gambar 9.2 Perbincangan di kedai kopi adalah hal lazim di sebagian besar masyarakat Aceh sebagai media silaturahmi dan memperkuat akar kebersamaan. 313

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 9.3 *Guest house* Meurandeh, tempat menginap dan basecamp Tim Regsosek Kecamatan Pulau Aceh (P. Breuh). 315
Gambar 9.4 Kepala BPS Aceh Besar menjelaskan aplikasi Regsosek 2022 bersama Penanggung Jawab Lapangan Regsosek Aceh Besar (Cek Mustafa) dan Koseka Kecamatan Lhoong (Pak Suwardi) 320
Gambar 9.5 PPL melakukan pendataan. 323
Gambar 9.6 Tim Regsosek Pulau Aceh Bersama Tim Peneliti dan Penanggung Jawab Lapangan (Cek Mus Kab Aceh Besar) 325
Gambar 9.7 Pencacahan PPL dengan Kepala BPS Aceh Besar kepada Bupati Aceh Besar 328
Gambar 9.8 Regsosek: Antara Pemaknaan dan Harapan 333
Gambar 9.9 Pencacahan PPL kepada Warga 335
Gambar 9.10 Salah Satu Korban Tsunami Aceh Tahun 2004..... 341
Gambar 9.11 Peta Aceh Besar 343
Gambar 9.12 Wajah-wajah Penuh Harapan Anak-anak Cok Langit Aceh 344
Gambar 10.1 Kabupaten Serdang Bedagai 350
Gambar 10.2 Koseka BPS Serdang Bedagai, BRIN, PPL, BPS Pusat, BRIN, Kepala TU Serdang Bedagai, dan PML (Kiri ke Kanan) 353
Gambar 10.3 Peta Lokasi Desa Bengkel 354
Gambar 10.4 Salah Satu UMKM yang Masih Bertahan..... 355
Gambar 10.5 Beberapa UMKM di Rruas Jalan Desa Bengkel yang Gulung Tikar..... 356
Gambar 10.6 Skema Pemaknaan (Entitas) Regsosek (2022)..... 360
Gambar 10.7 Dokumentasi saat melakukan FGD bersama BPS Serdang Bedagai..... 366
Gambar 10.8 Dokumentasi dengan Kepala Desa Bengkel, Bapak Indra (Memakai Topi) 367
Gambar 10.9 Dokumentasi Pak Martono (Kaos Hitam)..... 370
Gambar 10.10 Ibu Habibah, PPL Dusun III-IV, desa Kota Galuh 374

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 10.11 Kondisi Atap Rumah Warga..... 381
Gambar 10.12 Kondisi Rumah Tergenang Banjir 383

Buku ini tidak diperjualbelikan.

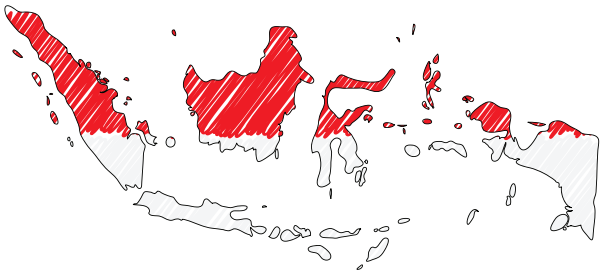

Daftar Tabel

Tabel 6.1 Dinamika Sensus Penduduk di Indonesia..... 171

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

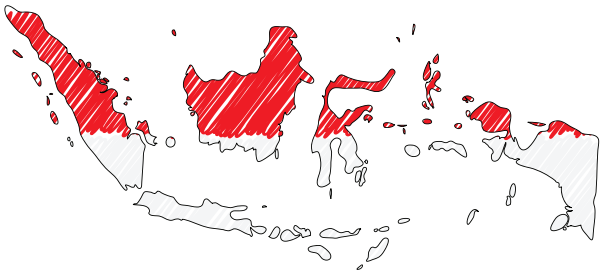

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *MENCATAT UNTUK MEMBANGUN NEGERI: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2 (Indonesia Tengah-Barat)* merupakan narasi emik kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Buku ini menggambarkan aktivitas kuantitatif berupa kegiatan model sensus ke dalam amatan kualitatif yang mendalam dan memberikan pemaknaan atas seluruh perilaku dan interaksi yang terjadi di antara masyarakat, subjek pendataan, dengan para petugas lapangan.

Buku ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan juga menumbuhkan kesadaran atas pentingnya satu data Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang tepat dan efektif.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

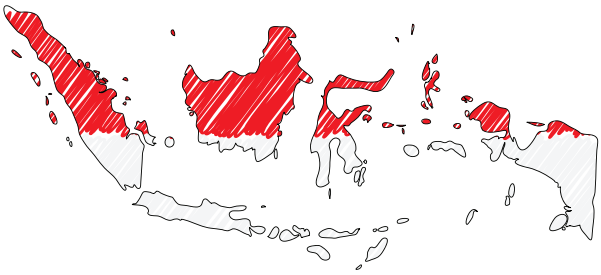

Kata Pengantar
Sekretaris Utama BPS RI

Data yang akurat dan berkualitas merupakan penentu keberhasilan dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam penyediaan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, salah satunya adalah untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial. Pada rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan 2022 dicetuskan tiga reformasi struktural menuju Indonesia Maju 2045 di mana salah satunya mengenai reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk melalui registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Perluasan cakupan data perlindungan sosial merupakan sebuah keniscayaan, terlebih setelah kehadiran pandemi Covid-19 dan peningkatan kejadian bencana alam dalam beberapa tahun terakhir yang dampaknya dirasakan oleh banyak kalangan. Pada Oktober–November tahun 2022, BPS diamanatkan untuk melaksanakan pendataan awal Regsosek 2022. Output Regsosek 2022 adalah basis data yang mencakup seluruh penduduk. Dari pendataan awal Regsosek akan diperoleh data-data yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan di berbagai sektor, seperti perumahan, kesehatan, UMKM, dan ketenagakerjaan. Data ini bersifat strategis karena akan menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi program perlindungan sosial yang bersifat adaptif dan inklusif.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kegiatan pendataan awal Regsosek 2022 telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2023 di depan rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2022. Mengingat nilai strategisnya, tantangan kegiatan pendataan awal Regsosek bagi BPS dan kementerian/lembaga adalah sinergi untuk kolaborasi dalam pelaksanaan tugas ini. Pengumpulan data sosial ekonomi seperti ini memang bukan yang pertama dilakukan BPS, sebelumnya pernah dilakukan pada 2005, 2011, dan terakhir 2015. Sekalipun demikian, tidak satupun di antaranya yang cakupannya menyasar 100 persen penduduk Indonesia. Oleh karenanya, kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak mutlak diperlukan, salah satunya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM).

Dukungan BRIN adalah merekam kegiatan pendataan Regsosek dari sisi yang berbeda, seperti interaksi pendata dan masyarakat, dukungan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, hingga cerita-cerita menarik (*behind the scene*) yang ditemui di lapangan akan memperkaya narasi Regsosek sebagai sebuah kerja kolaboratif. Fakta-fakta dari sudut pandang tersebut yang terkadang terlewat dari perhatian BPS yang banyak disibukkan oleh aktivitas teknis pendataan dan menjaga akurasi data. Di sisi lain, BRIN sebagai lembaga riset terbesar di Indonesia saat ini tentunya akan memberikan gambaran yang objektif dari perspektif kualitatif yang menjadi salah satu keahliannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan OR TKPEKM di 16 Provinsi ini, saya harap mampu menjadi referensi yang reflektif, dengan belajar dari kasus-kasus spesifik hingga rekomendasi strategis yang sifatnya komprehensif.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saya mengapresisasi sinergi yang baik antara BPS dan BRIN dalam kegiatan ini. Dua seri buku "Mencatat untuk Membangun Negeri" akan menjadi sumbangan berharga pada upaya pemerintah melaksanakan reformasi data perlindungan sosial di Indonesia.

Jakarta, Mei 2023
Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

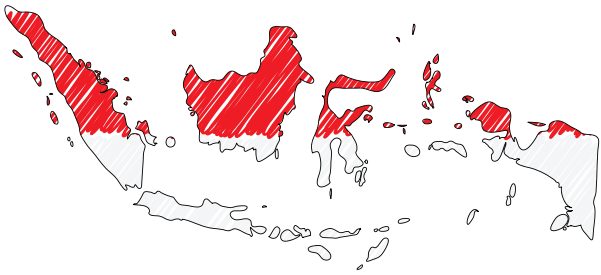

Kata Pengantar

Menyusun Variabel Emik Pendukung Regsosek

Registrasi sosial ekonomi (Regsosek), sebuah aktivitas "se-model sensus" yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menjadi momentum penting untuk membangun satu data Indonesia terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi basis dari perumusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan dari program pemerintah terkait bantuan sosial yang sebelumnya sering kali salah sasaran, kurang tepat, dan merenggangkan kohesivitas sosial.

Pendataan pada aspek-aspek sosial dan ekonomi pada skema Regsosek ini bersifat holistik dan integral, yang memungkinkan validitas dan akurasi datanya sangat tinggi. Terlebih kegiatan Regsosek ini juga didukung dengan penggunaan metode *geo-tagging* lokasi pada satuan lingkungan sensus atau satuan lingkungan setempat (SLS) dan pengambilan foto pada empat dimensi secara utuh dari masyarakat subjek pendataan. Pemilihan metode kuantitatif yang didukung dengan aplikasi pemodelan dan *geo-tagging* ini menjadi jalan penting inisiatif pemerintah dalam menyiapkan skema yang tepat dari berbagai program pembangunan yang akan diluncurkan.

Inisiatif pemerintah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Badan Pusat Statistik didasarkan pada kepentingan pencapaian tiga dari empat tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembukaan UUD 1945. Tujuan negara terkait perlindungan warga negara, peningkatan kesejahteraan umum, dan pencerdasan anak bangsa sangat kentara dalam berbagai konsep, variabel, dan indikator yang ditetapkan dan dituangkan dalam berbagai pertanyaan Regsosek. Jawaban subjek pendata atas pertanyaan itu menjadi data yang akan diolah, diprediksi, dan ditemukan model preferensinya sehingga berbuah pada kecenderungan program yang dapat dirumuskan dan diimplementasikan.

Niatan baik pemerintah yang dilakukan BPS di atas, seyogianya perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM). Visi besar OR TKPEKM adalah berusaha mendorong adanya rancang bangun sistem tata kelola pemerintahan yang *proper* bagi kebijakan perlindungan sosial menjadi mandat dukungan terhadap kegiatan Regsosek BPS tahun 2022 ini. Sensus, survei, dan registrasi sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari aktivitas penelitian. Oleh karena itulah, melakukan kegiatan Regsosek dan mendampingi aktivitasnya sebenarnya sama saja melakukan penelitian. Terlebih ketika para peneliti mengambil satu perspektif atau satu ranah tersendiri dari aktivitas Regsosek. Aktivitas teknis dan substansi Regsosek yang menjadi ranah tanggung jawab BPS tidak dimasuki. Namun, tim melihat dan merekam proses pendataan, strategi dalam pelaksanaan alur bisnis Regsosek, interaksi antara subjek data dengan pendata, dukungan kelembagaan sosial tradisi, *life story* pendata, dan *life story* keluarga subjek data menjadi fokus utamanya.

Sekalipun berada di luar dari aktivitas Regsosek, namun perekaman dan pemahaman secara kualitatif atas rangkaian perilaku aktivitas ini memungkinkan hadirnya tawaran strategi baru dalam sosialisasi dan pelaksanaan, perumusan variabel, dan indikator baru untuk kepentingan substansi ruang lingkup Regsosek, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mendokumentasikan peristiwa bersejarah yang diciptakan negara dalam upaya membangun satu data Indonesia.

Dalam konteks inilah, kehadiran para peneliti dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas OR TKPEKM bukan dengan tujuan melegitimasi kegiatan Regsosek, tetapi di dalamnya memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan arkeologi pengetahuan yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan masyarakat dan secara masif dapat menumbuhkan kesadaran bersama atas pentingnya data dan pendataan. Buku "Mencatat untuk Membangun Negeri" yang terdiri dari dua seri ini menjadi bukti keinginan dan semangat para peneliti untuk menjadi ujung tombak pencerahan dan pencerdasan kehidupan bangsa.

Saya menyambut gembira atas terbitnya dua seri buku "Mencatat untuk Membangun Negeri", seiring ucapan terima kasih kepada BPS RI yang bersedia memfasilitasi kegiatan penelitian dan menyertakan para peneliti dalam kegiatan Regsosek. Semoga kerja sama ini terus berlanjut, termasuk kesempatan para peneliti mengakses data Regsosek untuk kepentingan penelitian terkait perlindungan dan jaminan sosial. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR KSDK) Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) yang berusaha membangun kerja sama dengan pihak BPS, mempersiapkan para peneliti, dan menerbitkan buku luar biasa ini.

Untuk para peneliti di PR KSDK, saya ucapkan terima kasih dan selamat atas terbitnya buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penerbit BRIN dari Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah (RMPI) BRIN yang menerbitkan buku ini. Demikian juga ucapan terima kasih yang sama, saya sampaikan untuk lembaga penerbitan dan percetakan BPS RI yang bersedia mencetak dan mendistribusikan buku ini secara *hardcopy*. Semoga buku ini akan menjadi jalan dari arkeologi pengetahuan, dokumen hidup, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bagian tidak terpisahkan dari peristiwa bersejarah kegiatan Regsosek. Insyaallah, buku ini akan bermanfaat bagi mas

yarakat umum.

Jakarta, 20 Juni 2023

Dr. Agus Eko Nugroho, S.E., M.Eccon.

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan,
Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

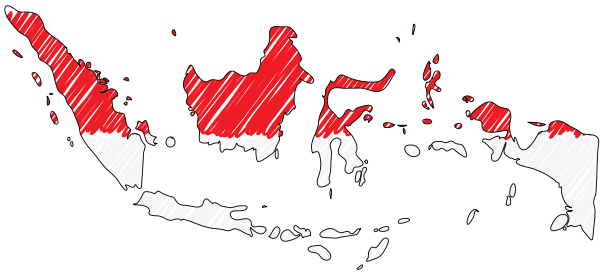

Prakata

"Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi" seri 1 dan 2 merupakan dua buku kompilasi yang menarik. Narasi tentang proses pendataan kuantitatif yang diceritakan menunjukkan bahwa kegiatan survei atau sensus tidaklah semudah yang dibayangkan. Para pendata bukan sekadar membawa lembar kuesioner, bertanya dengan berbagai pertanyaan standar kepada para responden, mencentang dan menorehkan angka, serta memeriksa kembali jawaban responden. Namun, di dalamnya penuh perjuangan untuk bertemu responden, yang sering kali tidak satu atau dua kali kunjungan.

Dengan beragam alasan, khususnya dari kelompok sosial ekonomi menengah ke atas, para responden berusaha menghindar diri dari pendataan, terlebih di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat privasi terkait tingkat kekayaan, kepemilikan tanah dan emas, ataupun tingkat kualitas kesehatan. Sebaliknya, bagi kelompok menengah ke bawah, bukanlah mereka menghindari kegiatan pendataan, tetapi mereka berusaha menyembunyikan kekayaan yang dimilikinya, dan berusaha mempesona para pendata agar memasukkannya sebagai kelompok entitas orang yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tak hanya itu, kelompok rentan dan miskin dengan segala kesulitannya selalu berharap bahwa pendataan ini akan menghantarkan dirinya untuk tetap mendapatkan program bantuan pemerintah. Sementara bagi mereka yang belum atau tidak pernah mendapatkan bantuan, tetapi sering kalinya pendataan dilakukan, maka tak jarang sifat acuh dan caci maki pun melayang kepada Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML).

Respon yang menyakitkan dan harapan yang melambung tinggi dari para responden dan ditambah bentang alam yang menyulitkan menjadi benang merah narasi emik kegiatan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) ini. Cerita kepedihan diantara sedikit kebahagiaan nyaris menghiasi seluruh cerita yang ditulis para peneliti dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR KSDK-BRIN).

Di sinilah kelebihan dari buku ini. Ia mampu menggambarkan aktivitas kuantitatif berupa kegiatan model sensus ke dalam amatan kualitatif yang mendalam dan memberikan pemaknaan atas seluruh perilaku dan interaksi yang terjadi di antara masyarakat, subjek pendataan, dengan para petugas lapangan. Tidak hanya itu, aspek dukungan kelembagaan formal dan sosial tradisi beserta *life story* dari para pendata dan subjek masyarakat yang didata dikisahkan sebagai jalan utama dari lika liku program pendataan nasional ini.

Buku ini, selain berkontribusi bagi ilmu pengetahuan juga menumbuhkan kesadaran atas pentingnya satu data Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang tepat dan efektif. Buku ini juga menghantarkan para pembaca untuk dapat menghormati pelaksanaan tugas negara yang dilakukan para petugas pencatat. Sebagai ujung tombak pendataan, mereka harus mampu memposisikan diri secara tepat di antara kepentingan kelompok masyarakat dan mendorongnya pada partisipasi masyarakat untuk bersedia didata. Adanya partisipasi para pihak dalam mengumpulkan data sehingga mampu terhimpun dalam buku ini patut diapresiasi. Temuan data terkait foto dan hasil

Buku ini tidak diperjualbelikan.

wawancara yang ditampilkan pun telah mendapat persetujuan dari para pihak yang terkait dalam proses pendataan.

Menghadirkan buku "Mencatat untuk Membangun Negeri: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi" seri 1 dan 2 ini, seolah sedang mengemas rasa ingin tahu dan semangat keindonesiaan kita untuk dimaknai oleh seluruh warga bangsanya. Selamat membaca.

Jakarta, 5 Juni 2023
Editor

M. Alie Humaedi
Dian Karinawati Imron
Agus Pramono

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

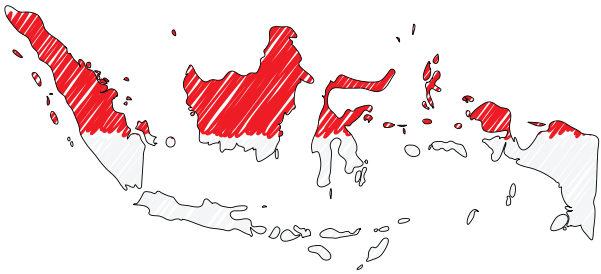

Ucapan Terima Kasih kepada Kepala BPS Provinsi 9 Lokus Kabupaten/Kota Amatan

Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PR KSDK) Badan Riset dan Inovasi Nasional mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan, fasilitasi dan dukungan yang diberikan para Kepala BPS Provinsi yang menjadi naungan dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi amatan kegiatan narasi emik Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022.

1	Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur	:	Dr. Yusniar Juliana, S.ST, MIDEC.
2	Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah	:	Ir. Eko Marsoro, MM.
3	Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat	:	Moh. Wahyu Yulianto, S.ST, S.Si, M.Si
4	Kepala BPS Provinsi Jawa Timur	:	Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si.
5	Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah	:	Ir. Adhi Wiriana, M.Si
6	Kepala BPS Provinsi Jawa Barat	:	Marsudijono, S.Si, M.M.
7	Kepala BPS Provinsi Lampung	:	Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si, M.M.
8	Kepala BPS Provinsi Aceh	:	Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si, MT.
9	Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara	:	Nurul Hasanudin, S.ST, M.Stat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

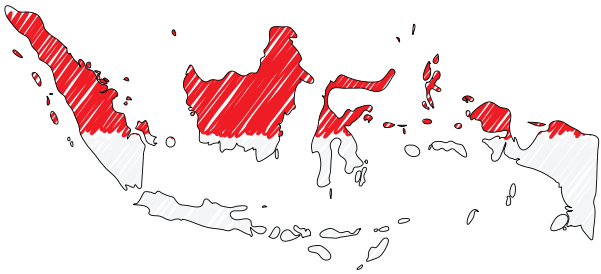

#1

Kesemestaan dalam Data: Kekuatan Narasi Emik Sembilan Amatan

M. Alie Humaedi

A. Mencari Alat Ikat Pendataan: Suatu Pengantar

Penarasian emik registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada tahun 2022 di 16 wilayah amatan menunjukkan adanya karakter masing-masing wilayah, baik karakter demografis, geografis, sosial budaya, dan termasuk proses pendataan beserta dukungan kelembagaan yang ada. Banyaknya permasalahan yang diangkat, terlebih didekati dengan penelitian kualitatif, memungkinkan narasi terceritakan cukup panjang. Dengan pertimbangan komprehensifitas tulisan, penarasian emik ini pun dipecah menjadi dua seri dalam penerbitan bukunya. Sekalipun dipecah, ruang lingkup pembahasannya sama dan masing-masing seri buku tersebut diberikan alat ikat yang memadai agar hubungan antara Seri 1 dan Seri 2 tetap ada.

M. A. Humaedi
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: mali002@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Humaedi, M. A. (2023). Kesemestaan dalam data kekuatan narasi emik sembilan amatan. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat* (1–22). Penerbit BRIN.
DOI: 10.55981/brin.777.c703 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada buku Seri 1, ruang lingkup penarasian emik mencakup wilayah Indonesia Tengah dan Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Pemilihan Nusa Tenggara Timur dan bukan Papua Barat sebagai bagian awal narasi buku didasarkan pada pertimbangan adanya tekanan tematik substantif. Keadaan dan fenomena NTT sebenarnya menjadi citra atau gambaran umum kondisi masyarakat Indonesia pada kawasan tengah dan timur. Sekalipun dalam konteks keamanan nasional, NTT relatif aman dan berbeda dengan Papua, namun kondisi keterbatasan, kerentanan, dan kurangnya akses pembangunan menjadi contoh dari tumbuh kembangnya wilayah Indonesia di masa awal.

Setelah bagian Nusa Tenggara Timur, dilanjutkan dengan penarasian Regsosek di Nusa Tenggara Barat, beberapa kabupaten/kota di wilayah pulau Sulawesi, dan diakhiri dengan Papua Barat dan Maluku Utara. Wilayah Indonesia Tengah dan Timur cukup otentik dalam proses pendataannya. Dukungan kelembagaan formal dan informal cukup terasa kuat di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tengah dan timur masih memegang teguh ikatan primordialisme atas nama keluarga, entitas kesukuan, dan jaringan primordialisme lainnya.

Dengan karakter sosial budaya seperti di atas, maka pemilihan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) yang berasal dari wilayah atau desa setempat menjadi sangat strategis dalam mendukung kelancaran pendataan berbasiskan rumah tangga atau keluarga pada satuan lingkungan setempat (SLS). Sekalipun ada tuduhan akan terjadi bias atau subjektivitas karena pendata terhubung dengan etnosentrisme atau jaringan kekerabatan yang sama, namun kedua kecenderungan itu dapat ditekan dengan penggunaan metode *geo-tagging* dan pemodelan empat dimensi pada kondisi tempat tinggalnya.

Model penarasian emik pada buku Seri 1 pun diikuti dengan penarasian 9 wilayah untuk buku Seri 2. Ada 9 wilayah amatan yang diangkat pada buku kedua ini, yaitu Balikpapan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Mempawah di Kalimantan Barat, Sampang di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jawa Timur, Surakarta di Jawa Tengah, Indramayu di Jawa Barat, Lampung Selatan di Lampung, beberapa lokasi di Aceh, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara.

Daerah Kalimantan Timur menjadi awal pembahasan sebagai bentuk penghargaan terhadap calon wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasan lain tentu didasarkan pada upaya memetakan permasalahan data dan pendataan sebelum wilayah ini benar-benar menjadi wilayah IKN. Penarasian emik Regsosek pada momentum seperti ini tentu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari arkeologi pengetahuan dan menuliskan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Ruang lingkup yang sama walaupun berbeda karakternya berdasarkan sistem sosial budaya yang berkembang di wilayah masing-masing, memungkinkan buku narasi emik Regsosek Seri 2 sama menariknya dengan buku Seri 1.

Falsafah dasar penulisan buku narasi emik Regsosek pada seri kedua juga sama dengan seri pertama. Falsafah itu terkait pengukuran dan penilaian terhadap kebesaran sebuah bangsa yang mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lainnya baik secara kuantitas ataupun kualitas harus dapat dilakukan semaksimal mungkin. Harapannya, kebesaran bangsa dapat diukur dan dikembangkan potensinya dengan cara-cara yang benar dan strategis berbasiskan data. Demikian juga tingkat kerentanan dalam aspek sumber daya, kesehatan, serta keterbatasan akses dan konektivitas yang ada pun harus terpetakan dengan baik. Proses pendataan potensi dan kerentanan sama pentingnya dengan perumusan kebijakan pembangunan yang diperuntukkan kemaslahatannya bagi warga bangsa.

Tujuan penghimpunan data yang valid, akurat, dan transparan selain untuk merencanakan kebijakan dan program yang mensejahterakan kehidupan masyarakat, juga di dalamnya ada penegasan tentang kemandirian dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Data bukan sekadar deretan angka tak bermakna, tetapi di dalamnya ada kepentingan perencanaan pembangunan yang memadai. Ketiadaan data ataupun data yang kurang valid sama

Buku ini tidak diperjualbelikan.

artinya membawa proses pembangunan yang tidak jelas arahnya dan tidak jelas pula target capaiannya.

Demikian juga klaim atas keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan serta merta, apalagi ketika dihadapkan pada upaya membangun citra posisi negara di tengah pergaulan internasional. Saat negara tidak memiliki data atau data yang diajukan salah, bagaimana mungkin kita mengajukan diri sebagai negara dalam status tertentu, misalnya status negara maju, status negara G-20, status pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan lainnya.

Data pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan sebuah bangsa. Untuk kepentingan itu, pencacahan dalam berbagai sisi dilakukan oleh negara. Sensus, survei, ataupun registrasi nasional terkait jumlah penduduk, sosial, dan ekonomi dilakukan untuk kepentingan merancang bangun berbagai kebijakan terkait hal itu.

Pencacahan menjadi garda terdepan dari sebuah proses pembangunan. Arah dan target pembangunan ditetapkan berdasarkan rasional kalkulatif yang didasarkan pada perhitungan *rigid* antara kepemilikan, kebutuhan, dan rasio lainnya. Menafikan kepentingan pencacahan, berarti sama saja mendorong pembangunan bangsa tanpa arah dan tujuan pasti. Akibatnya, empat tujuan negara, khususnya terkait pada perlindungan warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 tidak akan terwujud. Keadaan seperti inilah yang harus dihindarkan dalam proses pembangunan negara ini.

Aktivitas rutin sensus penduduk misalnya, secara umum bertujuan untuk mendapatkan data karakteristik dari suatu populasi pada waktu tertentu. Sensus penduduk juga bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial, termasuk penetapan kursi beserta beban biaya politik dalam berbagai pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Hal ini karena data hasil sensus penduduk tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga komposisi, distribusi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan karakteristik penduduk, seperti jenis kelamin, usia, bahasa, dan parameter demografi lain yang dianggap perlu.

Data sensus yang didasarkan pada hasil pencacahan di seluruh wilayah berbasiskan rumah tangga adalah hal yang penting bagi negara dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Bahkan, tidak jarang data kependudukan juga digunakan oleh sektor industri dalam menskenariokan strategi pemasaran beserta sistem mata rantai produksi-konsumsinya. Ibaratnya, menguasai data berarti juga menguasai mata rantai sektor industri, termasuk konsumen serta perilaku konsumsinya yang memungkinkan target pasar dapat ditentukan secara baik dan strategis.

Selain waktu dan target sensus yang ditetapkan secara maksimal, dari waktu ke waktu juga dilakukan berbagai penyesuaian terkait tujuan, metode, dan ruang lingkup sensus penduduk termasuk pada sensus penduduk tahun 2020. Sebagai contoh, sensus penduduk 2020 tidak hanya untuk melakukan pendataan penduduk saja, tetapi juga untuk mendukung tercapainya satu data kependudukan Indonesia. Hal ini karena kegiatan sensus penduduk terkini dilakukan untuk mendukung proses penyempurnaan data administrasi kependudukan yang dipegang oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Data kependudukan sesungguhnya menjadi basis data untuk berbagai kepentingan dan skenario pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itulah, apapun sensus dan survei terkait penduduk beserta potensi dan kerentanannya menjadi sangat penting. Sensus penduduk ataupun registrasi sosial ekonomi merupakan ide modern yang menempatkan penduduk beserta aspek sosial di dalamnya sebagai deret angka, dan diperhadapkan dengan kepentingan tujuan negara. Artinya, sensus dan registrasi menjadi pencacahan lengkap semua orang dan karakteristik penting masyarakat untuk tujuan memahami struktur dasar dan tren masyarakat.

Sejarah telah menunjukkan bagaimana pencacahan secara skala besar pertama kali dilakukan pada populasi Acadia (Nova Scotia) dengan termin 10 kali selama 1671–1714 (Ross & Deveau, 1992;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hynes, 1973). Italia melakukan lima sensus diantara waktu Unifikasi dan Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1861, 1871, 1881, 1901, dan 1911 (A'Hearn et al, 2021). Sedangkan di Amerika Serikat, sensus periode awal dilakukan pada 1790–1840 dimana data yang disediakan masih pada level rumah tangga dan pada tahun 1850, kemudian dirumuskan data pada level individu (Winkle, 1994).

Inggris melakukan sensus pertamanya pada tahun 1801 (Campbell-Kelly, 1996). Perancis pun melakukan kegiatan pencatatan warga pada tahun 1791 di bawah aturan *ancient regime*, tetapi mendandani tahun 1836 sebagai register populasi yang regular dan sistematik (Haug, 1979). Namun, adanya kelemahan pada sistem administrasinya yang dipandang kurang baik maka perbaikan kegiatan pendataan terus ditingkatkan. Pendataan penduduk akhirnya menjadi cara paling efektif masyarakat modern dalam menetapkan kebesaran suatu bangsa beserta karakter sosial budaya dan ekonominya. Melalui pencacahan juga, suatu negara dapat menetapkan orientasi dan perkiraan (*forecasting*) ke depan atas pengembangan dirinya.

Nilai dari falsafah dasar di atas juga diikuti Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. BPS berdasarkan Undang-undang menjadi penanggung jawab atas pendataan untuk kepentingan negara. Dalam konteks ini, BPS menjadi satu-satunya lembaga negara pemangku data. Jika ada kementerian/lembaga lain yang melakukan kegiatan pendataan, sebenarnya dapat dikatakan sebagai aktivitas di luar tugas dan fungsinya yang berkorelasi pada ketidakefektifan anggaran negara.

Selain persoalan di luar tugas dan fungsi, pendataan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di luar BPS memungkinkan akan menciptakan kesimpangsiuran dan ketumpangtindihan data yang memicu konflik arus bawah yang mematikan. Silang sengkarut data penerima Bantuan Langsung Tunai atau Bantalan Sosial yang tidak tepat atau salah sasaran misalnya, telah menyebabkan konflik laten di tingkat masyarakat lokal. Kecenderungan kerusakan moral (*moral hazard*) dan menjadi entitas maladaptif (penuh kemenduaan atau kepalsuan) juga semakin hari semakin besar seiring dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ketidaktepatan sasaran penerima BLT ataupun program perlindungan dan jaminan sosial lainnya (Nyman & Maude-Griffin, 2001).

Pendataan yang dilakukan secara sektoral telah memicu terjadinya peningkatan persepsi negatif bahwa pendataan itu berhubungan erat dengan penerimaan program bantuan. Akhirnya, setiap pendataan akan berujung pada tuntutan atas bantuan sosial sebagaimana yang dipersepsikan masyarakat. Suasana batin seperti ini yang menyulitkan para pendata di lapangan, termasuk pada perangkat organik dan non organik (mitra) BPS saat bekerja melakukan pencacahan. Keadaan ini telah menciptakan persepsi masyarakat tentang "pencacahan adalah bantuan".

Salah satu kelebihan BPS adalah ia menjadi satu-satunya lembaga pemangku data yang dijamin oleh Undang-undang. Dengan posisi seperti ini, sistem kelembagaan yang bersifat vertikal memungkinkan tugas dan fungsinya dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pendataan penduduk beserta aspek-aspek lainnya maka secara rutin BPS pun mengadakan sensus penduduk, sensus sosial ekonomi, berbagai survei aktual, dan registrasi sosial ekonomi.

Dalam konteks sensus, BPS telah dikenal oleh masyarakat di tingkat desa atau wilayah terpencil sekalipun. Hal ini terjadi karena basis data sensus di tingkat rumah tangga memungkinkan nama BPS masuk ke alam kesadaran masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian dan penulisan telah banyak dilakukan para akademisi sehingga citra BPS sebagai pemangku dan pelaksana pendataan atas aspek kependudukan, perkembangan sosial ekonomi, dan aspek lainnya masuk menjadi arkeologi pengetahuan dari kelompok pelajar dan terpelajar.

Kenyataan di atas ditambah dengan pemberitaan terus menerus dari media massa, baik cetak maupun *online* yang memberitakan pentingnya sensus penduduk, sensus pertanian, ataupun survei-survei lainnya, terlebih ketika jadwal-jadwal waktu itu telah rutin dilakukan. Angka akhir di urutan tahun akan menjadi rutinitas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

atas jadwal sensus atau survei tertentu. Misalnya, angka 0 akan identik dengan sensus penduduk (seperti 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020). Sementara angka 3 di belakang selalu identik dengan sensus pertanian, tahun 2003, 2013, dan 2023. Ada juga angka 6, yaitu dikhususkan untuk sensus ekonomi, seperti tahun 2006, 2016, dan 2026 nantinya. Lalu bagaimana dengan angka-angka lainnya? Angka akhir 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9 pada umumnya digunakan untuk aktivitas sensus yang direncanakan atau survei yang bersifat sampling dan tidak menyeluruh.

Salah satu sensus yang direncanakan itu adalah registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Kata registrasi yang ada telah menunjukkan semacam proses pendaftaran kembali dari data sensus yang ada pada pendataan sebelumnya. Program Regsosek ini semacam sensus karena berbasiskan pada keluarga di satuan lingkungan setempat (SLS). Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten sebab terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi, yang meliputi sebagai berikut: (i) Kondisi sosio ekonomi demografis; (ii) Kondisi perumahan dan sanitasi air bersih; (iii) Kepemilikan aset; (iv) Kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus; (v) Informasi geospasial; (vi) Tingkat kesejahteraan; dan (vii) Informasi sosial ekonomi lainnya.

Selain penghimpunan data di atas, Regsosek juga mengikhtiarkan adanya analisis lokasi dan dimensi keruangan (*geo-tagging*), serta keadaan rumah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan data bersifat valid, otentik, dan akurat sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penetapan rumah tangga penerima program perlindungan dan jaminan sosial di kemudian harinya. Akhirnya, Regsosek adalah pendataan kesejahteraan sosial ekonomi yang bersifat holistik dan integral bagi seluruh penduduk Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tujuan Regsosek yang sangat penting ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari lembaga riset dan inovasi, seperti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR KSDK BRIN). Dalam konteks perlindungan dan jaminan sosial, Regsosek dapat diposisikan sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Upaya pendataan kuantitatif yang berhubungan dengan perlindungan sosial seperti ini perlu dikuatkan dengan penarasian emik kualitatif, baik dalam proses pendataannya maupun dalam substansi data terkait aspek-aspek terkait perlindungan sosial bagi warga negara.

Kata emik yang dimaksud di sini adalah sebuah proses penggalian sudut pandang dari subjek yang diteliti, baik dari kelompok masyarakat umum yang didata ataupun para petugas pendata yang terdiri dari Petugas Pencatatan Lapangan/PPL dan Petugas Pemeriksa Data Lapangan/PML. Sudut pandang subjek tersebut tidak akan terlepas dari karakter sosial budaya (*social cultural specificity*) wilayah-wilayah lokal setempat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Penarasian emik pada aktivitas Regsosek berarti menunjukkan adanya upaya mengangkat perspektif dan praktik lokal dalam menerjemahkan aktivitas yang bersifat etik, baik berupa kebijakan, program, ataupun strategi yang berskala nasional dan general. Penerjemahan itu bisa dilihat dari kelompok masyarakat sebagai kelompok target yang didata ataupun para agen penghubung pelaksana kegiatan nasional tersebut. Penarasian emik Regsosek menjadi kekuatan tersendiri dalam mengungkap kedalaman data dan sisi sosial politik atas data yang bersifat lokal.

Bersamaan dengan penyusunan buku seri pertama dengan cakupan 7 wilayah, buku narasi emik seri kedua dengan cakupan 9 wilayah pun disiapkan. Artinya, secara keseluruhan dua seri buku ini mengangkat narasi emik pendataan pada 16 lokasi amatan. Tujuan strategis dari dua seri buku ini adalah menelisik dan menjelaskan proses pendataan Regsosek yang dianggap sebagai sensus model baru sehingga titik kelebihan dan kelemahannya dapat diketahui. Nilai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

strategis ini menjadi sangat penting untuk proses pembaharuan atau konstruksi ulang kegiatan Regsosek di masa berikutnya.

Selain tujuan di atas, substansi buku ini juga menawarkan berbagai variabel dan indikator baru yang dapat dikembangkan dalam penentuan terkait aspek-aspek kesejahteraan sosial dan kelayakan penerima program perlindungan dan jaminan sosial. Dua tujuan buku tersebut merupakan sumbangsih para peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam mendukung segala ikhtiar BPS RI yang berhubungan dengan penguatan tata kelola dan pencapaian tujuan program perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara. Ranah perlindungan sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana strategis dan *flagship* penelitian dan pengembangan yang ditetapkan oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN untuk Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Keterlibatan Bersama dengan BPS adalah jalan penting pelaksanaan tugas dan fungsi secara kelembagaan.

B. Menelisik Proses dan Memahami Pengalaman dalam Pendataan (Alur Metode)

Antara buku seri pertama dan seri kedua adalah satu kesatuan yang didasarkan dari proses penelitian dan pendampingan kegiatan Regsosek yang sama. Kegiatan penarasian emik Regsosek tahun 2022 yang dilakukan Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional berada pada dua aspek utama.

Pertama, prosesi pendataan yang dilakukan para pelaksana kegiatan, baik Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), atau Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang tersebar di berbagai wilayah. Selain soal pendataan, amatan, dan pengumpulan data juga difokuskan pada pelaksanaan alur bisnis beserta keputusan Kepala BPS kabupaten/kota lokus

Buku ini tidak diperjualbelikan.

amatan dan strategi dari perangkat organik dan non-organik BPS. *Kedua*, subjek data atau individu dan keluarga yang didata. Data amatan dan wawancara ini penting untuk mendapatkan konstruksi baru terkait variabel dan indikator penting yang bisa dikembangkan untuk kepentingan perumusan sistem dan penetapan mekanisme kelayakan penerimaan warga masyarakat yang layak mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial dari negara.

Kata penarasian emik berarti tertuju pada keseluruhan informasi, sudut pandang, praktik hidup, dan nilai-nilai yang dipedomani berdasarkan karakter sosial budaya tertentu yang berkembang pada dua kelompok subjek penelitian di atas. Kegiatan penarasian emik Regsosek ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang di dalamnya menuntut adanya kedalaman data untuk memahami proses interaksi, perilaku, harapan, dan tujuan yang hendak dicapai di dalamnya. Metode ini dipilih sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas berbagai aktivitas. Di dalamnya dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu: (i) wawancara mendalam terhadap para pelaku lapangan (supervisor, enumerator, dan masyarakat); (ii) observasi atas gesture dan proses pelaksanaan pada seluruh tahapan kegiatan Regsosek.

Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan atas kegiatan pendataan dan perolehan angka yang muncul pasca pendataan itu. Artinya, angka tidak sekadar angka yang dihasilkan dari lembar kuesioner yang ditanyakan pendata kepada subjeknya, tetapi di dalamnya ada makna dan harapan yang dihadirkan oleh subjek yang penuh dengan berbagai motivasi. Oleh karena itulah, wawancara mendalam, observasi terlibat, dan diskusi dilakukan para peneliti terhadap para informan yang berasal dari responden pendataan ataupun dari pelaksana pendata, tokoh masyarakat, dan kelompok pejabat yang dianggap mengetahui prosesi kegiatan, alur bisnis, dan daya dukung pelaksanaan kegiatan Regsosek.

Setelah data itu diperoleh, proses triangulasi data dan sumber data dilakukan secara bersamaan saat di lapangan. Jika termasuk informasi tunggal, seperti *life story* maka triangulasi data akan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dihadapkan pada informan sekitar atau didasarkan pada jawaban-jawaban atas pertanyaan di dalam kuesioner Regsosek. Triangulasi data juga dilakukan dengan mengkonfirmasikan informasi yang ada dengan warga pada satuan lingkungan setempat ataupun tokoh yang menjadi pemangku wilayahnya. Amatan keadaan lingkungan sekitar dan lainnya akan dikuatkan dengan data yang berasal dari desa, dinas terkait, dan dokumen lainnya. Tujuannya, data kualitatif yang dihadirkan dari para informan dapat tervalidasi dengan berbagai informasi tertulis yang mendukung. Dalam prosesnya, setiap tim peneliti telah diberikan panduan wawancara, observasi, dan bahkan *outline* sementara yang bisa dikembangkan berdasarkan temuan yang ada di daerah amatannya masing-masing.

Kegiatan pengumpulan data untuk penulisan buku ini dilakukan oleh 32 orang peneliti PR KSDK yang tersebar pada 16 provinsi di Indonesia. Pemilihan kabupaten/kota yang menjadi lokus penelitian didasarkan pada aspek-aspek utama terkait ruang lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Aspek terkait kemiskinan ekstrem, angka stunting, perkawinan muda/di bawah umur, rendahnya akses dan konektivitas, minimnya fasilitas publik, kurangnya kualitas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya tenaga kerja migran, minimnya pertanian, dampak buruk pembangunan, dan lainnya yang melekat pada status dan keadaan masyarakat pada sebuah wilayah menjadi dasar pemilihan kabupaten/kota sebagai lokus penelitiannya.

Bisa jadi suatu daerah kabupaten/kota mencakup aspek-aspek tersebut, namun aspek dominan lah yang menjadi pertimbangan utama dari pemilihan suatu daerah tertentu menjadi lokus penelitiannya. Dengan pertimbangan tertentu, maka penelitian atas kegiatan Regsosek pada setiap satu kabupaten/kota dengan cakupan aspek yang ada diamati oleh dua orang peneliti. Mereka bertugas untuk mengamati proses Regsosek dan sekaligus melakukan pengumpulan data terkait variabel dan indikator baru untuk kemiskinan, serta memahami tingkat keberterimaan masyarakat, dukungan kelembagaan sosial tradisi dalam promosi Regsosek, *life story* pendata, dan *life story* keluarga yang didata.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ada makna penting dibalik penelusuran *life story* subjek data. Dari informasi dan pengalaman sebuah keluarga yang terikat pada lingkungan sekitarnya, bisa dimunculkan variabel dan indikator terbaru terkait kemiskinan dan kesejahteraan yang diharapkan. Aspek inilah yang menjadi tujuan strategis dari pelaksanaan kegiatan kemitraan antara BPS dengan PR KSDK. Harapannya, penelitian dengan metode kualitatif ini dapat (i) memberikan penjelasan dan masukan terhadap proses bisnis pelaksanaan kegiatan register sosial ekonomi bagi BPS; (ii) Mendorong perbaikan proses bisnis berdasarkan data temuan di lapangan, beserta analisis *forecasting* dalam pengembangan ke depannya; dan (iii) Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan Regsosek secara emik di berbagai lokasi sebagai pembelajaran baik bagi para pihak dan masyarakat umum tentang potensi dan kendala membangun satu data Indonesia.

C. Struktur Penceritaan

Penelitian atas kegiatan Regsosek 2022 yang dilakukan secara keseluruhan terdiri dari 16 bagian. Jumlah ini didasarkan pada lokus penelitian beserta cakupan aspek utama yang dikembangkan dalam melihat permasalahan di lokasi Regsosek. Dalam menghasilkan tulisan yang komprehensif, seluruh tulisan ini dibagi ke dalam dua buah buku terbitan dengan judul "Mencatat untuk Membangun Negeri 1: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Timur" dan "Mencatat untuk Membangun Negeri 2: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Barat".

Pemecahan bagian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan geohistoris kawasan tanpa menafikan karakter masing-masing wilayah dengan ikatan lama dan fenomena umum di pulau besarnya. Pada buku seri pertama terdiri dari sembilan bab. Sementara pada buku seri kedua ini terdiri dari sebelas bab. Satu bab sebagai pendahuluan yang mengikat semua permasalahan dan karakterteristik emik di berbagai wilayah, sembilan bab lainnya adalah narasi emik pada masing-masing wilayah amatannya dan satu bab terakhir sebagai penutup.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nyaris memiliki kesamaan dengan seri pertama, bab pendahuluan ditulis oleh M. Alie Humaedi dengan judul "Kesemestaan dalam Data: Kekuatan Narasi Emik Sembilan Amatan". Bagian ini tentu menjadi pengantar dari upaya untuk memberikan pemahaman awal kepada para pembaca terkait proses kegiatan beserta tujuan penarasian emik Regsosek pada sembilan wilayah amatan. Bagian ini juga memberikan dasar-dasar teori dan metode terkait pelaksanaan kegiatan sehingga proses pengamatan dan penarasiannya tetap berada pada standar-standar ilmiah yang ditetapkan dalam dunia kepenulisan.

Tiga bab pertama, semua narasi emik didasarkan pada kawasan pulau Kalimantan. Gugusan pulau ini diposisikan sebagai wilayah Indonesia Tengah yang menjadi batas utama karakter sosial budaya antara wilayah Indonesia Tengah ke Timur, dan Indonesia Tengah ke Barat. Sebagai wilayah tengah dalam gugusan pulau besar Indonesia, karakter sosial budaya di pulau Kalimantan dapat disebut sebagai daerah *hybrid*, silang budaya dari berbagai budaya kelompok etnik yang bertemu. Ia dapat diposisikan sebagai poros dari geohistoris kebudayaan ke arah Tengah dan Timur Indonesia lainnya. Sekalipun pemangku utama di poros Indonesia adalah Bugis-Makassar, namun peran etnik Melayu dan Dayak juga tidak bisa dinafikan begitu saja. Kedua kelompok ini pun menyebar dan menancapkan pengaruhnya hingga ke Indonesia Timur ataupun bagi kelompok Melayu, pengaruhnya hingga ke Haramain (Mekkah dan Madinah).

Di buku seri kedua ini, wilayah Kalimantan Timur menjadi narasi amatan pertama dari gugusan pulau Kalimantan. Tujuannya, memberikan porsi lebih tentang proses pendataan dan kekuatan data dari wilayah yang menjadi Ibu Kota Baru. Narasi emik ini akan menjadi dokumentasi dari pengalaman bersejarah terhadap proses pendataan di wilayah pra IKN. Dokumen ini akan selalu hidup dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap amatan dalam menelisik fenomena tumbuh dan kembangnya masyarakat di wilayah Ibu Kota Baru itu. Apa yang ditulis oleh Nurbaety Setram dan Lindawati tentang "Mencacah di Kota Balikpapan: Sekelumit Kisah dari Kota Terpadat di Kalimantan Timur" memberikan gambaran tingkat kesulitan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendataan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Sebagai wilayah tujuan para rantau, pendataan Regsosek pun mengalami kendala terkait data kependudukan, tingkat kualitas kesehatan, data kepemilikan yang tidak bersifat terbuka, dan akses terhadap bantuan yang ada. Nyaris semua informasi itu samar. Namun demikian, warga kota Balikpapan yang benar-benar "duduk dan berdomisili" pastinya akan ada kejelasan data terkait ruang lingkup yang ditanyakan. Para PPL dan PML berusaha dengan berbagai strategi untuk terus menggali data yang objektif, valid, dan akurat.

Bab ketiga atau bagian kedua dari narasi gugusan pulau Kalimantan, mengangkat judul "Mendata Indonesia "Bumi Handep Hapakat": Kawasan Lumbung Pangan Nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah". Narasi emik ini ditulis secara apik oleh Rosita Novi Andari dan Kurnia Suci Indraningsih. Penarasian yang mengalir terkait kondisi geografis, karakter sosial budaya, dan proses pendataan beserta perjuangan para PPL dan PML dalam menggali data benar-benar menjadi pelajaran penting bahwa pencacahan atau pendataan tidaklah semudah dibayangkan orang. Di dalamnya ada komitmen kuat yang diiringi sifat keluwesan dan perilaku yang membangun rasa kepercayaan bagi subjek datanya. Dari narasi emik ini juga dapat diajukan adanya variabel baru terkait kelompok perantau yang terlihat miskin di kota, tetapi kaya di kampung. Artinya, amatan terhadap rumah kontrak dan perilaku harian tidak serta merta memosisikan mereka sebagai kelompok miskin kota. Hal lainnya, pendataan terhadap para perantau tidak serta merta berbasiskan pada cakupan kartu keluarga di daerah asal, tetapi juga bisa didasarkan pada lokus perusahaan tempat para perantau itu bekerja.

Selaras dengan fenomena perantauan, wilayah Kalimantan Barat mengalami hal serupa. Sekalipun Mempawah berada jauh dari ibu kota provinsi, wilayah ini menjadi rujukan utama dari para perantau Bugis dan Jawa. Apa yang ditulis oleh Eliana Sidipurwanty dan Yumantoko terkait proses Registrasi Sosial Ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi pada kelompok perantau, tetapi juga pada kelompok masyarakat setempat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hasil kebun sekalipun yang memiliki tanah luas rupanya tidak serta merta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keadaan ini menjadi salah satu tawaran indikator baru yang bisa dirumuskan oleh BPS bahwa kepemilikan luasan lahan tidak menjadi indikator kesejahteraan. Luasan tanah tanpa intensifikasi pertanian yang memadai tidak akan menghantarkan pada peningkatan kesejahteraan. Terkait teknis pendataan, wilayah perkebunan yang berada di dalam kampung atau memisahkan antar kampung telah menyulitkan proses pendataan yang dilakukan PPL dan PML. Jarak yang jauh dan sepi menjadi tantangan tersendiri dari para pelaksana pendata itu.

Setelah narasi emik Regsosek pada tiga wilayah keterwakilan di gugusan pulau Kalimantan selesai tertulis maka narasi emik mulai mengangkat gugusan pulau Jawa yang sarat dengan berbagai fenomena sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dimulai dari Sampang Madura di Jawa Timur, narasi emik di pulau Jawa dimulai. Kekuatan gotong royong dan sistem kekerabatan masyarakat Madura dipotret sebagai bagian tidak terpisahkan dari narasi emik ini. Demikian juga proses pendataan yang dilakukan oleh tim PPL dan PML yang menghadapi rintangan geografis, tingkat kemiskinan yang parah, dan lainnya juga dikisahkan oleh Nyi R Irmayani dan Pratiwi dalam tulisannya yang berjudul "Menelisik Simpang Regsosek di Kabupaten Sampang: Refleksi Kualitatif". Sebagai wilayah ujung timur utara Jawa Timur dan terpisah dari daratan besar pulau Jawa, wilayah Kabupaten Sampang Madura tentu memiliki karakternya sendiri. Angka kemiskinan yang cukup tinggi terlihat jelas pada pola permukiman dan perumahan, serta ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan. Demikian pula fenomena rantau dan urbanisasi juga jelas terlihat. Harapan atas bantuan pemerintah menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendataan yang dilakukan PPL dan PML. Dari kasus Sampang ini, setidaknya perlu ada *review* baru terhadap indikator kesejahteraan sosial terkait beban biaya ritual dan pelaksanaan beragam tradisi. Biaya besar atas pelaksanaan ritual tersebut memungkinkan rasio kalkulatif atas penghasilan pun akan masuk ke dalamnya. Kemiskinan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ekstrem yang disebabkan oleh praktik-praktik kultural sangat terasa di masyarakat Sampang Madura.

Setelah dari Jawa Timur, bab kelima buku ini difokuskan pada wilayah yang benar-benar kota. Kota Surakarta merupakan jantung wilayah provinsi Jawa Tengah. Selain sebagai pusat kebudayaan, di wilayah Surakarta ini juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada dua dekade terakhir. Banyak perusahaan atau industri yang menanamkan investasinya di wilayah ini dan sekitarnya. Ketika penanaman modal tinggi maka mau tidak mau wilayah kota ini pun akan siap menjadi tujuan rantauan dari wilayah lainnya. Sebagai kota lama, bentangan wilayah Surakarta ini sebenarnya telah padat dan sempit di masa sebelumnya. Keadaan ini semakin runyam ketika banyak industri yang menyedot banyak tenaga kerja datang ke wilayahnya. Penduduk yang padat dan ditambah dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang mencakupinya menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan yang dilakukan oleh PPL dan PML. Secara cermat, Nuzul Solekhah dan Rachmini Saparita menuliskan fenomena sosial budaya beserta kesulitan para PPL dan PML Regsosek ini ke dalam tulisan yang berjudul "Merefleksikan Makna Pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta". Dari konteks penarasian emik wilayah Surakarta, setidaknya ada rumusan strategi yang ditawarkan dalam proses pendataan. Dukungan kelembagaan tradisi, seperti kaum bangsawan dan kelompok abdi dalam kerajaan menjadi sangat penting dalam kelancaran kegiatan pendataan. Artinya, sosialisasi tidak hanya dilakukan pada tataran formal pemerintahan saja, tetapi juga pelibatan para pengampu wilayah di masa lalu juga menjadi tipe ideal sosialisasi Regsosek.

Siapa tidak kenal Indramayu di Jawa Barat? Sebuah wilayah yang berada di Pantai Utara Pulau Jawa ini sangat akrab dengan pengembangan tradisi seni Dangdut Pantura. Namun, keterkenalannya bukan saja pada soal dangdutnya saja, tetapi BPS mencatat bahwa pergerakan manusia dari Indramayu ke luar negeri sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi pemasok utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara di Asia. Alasan tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mau kalah secara ekonomi dengan tetangganya sering kali menjadi motif utama seseorang berangkat ke luar negeri untuk menjadi PMI. Jeratan hutang sering kali terjadi seiring niatan dan perilaku sosial ini. Bertahun-tahun banyak kepala keluarga, anak, ataupun istri berangkat ke luar negeri. Uang penghasilan dari luar negeri ditujukan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan hidup keluarga di kampung, dan membangun rumah tembok yang mewah. Fenomena "rumah gedong tetapi kosong perabotan" sering kali terlihat jelas di dalam kehidupan masyarakatnya. Fenomena ini akhirnya dapat menjadi tawaran indikator baru, bahwa lantai keramik, dinding tembok, dan atap berplafon tidak selalu identik sejahtera. Rumah itu adalah tabungan sesaat yang dilakukan selama bekerja di luar negeri karena setelah dua atau tiga bulan kembali ke kampung maka para PMI itu akan kembali miskin dan terlilit hutang kembali untuk biaya hidup dan keberangkatan berikutnya ke luar negeri. Fenomena ini juga menyulitkan para PPL dan PML dalam melakukan pendataan. Sirkulasi ekonomi yang cepat habis memungkinkan penilaian angka nominal dalam satu tahun terakhir sulit sekali dilakukan. Persoalan kesulitan dan usulan indikator baru ini ditulis secara apik oleh Nurul Hilmiati dan Dian Karinawati Imron dengan judul bab VI "Registrasi Sosial Ekonomi di Indramayu: Memahami Kemiskinan dengan Kelindan Persoalan Sosial di Wilayah Agraris–Maritim".

Tiga lokasi amatan sebagai keterwakilan pulau Jawa kita tinggalkan. Amatan terakhir tentu pada pulau Sumatra yang membentang dari ujung barat pulau Jawa hingga batas wilayah India dan Srilangka di ujung baratnya. Ada tiga wilayah amatan yang menjadi keterwakilan dari pulau Sumatra, yaitu Lampung, Aceh, dan Sumatra Utara. Pada bab ketujuh, Slamet Rahmat Topo Susilo, dan Habibullah mengangkat judul "Mendata Lampung, Menemukan Potensi". Tulisan ini diawali dari akar sejarah wilayah dan masyarakat Lampung yang sarat dengan pertemuan berbagai kelompok etnik Lampung, Jawa, Melayu, Banten, Bali, dan lainnya. Pengembangan masyarakat dan wilayah Lampung Selatan khususnya tidak terlepas dari campur tangan kerajaan dan kolonial di masa lalu. Berbagai kebijakan di masa lalu memungkinkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adanya temu jumpa dan pembauran berbagai kelompok etnik di wilayahnya. Program kolonisasi dan transmigrasi menjadi tonggak paling penting dalam pembukaan dan perkembangan wilayah Lampung Selatan. Pembukaan wilayah yang diwarnai dengan ikhtiar perkebunan untuk pasokan ekspor memungkinkan perkembangan lebih lanjut *livelihood system*-nya pun berorientasi di dunia pertanian, khususnya perkebunan, ladang, dan sawah. Penduduk setempat rata-rata memiliki lahan cukup luas, walaupun pengelolaannya kurang maksimal. Sementara kelompok transmigrasi, sekalipun kepemilikan lahannya kecil, namun tata kelolanya cukup baik dan intensif sehingga menghasilkan keuntungan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan minimalnya. Perbedaan karakter pengelolaan lahan seperti ini pun terlihat nyata dalam pendataan yang dilakukan para PPL dan PML Regsosek. Apa yang ditemukan di Lampung Selatan nyaris sama dengan apa yang ditemukan di Kalimantan Barat, khususnya soal usulan indikator baru terkait tingkat kesejahteraan bahwa luasan kepemilikan tanah tidak selalu berkorelasi dengan keterpenuhan kebutuhan minimal suatu keluarga. Keragaman pengelolaan dan intensifikasi pertanian dapat menjadi indikator baru terkait tingkat kesejahteraan yang dapat dimasukkan dalam variabel Regsosek di masa berikutnya.

Dari ujung Sumatra bagian Timur, buku ini menggesernya ke bagian ujung barat pulau Sumatra, yaitu Aceh. Sementara wilayah Sumatra Utara dipilih sebagai bagian terakhir dari tulisan ini. Fenomena Aceh, sebagai provinsi paling ujung barat ini cukup otentik. Aceh dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya. Daerah ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik di wilayah daratannya ataupun di wilayah lautannya. Sayangnya, dalam beberapa dekade sebelumnya, wilayah Aceh menjadi daerah konflik yang memilukan dan ditambah dengan tsunami besar yang meluluhlantakkan wilayah pantai. Dalam kejadian itu ratusan ribu orang meninggal dan hilang. Di saat itu, Aceh seolah kembali ke titik nadir peradaban. Masyarakat pun sedikit demi sedikit mengolah hidupnya kembali untuk sejahtera. Pengembangan usaha kelautan dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kebun dikelola secara baik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah sangat terlihat nyata. Temuan dan analisis dari Eko Wahyono dan Badrun Susantyo yang dikemas dengan judul "Dari Km 0 (Nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna Di Balik Data" menunjukkan fenomena ini.

Bagian selanjutnya ditulis oleh Ririn Purba dan Fedrickson Haradongan terkait Sumatra Utara. Keduanya mengangkat judul "Tanah Bertuah Negeri Beradat: Kabupaten Serdang Bedagai" untuk melihat fenomena kemiskinan perkotaan. Meskipun wilayah ini berdekatan dengan ibu kota Sumatra Utara, namun akses kesejahteraan sangat minim. Bahkan, seiring pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatra Utara, melahirkan dampak negatif bagi pengembangan UMKM yang di dalamnya selama ini mampu menjamin kesejahteraan sosial para pelakunya. Masyarakat harus berusaha mencari pendapatan lain di luar UMKM dengan menawarkan jasa dan keahlian. Namun, keadaan ini tidak semua bisa sehingga pemenuhan kebutuhan ekonominya hanya berkisar pada perdagangan kecil dan menggantungkan harapannya pada pemerintah dan masyarakat sekitar.

Fenomena permukiman yang padat dan rawan bencana banjir juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat miskin pinggiran kota Medan ini. Keadaan ini pula yang membuat tingkat kesulitan para PPL dan PML dalam melakukan pendataan. Kesulitan ini ditambah dengan pengalaman buruk kelompok Tionghoa yang bermukim di wilayah tersebut, yang sering kali didata, tetapi tidak memberikan manfaat sedikitpun bagi mereka. Pengalaman buruk inilah yang menciptakan kesulitan tersendiri bagi para PPL dan PML Regsosek di tahun 2022. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, dukungan tokoh lokal dan kelembagaan sosial menjadi sangat penting. Pembelajaran baik dari kasus Regsosek di wilayah Serdang Bedagai adalah dukungan lembaga informal dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan. Fenomena ini sangat jarang ditemui di berbagai wilayah amatan lainnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagian terakhir dari buku ini merupakan penutup yang ditulis Dian Karinawati Imron dalam bab "Jejaring Makna dan Impresi Nilai: Merajut Simpul Pembelajaran Regsosek". Bab ini merangkum temuan penting dari sembilan lokasi pendataan. Makna-makna pendataan tidak hanya dipotret tetapi juga dihubungkan dalam jejaring tema untuk kemudian menghasilkan konstruksi makna. Konstruksi makna dari berbagai pengalaman pendataan potensial dikembangkan sebagai strategi perbaikan pendataan di masa mendatang.

Rangkaian pembahasan yang mengangkat sisi emik aktivitas Regsosek tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sekaligus pembelajaran bahwa proses pendataan yang terlihat sederhana dengan cara menanyakan sebagaimana dalam daftar pertanyaan di kuesioner, pada praktiknya memiliki kesulitan tersendiri. Para petugas lapangan berusaha untuk membangun hubungan baik (*rapport*) dalam waktu pendek untuk mendapatkan kepercayaan dari subjek data. Dalam konteks tertentu, Regsosek adalah sebuah peristiwa bersejarah yang perlu direkam dan ditransmisikan segala nilai baik, kendala, kelemahan, dan kelebihannya. Buku ini hadir untuk menjadi bagian dari peristiwa bersejarah itu.

Referensi

A'Hearn, B., Delfino, A., & Nuvolari, A. (2022). Rethinking age heaping: a cautionary tale from nineteenth-century Italy. *Economic History Review*, *75*(1), 111–137. https://doi.org/10.1111/ehr.13087

Campbell-Kelly, M. (1996). Information technology and organizational change in the British census, 1801–1911. *Information Systems Research*, *7*(1), 22–36. http://www.jstor.org/stable/23010787

Haug, C. J. (1979). Manuscript census materials in France: the use and availability of the listes nominatives. *French Historical Studies*, *11*(2), 258–274. https://doi.org/10.2307/286604

Hynes, G. I. (1973). Some aspects of the demography of port royal, 1650–1755. *Acadiensis*, *3*(1), 3–17. http://www.jstor.org/stable/30302422

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nyman, J. A. & Maude-Griffin, R. (2001) The welfare economics of moral hazard. International *Journal of Health Care Finance and Economics*. 1, 23–42, https://doi.org/10.1023/A:1011547904553

Ross, S. & Deveau, A. (1992). *The acadians of nova scotia: past and present*. Nimbus

Winkle, K. J. (1994). The United States census and community history. *The History Teacher*, *28*(1), 87–101. https://doi.org/10.2307/494293

Buku ini tidak diperjualbelikan.

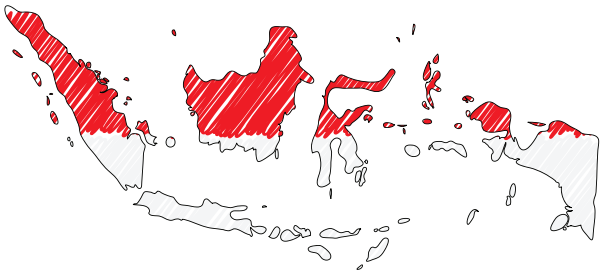

#2

Mencacah di Kota Balikpapan: Sekelumit Kisah dari Kota Terpadat di Kalimantan Timur

Nurbaety Setram & Lindawati

A. Pengantar

Dampak munculnya serangan wabah pandemi Covid-19 sangat tidak menentu sehingga perlu dicarikan solusi. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan 2022 mencetuskan tiga reformasi struktural, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi warga negara berdasar kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana. Enam prasyarat reformasi sistem perlindungan sosial dengan prasyarat utama adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (Regsosek) seluruh penduduk.

N. Setram,* & Lindawati
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nurb003@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Setram, N., & Lindawati. (2023). Mencacah di kota Balikpapan: sekelumit kisah dari kota terpadat di Kalimantan Timur. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat* (23–52). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c704 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Di Kota Balikpapan, komunikasi antara BPS dengan masyarakat setempat terjalin dengan baik sehingga masyarakat tidak sungkan untuk menyampaikan pendapat, kritik, ataupun masukan terhadap petugas BPS. Pendataan untuk basis data semacam ini adalah yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya terdapat pendataan serupa tetapi tidak menyeluruh. Oleh karenanya, sebelum pendataan awal dimulai, dilakukan rakorda Regsosek yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan, BPS Kota Balikpapan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Regsosek di Kota Balikpapan.

B. Memotret Balikpapan, Kota dengan Keragaman

Kota Balikpapan memiliki letak yang strategis dan akan menjadi gerbang utama menuju Ibu Kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari enam kecamatan dan 34 kelurahan. Enam kecamatan tersebut antara lain Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Kota. Jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2020 sekitar 688.318 jiwa dan menjadi 695.287 jiwa tahun 2021, dengan laju pertumbuhan 1,35 persen (2020–2021). Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan area terpadat, yakni 19 kali lebih padat dibandingkan kecamatan Balikpapan Barat yang dihuni sekitar 512 jiwa per km^2. Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1,357 jiwa/km^2, Balikpapan menjadi kota terpadat di Provinsi Kalimantan Timur (BPS Kota Balikpapan, 2022).

Kota yang sering kali dikenal dengan julukan kota minyak ini juga memiliki berbagai keragamanan, baik secara geografis maupun kultural. Secara geografis, Balikpapan memiliki wilayah yang berbukit-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2021); Google (t.t.).

Gambar 2.1 Peta Kota Balikpapan

bukit dengan wilayah landai terdapat di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai. Kota yang merupakan salah satu wilayah tersibuk di Kalimantan Timur ini dapat dikatakan sebagai pusat para pendatang. Penduduknya berasal dari beragam suku dan daerah, seperti Jawa, Sulawesi, dan Sumatra sehingga tidak heran jika makanan khas dari daerah lain, seperti Gudeg, Coto Makassar, Pecel Pincuk pun sangat mudah dijumpai di kota ini.

Selain kota minyak, Kota Balikpapan juga dikenal sebagai Kota Pendidikan yang menjadi tujuan utama para pelajar karena kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding dengan daerah di sekitarnya. Akan tetapi, penyebaran lembaga pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, prasarana dan sarana, maupun ketenagaan pendidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan dengan munculnya sekolah favorit dan sekolah yang kurang favorit. Masyarakat yang hidupnya biasa-biasa saja tetap hanya mampu menyekolahkan putra putrinya pada sekolah negeri yang gratis. Orang tua yang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak pernah mimpi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Para orang tua tersebut hanya berharap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dapat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang gratis agar kehidupan anak-anaknya kelak dapat lebih baik dari orang tuanya.

Dalam memantau pelaksanaan kegiatan Regsosek di Kota Balikpapan, Tim mengunjungi beberapa wilayah kecamatan, yakni Balikpapan Kota, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosial yang khas pada masing-masing wilayah. Kecamatan pertama adalah Balikpapan Kota. Tim menelusuri dua wilayah perkampungan yang berada di sekitar pantai, tepatnya di Kelurahan Klandasan Ulu dan Kelurahan Damai. Rumah penduduk di sekitar pantai adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu, ketika pasang air laut akan menerjang kolong-kolong rumah tersebut dan meninggalkan sampah ketika air surut. Bau menyengat dan tikus-tikus besar berkeliaran menjadi hal yang lumrah. Wilayah ini sarat dengan kemiskinan dan permasalahan sosial lain. Tingkat perceraian yang cukup tinggi juga menjadi pendorong kemiskinan di area ini.

Area lainnya adalah wilayah perkebunan di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Warga di wilayah ini sebagian

Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.2 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota

Buku ini tidak diperjualbelikan.

merupakan migran yang berasal dari Jawa Timur. Umumnya, warga datang sekitar tahun 1990 dan hingga saat ini menetap di Balikpapan untuk berkebun, menjadi buruh, ataupun melakukan pekerjaan lain, seperti berdagang. Tempat ini dahulu menjadi salah satu tempat lokalisasi, tetapi bangunan lokalisasi kemudian diruntuhkan oleh pemerintah setempat. Pemandangan daerah ini sekilas terlihat sangat sederhana. Dinding rumah warga terbuat dari kayu, atap dari asbes, dan lantai belum dikeramik. Namun, ternyata warga dengan kondisi rumah seperti itu memiliki lahan perkebunan yang cukup luas dan kendaraan roda empat. Jika ditanyakan oleh PPL, pemilik rumah cenderung menutupi aset yang dimiliki. Peran dari ketua RT dalam membantu petugas memeriksa data menjadi sangat bermakna pada kawasan ini.

Warga di daerah ini tidak begitu menguasai teknologi ataupun berminat terhadap media sosial (medsos). Program-program pemerintah yang disampaikan melalui medsos atau berbasis elektronik, nyaris tidak diketahui apalagi diikuti oleh warga setempat. Beberapa warga juga cukup awam dengan perbankan dan memilih untuk menyimpan uang yang dimilikinya dalam tabung galon air

Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.3 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mineral. Hal ini diketahui saat warga tersebut terkena musibah kebakaran, uang simpanannya rusak dalam tabung galon tersebut. Selain itu, jarak rumah ke rumah juga relatif jauh, dengan kondisi berbukit dan sebagai jalan masih berupa tanah liat, menjadi licin dan sulit didatangi oleh petugas dalam kondisi hujan sehingga pendataan terhenti ketika cuaca buruk.

Kawasan lainnya adalah Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan pemukiman warga yang berada dekat dengan pelabuhan. Kontur wilayahnya berupa area perbukitan yang berada dekat tepian laut. Daerah ini juga dikenal sebagai Gunung Bugis karena kontur wilayah perbukitan tersebut dan mayoritas warga merupakan suku Bugis. Wilayah ini cukup ramai, banyak pendatang dalam arti pekerja pelabuhan yang kontrak di daerah tersebut, banyak kendaraan lalu lalang. Menurut Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan, wilayah Kelurahan Baru Ulu merupakan salah satu wilayah yang paling rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Daerah ini bahkan sempat disebut-sebut sebagai Kampung Narkoba karena dikaitkan dengan pengungkapan kasus narkoba

Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.4 Pemandangan Pemukiman di di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di Balikpapan yang erat dengan kawasan tersebut. Ketika petugas mendatangi salah satu rumah untuk pendataan, sedang terjadi transaksi jual beli "ikan asin" (istilah yang digunakan petugas untuk obat-obatan terlarang dan narkotika) dengan penghuni di loteng rumah. PPL dan PML akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut, khawatir akan terlibat permasalahan serius.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Terdapat tiga jenis statistik yang perlu diketahui. Pertama, statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS. Kedua, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/OPD untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, statistik khusus yang diselenggarakan perorangan/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan satu data Indonesia (SDI) untuk data statistik yang berkualitas, salah satu implementasinya adalah penggunaan kode referensi klasifikasi baku lapangan usaha (KLBI) yang digunakan oleh OSS untuk perizinan usaha dan master file desa (MFD) yang digunakan dalam pengambilan sampel. Dengan adanya penyediaan data spasial dan database kerangka induk *wilkerstat* BPS menjaga pembaruan data wilayah kerja agar ada homogenitas.

Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk menentukan langkah yang harus ditempuh, dari pusat sampai ke daerah. Hasil Regsosek diharapkan dapat menghasilkan data yang diperlukan tersebut sehingga penduduk miskin dapat terdeteksi dengan benar dan bantuan yang digulirkan pemerintah tepat sasaran. Selama ini pihak BPS daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sering kali didatangi oleh penduduk/masyarakat setempat terkait bantuan yang disalurkan. Banyak penduduk yang datang ke Kantor BPS menanyakan siapa saja yang terdaftar dalam program-program pemberian bantuan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Banyak keluhan masyarakat bahwa yang mendapatkan bantuan adalah orang yang terbilang mampu, sementara menurut mereka yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah justru tidak mendapatkan.

Keluhan masyarakat tersebut juga disampaikan kepada ketua RT setempat. Akan tetapi, para ketua RT tersebut tidak dapat berbuat banyak karena menurut mereka daftar nama tersebut berasal dari data pemerintah pusat. Tim menghubungi beberapa ketua RT karena banyaknya keluhan dari masyarakat seputar dana bantuan pemerintah, yang juga disampaikan kepada tim saat di lapangan (Regsosek). Informasi yang diperoleh adalah kemungkinan data yang masih dipakai hingga saat ini merupakan data lama. Warga yang tadinya tergolong berhak mendapat bantuan, seiring berjalannya waktu dapat menjadi lebih baik tingkat ekonominya. Akan tetapi, pada saat pemberian bantuan nama warga tersebut masih tercatat dan turut menerima bantuan. Intinya, data harus *update* setiap tahun. Oleh karena itu, hasil Regsosek tahun 2022 ini sangat diharapkan akan membantu seluruh pihak dalam hal pemutakhiran data, sesuai tujuan dari pendataan awal Regsosek adalah untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

1. Petugas Regsosek

Rekrutmen petugas dibuka mulai tanggal 5 September 2022 dengan menggunakan aplikasi SOBAT (unggah atau *download* via *playstore*) atau melalui mitra.bps.go.id untuk pendaftaran mandiri mitra. Jika pelamar mendaftar secara manual ke kantor BPS atau dengan cara lainnya maka admin BPS akan memasukkan data mitra tersebut ke manajemen mitra.bps.go.id agar pengelolaan datanya berada di satu tempat. Setelah dinyatakan lulus sebagai petugas (mitra), kemudian petugas dilatih secara *offline* selama beberapa hari. Selama pelatihan dijelaskan tentang konsep definisi yang digunakan dalam pendataan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Regsosek dan diajarkan hal apa saja yang harus dilakukan di lapangan sesuai tugas masing-masing.

Penanggung jawab kegiatan pelaksanaan lapangan Regsosek di kabupaten/kota adalah Kepala BPS kabupaten/kota, sedangkan penanggung jawab teknis adalah Tim Pelaksana Teknis, dan penanggung jawab administrasi adalah Tim Pelaksana Administrasi. Petugas lapangan terdiri dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Koseka bertanggung jawab mengawasi seluruh Tim Pendataan Awal Regsosek di wilayah tugasnya. Koseka berperan penting dalam mengorganisasikan kegiatan pendataan di tingkat kecamatan.

Setiap Petugas Pendataan Lapangan (PPL) memiliki beban tugas mendata sekitar 250 KK dan setiap Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) bertugas mengawasi dan memeriksa hasil pendataan yang dilakukan oleh 4 PPL. Koseka pada umumnya bertanggung jawab di satu kecamatan. Jika dalam satu kecamatan terdapat lebih dari 4 PML, maka dapat ditambahkan 1 orang Koseka. Dalam hal ini, di Kota Balikpapan, terdapat 1.104 orang petugas lapangan yang diturunkan ke rumah tangga.

2. Mekanisme Pendataan Lapangan

Secara garis besar kegiatan lapangan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: a) persiapan lapangan; b) verifikasi keberadaan keluarga; dan c) pendataan keluarga. Alur kegiatan lapangan yang dilakukan oleh PPL dimulai dari persiapan sampai dengan pendataan. Pengawasan yang dilakukan oleh Koseka berperan penting dalam dalam menjamin kegiatan pendataan di tingkat kecamatan dapat terlaksana sesuai dengan SOP. Mengumpulkan kembali semua hasil pendataan, memeriksa kelengkapan dokumen dan isiannya, serta menyampaikan ke BPS kabupaten/kota.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

3. Pengawasan dan Pemeriksaan oleh PML

PML harus berperan aktif dalam pengawasan PPL selama periode pelaksanaan lapangan pendataan awal Regsosek. Mendampingi dan mengevaluasi kinerja dari PPL saat pendataan merupakan bentuk pengawasan oleh PML. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa PPL sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP sehingga hasil pendataan yang didapatkan menjadi optimal. Laporan pengawasan dibuat secara berkala dan diserahkan kepada BPS kabupaten/kota.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Selama sepekan, tim berada di Kota Balikpapan memantau pelaksanaan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek), banyak hal yang dapat dipetik dari masyarakat yang ditemui. Setiap kecamatan memiliki suasana dan fenomena yang berbeda. Di pemukiman kumuh, kehidupan masyarakatnya tampak memprihatinkan. Namun, masyarakat merasa terbiasa dan mensyukuri kehidupannya.

Pengalaman berbeda dialami petugas pendata saat mengunjungi pemukiman selanjutnya. Rumah warga terlihat dalam kondisi layak, permanen dari tembok dan kehidupan warga menunjukkan situasi yang lebih baik. Warga pada pemukiman sebelumnya mudah untuk ditemui dan dengan ramah menyambut kedatangan petugas. Akan tetapi, saat berkunjung ke pemukiman yang lebih bagus, petugas perlu bersabar untuk dibukakan pintu, bahkan sering tidak dapat menemui warga (pada jam kerja). Cara penyambutan penghuni rumah juga sedikit berbeda, yakni terlihat lebih berhati-hati dengan petugas yang datang. Pada akhirnya, petugas tetap diterima untuk wawancara.

Pengalaman menarik lainnya ialah adanya warga yang tidak bersedia menerima petugas Regsosek. Tim petugas mendatangi rumah tersebut, berupaya membantu petugas lapangan dan berharap dengan mendengar penjelasan dari petugas, warga tersebut bersedia diwawancarai. Setibanya tim dan petugas di rumah tersebut, mengetuk pintu dan mengucap salam, terdengar teriakan dari dalam rumah "saya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak mau didata". Petugas menjelaskan maksud dan tujuan pendataan, tetapi penghuni rumah tetap dengan teriakannya "saya tidak bersedia, mau dipanggil polisi pun saya tidak bersedia". Petugas Regsosek tidak putus asa dan pantang menyerah, kemudian menelpon kader yang ada di RT tersebut. Kader RT tersebut datang dan mengetuk pintu sambil memperkenalkan diri dan menjelaskan kedatangannya, tetapi tetap saja, jawaban dari dalam rumah "saya tidak mau didata". Setelah dilihat daftar nama warga yang ada di RT tersebut, ternyata pemilik rumah adalah perempuan dan bukan laki-laki. Menurut ibu kader, kemungkinan bapak yang berteriak dari dalam rumah hanyalah orang yang menumpang tinggal di sana.

Berdasarkan hasil diskusi dengan PPL mengenai pengalaman pendataan Regsosek, pada umumnya tidak ada kesulitan yang berarti. Kendala yang sering ditemui adalah responden tidak ada di rumah sehingga petugas harus berkunjung beberapa kali atau melakukan pendataan di sore/malam hari (bagi pedagang di pasar). Kemudian, kondisi geografis yang sulit, yaitu rumah penduduk yang berada di ketinggian dengan kondisi jalan tanah liat. Apabila hujan turun maka akan sulit untuk mengakses daerah tersebut. Begitu pula dengan beberapa ketua RT/sesepuh yang ditemui, umumnya ketua RT tidak keberatan dan menyambut baik pendataan Regsosek. Ketua RT dan tokoh masyarakat berharap agar pada masa mendatang, data ter*update* dengan baik sehingga bantuan yang disalurkan tidak lagi salah sasaran.

Pengalaman berbeda diceritakan pendata yang bertugas di kawasan elit. Kawasan yang terletak di bagian selatan dan berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dikenal sebagai kawasan dengan perumahan mewah/elit dan apartemen. Petugas mengakui sangat sulit untuk masuk sampai ke kediaman penduduk. Pendampingan khusus dan surat resmi diperlukan dari pejabat setempat untuk bisa masuk. Hal yang menjadi perhatian adalah tingkat ekonomi yang mapan dan pendidikan yang tinggi tidak menjamin penerimaan yang baik terhadap program Regsosek. Upaya khusus dan intensif diperlukan agar petugas pendata dapat diterima

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan baik. Alasan dibalik bertingkatnya pengamanan diduga karena warga setempat cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan data sehingga perlu diyakinkan dengan cara yang berbeda bahwa sensus yang dilakukan adalah aman dan resmi. Di kawasan ini, petugas Regsosek harus didampingi *security* pada saat pendataan. Petugas pendataan pun hanya dapat menemui sedikit warga yang berada di rumah dan dapat ditemui. Untuk kawasan apartemen, BPS melakukan koordinasi dengan pihak pengelola, pihak pengelola kemudian menyampaikan kepada penghuni apartemen. Pendataan ada yang dibantu oleh pihak pengelola (dengan menyampaikan form), ada yang melalui *voice call* atau *video call*, dan hanya sedikit yang dapat ditemui secara langsung oleh petugas.

Evaluasi juga dilakukan secara berkala, setiap pagi hari untuk memantau perkembangan capaian pendataan. Tim akan memberikan perhatian khusus untuk kawasan yang capaiannya rendah atau di bawah rata-rata. Salah satu contoh adalah di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Berdasarkan data di sistem per

Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Regsosek di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2 November 2022, dari sekitar 7.705 KK pada data *prelist*, baru sekitar 2.700 KK atau 35% yang sudah terdata. Dalam mencari tahu penyebab hal ini, Kepala BPS Kota Balikpapan berdiskusi langsung dengan para PPL dan PML di salah satu kediaman warga setempat.

Pertemuan Kepala BPS Kota Balikpapan dengan PML dan PPL esensinya merupakan forum evaluasi. Namun, suasana cair dan akrab yang terbangun antara pimpinan BPS dengan para petugas lapangan menjadikan forum ini mirip seperti sesi curhat, terkadang PML dan PPL tidak sabar berbicara. Masing-masing PML dan PPL menyampaikan kendala yang dihadapi, mulai dari ketidaksesuaian data *prelist*, sinyal sulit di area pegunungan, hingga yang kehabisan kuota internet. Untuk kendala terakhir, kepala BPS langsung mengirimkan pulsa tambahan kepada yang bersangkutan dan diiringi keriuhan petugas yang lain.

Beberapa kendala yang disampaikan ialah ketidaksesuaian data *prelist*, yakni KK tidak ditemukan, sebagian merupakan penyewa kurang dari 3 bulan, ada yang telah berpindah, bangunan tidak lagi ditempati, terdapat pemekaran dari RT yang lama. Terkait hal ini, PPL melaporkan perbedaan data *prelist* dan kondisi riil *eksisting* kepada PML/Koseka. Kendala selanjutnya terkait pendataan di kawasan asrama tentara. Informasi dari ketua RT terdapat 26 KK yang tinggal di sana. Namun, setelah dilakukan pendataan ternyata tidak mencapai jumlah tersebut karena tidak ditempati secara permanen dan hanya sebagai transit. Suami dan istri tinggal di lokasi yang berbeda. Solusinya, jika hanya suaminya saja yang menetap di asrama maka pencacahan dilakukan terhadap suaminya saja, pencacahan terhadap istri dan anak-anak dilakukan sesuai dengan lokasi mereka tinggal. PPL menyesuaikan isian dengan kategori/kode yang terdapat pada form pencacahan. Kemudian, angka penderita Covid-19 di area ini sedang naik sehingga ada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya pendataan dilakukan via telepon atau *video call*, dan tidak dapat dilakukan penandatanganan form. Petugas menambahkan catatan dalam form bahwa warga tersebut sedang menjalani isoman.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Permasalahan lain terkait progres capaian Regsosek di Kota Balikpapan adalah banyaknya PPL yang takut melakukan *upload*, padahal telah selesai melakukan pendataan dan *tagging* lokasi. Ini yang membuat progres capaian pendataan pada aplikasi terlihat rendah. Petugas khawatir masih terdapat data yang keliru sehingga takut meng*upload* data. Kendala lain yang dihadapi petugas, yaitu sulitnya melakukan *tagging* lokasi karena akurasi yang dipersyaratkan sulit tercapai, serta kondisi sinyal yang kurang baik di lokasi pencacahan khususnya di area pegunungan. Petugas mengatasi hal ini dengan menyesuaikan tingkat akurasinya menjadi 50 m dan melakukan *upload* data sesegera mungkin setelah kondisi sinyal lebih baik.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan

Suasana hangat terasa saat bertemu dengan petugas lapangan di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Di lokasi, tim bertemu dengan beberapa petugas lapangan, yakni Bpk. MA (PML), Bpk. US (PPL), Ibu N (PPL), dan Pak F (PPL). Tawa riang muncul saat para petugas memanggil rekannya dengan julukan masing-masing, seperti "big boss" untuk PPL yang bertubuh tinggi besar dan "boscil" untuk PPL yang bertubuh mungil.

Kawasan ini berada dekat dengan pelabuhan di mana lokasinya yang cukup menantang, baik dari kontur wilayahnya di area perbukitan yang dekat dengan pesisir pantai, jalan berkelok, serta memiliki potensi kerawanan sosial. Oleh karenanya, petugas lapangan nyaris tidak melakukan pendataan sendiri-sendiri, namun secara berkelompok dengan didampingi oleh ketua RT setempat. Tim pun sempat diingatkan untuk berhati-hati dan tidak membiarkan kondisi tas terbuka saat sedang berkeliling di sana. "Mba, itu tasnya jangan sampai terbuka, nanti dilempari, diselipin 'ikan asin' bisa repot semua, mba", ucap ketua RT. Uniknya PPL dan PML yang bertugas merupakan ketua RT sehingga dapat saling mendukung satu sama lain dan memudahkan koordinasi dengan ketua RT di wilayah pendataannya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.6 Petugas Lapangan, Babinsar, dan Sekretaris Lurah Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat bersama dengan Tim BPS-BRIN

Diskusi berlanjut dengan Bapak NP (52 tahun) yang merupakan ketua RT setempat. Bapak NP berasal dari Pare-Pare, datang ke Balikpapan pada tahun 1991 untuk ikut dengan saudaranya bekerja di pelabuhan. Istri beliau berasal dari Balikpapan dan kesehariannya berdagang sayur di pasar. Menurut beliau, pendataan seperti Regsosek sangat dibutuhkan karena terlalu banyak sanggahan terhadap data yang ada saat ini. Misalnya, ketika ada pembagian bantuan sosial di siang hari, malam harinya beliau sudah mendapat banyak protes dan keluhan dari warga karena penerima bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran.

Bapak NP pertama kali mendengar mengenai Regsosek dari petugas lapangan. Area wilayah RT Bapak NP tidak terlihat adanya baliho, poster, ataupun spanduk terkait Regsosek. Media sosialisasi tampaknya cukup minim di daerah ini. Respon masyarakat terhadap pendataan cukup beragam ada yang menerima dengan baik, namun ada pula yang memandang negatif dan mempertanyakan fungsi dari pendataan yang dilakukan. Mayoritas penduduk merupakan buruh lepas dan sebagian bekerja di pelabuhan. Tingkat hilir mudik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendatang di wilayah ini cukup tinggi dengan permasalahan sosial yang dihadapi adalah peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika yang cukup tinggi. Oleh karena itu, petugas lapangan didampingi oleh ketua RT agar warga tidak resisten dan petugas lebih aman dalam menjalankan tugasnya. Pendataan umumnya dilakukan setelah pukul 10 pagi atau bahkan malam hari, menyesuaikan dengan waktu pemilik rumah. Warga juga ada yang meminta pendataan setelah pukul 10 malam sehingga di wilayah ini petugas kadang melakukan pendataan sampai pukul 12 malam.

Peran penting ketua RT juga tampak di lokasi lainnya, yakni di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Bapak MS datang dari Jember ke Balikpapan pada tahun 1992. Istri beliau juga berasal dari Jember. Bapak MS memiliki dua orang putri, putri pertama menamatkan kuliah dari Universitas Balikpapan, sedangkan anak kedua di Universitas Mulawarman, Samarinda. Awalnya beliau ke Balikpapan ikut dengan kakak mencoba-coba berkebun, lalu berjualan bakso. Saat ini beliau bekerja serabutan dan bertani karet.

Warga di Kelurahan Karang Joang umumnya adalah petani singkong, laos, sereh, sayuran, atau karet. Ada petani yang memiliki lahan sendiri dan ada pula yang menggarap tanah milik negara dengan status lahan adalah hak garap. Salah satu contohnya adalah lahan yang digarap oleh Bapak MS. Ketika ditanyakan mengapa tidak membeli lahan sendiri, sambil tertawa beliau menyampaikan bahwa uangnya habis untuk biaya sekolah putri-putrinya. Beliau menyampaikan, "Itu dendam saya dahulu mau teruskan ke SMA tapi bapak tidak mampu, sudah ku balaskan ke anak. Dua-duanya sudah tamat kuliah. Termasuk merantau ke Balikpapan ini. Awal aku pergi-pergi dari rumah, lama-lama minggat karena malu sama teman-teman nggak lanjut SMA. Aku pertama kali ke Balikpapan lulus SMP, usia 13 tahun."

Kelompok tani yang ada di Karang Joang adalah kelompok tani umum. Seluruh petani harus bergabung dan jika tidak maka tidak akan mendapatkan bantuan bibit atau subsidi pupuk, meskipun pupuk subsidi tersebut belum tentu tersedia di toko karena stoknya kosong. Dahulu ada bantuan bibit pisang dan karet. Pohon karet yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ditanam Bapak MS juga merupakan bantuan dari pemerintah sekitar 12 tahun lalu. Bapak MS diberikan bibit, tiga karung pupuk, dan biaya pembukaan lahan sebesar satu juta rupiah.

Sebelum didatangi oleh petugas, Bapak MS tidak mengetahui apa itu Regosek, serta nyaris tidak pernah melihat di media sosial maupun televisi. Menurut Bapak MS, Regsosek bermanfaat untuk kesesuaian data bantuan sosial dan data yang sudah ada diperbarui. Data terkait warga yang seharusnya sudah tidak dapat bantuan misalnya, warga tersebut masih menerima bantuan. Semoga pada masa mendatang, pendataan akan lebih tepat sasaran.

> Penampilannya warga disini memang begini, mba. Rumah-rumah tidak dibersihkan, rumah keadaan seperti itu, dinding dari kayu, tetapi mobil ada dua, usahanya banyak. Tidak dibersihkan bukan karena repot mba, memang warga disini seperti itu. Kalau RT tidak diberi tahu dan petugas hanya melihat kondisi rumah dan penampilannya saja maka data nggak sesuai, yang lebih perlu nanti malah nggak dapat. Jadi ribut nanti orang-orang, memang perlu pendataan ulang ini. Kalau yang di*update* di kelurahan dari puskesos, tapi kadang data *update*nya malah tidak masuk. Mudah-mudahan ke depannya bantuan lebih tepat sasaran, misalnya per tahun ada pembaruan data. Contohnya, kemarin ada bantuan dari lembaga zakat, ada 30 paket, minta tolong saya yang carikan, jadi dipilihkan dari RT mana yang berhak menerima. Pendataan juga begitu, agar lebih sesuai karena RT yang mengetahui kondisi warga, mana yang kategori miskin atau tidak miskin saya tunjukkan. Kalau misalnya petugasnya sudah mendata lebih dahulu, nanti RT yang akan mengkonfirmasi misalnya warga tersebut ternyata tidak miskin hanya tampak miskin. Mudah-mudahan masyarakat yang ditanyai benar-benar menjawab dengan kondisi sesungguhnya dan tidak berbohong karena menutupi aset yang dimiliki. (Wawancara MS, 1 November 2022).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.7 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara

Hal senada juga disampaikan oleh petugas lapangan, warga cenderung mengurangi nilai aset yang dimiliki atau bahkan ada yang menyatakan tidak memiliki simpanan emas atau lahan, padahal kondisinya riilnya sebaliknya. Jika bukan dari ketua RT yang memberitahu maka petugas akan terkecoh. Masyarakat pun perlu dihimbau menjawab pertanyaan yang disampaikan petugas sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila warga berkecukupan, memiliki lahan berhektar-hektar, tetapi masih mendapat bantuan akan sangat tidak adil bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

PPL dan PML di kelurahan ini bersyukur atas ketua RT yang sangat kooperatif seperti Bapak MS. Menurut warga, ada pula ketua RT yang masa bodoh, artinya ketika disodorkan *prelist* untuk dikonfirmasi mana yang miskin dan tidak miskin, malah diserahkan ke petugas dan mengatakan, "Saya ndak tahu mba, mba datang aja, lihat aja sendiri." Ada anggapan bahwa petugas kan mendapatkan gaji, untuk apa ketua RT bantu-bantu petugas. Jika sudah seperti ini, ketika ada kekeliruan, ketua RT menyampaikan ke warga bahwa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kekeliruan itu merupakan ulah petugas dan mencari aman padahal ia tahu kondisi yang sebenarnya.

F. *Life Story* Pendata

1. MA: PML Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat

Bapak MA (usia 46 tahun), sehari-hari merupakan petugas kontrak di Dinas Lingkungan Hidup untuk pengawasan dan pengambilan sampah di atas air. Di Kelurahan Baru Ulu terdapat sembilan RT yang berada di tepian pantai dan memiliki area pemukiman di atas air. Jika air laut pasang, sampah juga turut terbawa ke pemukiman warga menyisakan tumpukan sampah pada saat air surut. Tugas Bapak MA adalah jika air laut pasang dan sampah terbawa air maka tim beliau yang mengambil sampah-sampah itu.

> "Saya mengambil sampah di RT 30, 41, 31, 49, 48, 29, dan 28. Setiap hari keliling, jam 8 sampai jam 10 mengambil sampah, setelah jam 10 lanjut lagi pendataan. Tim pengambil sampah ada 5 orang. Kadang-kadang air pasang bisa masuk ke rumah, biasanya di akhir tahun. Kondisi air pasang dan hujan deras, air masuk ke rumah warga. Misalnya di rumah Pak F (salah satu PPL), air sampai 40 cm dan bisa berenang di dalam rumah. Semoga bulan Desember tidak bertambah berat." (Wawancara MA, 2 November 2022)

Sebelum menjadi PML, Bapak MA sudah menjadi mitra BPS pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 untuk kegiatan sensus penduduk (SP2020). Beliau pertama kali mengetahui Regsosek dari medsos. Selain itu, beliau pernah menjadi mitra sehingga beliau dihubungi dan diinformasikan oleh pihak BPS untuk kegiatan ini. "Mungkin karena pernah mengikuti kegiatan di BPS sebelumnya sehingga saya dihubungi. Di satu sisi kami juga sudah tahu medan dan kami juga ketua RT," ungkap beliau. Beliau melanjutkan, "Pendataan kan memang butuh orang yang dikenal, Bu. Kan banyak rumor-rumor di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sosial media, jangan memberikan data sembarangan pada orang yang tidak dikenal." Menurut Bapak MA, pemukiman yang paling 'berat' kondisinya ada di lingkungan RT 38 dan 40. Ada sekitar 10 orang yang di-*tag* dengan kategori miskin di wilayah tersebut.

Banyak suka duka saat menjadi petugas lapangan, diantaranya dianggap sebagai peminta sumbangan hingga dikejar-kejar hewan peliharaan. Namun, menurut beliau, pengalaman ini adalah tantangan untuk belajar sabar dan apapun diterima. Ada pula warga yang mempersilakan petugas masuk dan diminta menunggu sebentar untuk mengambil KK. Akan tetapi, setelah menunggu lama sampai lebih dari setengah jam, orang itu tidak juga muncul. Bapak MA tidak memahami apakah memang karakter respondennya atau faktor kesalahan dari petugas, misalnya saat petugas datang, responden sedang beristirahat. Dalam hal ini, petugaslah yang harus memaklumi responden, responden mungkin masih lelah karena baru selesai bekerja atau pekerjaannya bermasalah, atau kondisinya sedang kurang baik. Rekan-rekan PPL yang pasti akan mencoba lagi mengunjungi responden tersebut di lain hari untuk mendapatkan data. PPL pun bersyukur bahwa saat melakukan pendataan, tidak ada medan yang tidak dapat dilalui dan tidak ada masyarakat yang betul-betul menolak pendataan. Kendala yang dihadapi bukan menjadi alasan untuk tidak mendata.

> "Kami kan ada lima orang termasuk saya, keluhan-keluhan dari petugas dan warga saya tampung semua. Kalo disini kendala permasalahannya adalah peredaran 'ikan asin'. Kita harus sabar aja disitu. Pertama kan kami melihat kartu keluarga dan wajar saja masyarakat takut kartu keluarga diambil. Karena setiap harinya banyak pula penyidik yang memantau peredaran 'ikan asin'. Kami jelaskan. yang kami lakukan tidak ada kaitannya dengan hal lain macam-macam, yang kami tanyakan adalah masalah sosial ekonomi bapak/ibu." (Wawancara MA, 2 November 2022)

Petugas mengungkapkan pengalaman paling berkesan selama menjadi mitra BPS ialah belajar membaca dan mempelajari karakter

Buku ini tidak diperjualbelikan.

orang. Terkadang, hingga malam hari, beliau masih di jalan karena sebagian responden pulang kerja sekitar waktu magrib. Beliau biasanya melakukan pendataan sampai pukul 9 atau 10 malam, bahkan pernah menjelang dini hari. Menurutnya, pendataan tidaklah sulit, hanya petugas saja yang harus pandai-pandai untuk memahami responden. Adapula warga yang antusias dan menunggu petugas datang. Menurutnya, rekan-rekan PPL juga menikmati peran ini. Apabila tidak dapat naik gunung karena lelah maka ada rekan lain yang membantu. Intinya kekompakan dan saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan tugas.

2. NZ: PPL, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara

NZ, lahir di Balikpapan tahun 1977. Alm. ayah beliau merupakan kelahiran Surabaya yang merantau pada usia 20 tahun ke Balikpapan, saat itu kapal yang ada masih berupa kapal kayu. "Disitu sampai, disitulah kaki berpijak" menjadi prinsip yang dipegang oleh alm. ayah beliau. Alm. ayah beliau kemudian melamar di sebuah bengkel. Pemilik bengkel yang saat itu tidak memiliki anak, akhirnya mengangkat alm. ayah NZ sebagai anak angkat mereka, hingga akhirnya mampu membuka bengkel sendiri, Alm. ayah beliau telah menjadi ketua RT di Kelurahan Muara Rapak (semula bernama Gunung Samarinda) selama kurang lebih 30 tahun (saat ini sudah tidak ada RW di Balikpapan, sejak sekitar 1990-an hanya RT saja).

Suami dari Ibu NZ bekerja di Kaltim Pos, lahir di Indramayu saat mertua bertugas di sana namun besar di Kalimantan. Semula suami beliau bekerja di bagian desain grafis. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19 ada tiga opsi yang dihadapi, yakni dirumahkan dengan gaji sebesar satu juta per bulan, diberhentikan dengan pesangon, atau tetap bekerja namun dipindahkan ke posisi yang lebih rendah ke bagian umum. Suami Ibu NZ saat itu mengambil opsi ketiga karena anak masih sekolah di kelas 1 SMK, "Yang penting tiap bulan masih ada *income* yang diperoleh," ujarnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ibu NZ juga bekerja sebagai perias. Ia pernah mengikuti beberapa sekolah perias untuk pengantin Bugis, Banjar, Yogya, dan muslim modern. Pendidikan terakhir beliau adalah SMK Akuntansi. Sejak lulus SMK, Ibu NZ telah aktif di kegiatan masyarakat sebagai kader posyandu. Awalnya, beliau hanya ikut saja sebagai kader posyandu (menimbang bayi/balita). Namun, kader (utama) berpindah rumah sehingga Ibu NZ yang akhirnya mengelola posyandu. Setiap pergantian ketua RT, Ibu NZ tetap menjadi kader Posyandu karena tidak ada warga lain yang bersedia mengurusi hal-hal seperti itu. Ibu NZ kemudian menjadi ketua RT sejak tahun 2019. Ketua RT yang sebelumnya mengundurkan diri dan akhirnya diadakan pemilihan. Ibu NZ didorong oleh warga untuk mencalonkan diri hingga terpilih sebagai ketua RT.

Hingga saat menjadi ketua RT, Ibu NZ masih melakukan penimbangan bayi/balita. Sebelumnya, penimbangan bayi/balita sempat dilakukan di kediaman RT terdahulu. Namun, saat ini penimbangan bayi/balita dilakukan dari rumah ke rumah tiap satu bulan sekali. Pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan jentik nyamuk dengan kader Jumantik, sekaligus memeriksa kondisi rumah warga apakah sehat atau tidak. Warga sudah hafal dengan Ibu NZ dan di wilayah penugasan resgosek, Ibu NZ sudah mengenal 49 pemilik rumah yang ada di wilayah RT tersebut.

> "Saya ikut seperti ini mencari ilmu, merias sesekali saja saat ada permintaan. Dahulu ada usaha sewa tenda kursi, namun karena saya tidak mampu menjalani sendiri akhirnya dijual. Saya ikut mitra BPS baru saat Regsosek ini. Ini pengalaman pertama. Saya diberi tahu oleh salah satu mitra BPS, sekaligus untuk mencari ilmu tentang BPS dan apa yang dikerjakan BPS. Awal ikut proses, saat mendaftar diberikan lembaran isian melamar jadi PPL, saat diwawancara membawa berkas, kemudian diterima atau tidaknya diumumkan lewat *online*. Setelah lulus dan dinyatakan sebagai calon PPL, barulah dilakukan pelatihan." (Wawancara NZ, 2 November 2022).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menurutnya, kendala dalam pendataan sering kali muncul saat akan memfoto dinding rumah, lantai, atap, dan kamar mandi rumah warga yang termasuk dalam kategori miskin atau sangat miskin. Warga ada yang berkeberatan dan menyatakan kalau seperti itu caranya biar saja tidak perlu dimasukkan dalam kategori tersebut, biarpun susah makan dan tidak dapat bantuan tidak apa-apa. Ibu NZ kemudian menyampaikan kepada warga tersebut petugas tidak mengetahui apakah warga akan mendapatkan bantuan atau tidak, tetapi tuntutan pendataan memang perlu mengambil gambar/foto kondisi rumah.

Saat pelatihan telah disampaikan, petugas hanya perlu mengamati kondisi rumah apakah layak atau tidak. Namun, dalam perkembangannya, petugas diminta untuk mengambil gambar kondisi rumah warga. Pendataan dimulai dengan menemui RT setempat untuk verifikasi data, memastikan keberadaan dengan *checklist* data menggunakan pensil. Selanjutnya, memeriksa kategori kesejahteraan warga yang juga ditandai oleh ketua RT. Dalam hal ini, penentuan tingkat kesejahteraan warga apakah termasuk dalam kategori sangat miskin, miskin, atau tidak miskin juga merupakan hak prerogatif ketua RT. Namun, apabila ada warga yang tidak pernah melapor kepada ketua RT mengenai situasinya maka petugas yang akan membantu menentukan kategori miskin atau tidak miskin untuk warga tersebut.

Terkadang terdapat ketidaksesuaian hasil temuan di lapangan dengan kategori yang disampaikan oleh ketua RT setempat. Menurut petugas, penentuan kategori miskin dan sangat miskin juga dipengaruhi oleh tekanan sosial yang diberikan kepada ketua RT setempat. Ketua RT mendapatkan tekanan dari warga tertentu, jika ada pendataan maka warga tertentu harus dimasukkan sebagai kategori penerima bantuan. Selain itu menurutnya, kondisi ekonomi di suatu wilayah juga mempengaruhi penentuan kriteria miskin dan tidak miskin. Wilayah penugasan Ibu NZ rata-rata memiliki kondisi ekonomi cukup baik sehingga kondisi warga yang masuk dalam kategori miskin mungkin akan berbeda dengan kondisi warga yang bertempat tinggal di area lain karena penentuan berdasarkan persepsi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari ketua lingkungan setempat. Namun demikian, akan ada verifikasi tahap berikutnya, yakni verifikasi kesesuaian antara temuan petugas saat sensus dengan pengkategorian yang disampaikan oleh ketua RT setempat.

3. SM: PPL, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara

Bapak SM (PPL), berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Pria kelahiran tahun 1969 ini datang merantau ke Balikpapan sejak tahun 1994. Bapak SM adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Keputusannya merantau ke Balikpapan untuk mengubah kondisi keluarga agar adik-adiknya dapat melanjutkan sekolah. Bapak SM merupakan tamatan SMP. Saat ini, beliau telah memiliki dua orang putri. Putri pertama melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Kalimantan dan putri kedua duduk di kelas 3 SMP. Prinsip yang beliau pegang adalah meskipun kondisi beliau sulit, anak-anaknya harus lebih baik dari beliau. Pertama kali tiba di Balikpapan, Bapak SM bekerja sebagai tukang kayu. Bapak SM tidak memiliki lahan kebun dan hanya sebidang tanah untuk rumah yang ditempati. Bapak SM khawatir untuk membeli lahan kebun karena kondisi lahan disana terkadang kepemilikannya tumpang tindih. Saat ini, Bapak SM bekerja serabutan, sebagai tukang kayu, sebagai kuli bangunan, tukang urut, dan mencoba untuk memelihara beberapa ekor kambing sebagai simpanan.

Bapak SM mendapat tugas mendata di kawasan perkebunan dan daerah pembuatan batu bata. Kendala yang ditemui ketika melakukan pencacahan ialah: a) jarak antar rumah yang berjauhan, b) kondisi jalan yang umumnya tanah liat dan sulit dilalui dalam kondisi hujan karena licin, c) kondisi sinyal yang buruk di area perkebunan, dan d) penyesuaian dengan waktu para pekerja pembuat batu bata. Beberapa responden yang awalnya menolak didata adalah karena KTP ataupun KK responden masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah Jawa, bukan di Balikpapan. Kemudian, Bapak SM menjelaskan bahwa pendataan ini dilakukan serentak di semua wilayah selama satu bulan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jika saat pendataan alamat domisili di Balikpapan maka pendataan dilakukan di Balikpapan. Jika ingin didata di kampung halaman maka akan terlewat untuk pendataan karena batas waktu yang singkat, dan jika tetap tidak mau jangan sampai menyalahkan petugas jika tidak terdata. Selain itu, menurutnya responden cenderung menutupi aset yang dimiliki, misalnya mobil terparkir di samping rumah, tetapi tidak diakui sebagai miliknya. Bapak SM berharap program Regsosek ini nantinya dapat membantu agar penerima bantuan sosial dari pemerintah lebih tepat sasaran.

G. *Life Story* Sebuah Keluarga

Saat mendengar mengenai pemukiman di dekat tepian pantai, akan terbayang suasana segar dan nyaman dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan laut yang indah membentang. Saat turun dari kendaraan dan mulai memasuki area pemukiman di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, suasana terlihat cukup nyaman. Namun, ketika masuk lebih dalam ke area pemukiman, terlihat hal yang sangat berbeda. Pemandangan yang terlihat di kolong rumah penduduk penuh dengan sampah dan mungkin menurut yang melihat (sebagai pendatang) akan menggumam "betapa kotor dan tidak sehatnya rumah hunian tersebut". WC tempat buang air besar tidak tersedia. Kesan yang tergambar ialah kondisi sanitasi yang tidak layak. Kesan tersebut merupakan pandangan para pendatang. Namun, bagi penghuni setempat, kondisi demikian merupakan bagian dari keseharian dan dianggap biasa saja.

Rumah warga tersebut ditempati oleh dua keluarga, yaitu Ibu AD dengan putra bungsunya dan putri Ibu AD dengan ketiga anaknya yang masih kecil. Ibu AD dan putrinya telah bercerai dengan pasangannya. Penghuni rumah sejumlah enam orang tinggal di rumah yang disebutkan adalah milik kerabat keluarga. Sehari-hari Ibu AD bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan Rp700.000,00 per bulan, sedangkan putrinya bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Ibu AD menuturkan bahwa putrinya ditinggalkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Lindawati, 2022

Gambar 2.8 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Damai

oleh suaminya dan harus membiayai ketiga anaknya yang masih kecil. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja. Ibu AD membantu beres-beres di rumah tetangganya pada sore hari, yakni setelah putrinya tiba di rumah karena ada bayi dan anak kecil yang harus dijaga. Ibu AD bersyukur dengan adanya pendataan yang dilakukan. Ibu AD dan putrinya juga merasa tertolong dengan bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah, seperti PKH ataupun bantuan langsung tunai.

Perjalanan tim berlanjut dan bertemu dengan ibu-ibu yang sedang duduk di pojok rumahnya bersama dengan beberapa anak kecil. Tim menemui salah satu responden, yaitu Ibu AS. Ibu AS tinggal di rumah panggung yang disewa Rp300.000,00 per bulan. Ibu AS mempunyai dua orang anak, putri dan putra. Putri pertamanya sudah menikah dan mempunyai dua orang anak, namun ditinggal cerai hidup oleh suaminya. Ibu AS tinggal di samping rumah ibunya, sedangkan putra keduanya disabilitas rungu dan bekerja sebagai penjaga toilet di pasar (Ramayana). Ibu AS tidak memiliki pekerjaan, untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan sehari-harinya mengandalkan putranya.

Rumah Ibu AS tidak diisi oleh satupun perabot. Hanya ada kompor minyak tanah yang digunakan untuk memasak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air dengan mengambil dari pipa komunal

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.9 Pemandangan Kediaman Ibu AS

yang terdapat beberapa puluh meter dari lokasi tempat tinggalnya. Ibu AS bercerita, jika beliau kehabisan minyak tanah maka beliau akan berjalan kaki ke pasar untuk menemui putranya dan meminta uang untuk beli minyak tanah. Tim cukup tercengang mendengar bahwa minyak tanah masih dijual untuk keperluan rumah tangga dan dengan harga yang cukup tinggi, yaitu Rp15.000,00–Rp 20.000,00 per liter.

Kondisi Ibu AS tidak menyebabkan beliau putus asa dan tetap semangat menjalani hidup. Selama ini, Ibu AS belum pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Ibu AS menerangkan bahwa beliau sudah pernah menjadi responden dalam pendataan. Beliau tidak keberatan dengan kehadiran petugas Regsosek kali ini dan menjawab pertanyaan dengan sebenarnya. Ibu AS mengungkapkan harapannya agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

Responden berikutnya adalah Ibu HS (usia 60 tahun) di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Suami Ibu HS bekerja

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagai buruh pelabuhan. Ibu HS memiliki tujuh orang anak dan tiga diantaranya menjadi warga binaan karena terjerat penggunaan dan peredaran narkotika. Sejak beberapa tahun terakhir, Ibu HS mengalami strok dan saat ini tinggal bersama anaknya yang bungsu. Kondisi strok menyebabkan Ibu HS tidak dapat berbicara dengan jelas, terkadang Ibu RT setempat yang menerjemahkan maksud perkataan Ibu HS ke petugas. Menurut Ibu RT, dahulu perawakan Ibu HS ini bersih. Ibu HS tidak dapat merawat diri semenjak terkena strok. Kondisi ini pula yang membuat suami Ibu HS memilih untuk menyewa rumah dekat pelabuhan, "Karena mungkin kondisi Ibu HS sakit dan dia capek pulang kerja dari pelabuhan, jadi memilih kontrak rumah di bawah sana, dekat pelabuhan," ujar Ibu RT. Rumah Ibu AS memang tidak dilengkapi perabotan dan kompor karena beliau tidak dapat beraktivitas dan khawatir akan membahayakan. Kebutuhan makan dan minum disediakan oleh anak dan suami beliau. Kondisi beliau yang memprihatinkan membuat ketua RT setempat secara

Foto: Lindawati, (2022)

Gambar 2.10 Pemandangan Kediaman Ibu HS

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rutin mengunjungi dan mengecek kondisi beliau sambil membawakan makanan.

Keluarga lain yang ditemui di kelurahan ini adalah Ibu IB (usia 60 tahun) berasal dari Pare-Pare. Suami Ibu IB telah wafat dan saat ini Ibu IB tinggal dengan anak-anaknya. Ketika ditanyakan tentang Regsosek, Ibu IB tidak memahami manfaatnya. Beliau juga tidak mengetahui apakah selama ini bantuan sosial yang diberikan ke warga tepat sasaran atau tidak karena beliau nyaris tidak dapat keluar rumah karena sakit dan sulit untuk berjalan. Ibu IB sebelumnya pernah menjadi responden saat masih tinggal di Pare-Pare.

Ibu IB tidak keberatan untuk didata dalam Regsosek selama petugas pendata didampingi ketua RT setempat, "Yang penting ada Bu RT saya percaya. Biarpun kata anak saya jangan sembarangan kasih data atau tanda tangan apa, tetapi kalau yang datang ditemani Bu RT saya percaya," tambahnya. Bantuan yang saat ini Ibu IB terima adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Beliau sedang kondisi sakit dan sangat berharap agar BPJS dapat terus digunakan dan tanpa perlu mengeluarkan biaya iuran pribadi.

H. Penutup

Kota Balikpapan, kota minyak di Kalimantan Timur menjadi salah satu tujuan utama perantau di era 1990-an. Kota ini menyimpan sekelumit kisah pilu di antara pemukiman kumuh tepian pantai yang justru terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Balikpapan. Kota ini menggambarkan kehidupan keras dan kegigihan perantau di perkebunan. Sudut kota juga menyimpan fakta kerawanan sosial di pemukiman pelabuhan. Perjalanan kajian Regsosek mencoba melihat berbagai realitas dan merekam berbagai kisah warga negara yang membutuhkan afirmasi. Kehadiran negara menjadi penting untuk menjamin dan melindungi warga dari berbagai ancaman kerentanan.

Kehadiran Regsosek memberi harapan baru atas ketersediaan data sosial ekonomi masyarakat yang komprehensif. Keterpaduan dan konsistensi data yang digunakan merupakan prasyarat untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mencapai reformasi sistem perlindungan sosial. Regsosek dapat menjadi jawaban dari kegelisahan atas carut marutnya pemberian bantuan sosial. Regsosek mengingatkan para pihak untuk menyediakan jaminan sosial ke masyarakat rentan (lebih tepat sasaran). Dukungan krusial dari kegiatan Regsosek adalah kemampuan dalam melakukan pendekatan valid untuk merekam data warga. Pendataan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dan prinsip dibagi-pakaikan merupakan muara pemersatu para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat hingga daerah. Pendataan memang ditujukan untuk menghasilkan basis data yang valid. Peningkatan pelayanan dan perjuangan mencapai kesejahteraan masyarakat adalah komitmen selanjutnya yang perlu dijaga para pihak. Kehadiran Regsosek semoga menjadi air menyejukkan yang membawa bangsa ini bangkit jauh lebih kuat.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda litbang) Kota Balikpapan. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJDM) Kota Balikpapan tahun 2021–2026.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Balikpapan.

BPS Kota Balikpapan. (2022). *Kota Balikpapan dalam angka 2022.* BPS Kota Balikpapan.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2022). *Buku 3 pedoman pendataan lapangan registrasi sosial ekonomi 2022.* Badan Pusat Statistik.

Google. (t.t.). [Lokasi Kota Balikpapan]. Diakses pada 7 November, 2022, https://www.google.com/maps/place/Balikpapan,+Balikpapan+City,+East+Kalimantan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

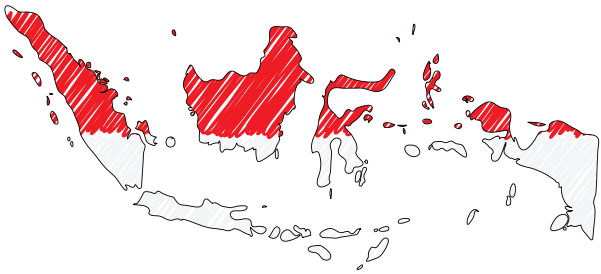

#3

Mendata Indonesia "Bumi Handep Hapakat" Kawasan Lumbung Pangan Nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Rosita Novi Andari & Kurnia Suci Indraningsih

A. Menelusur Angka Bumi Handep Hapakat

Pendataan awal Regsosek yang dilaksanakan sepanjang tanggal 15 Oktober–14 November 2022 merupakan momentum dan proses penting yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Pulang Pisau. Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang harus mendata seluruh penduduk yang berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa yang tersebar di 1 kota dan 13 kabupaten (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2022) dan juga BPS Kabupaten Pulang Pisau yang harus mendata seluruh penduduk yang berjumlah 135.336 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan dan 99 desa/kelurahan (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022).

R. N. Andari,* & K. S. Indraningsih
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: rosi014@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Andari, R. N., & Indraningsih, K. S. (2023). Mendata Indonesia "bumi handep hapakat" kawasan lumbung pangan nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (53–92). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c705 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

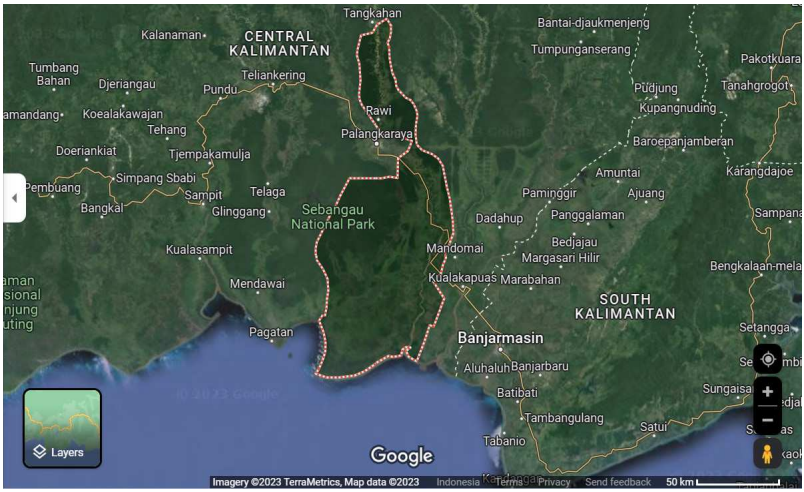

Sumber: Google (t.t.)

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pulang Pisau

Kondisi geografis, bentang alam, sosial, ekonomi, budaya, dan karakteristik masyarakat lokal yang beragam di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten dalam melaksanakan pendataan Regsosek yang harus selesai selama satu bulan ini. Momentum dan proses penting pendataan awal Regsosek tersebut yang menjadi fokus bagi peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset Inovasi Nasional (PR KSDK BRIN) dengan melakukan penelitian penarasian emik kegiatan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Pulang Pisau.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas di Pulau Borneo (Kalimantan) dan menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 153.564,5 km^2 dengan potensi lahan rawa yang sangat luas (4,3 juta ha) sehingga provinsi ini ditetapkan menjadi kawasan *Food Estate* (FE) dengan luas lahan yang dialokasikan sekitar 165.000 ha (Hermanto dkk., 2020). FE

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah usaha pangan skala luas yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan. Program FE merupakan program strategis nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk peningkatan penyediaan pangan nasional.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan satu diantara dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi kawasan FE. Kabupaten Pulang Pisau memiliki sebaran rawa gambut terluas di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 911.025 ha dengan alokasi lahan untuk FE seluas 10.000 ha yang tersebar di lima kecamatan dan 28 desa (Hermanto dkk., 2020). Desa Pangkoh Hulu di Kecamatan Pandih Batu merupakan salah satu desa kawasan FE yang peneliti pilih menjadi lokasi untuk melihat; mendengar; merasakan langsung momentum, proses, dan perjuangan dari petugas pendataan Regsosek BPS Kabupaten Pulang Pisau mulai dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL), termasuk keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Berbagai pengalaman, tantangan, kendala, dan harapan atas hasil pendataan awal Regsosek ditengah berbagai permasalahan dan isu-isu terkait perlindungan sosial selama ini terjadi di Kabupaten Pulang Pisau tentu menjadi hal menarik untuk disajikan dalam narasi emik ini.

B. Pulang Pisau, Pantang Pulang Sebelum Berhasil

Kabupaten Pulang Pisau merupakan satu di antara dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi kawasan FE. Kabupaten yang dikenal dengan julukan Bumi Handep Hapakat ini berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan dengan luas wilayah sebesar 8.977 km^2. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Palangkaraya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas di sebelah Timur, Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, dan Laut Jawa di sebelah selatan. Kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, di sebelah Selatan merupakan daerah pantai, pesisir, dan rawa-rawa gambut, sedangkan di daerah utara merupakan daerah perbukitan. Kabupaten ini juga dilintasi oleh lima sungai utama, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya.

Perjalanan peneliti menuju Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari Palangkaraya di pagi hari pukul 09.00 dengan menggunakan kendaraan mobil melewati jalan beraspal antar kota/provinsi dengan kondisi yang baik dan lancar sehingga membutuhkan waktu tempuh sekitar 2,5 jam untuk sampai ke ibu kota kabupaten, yaitu Kelurahan Pulang Pisau yang terletak di Kahayan Hilir. Di sepanjang pinggir jalan raya nampak hamparan lahan gambut, lahan sawah, kebun sawit, dan sengon serta beberapa rumah penduduk. Perjalanan peneliti selanjutnya menuju Desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu juga ditempuh dengan menggunakan mobil melewati ruas jalan beraspal yang lebar dengan kondisi yang sangat baik sebagai salah satu infrastruktur yang dibangun pemerintah di lokasi FE, yaitu sepanjang 41 km dari Simpang Tahai menuju Belanti Siam.

Di sepanjang pinggir jalan raya nampak hamparan lahan sawah yang sangat luas, kebun sawit dan juga sengon. Perjalanan selanjutnya dari Belanti Siam ke Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) melewati jalan desa dengan kondisi yang sedikit berbatu hingga sampai di pelabuhan penyeberangan Palambahen. Untuk mencapai Pangkoh Hulu (Kantor Kecamatan Pandih Batu) tim harus menggunakan kapal feri untuk menyeberangi Sungai Kahayan dengan waktu tempuh selama sekitar 10 menit hingga sampai di Pelabuhan Penyeberangan Motor Pangkoh. Total keseluruhan jarak dari ibu kota kabupaten ke Desa Pangkoh Hulu adalah 72 km dengan waktu tempuh sekitar tiga jam.

Secara umum di Kabupaten Pulang Pisau, tidak ada transportasi darat, seperti bis atau angkutan kota/desa, tetapi masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagai alat transportasi. Kapal feri untuk angkutan mobil dan sepeda motor adalah transportasi umum yang menghubungkan Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) dan Desa Pangkoh Hulu (pusat pemerintahan desa dan kecamatan). Secara umum, kondisi jalan Desa Pangkoh Hulu sebagian sudah beraspal, beton, dan sebagian lagi masih rusak terutama jalan di sekitar bantaran Sungai Kahayan yang rawan rusak karena banjir air pasang surut.

Berdasarkan cerita perjalanan tersebut, dapat diketahui bahwa bentang alam dari Desa Pangkoh Hulu terbagi menjadi dua wilayah/kawasan yang dipisahkan oleh Sungai Kahayan. Secara administratif, Desa Pangkoh Hulu yang menjadi pusat pemerintahan desa dan kecamatan Pandih Batu terdiri dari empat rukun tetangga (RT) atau satuan lingkungan setempat (SLS). Sebagai pusat pemerintahan, semua fasilitas pelayanan publik, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA

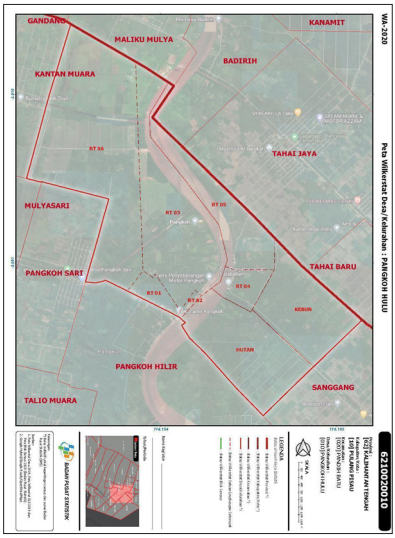

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau (2022)

Gambar 3.2 Peta Wilkerstat Desa Pangkoh Hulu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tersedia di sini dengan kondisi yang baik. Sedangkan, wilayah Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) terdiri dari dua RT/SLS dengan akses ke fasilitas pelayanan publik yang cenderung lebih jauh. Namun, pada wilayah Dusun Palambahen inilah lokasi FE berada karena memiliki lahan hutan dan kebun yang lebih luas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. menunjukkan bahwa Desa Pangkoh Hulu berbatasan atau dikelilingi oleh sembilan desa lainnya, yaitu Desa Sanggan, Tahai Baru, Tahai Jaya, Badirih, Maliku Mulya, Kantan Muara, Mulyasari, Pangkoh Sari, dan Pangkoh Hilir. Menurut hasil wawancara, masyarakat lokal di Desa Pangkoh Hulu sebagian besar adalah masyarakat suku Dayak (90%) sementara lainnya adalah masyarakat pendatang (eks transmigran dari suku Banjar dan suku Jawa). Masyarakat di desa-desa sekitar lainnya atau yang mengelilinginya sebagian besar adalah masyarakat eks transmigran. Desa Pangkoh Hulu memiliki luas 35 km^2 atau terluas keempat se-Kecamatan Pandih Batu dengan jumlah penduduk 1.016 jiwa dengan kepadatan penduduk 29 (per km^2)[3]. Menurut salah satu tokoh masyarakat desa sekaligus Ketua RT Desa Pangkoh Hulu yang berusia 63 tahun menceritakan sejarah Pangkoh Hulu pada tahun 1980-an masih sepi dan hanya ada rumah di sekitar sungai Kahayan, hingga pada tahun 1995-an mulai ramai karena adanya pendatang (transmigran dari Jawa). Namun demikian, masyarakat lokal Dayak di Desa Pangkoh Hulu menerima dengan terbuka dan senang hati dengan keberadaan masyarakat transmigran tersebut bahkan ikut belajar dan menjadi terdidik terutama dalam bidang pertanian.

Petani adalah mata pencaharian sebagian besar masyarakat lokal Desa Pangkoh Hulu dengan tanaman padi sebagai komoditas pertanian utama mereka. Pertanian di Desa Pangkoh Hulu dikembangkan dengan sistem pertanian lahan rawa pasang surut, yaitu dengan memanfaatkan pasang surut air sungai selama penyiapan lahan dan pertumbuhan tanaman. Namun demikian, terdapat perbedaan kondisi pertanian antara Desa Pangkoh Hulu dengan Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) terutama sejak adanya program FE.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Menurut Camat Pandih Batu, kegiatan FE di Kecamatan Pandih Batu dipusatkan pada desa-desa eks transmigrasi tahun 1983, yaitu Desa Gadabung 1.800 ha, Desa Belanti Siam 2.200 ha, Desa Sanggang 600 ha, Desa Pantik 400 ha, Desa Pangkoh Hilir 300 ha, dan Desa Pangkoh Hulu 300 ha. Kondisi secara umum program FE di Kecamatan Pandih Batu mulai tahun 2020, masih memiliki perencanaan kurang matang dengan musim tanam yang tidak mengikuti program dan masih melakukan cara bertani yang biasanya dilakukan oleh masyarakat lokal.

Kegiatan FE pada tahun 2021 mulai berjalan dengan baik dan infrastruktur jalan sudah sangat baik (mulus) mengalahkan jalan lintas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi prasarana jalan yang baik tersebut memudahkan pemasaran produk pertanian. Sebelum ada program FE, petani masih bertani secara tradisional dengan produksi padi sebanyak 4 ton/ha. Setelah mengikuti program FE, produksi padi meningkat dengan kisaran 4,5–7 ton/ha atau rata-rata 5 ton/ha, dalam satu tahun dapat menanam padi dua kali. Kegiatan FE juga memberi pelatihan kepada kelompok tani untuk menjadi petani modern yang mampu mengembangkan potensi wilayah, penggunaan alsintan modern, dan pengolahan lahan yang modern. Pada lahan perkebunan sawit ada bantuan dari mulai penggarapan lahan sampai pertanaman. Selain itu juga ada bantuan ternak berupa itik, ayam, sapi, dan babi per kelompok tani.

Desa Kantan Atas dan Desa Kantan Dalam yang merupakan wilayah hortikultura, menerima bantuan sesuai permintaan kelompok tani, yaitu cabai, kacang panjang, dan jagung manis. Bantuan berupa tanaman porang dan kelor diberikan untuk restorasi lahan gambut. Kementerian/lembaga pemerintah yang turut serta dalam kegiatan FE adalah Kementerian Pertanian, Perhubungan, Pekerjaan Umum, ATR/BPN. Implementasinya, dapat dikatakan program FE 90% berhasil, 10% tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, angin yang kencang menyebabkan tanaman padi jadi roboh. Selain itu, masih ada petani yang menanam padi lokal, walaupun masa tanam lama, tetapi harga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jual padi lokal lebih tinggi dibanding padi unggul. Kemudian, padi lokal sesuai selera masyarakat setempat, tahan hama, dan memiliki daya simpan yang lama.

Kendala utama yang dihadapi dalam kegiatan FE adalah pengairan, baik pengairan primer maupun sekunder merupakan peninggalan eks trans tahun 1983. Hingga saat ini (Oktober 2022) belum pernah dilakukan pendalaman sehingga air tidak mengalir ke saluran sekunder. Air di pengairan sekunder posisinya lebih tinggi daripada di pengairan primer, padahal untuk program FE yang harus disiapkan adalah irigasinya. Selain itu, harga Gabang Kering Giling (GKG) tidak sesuai dengan harapan petani, pada tahun 2020 harganya Rp4.000,00/kg dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp6.000,00/kg. Bagi petani yang terbiasa menanam padi lokal, menanam varietas unggul relatif lebih sulit merawatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan pemasaran dari hasil panen petani, mengingat modal usaha tani padi sebesar Rp7–8 juta/ha, perlu penetapan harga yang lebih tinggi karena selama ini Bulog membeli GKG di bawah harga tengkulak Rp5.200,00/kg. Selain itu, pemerintah perlu merealisasikan bantuan satu unit penggilingan padi dengan kapasitas 3.500 kg/jam dan pembangunan gudang yang pernah dijanjikan kepada Gapoktan Bersama.

Kondisi pertanian tersebut juga terjadi di Desa Pangkoh Hulu. Sebelum program FE dilaksanakan, pertanian di Desa Pangkoh Hulu adalah tanaman padi jenis lokal yang membutuhkan waktu tanam lebih lama dan hanya panen satu kali setahun. Setelah adanya program FE, sebagian besar masyarakat lokal mulai menanam padi jenis unggul yang memiliki masa tanam lebih singkat dan dapat dipanen dua kali setahun sehingga diharapkan dapat meningkatan produktivitas hasil pertanian Desa Pangkoh Hulu secara keseluruhan. Namun demikian, FE di Desa Pangkoh Hulu mengalami kegagalan, sedangkan FE di Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) mengalami keberhasilan. Hingga akhirnya, sekarang ini masyarakat lokal di Desa Pangkoh Hulu hanya sebagian kecil saja yang masih bertahan menjadi petani dengan menanam padi lokal untuk kebutuhan konsumsi sendiri

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan masyarakat sekitar desa saja yang secara kebiasaan mereka lebih menyukai nasi dari padi lokal.

Beberapa petani lainnya berpindah menjadi pekebun rakyat dengan menanam tanaman karet dan sengon, serta menjadi pedagang. Sementara itu, FE di Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) mengalami keberhasilan. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat menyebutkan bahwa Dusun Palambahen pada tahun 1990–2000-an lebih terisolir apabila dibandingkan Desa Pangkoh Hulu dan baru ada listrik sekitar tahun 2015-an. Namun, Dusun Palambahen yang dipelopori oleh Kepala Dusun dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Hapakat Haduhup" berhasil secara mandiri memajukan pertanian padi di wilayah tersebut termasuk juga perkebunan rakyat, seperti karet, sengon, kelapa sawit, dan tanaman holtikultura sehingga berdampak terhadap peningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Desa Pangkoh Hulu memiliki kekhasan dari sisi kondisi bentang alam dan juga karakteristik masyarakat lokal termasuk kondisi sosial ekonomi yang menyertainya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para petugas pendataan Regsosek di Desa Pangkoh Hulu baik Koseka, PML maupun PPL, terlebih lagi Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) menjadi RT percepatan atau prioritas yang didata pada minggu awal pendataan (akhir bulan Oktober). Saat penelitian ini dilakukan, proses pendataan Regsosek di Dusun Palambahen sudah selesai dan menyisakan beberapa warga saja yang masih belum didata, yaitu warga RT 02 dan warga yang tinggal dan kerja di perusahaan kelapa sawit PT Borneo Sawit Gemilang di Desa Pangkoh Hulu.

Tim BPS Kabupaten Pulang Pisau dan petugas pendataan Regsosek telah melakukan berbagai strategi dan upaya terbaik melalui pendekatan kolaborasi kemitraan untuk Handep Hapakat untuk menyukseskan proses pendataan Regsosek di Desa Pangkoh Hulu pada khususnya dan Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya. Handep Hapakat merupakan moto dari Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki arti adanya persatuan dan kesatuan semua suku dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

warna kulit dalam falsafah hidup gotong royong. Istilah Handep Hapakat secara etimologis berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti tindakan saling gotong royong, saling membantu, dan/atau saling bermufakat (Agon & Fimeir Liadi, 2020; Jasiah & Liadi, 2021; Purnomo, 2018). Budaya ini merupakan kearifan lokal yang sangat mengakar kuat di kehidupan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

C. Menelisik Pemahaman Proses Bisnis Regsosek

Proses bisnis kegiatan pendataan awal Regsosek terdiri dari enam tahapan. Tiga tahapan pertama dilaksanakan pada tahun 2022 dan tiga tahapan berikutnya di tahun 2023. Tahapan yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis, serta pendataan lapangan. Pada tahun 2023 dilakukan pengolahan data, forum konsultasi publik, dan terakhir adalah diseminasi (penyerahan data) (BPS RI, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jajaran BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Pulang Pisau sudah memahami proses bisnis kegiatan pendataan awal Regsosek pada tahun 2022 sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah menceritakan sejarah kegiatan sensus penduduk pada tahun 1961 hingga adanya kegiatan Regsosek ini, serta kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS melaksanakan tiga sensus, yakni sensus penduduk mulai tahun 1961, sensus pertanian mulai tahun 1973, dan pendataan sosial ekonomi pada tahun 2005. Sebelum adanya kegiatan Regsosek, BPS pernah melaksanakan kegiatan pendataan sosial ekonomi pada tahun 2005 dan pendataan data terpadu tahun 2015 yang sekarang datanya dikelola oleh Kementerian Sosial, tetapi bentuk kegiatan tersebut bukan sensus dan pelaksanaannya hanya menjaring keluarga (rumah tangga miskin) yang tingkat kesejahteraannya kurang dari 40%. Sementara, kegiatan pendataan awal Regsosek secara metodologi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

merupakan sensus dengan ciri utamanya, yaitu statistik dasar, tetapi bukan sensus sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU. Pendataan Regsosek ini merupakan penugasan pendataan data terpadu dengan payung hukum Peraturan Presiden melalui Bappenas yang ditugaskan kepada BPS. Namun demikian, hasil pendataan Regsosek ini tidak didesiminasikan oleh BPS, melainkan nanti akan ada Peraturan Presiden untuk dokumen satu data Indonesia terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Kebaruan dari pendataan Regsosek ini dibandingkan kegiatan pendataan sosial ekonomi dan pendataan data terpadu sebelumnya adalah pendataan Regsosek mendata masalah kesejahteraan masyarakat secara sensus. Hasil pendataan Regsosek ini adalah *database* tingkat kesejahteraan masyarakat secara individu. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan proses bisnis dari pusat, tetapi tentu ada dinamika dalam pelaksanaannya sehingga BPS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai strategi dan upaya modifikasi proses pendataan Regsosek.

Pertama, koordinasi dan konsolidasi teknis dilakukan oleh BPS provinsi dengan pelaksanaan rapat koordinasi daerah (rakorda) Provinsi yang melibatkan jajaran pemerintah daerah provinsi dan BPS kabupaten/kota. Terkait dengan kegiatan pendataan Regsosek, pemerintah daerah provinsi (gubernur) tidak memiliki kepentingan khusus, tetapi mereka hanya mendapat informasi dari BPS provinsi bahwa akan ada kegiatan pendataan Regsosek dan nanti pemerintah daerah akan mendapatkan hasil pendataan tersebut melalui Bappenas dengan prosedur yang ditetapkan nantinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah ikut mendukung dan memahami bahwa kegiatan pendataan Regsosek ini akan bermanfaat untuk pemerintah daerah.

Kedua, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis dengan menggunakan basis data sensus penduduk tahun 2020, yaitu dengan target awal mendata di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 898.641 keluarga. Ketiga, pendataan lapangan dimulai dengan pelaksanaan *workshop* Instruktur Nasional (Innas)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan Instruktur Daerah (Inda), dan pelatihan petugas lapangan (Koseka, PML, dan PPL), serta pelaksanaan pengumpulan data/pendataan lapangan. BPS Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dua orang Innas yang mengikuti pelatihan di tingkat Pusat untuk selanjutnya mengajarkan materi Regsosek yang diperoleh kepada Inda yang berjumlah 110 orang. Innas juga merancang rakorda, menyusun laporan mingguan, merencanakan anggaran di tingkat provinsi, mengalokasi Inda dari BPS Provinsi untuk mengajarkan materi Regsosek ke BPS kabupaten/kota, dan mendistribusikan tim monitoring. Innas bertugas merancang pelatihan terhadap Inda dan selanjutnya Inda mengajarkan materi Regsosek kepada 5.054 petugas yang mencakup Koseka sebanyak 207 orang, PML sebanyak 1.000 orang dan PPL sebanyak 3.847 orang.

Proses rekrutmen dan pemilihan petugas pendataan yang diprioritaskan adalah mitra BPS yang selama ini sering terlibat dan memiliki pengalaman kegiatan sensus/survei sebelumnya, yaitu para Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Mitra BPS itu sudah seperti pegawai BPS yang setiap hari ke kantor sehingga pihak BPS menjaga model kemitraan ini karena menyadari keterbatasan jumlah pegawai BPS. Selain itu, pemilihan petugas lapangan juga dilakukan dengan memperhatikan kedekatan petugas dengan wilayahnya misalnya untuk Kabupaten Pulang Pisau, PPL dari warga RT 05 mendata warga di RTnya tersebut sehingga mereka bisa lebih memahami kondisi bentang alam dan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Selanjutnya, para petugas lapangan tersebut mendapatkan pelatihan teknis yang dilaksanakan selama dua hari pada bulan September sampai dengan Oktober untuk penyamaan persepsi, pengetahuan, pemahaman tentang konsep, definisi, dan proses bisnis pendataan Regsosek, serta komitmen yang sama. Setiap PPL di Provinsi Kalimantan Tengah mendapat target untuk mendata 250 keluarga atau maksimal delapan satuan lingkungan setempat (SLS) dalam rentang waktu satu bulan (15 Oktober–14 November 2022). Dalam pelaksanaan pengumpulan data/pendataan lapangan, setiap PPL mengatur sendiri waktunya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan berbagai strategi dan modifikasi pendataan yang dilakukan terutama untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya apabila dalam proses bisnis ditetapkan satu wilayah satu petugas, tetapi karena ini wilayah khusus (daerah *remote*) di lima desa di Kabupaten Pulang Pisau, seperti Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit, maka BPS mengirimkan satu tim petugas pendataan ke sana secara serentak agar proses pendataan dapat selesai dalam waktu dua hari sesuai izin dari pihak perusahaan. Dalam rangka menjaga kualitas data yang dihasilkan, Innas melakukan monitor dengan cara mewawancara ulang 15 responden di tiga petugas yang berbeda. Hasil monitor kemudian dilaporkan ke bagian *monitoring* kualitas di BPS Pusat dan dilakukan kegiatan rapat melalui *zoom meeting* dengan Kepala BPS dan Tim Regsosek untuk memperoleh *feedback* yang kemudian hasilnya akan disampaikan ke BPS kabupaten untuk diteruskan ke semua petugas lapangan.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga membuat situs web (*google data studio*) untuk pelaksanaan monitor pendataan Regsosek. Hal tersebut dikarenakan *aplikasi geo-tagging* yang terhubung dengan *website monitoring* Regsosek dari BPS Pusat sering terlambat atau terganggu padahal banyak yang akan mengakses. *Website monitoring* yang dibuat BPS Provinsi Kalimantan Tengah digunakan untuk merekam laporan hasil pendataan Regsosek yang mencakup RT/SLS yang sudah selesai, keluarga yang telah didata, keluarga yang dilakukan *geo-tagging,* dan keluarga yang difoto (khusus untuk keluarga miskin dan sangat miskin) secara harian. Hasil monitor tersebut dibahas dalam kegiatan diskusi *zoom meeting* setiap minggu minggunya dan juga laporan dalam bentuk dokumen *hard copy*.

Pada saat penelitian ini dilakukan progres pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencapai 30%. Sementara itu, progress pendataan untuk Kabupaten Pulang Pisau menurut *website* monitoring BPS Pusat sudah mencapai 69,7% sebagaimana pada Gambar 3.2 dan progres hasil *geo-tagging* harian menurut *website* atau aplikasi (*google* data studi) BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Gambar 3.2.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022

Gambar 3.3 Hasil Monitoring Regsosek Provinsi Kalimantan Tengah pada Website Regsosek BPS Pusat per 4 November 2022

Sejalan dengan proses pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pendataan Regsosek di Kabupaten Pulang Pisau juga sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan proses bisnis dari BPS Pusat, serta berbagai strategi dan upaya modifikasi proses pendataan Regsosek dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan.

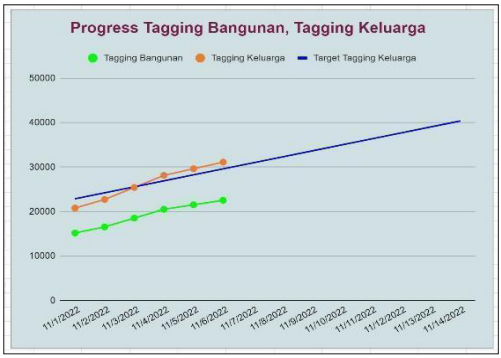

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau (2022)

Gambar 3.4 Hasil *monitoring* Regsosek Provinsi Kalimantan Tengah pada *website google* data studi BPS Provinsi Kalimantan Tengah per 6 November 2022.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pertama, koordinasi dan konsolidasi teknis yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Pulang Pisau secara umum meneruskan perencanaan dari BPS Pusat melalui beberapa kegiatan rakornas, rakorda, dan rakerda kabupaten/kota dengan melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan pimpinan beberapa perusahaan kelapa sawit, seperti di wilayah Sebangau Kuala serta Ketua Adat Dayak Pulang Pisau. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Bupati) dan jajarannya tidak memiliki kepentingan khusus terkait pendataan Regsosek tetapi sangat mendukung kegiatan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menyampaikan data secara jujur kepada petugas lapangan dan menyukseskan kegiatan Regsosek. Himbauan Bupati tersebut dikemas dalam bentuk video yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media sosial (Instagram, Facebook, dan WhatsApp).

Kedua, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis dengan menggunakan basis data sensus penduduk tahun 2020, yaitu dengan target awal mendata sebanyak 41.092 keluarga.

Ketiga, pendataan lapangan dimulai dengan pelaksanaan *workshop* Instruktur Daerah (Inda) sebanyak tujuh orang dan pelatihan petugas lapangan yang terdiri dari Koseka sebanyak 11 orang, PML sebanyak 59 orang, dan PPL sebanyak 224 orang.

Pemilihan petugas lapangan di Kabupaten Pulang Pisau dilakukan melalui proses rekrutmen terbuka dengan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, seperti ijazah, KTP, dan pelaksanaan wawancara yang dilakukan melalui *video call*. Adapun mitra BPS sebelumnya yang mendapatkan prioritas utama sebagai petugas lapangan adalah sekitar 100 orang dengan tetap mengikuti rekrutmen dan *assessment* untuk menyeleksi kembali dan melihat kinerja mereka. Hasil seleksi Tim Regsosek menetapkan sebanyak 294 orang petugas lapangan dari sebanyak lebih dari 300 pendaftar.

Para petugas lapangan itu kemudian mendapatkan pelatihan dalam kurun waktu satu bulan yang terbagi menjadi enam kelas dan dua gelombang dengan waktu pelatihan dua hari efektif. Pelatihan itu ditujukan untuk menyamakan persepsi atas konsep, definisi, proses

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sensus tata cara wawancara, *geo-tagging*, cara mendokumentasikan keluarga miskin/sangat miskin melalui identifikasi awal dari informasi ketua RT/SLS, dokumentasi foto, dan selanjutnya melakukan pendataan atau pengisian kuesioner. Dalam penandatanganan kontrak kerja petugas lapangan, terdapat pernyataan bila petugas mengundurkan diri maka harus mengganti biaya pelatihan Rp2.431.000. Hal itu ditujukan untuk membangun dan mengikat komitmen mereka agar melaksanakan tugasnya sesuai target dan standar yang ada.

Pada pelaksanaan pengumpulan data/pendataan lapangan, BPS Kabupaten Pulang Pisau menetapkan strategi pendataan yang dilakukan oleh petugas lapangan di setiap desa berbasis *team work*, misalnya satu desa terdiri dari empat PPL dan satu PML. Pada saat pendataan, setiap tim tersebut diberikan keleluasaan mengatur dan menetapkan sendiri teknik pendataan yang nyaman dan sesuai dengan kondisi bentang alam maupun kondisi sosial, lingkungan, dan karakteristik keluarga yang didata. Setiap PPL dapat mendata keluarga di masing-masing wilayah RT/SLS mereka ataupun berkolaborasi dan saling membantu (keroyokan) antar PPL untuk mendata keluarga yang menjadi target yang sudah menjadi komitmen tim tersebut. Secara umum, setiap PPL mendapatkan target rata-rata 185 keluarga dalam jangka waktu satu bulan. Pada proses pendataan, petugas lapangan di Kabupaten Pulang Pisau sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan komitmen masing-masing dan tidak ada yang berhenti atau menyerah di tengah jalan, termasuk petugas lapangan di Desa Pangkoh Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas lapangan Desa Pangkoh Hulu juga sudah melaksanakan proses pendataan lapangan sesuai proses bisnis dan strategi yang ditetapkan oleh BPS. Petugas lapangan di Desa Pangkoh Hulu terdiri dari dua orang PPL dan dua orang PML dengan target sebanyak 293 keluarga. Desa Pangkoh Hulu terutama Dusun Palambahen menjadi RT/SLS percepatan yang ditetapkan oleh BPS Pusat sebagai wilayah wajib didata terlebih dahulu di pekan pertama saat pendataan Regsosek, karena akan dientri mulai tanggal 15 November 2022, yaitu dengan target sebanyak 93 keluarga.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebelum melakukan pendataan, PPL dan PML melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk menginformasikan dan menjelaskan tujuan dan proses kegiatan Regsosek. Selanjutnya, proses pendataan yang dilakukan oleh setiap PPL adalah melakukan koordinasi dengan ketua RT untuk menginformasikan kegiatan dan tujuan pendataan Regsosek mengidentifikasi wilayah RT/SLS sesuai peta Willkerstat. Mengidentifikasi dan memverifikasi keluarga pada daftar Regsosek yang mencakup identitas diri (nama), keberadaan, dan status (menikah/belum menikah) dari setiap keluarga yang ada di wilayah RT/SLS tersebut berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK), serta tingkat kesejahteraannya apakah termasuk kategori tidak miskin, miskin, dan sangat miskin menurut pendapat ketua RT/SLS tersebut. Selain itu, PPL juga melakukan verifikasi keberadaan keluarga lain yang diragukan dan atau belum tercantum pada daftar Regsosek.

Setelah itu, PPL mengunjungi rumah dari setiap keluarga di RT/SLS tersebut, melakukan proses wawancara, proses pendataan, dan pengisian kuesioner pendataan Regsosek; melakukan *geo-tagging* lokasi bangunan tempat tinggal keluarga itu; dan mengambil foto bangunan tempat tinggal keluarga yang diidentifikasi miskin dan sangat miskin kemudian memberi noktah/nomor urut bangunan. Hasil observasi dari keseluruhan proses pendataan lapangan yang dilakukan oleh salah satu PPL membutuhkan waktu efektif sekitar 1 jam 30 menit. Tahapan selanjutnya PPL memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran pengisian kuesioner tersebut dan apabila sudah selesai PPL kemudian menyerahkan hasilnya kepada PML. PML akan memeriksa kembali konsistensi pengisian kuesioner dan apabila ada kesalahan pengisian PML akan mengkonfirmasi data tersebut kepada PPL. Apabila sudah selesai PML kemudian menyerahkan hasilnya kepada Koseka.

Koseka sebagai perwakilan dari BPS, melakukan monitoring, menerima kuesioner yang sudah diperiksa PML, dan selanjutnya diperiksa ulang. Melaporkan kepada Ketua Bidang Manajemen Lapangan di BPS Kabupaten Pulang Pisau. Hal tersebut menunjukkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahwa sistem pengawasan, validitas, dan pengendalian data di tingkat lokal sudah dilakukan dengan baik oleh Koseka dan PML secara bertingkat. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa proses pendataan/pengumpulan data sudah dilakukan secara berjenjang sesuai proses bisnis dan tugas masing-masing petugas lapangan.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Pendataan awal Regsosek bertujuan menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan sosial dari setiap warga masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pada proses pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu faktor bentang alam dengan medan yang bervariasi dan faktor cuaca yang pada akhir Oktober ini curah hujan di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan bencana banjir hampir di semua Kabupaten. Dari sisi petugas lapangan, adanya kegiatan pendataan Regsosek memberikan nilai positif yang memotivasi mereka untuk terlibat, yaitu selain untuk mengisi waktu luang juga memperoleh pendapatan. Namun demikian, BPS menetapkan berbagai persyaratan khusus sebagai kualitas standar yang harus mereka miliki sehingga sesuai dengan harapan dan tujuan pendataan. Meskipun demikian, ada juga petugas lapangan yang menyerah ditengah jalan, tetapi tidak banyak, biasanya yang menyerah itu lebih karena belum berpengalaman (baru lulus SMA) dan adanya *mental block*, seperti takut mengetuk pintu rumah orang.

Pendataan awal Regsosek di Kabupaten Pulang Pisau mempunyai beberapa nilai positif yang dirasakan baik oleh BPS Kabupaten Pulang Pisau, petugas lapangan, dan juga masyarakat.

1. Pertama, kegiatan pendataan Regsosek menambah jaringan mitra baru BPS. Istilah mitra BPS sudah ada sejak kegiatan sensus-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sensus sebelumnya. Mitra tersebut berasal dari perangkat desa, guru, atau berbagai macam profesi yang membantu melakukan pendataan penduduk yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pegawai BPS. Mitra tersebut tidak seratus persen terikat dengan BPS dan lambat laun mitra tersebut ketika ada pendataan akan dibutuhkan kembali untuk membantu BPS melakukan pendataan, mereka ada yang tetap bersedia, tetapi ada pula yang menolak. Semakin lama semakin terbangun mitra-mitra BPS yang tetap komitmen, solid, memiliki kemampuan pengalaman pendataan yang mumpuni, dan kualitas hasil pendataan yang bagus. Mitra BPS yang dianggap lebih bagus dan mumpuni tersebut ketika di lapangan ditetapkan sebagai Koseka dengan tujuan mereka bisa menyebarkan pengetahuan dan pengalamannya kepada PML dan PPL yang baru bergabung sebagai mitra. Dari 294 orang petugas lapangan terdapat sepertiga petugas lapangan termasuk mitra lama BPS dan dua pertiga lainnya termasuk mitra baru.

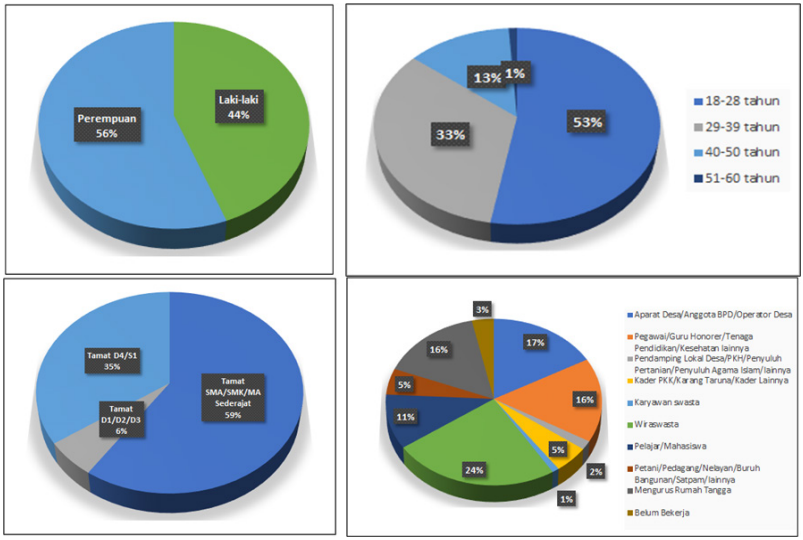

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti (2022)

Gambar 3.5 Profil Petugas Lapangan Regsosek Kabupaten Pulang Pisau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sementara itu jumlah petugas lapangan menurut jenis kelamin, kelompok umur, tingkat Pendidikan, dan pekerjaan adalah sebagaimana pada Gambar 3.5.

2. Kedua, kegiatan pendataan Regsosek membuka lapangan kerja baru, pengalaman kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama bagi petugas lapangan dan perangkat kecamatan/desa di Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan Gambar 3.5 dapat diketahui bahwa petugas lapangan adalah jenis pekerjaan baru bagi masyarakat Pulang Pisau, baik yang sudah memiliki pekerjaan tetap maupun yang belum memiliki pekerjaan tetap. Bagi yang memiliki pekerjaan tetap, seperti aparat desa, pegawai/guru honorer/tenaga pendidikan/ kesehatan, penyuluh desa, karyawan, wiraswasta, petani, pedagang, dan lainnya maka Koseka/PML/PPL menjadi pekerjaan sampingan, pengalaman kerja, dan sumber pendapatan baru bagi mereka. Bagi ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan belum bekerja maka Koseka/PML/PPL menjadi pekerjaan, pengalaman kerja, dan sumber pendapatan baru bagi mereka. Menurut ketentuan BPS, setiap petugas lapangan di Kabupaten Pulang Pisau akan mendapatkan honor sesuai peranannya, yaitu Koseka sebesar Rp4.774.000,00; PML sebesar Rp4.317.000,00; dan PPL sebesar Rp3.890.000,00 Pendapatan petugas lapangan tersebut cenderung lebih besar apabila dibandingkan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Pulang Pisau sekitar Rp2.900.000,00 maupun honor kegiatan pendataan sebelumnya. Adapun komponen honor tersebut termasuk biaya pembelian bensin (transportasi), pembelian pulsa, dan uang makan, kecuali untuk sewa kendaraan khusus, seperti alat angkut perahu (klotok) misalnya ke wilayah Sebangau Kuala dengan biaya sewa mencapai Rp3–5 juta akan ditanggung oleh BPS Kabupaten Pulang Pisau. Honor tersebut akan mereka terima ketika sudah serah terima hasil pekerjaan. Selain petugas lapangan, perangkat kecamatan/desa/pihak lainnya yang berperan sebagai penunjuk jalan juga mendapatkan honor, yaitu camat sebesar Rp600.000,00; kepala desa sebesar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rp300.000,00; dan ketua RT/SLS/penunjuk jalan di perusahaan sawit/lainnya sebesar Rp150.000,00.

3. Ketiga, kegiatan pendataan Regsosek meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk lebih *melek* data. Bagi petugas lapangan, kegiatan pelatihan yang mereka ikuti membuka pengetahuan baru bagi mereka akan pentingnya data Regsosek, proses bisnis pendataan, tujuan, dan manfaat Regsosek ke depan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, ketika proses pendataan, mereka juga menyebarkan arti pentingnya data Regsosek tersebut kepada setiap keluarga yang didata sehingga masyarakat secara luas pun menjadi ikut melek data. Hasil observasi menunjukkan bagaimana Koseka, PML, dan PPL berusaha dengan baik menjelaskan pentingnya data dan proses pendataan Regsosek kepada camat, kepala desa, ketua RT, dan beberapa keluarga. Mereka memiliki respon dan pandangan positif yang sama bahwa kegiatan pendataan Regsosek tersebut penting dan bermanfaat bagi mereka terutama adanya kebaruan proses pendataan yang sebelumnya hanya diwakilkan oleh kepala keluarga menjadi setiap anggota keluarga.
4. Keempat, kegiatan pendataan Regsosek semakin meningkatkan hubungan kekeluargaan, rasa empati, kolaborasi, dan semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau. Bagi petugas lapangan, pengalaman pertama menginap di hotel memberikan nilai positif bagi mereka untuk saling mengenal, berinteraksi, bertukar pengalaman dan cerita dengan petugas lainnya dari berbagai desa yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam proses pendataan Regsosek, petugas lapangan pun dapat saling membantu dan berkolaborasi sebagai *team work* baik di tingkat RT/SLS, tingkat desa, tingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten. Selain itu, petugas lapangan juga mendapatkan rasa kebahagiaan dan penghargaan dari masyarakat, yaitu ketika mereka bertamu, bersilaturahmi, kemudian disuguhi minuman oleh keluarga tersebut. Bagi keluarga yang didata, secara umum juga merasa bahagia dan mendapat penghargaan ketika ada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang bertamu ke rumah mereka. Suasana kebatinan yang hadir selama proses pendataan Regsosek tersebut mencerminkan nilai-nilai Handep Hapakat yang selama ini menjadi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

Selain memberikan nilai positif, proses pendataan Regsosek di Kabupaten Pulang Pisau juga menghadapi berbagai tantangan.

1. Pertama, sekalipun sudah ada dukungan secara lisan dari Pemerintah Daerah (Bupati) Pulang Pisau yang menghimbau masyarakat menerima petugas pendataan dari BPS kabupaten dalam pelaksanaan Regsosek, namun bentuk dukungan secara tertulis (surat resmi) masih belum ada dikarenakan proses administrasi tata naskah dinas yang masih terus tertunda. Sementara itu, surat resmi tersebut dibutuhkan untuk menjadi pelengkap surat izin pelaksanaan Regsosek di beberapa perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Kedua, kendala ketika petugas lapangan mensosialisasikan ke beberapa masyarakat khususnya di wilayah perkotaan yang masih menolak, mencurigai, dan mempertanyakan tujuan dari pendataan Regsosek sehingga mengharuskan pelaksana BPS Kabupaten Pulang Pisau harus turun langsung menjelaskan dengan berkoordinasi dengan camat, kepala desa/lurah, dan ketua RT kemudian pada akhirnya masyarakat menerima petugas lapangan. Sementara untuk wilayah perkotaan, kendala tersebut tidak terjadi sekalipun surat pengantar resmi dari Bupati belum ada atau belum turun.
3. Ketiga, sekalipun secara umum masyarakat desa (keluarga) merespon dengan baik adanya kegiatan Regsosek, namun masih terdapat beberapa individu yang menolak diwawancarai, tidak mau menunjukkan data keluarga (KK), tidak memberikan informasi secara jujur.
4. Keempat, masyarakat tidak ada di rumah karena bekerja ketika petugas lapangan dating sehingga petugas harus rela mengun-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jungi dan mendata rumah itu berulang-ulang ketika sore atau malam hari yang waktunya cenderung terbatas.

5. Kelima, proses pendataan di lingkup RT dengan jumlah keluarga yang banyak terutama di daerah perkotaan, termasuk di perusahaan sawit PT Menteng Kencana Mas. Jumlah petugas lapangan diperlukan lebih banyak, yaitu sekitar 15 orang yang disebar ke up-willing 80–100 pekerja sawit. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan sawit yang belum dapat ditembus petugas pendataan, terdapat sekitar 1.080 tenaga kerja sawit yang diidentifikasi pada tanggal 31 Oktober 2022 dan baru 60 orang yang telah didata.
6. Keenam, faktor jarak jauh khususnya pendataan di perusahaan sawit, medan yang cukup sulit, jalan belum bagus, dan musim hujan sehingga itu menjadi tantangan bagi petugas. Masyarakat ada yang dihubungi terlebih dahulu, menyesuaikan waktunya, dan Tim Desa terdekat datang mengikuti jadwal mereka. Kemudian, untuk pegawai perusahaan yang menetap di tempat kerja, pendataan dilakukan di tempat kerja meskipun belum ada balasan surat untuk BPS Pulang Pisau karena panjangnya birokrasi. Sarana informasi, seperti radio yang dimiliki Pemerintah Daerah rusak dan sangat disayangkan sekali karena memiliki jangkauan yang luas.
7. Ketujuh, faktor cuaca dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan musibah banjir pada beberapa desa di wilayah barat Kabupaten Pulang Pisau, diantaranya Desa Tumbang Nusa, Kembang, dan Tumbang Taruna. Strategi dan upaya yang dilakukan oleh PPL di wilayah tersebut adalah mereka harus naik klotok dikarenakan fasilitas jalan terputus.
8. Kedelapan, masih terdapat beberapa PML dan PPL yang mengeluh sulitnya melakukan pendataan dan masih melakukan kesalahan pengisian kuesioner dan koding karena terburu-buru ketika mengisi.

Diantara nilai positif dan tantangan dalam pelaksanaan pendataan Regsosek tersebut, baik BPS Kabupaten Pulang Pisau,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

petugas lapangan, perangkat kecamatan/desa, dan masyarakat memiliki harapan yang sama bahwa kegiatan pendataan Regsosek mampu menghasilkan data yang dapat menjadi rujukan bersama bagi pemerintah pusat, daerah, dan desa ketika ada program perlindungan sosial dan program nasional ke masyarakat desa, seperti bantuan sosial, PKH, dan sebagainya agar tidak salah sasaran.

Menurut Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, tujuan dari kegiatan pendataan regosek adalah bagian dari reformasi satu data kesejahteraan sosial dan arah kebijakan pemerintah adalah untuk menjadikan berbagai data itu bagian dari satu data Indonesia. Dari aspek perlindungan sosial, hasil pendataan Regsosek mencakup unsur kesejahteraan sosial yang nanti akan dibuat peringkat dari yang paling miskin hingga paling kaya. Hasil pendataan ini tidak hanya ditujukan untuk program bantuan sosial, tetapi juga untuk semua program lainnya, seperti Indonesia pintar, Indonesia sehat, dan lainnya. Selain itu, tujuan lain adalah untuk efisiensi karena selama ini Menteri Keuangan cenderung memberi kegiatan kepada masing-masing kementerian sehingga apabila dijumlah mencapai 20 triliun rupiah. Namun, semua tergantung dari keputusan politiknya nanti akan seperti apa terutama terkait dengan pemanfaatan data. Nuansa politik kemungkinan akan tinggi karena ada tarik-menarik kegiatan antar K/L sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas terkait pemanfaatan data Regsosek. Berkaitan dengan hal tersebut akan ada rancangan Peraturan Presiden tentang bagi pakai data, tetapi belum diketahui sejauh mana dan bagaimana prosesnya. Harapannya melalui kegiatan pendataan Regsosek ini, kedepan tidak ada lagi pendataan sektoral sehingga menjadi data tunggal yang digunakan oleh berbagai sektor. Hal tersebut membutuhkan perawatan data setiap tahun, dan ini yang masih belum diatur. Oleh karena itu, kegiatan perawatan data ini tidak dilakukan oleh BPS melainkan instansi pemerintah lainnya sehingga BPS tetap fokus terhadap tugas dan fungsi utamanya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau bahwa pendataan Regsosek dalam hal perlindungan sosial ditujukan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hasil pendataan Regsosek menjadi basis data pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya terdapat data tentang UMKM, bentuk usaha, jumlah pendapatan, pekerjaan sehingga ketika ada program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya modal UMKM maka instansi terkait dapat menggunakan data tersebut, termasuk juga untuk program bantuan sosial dan lainnya. Sekali lagi, hal yang terpenting adalah keberlanjutan dari perawatan data Regsosek ini.

Dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan pendataan Regsosek, Tim Pelaksana BPS kabupaten Pulang Pisau mengharapkan adanya perencanaan kegiatan yang lebih sistematis dari pemerintah pusat sehingga proses koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan pendataan lapangan dapat lebih baik. Hal tersebut dikarenakan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan sangat singkat mulai dari turunnya anggaran kegiatan Regsosek dari pusat ke daerah pada bulan September 2022, sedangkan implementasi pendataan 15 Oktober–14 November 2022. Sementara itu, untuk rentang waktu sebelum pelaksanaan (September–14 Oktober 2022) digunakan untuk rapat koordinasi daerah, pelatihan, dan publikasi.

Keterbatasan jangka waktu tersebut menyebabkan proses koordinasi untuk administrasi surat pengantar tentang himbauan resmi dari pemerintah daerah terhambat dan sosialisasi kegiatan Regsosek ke masyarakat menjadi kurang maksimal. Namun demikian, kegiatan pendataan Regsosek memiliki kebaruan yang bernilai penting, yaitu adanya data titik koordinat lokasi *tagging* dan foto rumah seluruh masyarakat desa di Kabupaten Pulang Pisau. Secara substansi data Regsosek lebih lengkap dibandingkan kegiatan pendataan yang pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2015 (hanya 40%). Camat, kepala desa, ketua RT, petugas lapangan, dan masyarakat memiliki harapan agar kegiatan Regsosek mampu memperbaiki data-data lama sebelumnya dan menghasilkan satu basis data yang sinkron, sesuai dengan kondisi riil, akurat, dan menjadi acuan sama bagi pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial. Hal tersebut sangat penting karena implementasi program perlindungan sosial selama ini sering kali

Buku ini tidak diperjualbelikan.

salah sasaran, menyulitkan pelaksanaan di tingkat kecamatan dan desa, hingga menimbulkan kecemburuan sosial dan permasalahan di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, program perlindungan sosial yang sering dikeluhkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) per kecamatan, per desa dengan daftar penerima bantuan (Nama dan NIK) sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah data diverifikasi di tingkat desa, ternyata terdapat penerima bantuan yang tingkat kesejahteraannya sudah baik (tidak miskin, sudah meninggal, dan anggota keluarga lainnya memiliki pekerjaan tetap, yaitu PNS). Penggunaan basis data yang lama tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting saat program dilaksanakan, sementara bila penerima bantuan digantikan dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak boleh karena harus sesuai nama dan NIK. Sementara itu, penerima bantuan yang dianggap perangkat kecamatan/desa sudah mampu tidak mau mengundurkan diri, jadi data itu tidak dapat dihapuskan kecuali ada surat pernyataan yang bersangkutan. Hal itu sering kali menimbulkan prasangka, dan kecemburuan sosial di masyarakat. Camat, kepala desa, dan ketua RT sering menjadi sasaran kekesalan masyarakat dan 'dikambing hitamkan'. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya kriteria tingkat kesejahteraan sosial (misalnya kriteria sangat miskin, miskin, dan tidak miskin) yang disepakati dan ditetapkan secara bersama dari tingkat pusat sampai tingkat desa sebagai acuan utama pelaksanaan program perlindungan sosial agar tepat sasaran.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan

Pada proses bisnis pendataan awal Regsosek tidak terdapat ketentuan khusus untuk melibatkan kelembagaan sosial adat, tetapi lebih mengutamakan kelembagaan formal, yaitu pemerintah kecamatan dan pemerintah desa (kepala desa dan ketua RT). Secara kelembagaan sosial adat, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lembaga adat yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bernama Dewan Adat Dayak yang dipimpin Ketua Dewan Adat Dayak yang berada di provinsi dan kabupaten, sedangkan di tingkat kecamatan bernama Damang. Adapun secara rinci struktur kelembagaan adat khususnya di Kecamatan Pandih Batu, terdiri dari Damang sebagai Kepala Adat dan Mantir Adat sebagai pengurusnya yang terdiri dari lima orang. Damang ini berfungsi untuk melaksanakan kegiatan ritual adat, seperti upacara/pesta pernikahan dan *ngunduh mantu* secara adat, mengatasi sengketa tanah adat dengan perusahaan, dan masalah adat lainnya.

Pada kegiatan pendataan Regsosek, Ketua Adat Dayak Kabupaten Pulang Pisau diundang pada saat rakorda. Namun, saat proses pendataan Regsosek di Pangkoh Hulu, petugas lapangan tidak perlu meminta izin atau melibatkan secara langsung Damang, tetapi dengan berkoordinasi secara langsung dengan camat, kepala desa, dan ketua RT sebagaimana proses bisnis pendataan Regsosek. Petugas lapangan sudah melakukan sosialisasi kegiatan Regsosek kepada camat, kepala desa, ketua RT, dan masyarakat dengan penjelasan yang baik sehingga masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari proses pendataan Regsosek. Jejaring dan distribusi informasi dan komunikasi kegiatan pendataan Regsosek di lingkungan masyarakat Desa Pangkoh Hulu juga sudah tersebar dengan baik. Perangkat camat/desa memberikan respon dan dukungan nyata terhadap kelancaran proses pendataan Regsosek. Kepala desa sudah mengetahui dan memahami tujuan dari kegiatan Regsosek dan bahkan ikut berperan aktif, diantaranya dengan mengumpulkan para ketua RT dan menggerakkan mereka untuk memberikan informasi secara jujur tentang kondisi keluarga di RT/SLSnya, baik dalam pertemuan rutin warga maupun tidak rutin. Selain itu, kepala desa juga menjelaskan teknik/cara mengidentifikasi awal anggota masyarakat yang termasuk keluarga miskin, sangat miskin, dan tidak miskin. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa ketua RT di Desa Pangkoh Hulu.

Ketua RT turut berperan aktif menginformasikan dan mendorong masyarakat di lingkungan RT/SLSnya untuk menerima petugas lapangan ketika mendata karena hal itu merupakan salah satu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bentuk kewajiban warga negara untuk terlibat dalam administrasi pemerintahan. Masyarakat Desa Pangkoh Hulu secara umum menerima, sekalipun ada juga yang menolak dan mempertanyakan tujuannya, tetapi dengan penjelasan yang baik dari ketua RT, masyarakat pun akhirnya mengerti. Ketua RT turut mengajak masyarakat sadar akan masalah sosial yang terjadi, program-program perlindungan sosial, serta kebutuhan data yang benar untuk mendukung program pemerintah mengatasi masalah sosial tersebut. Ketua RT juga ikut mendampingi secara langsung petugas lapangan yang mendata. Ketika petugas lapangan melakukan *geo-tagging* dan mendokumentasikan kondisi rumah, masyarakat tidak merasa keberatan.

F. *Life Story* Pendata Desa Pangkoh Hulu

Salah seorang PPL di Desa Pangkoh Hulu adalah seorang pemuda desa laki-laki berusia 19 tahun yang bekerja sebagai perangkat desa, yakni operator desa sejak bulan Mei 2022. Sebagai operator desa, pemuda lulusan SMA tersebut bertugas untuk membantu sekretaris desa menginput rancangan APBDes, APBDes, dan perubahan APBDes Siskeudes. Pemuda desa itu juga membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menginput penatausahaan, baik itu membuat buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan laporan realisasi APBDes di Siskeudes. Adapun honor yang diterima sebagai operator desa sebesar Rp800.000,00/bulan. Pada awal September 2022, pemuda desa itu membaca pengumuman di Instagram BPS Kabupaten Pulang Pisau tentang adanya pendaftaran petugas lapangan Regsosek yang diselenggarakan pada tanggal 5–11 September 2022 dan tertarik untuk ikut mendaftar hingga akhirnya menerima pengumuman lulus seleksi sebagai PPL pada tanggal 13 September 2022. Selanjutnya pada tanggal 8–11 Oktober 2022 pemuda desa itu mengikuti pelatihan selama dua hari efektif di salah satu hotel di Kota Palangkaraya.

Sebagai seorang PPL, pemuda desa itu mendapatkan tugas untuk mendata sebanyak 98 keluarga yang tersebar di RT 01 dan RT 06. Pada saat pendataan pemuda desa itu sudah memahami proses

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bisnis pendataan Regsosek dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pendataan lapangan, yaitu mengunjungi setiap keluarga yang namanya ada di daftar verifikasi keluarga. Selanjutnya, memberikan noktah dan nomor urut bangunan pada peta WS sesuai dengan isian daftar verifikasi, melakukan *geo-tagging* lokasi bangunan tempat tinggal keluarga responden, dan mengunggahnya melalui aplikasi Wilkerstat, serta menyalin kode ID Landmark *Wilkerstat* ke kuesioner.

Pada saat penelitian dilakukan, seluruh keluarga yang bertempat tinggal di RT 01 dan RT 06 sudah selesai didata dan menyisakan satu perusahaan kelapa sawit yang baru akan dilaksanakan pada hari Minggu sehingga peneliti tidak dapat mengikuti perjalanan pendataan tersebut. Sementara itu, kendala yang dihadapi pemuda desa itu dalam mendata adalah kesulitan menjumpai responden yang bekerja di perusahan kelapa sawit sehingga perlu mendatangi kembali di waktu malam hari; adanya responden yang sakit; ataupun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dilakukan pendataan karena hujan terus menerus dan menyebabkan banjir. Harapannya apabila kegiatan Regsosek dilanjutkan maka ia berharap agar ada biaya transportasi tambahan selain honor yang diperoleh sebesar Rp3.900.000,00.

Hasil observasi terhadap perjalanan mendata dari beberapa orang PPL di Kecamatan Pandih Batu menemukan beragam kisah menarik.

1. Kisah PPL yang harus melakukan pendataan pada malam hari karena ketua RT yang bekerja sebagai petani/berkebun tersebut pada pagi hingga sore hari tidak ada dirumah. Sekitar pukul 19.00, PPL datang ke rumah ketua RT yang terletak dipinggir sungai Kahayan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. PPL tersebut kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari pendataan Regsosek. PPL tersebut membuka daftar Regsosek di wilayah RT, menanyakan satu per satu nama kepala keluarga beserta anggotanya, keberadaan, dan tingkat kesejahteraannya apakah menurut pendapat ketua RT termasuk tidak miskin, miskin, atau sangat miskin. Ketua RT tersebut menerima dan merespon dengan baik semua pertanyaan pemuda itu dan membuka dokumen daftar KK dari semua warga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

RT. Proses diskusi dan pertimbangan yang cukup lama terjadi ketika ketua RT mengidentifikasi tingkat kesejahteraan keluarga karena tidak ada panduan atau kriteria yang jelas dari BPS, tetapi hanya berdasarkan pendapat pribadi ketua RT. Beberapa keluarga miskin yang diidentifikasi menurut ketua RT tersebut antara lain masyarakat yang janda, memiliki cacat fisik bekas kecelakan, hidup sendiri (sudah berusia lanjut dan tidak menikah), tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang tetap dengan hanya mengandalkan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup (makan). Keseluruhan proses pendataan PPL membutuhkan waktu kerja efektif sekitar 1 (satu) jam 30 menit dan baru selesai sekitar pukul 22.00 ketika suasana malam hari sudah sangat sepi. Kondisi itu tidak menyurutkan semangat PPL untuk mendata warga.

2. Kisah lain dari PPL ketika mendatangi rumah ketua RT untuk melakukan identifikasi keluarga yang tergolong miskin dan sangat miskin. Ketua RT tinggal bersama mertua, menumpang karena rumah yang ditempati milik mertua. Saat menentukan keluarga miskin dan sangat miskin, berbagai pertimbangan dijadikan acuan sebagai penentu keputusan. Bapak mertua yang kebetulan turut mendengarkan, ikut mengusulkan diri untuk dimasukkan dalam kategori keluarga miskin, karena sudah tidak bisa bekerja. Ketua RT bahkan mempertanyakan untuk keluarga yang belum memiliki rumah, apakah dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin karena masih tinggal dengan orang tua. Teridentifikasi juga keluarga yang tinggal di rumah tembok yang dinilai bagus, tetapi keluarga yang menempati sudah lanjut usia dan kepala keluarga sakit strok. Kehidupan sehari-hari sangat tergantung pada kiriman uang dari anaknya yang tinggal di luar kota, keluarga ini dikategorikan miskin, tidak sepenuhnya berdasarkan indikator kondisi fisik rumah. Janda tua yang tidak berpenghasilan juga dikategorikan miskin, walaupun rumah yang ditempati tergolong bagus. Ketergantungan biaya hidup justru menjadi tolok ukur kemiskinan menurut pandangan ketua RT yang mengetahui

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kehidupan sehari-hari warganya. Koseka hadir mendampingi PPL ketika dilakukan identifikasi keluarga miskin/sangat miskin sebelum dilakukan pendataan ke rumah warga.

3. Kisah PPL ketika mendatangi keluarga yang diidentifikasi ketua RT sebagai keluarga miskin. Kondisi rumah berupa bangunan dari bambu ukuran tipe rumah 45, sudah usang kurang terawat, dengan penghuninya yang berusia di atas 60 tahun, dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil pekarangan di sekitar rumah, mencerminkan suatu keluarga yang miskin. Pendataan yang dilakukan PPL tidak mengalami kesulitan, data dan informasi yang dibutuhkan PPL untuk mengisi kuesioner dijawab lugas apa adanya oleh responden, termasuk ketika diminta menunjukkan kartu keluarga.

Selanjutnya adalah salah seorang PML di Desa Pangkoh Hulu adalah seorang perempuan berusia 39 tahun yang memiliki pendidikan sarjana dan bekerja sebagai staf di Perpustakaan SMAN 1 Pandih Batu (tenaga honorer) sejak bulan Oktober 2014. PML tersebut menceritakan kisah dan pengalamannya dari sebelum hingga akhirnya menjadi PML pada kegiatan pendataan Regsosek. PML tersebut merupakan kepala keluarga perempuan, janda cerai hidup yang menanggung dua orang anak perempuan. Anak pertamanya perempuan kuliah semester tiga jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Banjarmasin, sedangkan anak kedua kelas satu pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin. Beliau memperoleh honor sebesar Rp350.000,00/bulan (dari dana BOS kabupaten) sebagai staf Perpustakaan di SMAN 1 Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2014. Sejak tahun 2016–2017, pengelolaan SMAN 1 Pandih Batu beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2022 honor yang diperoleh sebesar Rp750.000,00/bulan ditambah bantuan dari komite sekolah sebesar Rp650.000,00/bulan, untuk kelancaran belajar mengajar, khusus bagi tenaga honorer yang terdiri atas lima orang staf dan empat orang guru. Setiap hari kerja,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Senin sampai Jumat disediakan makan siang yang dikelola oleh staf dan guru secara bergiliran dengan dana dari komite sekolah.

PML juga berjualan pulsa untuk menambah penghasilan dengan pendapatan rata-rata Rp500.000,00/bulan dan berjualan es batu rata-rata per hari 40 biji dengan harga Rp1.000,00/biji, sehingga diperoleh pendapatan Rp800.000,00/bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk anak pertama yang kuliah di Banjarmasin dan tinggal dengan orang tua PML sebesar Rp900.000,00/bulan dengan perincian Rp200.000,00/bulan untuk bantuan belanja dan beras 10 kg/bulan, dan uang jajan Rp150.000,00/minggu atau Rp600.000,00/bulan, serta biaya kuliah sebesar Rp2.900.000,00/semester. Biaya sekolah anak kedua di Pondok Pesantren sebesar Rp1.005.000,00/bulan dengan rincian SPP sebesar Rp55.000,00/bulan, uang makan di Pondok Pesantren Rp350.000,00/bulan, dan uang jajan Rp150.000,00/minggu atau Rp600.000,00/bulan.

PML aktif membantu kegiatan pilkada sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan honor sebesar Rp800.000,00/bulan pada tahun 2018. PML pada bulan April–Mei 2019 menjadi responden juga yang bergabung sebagai PPL untuk menjadi mitra BPS, setelah mengikuti pendaftaran yang diumumkan secara terbuka melalui Instagram dan lolos seleksi untuk persiapan sensus penduduk 2020. Honor yang diterima sebesar Rp1.900.000,00 untuk pekerjaan selama satu bulan. Rekrutmen BPS selanjutnya juga diikuti untuk kegiatan sakernas pada bulan Agustus 2019 mendapat honor sebesar Rp2.300.000,00 selama satu bulan kerja. Beliau masih mendapat kesempatan sebagai petugas pencacah untuk kegiatan sensus penduduk dengan honor sebesar Rp1.600.000,00 selama satu bulan kerja pada tahun 2020. Honor yang diterima petugas relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan sebelumnya karena anggaran yang ada dipotong untuk penanganan Covid-19. Pelatihan yang biasanya dilaksanakan di hotel Palangkaraya, pada waktu itu hanya dilakukan di kantor BPS Kabupaten Pulang Pisau.

PML tersebut pada bulan November 2020 turut membantu kegiatan industri mikro kecil dengan melakukan survei pada pengusaha skala rumah tangga, seperti pembuat perahu jukung, pembuat tahu dan tempe, pembuat bakul dari anyaman, pembudi daya jamur, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga pembuat kerupuk. Honor yang diterima dihitung dari jumlah responden yang disurvei, selama satu bulan bekerja memperoleh Rp780.000,00 atau Rp65.000,00/responden. Responden (PML) kemudian mengikuti kegiatan SUSENAS pada Maret 2021, yang dinilai pendataannya relatif rumit sehingga diistilahkan para petugas tidak afdol disebut sebagai mitra BPS jika tidak menyangkut pendataan SUSENAS. Selanjutnya, PML mengikuti kegiatan survei pertanian terintegrasi (sitasi) di September–Oktober sebagai petugas pendataan.

Sampel yang diambil hanya 10 sampel dan satu petugas ditargetkan dua desa atau 20 sampel. Honor yang diterima petugas selama satu bulan bekerja sebesar Rp2.800.000,00. Selanjutnya, pada bulan Maret 2022, responden (PML) berkesempatan kembali sebagai petugas pendataan pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan honor sebesar Rp2.900.000,00 selama satu bulan bekerja. Responden mengikuti kegiatan *long form* sensus penduduk 2020 lanjutan pada bulan September–Oktober dengan status sebagai petugas pendataan lapangan. Honor yang diperoleh Rp3.800.000,00 selama satu bulan kerja ditambah uang saku pada waktu mengikuti pelatihan selama enam hari sebesar Rp980.000,00. Perjalanan panjang sebagai petugas pendataan lapangan selama April 2019–Juni 2022 telah mengantarkannya sebagai PML, ketika mengikuti rekrutmen petugas pada kegiatan Regsosek 2022. Pekerjaan tambahan sebagai PPL maupun PML telah melalui izin kepada kepala sekolah, dengan perjanjian tidak meninggalkan tugas utamanya. Jangka waktu kesibukan PML selama satu bulan, pendataan pada hari Senin sampai Jumat dilakukan setelah jam kerja sebagai staf perpustakaan. Kegiatan pendataan pada hari Sabtu dan Minggu kegiatan pendataan dilakukan sejak pagi.

PML menceritakan tugasnya sebagai PML, yaitu mendampingi empat orang PPL, membantu mengawasi kegiatan pendataan, membantu PPL di bawahnya apabila mengalami kesulitan dalam pendataan, dan memeriksa kelengkapan dokumen pendataan dari lapangan. Cakupan wilayah kerja PML, meliputi empat desa dan 21 RT, yaitu Desa Pangkoh Hulu dua RT, Desa Pangkoh Hilir satu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

RT, Desa Kantan Muara 15 RT, dan Desa Kantan Dalam tiga RT. Adapun kendala yang dihadapi PML tersebut adalah kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada PPL tentang peta web wilkerstat Regsosek, terutama kepada PPL sebagai mitra baru BPS.

Dalam pandangan PML, Regsosek mirip dengan sensus pertanian, namun kegiatan pertanian tidak terlalu beragam, tidak ada pendataan tentang agama dan bahasa yang digunakan. Empat orang PPL yang berada di bawah PML responden merupakan mitra BPS yang baru pertama kali sehingga perlu diberitahu cara mendata dengan baik, termasuk cara penulisan peta. Seperti halnya jawaban responden yang menyatakan bahwa pekerjaannya serabutan. Dalam hal ini PML menjelaskan bahwa pekerjaan serabutan perlu diperinci, misalkan bekerja menebas rumput, memetik buah sawit.

Kendala yang dihadapi PML, pada saat PPL mengalami kesulitan dalam pendataan di petani sawit. Petani sawit yang tinggal di barak perusahaan sekitar 96 orang yang berada dalam enam bangunan, masing-masing bangunan terdiri dari empat pintu. Petani yang telah berkeluarga berada pada satu ruangan tersendiri. Barak dihuni satu KK beserta anak istri, suami istri bekerja di perusahaan sawit, anak yang masih balita berada di tempat penitipan anak, bila masih belum masuk sekolah. Adapun pekerja laki-laki yang berasal dari daerah yang berbeda, belum berkeluarga, biasanya digabung dalam satu ruangan yang berukuran 4x5 m^2 (satu pintu) diisi antara 4–6 orang.

Kegiatan pada hari pertama mendata ialah pendata (satu orang PPL didampingi PML) yang datang ke perusahaan sawit meminta izin ke satpam, kemudian satpam melaporkan ke manajer perusahaan dan disetujui, prosesnya tidak lama. Sementara itu, pendataan Regsosek di barak tak ada kendala dan para pekerja menyambut baik kedatangan petugas Regsosek, dibutuhkan waktu sekitar 20–25 menit untuk mendata. Kegiatan pada hari kedua cukup menantang. Satpam yang berbeda dengan hari pertama meminta pendata untuk menunggu di pos satpam dalam waktu yang relatif lama. PML membantu PPL melakukan pendataan, mengingat jumlah yang didata sebanyak 31 KK dengan waktu yang dibatasi dua hari.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Harapan PML terhadap kegiatan pendataan Regsosek adalah data Regsosek yang telah melalui pemeriksaan berjenjang, dapat menghasilkan data yang akurat dan benar. Setelah data diolah, ada forum pertemuan yang dihadiri ketua RT, kepala desa, PPL, PML, dan Koseka untuk mempertanggungjawabkan data Regsosek, terutama yang terkait dengan keluarga miskin dan sangat miskin. Data yang dikumpulkan PPL perlu diperiksa ulang, mengingat data yang dikumpulkan ada pertanggung-jawabannya.

G. *Life Story* Sebuah Keluarga Fokus Data

Salah salah masyarakat asli suku Dayak di Desa Pangkoh Hulu menceritakan kisah hidupnya sebagai keluarga petani yang berperan aktif dalam kegiatan FE. Petani itu adalah seorang laki-laki berusia 52 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA yang menjadi Ketua Gapoktan. Petani itu memiliki istri berpendidikan SD yang selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga membantu mempersiapkan makan untuk tenaga kerja di sawah. Keluarga ini memiliki dua orang anak, yang sulung sudah lulus dan saat ini telah bekerja di Puskesmas, sedangkan yang bungsu masih sekolah di SMP.

Keluarga ini memiliki lahan sawah pasang surut seluas 40 ha, produksi padi yang dihasilkan lebih untung bila dijual dalam bentuk beras daripada gabah kering panen (GKP), dari 20 ton GKP (harga Rp5.000,00/kg) dikonversi menjadi 13 ton beras (harga Rp9.000,00/kg). Ongkos angkut beras ke Palangkaraya Rp500,00/kg. Petani lokal suku Dayak meskipun sudah diajari menanam padi varietas unggul, tetapi sulit untuk menerapkannya, jiwa uletnya kurang dibandingkan petani trans, terlebih lagi bila harus menunggu giliran pengolahan lahan dengan traktor tangan, menjadi malas dan tidak bersemangat. Selain itu, tenaga kerja untuk tanam mengupah petani trans.

Gapoktan Hapakat Haduhup didirikan pada tahun 2007 di Desa Pangkoh Hulu, ketika ada program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), dengan bantuan dana sebesar Rp100 juta. Anggota Gapoktan yang aktif hanya lima kelompok tani, sedangkan yang tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

aktif tiga kelompok tani (termasuk diantaranya kelompok wanita tani). Arti kata Hapakat adalah kerja sama, sedangkan haduhup berarti saling menolong. Gapoktan yang terbentuk harapannya akan terjalin kerja sama antar anggotanya dan saling tolong menolong.

Program FE mulai dilaksanakan pada tahun 2020 pada area seluas 250 ha yang diikuti oleh lima kelompok tani. Teknologi yang diintroduksikan berupa pengolahan lahan dengan traktor tangan roda dua (TR-2), penggunaan benih padi unggul Inpari 42, pupuk Urea, NPK, kapur, herbisida, dan pupuk hayati. Bantuan pembelian minyak sebesar Rp200.000,00/ha. Pendampingan kegiatan FE dilakukan Babinsa dengan pengawasan langsung penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme tumbuhan (POPT). Saat musim hujan di bulan Oktober–Maret, produksi padi 3,5–4 ton/ha GKP. Saat musim kemarau di bulan April–September, produksi padi mencapai 4–5 ton/ha GKP. Sebelum program FE, petani menanam padi lokal dengan umur tanaman satu tahun, semai padi dilakukan selama dua bulan pada bulan November dan penanaman pada bulan Maret, dengan produksi padi sekitar 2–3 ton/ha.

Kesulitan yang dihadapi petani dalam mengikuti program FE adalah penggunaan traktor tangan dengan harga Rp30 juta. Ada sesama petani yang menakut-nakuti jika menggunakan traktor tangan menyebabkan kaki patah. Pemeliharaan padi unggul dinilai petani lebih sulit dibandingkan padi lokal. Namun, setelah melihat padi unggul yang ditanam petani trans produksinya tinggi, petani setempat (suku Dayak) mengikuti tanam padi unggul. Setelah dua kali menanam padi unggul petani setempat merasa lebih mudah, karena telah terbiasa. Produktivitas padi unggul yang lebih tinggi menjadi faktor pendorong, walaupun sebagian kecil lahan petani ditanami padi lokal untuk konsumsi karena masih belum dapat mengubah selera.

Kearifan lokal yang masih dipertahankan petani suku Dayak yang telah ikut program FE adalah pembuatan sesajen berupa ketan yang dimasak dengan gula merah, ketan putih, dan telur. Sesajen tersebut diletakkan di empat sudut sawah dengan cara berjalan berlawanan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

arah jam dengan membaca Bismillah tujuh kali, shalawat Nabi tujuh kali. Ritual tersebut dimaksudkan untuk memanggil raja tikus sambil mengatakan dalam bahasa Dayak, yang artinya, "saya sudah memberi makan, maka anak buahmu jangan mengganggu tanaman di sawah." Setelah memberikan sesajen selama tiga hari petani tidak pergi ke sawah. Sesajen tersebut diyakini petani suku Dayak mampu mengusir tikus.

Agama asli suku Dayak adalah Kaharingan, tetapi saat ini hampir sebagian besar telah memeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari adanya yasinan pada setiap hari Jumat yang dihadiri oleh semua warga. Kegiatan yasinan disertai dengan adanya ceramah yang disampaikan oleh ustaz, termasuk juga tata cara salat. Kegiatan yasinan juga didukung dengan iuran sebesar Rp10.000,00/KK. Uang yang terkumpul dari 50 KK sebesar Rp500.000,00 digunakan untuk memberikan insentif kepada ustaz sebesar Rp100.000,00 untuk keperluan konsumsi Rp400.000,00 termasuk pembelian air aqua 1,5 liter. Air yang sudah dibacakan doa bersama, digunakan untuk campuran pestisida untuk menyemprot tanaman. Kegiatan yasinan juga digunakan sebagai media penyampaian informasi jenis padi yang ditanam, waktu/ tanggal tanam, warga yang akan hajatan. Dalam hal ini, kegiatan yasinan juga bisa dibiayai dari yang punya hajat.

Terkait dengan kegiatan Regsosek, warga tidak mengalami masalah ataupun kesulitan dalam menjawab pertanyaan petugas. Permasalahan yang terjadi ialah adanya ketua RT yang sudah berusia 70 tahun, tidak tamat SD, tetapi Tim Sukses pemilihan kepala desa. Ketua RT meminta bantuan Ketua Gapoktan untuk memetakan warga yang tidak miskin dan miskin. Berdasarkan data, jumlah warga miskin hanya 4% dari keseluruhan 50 KK. Sebenarnya, peluang kerja di desa banyak, tetapi adanya berbagai bantuan mempengaruhi mental warga yang dipandang menjadi malas. Pendataan Regsosek saat ini dilakukan secara *door to door.* Berbeda dengan pendataan sebelumnya yang hanya dilakukan di rumah ketua RT, Regsosek mendatangkan petugas hingga ke rumah warga.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

H. Penutup: Sebuah Refleksi atas Pendataan Regsosek

Kegiatan pendataan Regsosek memiliki peran strategis dalam proses transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (Regsosek) seluruh penduduk Indonesia dan reformasi sistem perlindungan. Kegiatan pendataan Regsosek sarat akan nilai positif dan juga tantangan mendata yang dihadapi. Namun demikian, diantara nilai positif dan tantangan tersebut tumbuh juga harapan-harapan baru bahwa keberadaan data Regsosek untuk satu data Indonesia adalah sebuah kebutuhan utama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran rekomendasi yang dapat dilakukan untuk proses pendataan Regsosek di masa yang akan datang.

1. Optimalisasi publikasi kegiatan Regsosek melalui forum komunikasi cinta statistik untuk perangkat daerah/kecamatan/desa/masyarakat. BPS Kabupaten Pulang Pisau sudah mempublikasikan kegiatan Regsosek melalui rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa serta berbagai media sosial, seperti Instagram dan WhatsApp serta pelibatan Koseka dan ketua RT. Namun, penyebarluasan informasi ke pemerintah daerah dan masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu, BPS Pulang Pisau dapat mengembangkan forum komunikasi cinta statistik untuk perangkat daerah/ kecamatan/desa/masyarakat, seperti WhatsApp Grup (WAG) atau kegiatan pertemuan berkala baik secara formal maupun informal.
2. Pengembangan kompetensi mitra BPS melalui forum komunikasi mitra BPS. BPS Kabupaten Pulang Pisau sudah memiliki mitra BPS yang sudah berpengalaman pada kegiatan sensus penduduk sebelumnya. BPS melibatkan kembali mereka pada kegiatan Regsosek ini yang secara umum ditetapkan sebagai Koseka sehingga proses koordinasi, komunikasi dan pendampingan bagi PML dan PPL ketika melakukan pendataan dapat lebih mudah dan cepat, terutama ketika menemui kendala/hambatan di lapangan. Melalui kegiatan Regsosek ini, BPS Kabupaten Pulang Pisau juga mendapatkan lebih banyak mitra baru, yaitu Koseka, PML,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan PPL yang saat ini terlibat. Oleh karena itu, untuk menjaga mitra BPS tersebut, mereka selalu mendukung dan terlibat aktif membantu kegiatan-kegiatan sensus BPS selanjutnya maka BPS perlu melakukan kegiatan pengembangan kompetensi mitra BPS melalui forum komunikasi mitra BPS. Forum tersebut bisa menjadi wadah bagi Tim BPS untuk sharing pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tentang pentingnya data, statistik, dan kegiatan sensus bagi masyarakat hingga level desa.

3. Proses pendataan Regsosek berbasis nilai kearifan lokal team work dan Handep Hapakat. Penerapan strategi *team work* dan nilai Handep Hapakat terbukti efektif dalam mendukung proses pendataan Regsosek sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan nilai-nilai positif dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendataan baik BPS Kabupaten Pulang Pisau, petugas lapangan, perangkat kecamatan/desa, dan masyarakat.

Narasi emik "Mendata Indonesia Dari "Bumi Handep Hapakat" Kawasan Lumbung Pangan Nasional Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah" ini adalah sebuah potret nyata momentum, proses, dan perjuangan menghadirkan data yang terjadi pada salah satu desa di Indonesia dengan bentang alam dan kearifan lokal yang dimilikinya. Narasi emik ini tersusun melalui proses penelitian yang terbatas waktu, informan, dan objek pengamatan lapangan sehingga belum mampu merekam momentum, proses, dan perjuangan pendataan Regsosek secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Agon & Fimeir, L. (2020). *Prosesi malan-monograf kearifan lokal dayak Kalimantan Tengah*. CV Kanaka Media. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3110

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BPS RI. (2022). *Pendataan awal registrasi sosial ekonomi: Satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. BPS RI.

BPS Kabupaten Pulang Pisau. (2022). *Kabupaten Pulang Pisau dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Pulang Pisau.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2022). *Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2022*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. https://kalteng.bps.go.id/publication/2022/02/25/27023d5a5aa82394035a6efb/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2022.html

Google. (t.t.). [Lokasi Kabupaten Pulau Pisau]. Diakses pada 27 November, 2022, dari https://www.google.com/maps/search/peta+indonesia, diakses 27 November 2022

Hermanto, Sativa, M., Alihamsyah, T., Noor, M., Subiksa, I. G. M., Mulyani, A., Agustian, A., Syahyuti, Kartiwa, B., Subekti, N. A., Prabowo, A., Rahman, R., Adi, S. H., Sosiawan, H., Sasongko, Fitriana, V., Senoadji, T., & Elfitri. (2020). *Grand design pengembangan kawasan FE berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah*. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

Jasiah & Liadi, F. (2021). *Budaya handep hapakat dalam betana (malan/berladang) suku Dayak ngaju di Kabupaten Kapuas*. LP2M IAIN Palangka Raya Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54353/pp-no-51-tahun-1999

Purnomo, B. (2018). Aktualisasi nilai sosial kemasyarakatan "handep hapakat" dalam upacara kematian penganut Hindu Kaharingan. *Dharma Duta Jurnal Penerangan Agama Hindu*, *16*(2), 1–16.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. (1997). https://jdihn.go.id/files/4/1997uu016.pdf

Buku ini tidak diperjualbelikan.

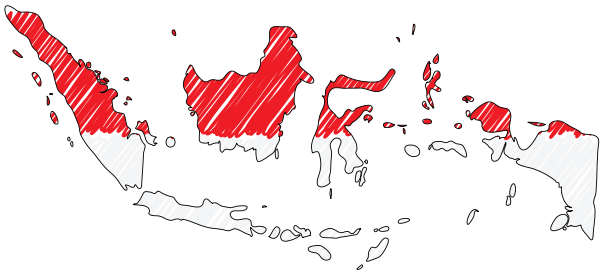

#4
Proses Registrasi Sosial Ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat

Eliana Sidipurwanty & Yumantoko

A. Mendata di antara Aliran Sungai

Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat adalah Mempawah. Kabupaten ini sebelumnya bernama Pontianak dan berubah menjadi Kabupaten Mempawah sejak tahun 2014. Di lokasi observasi ini, tim bertemu dengan berbagai etnis dominan, seperti Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Madura. Keragaman ini membuat kekayaan sosial, ekonomi, dan budaya di sana semakin beragam. Dari observasi singkat di sana terlihat bahwa mayoritas etnis Melayu dan Dayak dominan berprofesi sebagai nelayan dan petani. Etnis Tionghoa dengan kepiawaiannya dalam bidang perdagangan dan industri. Tidak ketinggalan etnis Jawa yang terlibat dalam perdagangan dan etnis Madura yang lebih banyak terlibat dalam sektor pertanian semuanya memberikan warna unik dalam kehidupan masyarakat Mempawah.

E. Sidipurwanty,* & Yumantoko
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: elia001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sidipurwanty, E., & Yumantoko. (2023). Proses registrasi sosial ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (93–126). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c706 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Regsosek merupakan kegiatan untuk mencatat kondisi sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Mempawah sendiri kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan wilayah setempat. Meskipun statistik menunjukkan bahwa Mempawah bukan kabupaten yang tertinggal dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, tetapi masih ada perbedaan data kemiskinan dari kementerian/lembaga terkait yang digunakan untuk bantuan sosial sehingga menyebabkan ketidakakuratan data yang sering kali tidak tepat sasaran ketika digunakan sebagai dasar pemberian bantuan. Presiden menginginkan adanya satu data yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan bantuan sosial agar pengentasan kemiskinan dapat tuntas pada tahun 2024. Oleh karena itu, Regsosek diharapkan dapat menghilangkan duplikasi data di kementerian/lembaga dan membangun satu basis data baru yang dapat digunakan bersama. Hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Mempawah dimana terdapat perbedaan data kesejahteraan antara desa dengan instansi tingkat kabupaten hingga pusat sehingga banyak desa di Mempawah kebingungan ketika bantuan masa pandemi.

Sumber: Google (t.t.)

Gambar 4.1 Posisi Kabupaten Mempawah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kalimantan Barat melaksanakan Regsosek di 12 kabupaten dan dua kota termasuk Kabupaten Mempawah. Menceritakan Regsosek di Kabupaten Mempawah sangat menarik karena kabupaten ini memiliki kekhasan geografis sebagai wilayah pesisir di Kalimantan yang selalu diidentikkan dengan muara-muara sungai besar, serta ekosistem pesisir yang kaya akan keragaman sosial budaya masyarakatnya. Jika dihubungkan dengan kekayaan sosial ekonomi budaya dalam konteks lokal akan menjadi pembahasan yang memiliki nilai kekhasan tersendiri. Selain itu, berdasarkan kekhususan daerah observasi merupakan salah satu kabupaten rawan miskin akibat perubahan lingkungan.

Namun, pelaksanaan Regsosek di lapangan tidak selalu berjalan lancar karena hambatan-hambatan yang menyertainya. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Regsosek di Kalimantan Barat dapat berasal dari faktor alam dan manusia. Faktor alam terkait dengan aspek geografis, meliputi jangkauan yang luas pada daerah-daerah, sungai-sungai yang terkenal besar, adanya pulau-pulau terluar, daerah pedalaman, daerah perkebunan, wilayah pesisir, dan wilayah rawa. Terkadang banjir karena pelaksanaan pada musim penghujan (15 Oktober sampai 14 November) sehingga menyulitkan petugas untuk mendata. Pada saat itu juga, ada masyarakat yang didata terkena musibah bahkan ada yang sampai mengungsi. Faktor manusia, meliputi masyarakat yang akan didata sulit ditemui, PPL yang datang ditolak atau tidak mau ditemui sama sekali karena sibuk, tuan rumah acuh atau tidak berada di rumah karena jam kerja. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak serta kerja sama yang baik dengan masyarakat setempat, petugas Regsosek dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan melaksanakan kegiatan pendataan dengan sukses.

Melalui buku ini pembaca akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses Regsosek berlangsung dan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Mempawah serta dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Tulisan ini memaparkan kegiatan Regsosek di Kabupaten Mempawah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

secara khusus dan Kalimantan Barat secara umum mulai dari kondisi lokasi observasi, proses bisnis Regsosek, dukungan para pihak, serta nilai positif yang diperoleh dari pendataan baik oleh petugas maupun masyarakat setempat.

Data dalam buku ini diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat Regsosek, seperti Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BPS Kabupaten Mempawah, staf di BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten Mempawah, petugas lapangan, kepala desa serta perangkatnya, dan masyarakat. Selain itu tulisan ini juga menggunakan data sekunder berupa data yang telah dikumpulkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten Mempawah. Selain itu dalam tulisan ini juga menampilkan beberapa gambar yang dapat mewakili proses Regsosek di Kabupaten Mempawah. Foto yang dipublikasikan sudah mendapatkan persetujuan dari pihak pihak terkait.

Banyak pihak telah membantu dalam penyusunan tulisan ini, antara lain BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten Mempawah yang telah memfasilitasi kebutuhan penulis selama

Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.2 Diskusi dengan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dilapangan. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kerja samanya semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

B. Bentang Alam Tersulit

Kondisi lingkungan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Apabila lingkungan dalam kondisi baik maka makhluk hidup di sekitarnya akan memperoleh manfaat yang beraneka ragam. Namun, ketika lingkungan rusak, kehidupan manusia menjadi terancam. Kajian pada bab ini menggambarkan kondisi alam Kalimantan Barat secara umum dan memberi contoh secara khusus sebuah desa di Mempawah yang penduduknya terdampak akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan kemudian menjadi ancaman (*threat*) nyata untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat berada di posisi rentan dengan adanya kerusakan lingkungan.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki kondisi geografis yang beragam. Wilayah Timur berbatasan dengan provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Wilayah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Wilayah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, dan wilayah Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia. Wilayah provinsi ini membentang sepanjang 600 km dari Utara ke Selatan dan 850 km dari Barat ke Timur. Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan dan lautan. Di darat terdapat kawasan hutan yang luasnya mencapai 8.389.600 ha atau 57,14 % dari luas provinsi, yaitu 14.680.790 ha. Potensi yang besar tersebut menjadi kesempatan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hutan sangat penting bagi ekosistem secara keseluruhan di suatu wilayah. Kerusakan akibat kebakaran hutan dan penebangan lahan menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat. Anugerah lain dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu keberadaan sungai dan danau. Sungai besar yang terkenal, antara lain Kapuas (1.086 km),

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Melawi (471 km), Pawan (197 km), Kedawangan (128 km), Jelai (135 km), Sekadau (117 km), Sambas (233 km), Landak (178 km). Transportasi pada zaman dahulu menjadikan sungai sebagai andalan akses mencapai daerah lain. Bentang alam lainya, yaitu danau. Danau yang terkenal ialah Sentarum dengan luas 117.500 hektar (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, t.t.).

Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dapat diamati dari komoditas yang dihasilkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Komoditas tersebut diantaranya kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, dan sebagainya. Berdasarkan data dari BPS, komoditas tersebut juga menyumbang PDB regional yang besar bagi perekonomian Kalbar. Usaha komoditas terdiri dari usaha besar dan individu. Usaha besar diartikan sebagai usaha yang dikelola oleh perusahaan atau memiliki skala usaha besar. Usaha besar umumnya mengelola komoditas kelapa sawit. Usaha perkebunan yang dikelola rakyat, antara lain kelapa sawit, kelapa, kopi kakao, dan karet.

Selanjutnya, sektor perikanan. Sektor ini memberi hasil yang besar dari perikanan tangkap dan budi daya. Usaha perikanan budi daya biasanya dalam bentuk tambak dan hanya dilakukan oleh pemodal menengah hingga besar. Sedangkan masyarakat secara umum banyak terlibat pada usaha perikanan tangkap sebagai nelayan. Hasil yang didapatkan dari berbagai macam komoditas menjadikan warga enggan untuk merantau. Hal ini sesuai dengan pengakuan perangkat desa di Desa Sungai Bakau Besar Laut yang warganya lebih banyak berusaha di daerahnya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Ketergantungan masyarakat ini harus menjadi perhatian agar mereka terus eksis dengan sumber daya alam disekitarnya dan kelestariannya terus terjaga. Kerusakan lingkungan terjadi akibat pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan kaidah akan merugikan masyarakat itu sendiri. Desa Sungai Bakau Besar Laut menjadi contoh bagaimana kondisi lingkungan berdampak kepada masyarakat.

Penduduk Desa Sungai Bakau Besar Laut banyak berprofesi sebagai nelayan dan petani. Para nelayan mencari ikan ke Laut Natuna yang berbatasan dengan desa. Kapal yang digunakan sebagian besar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

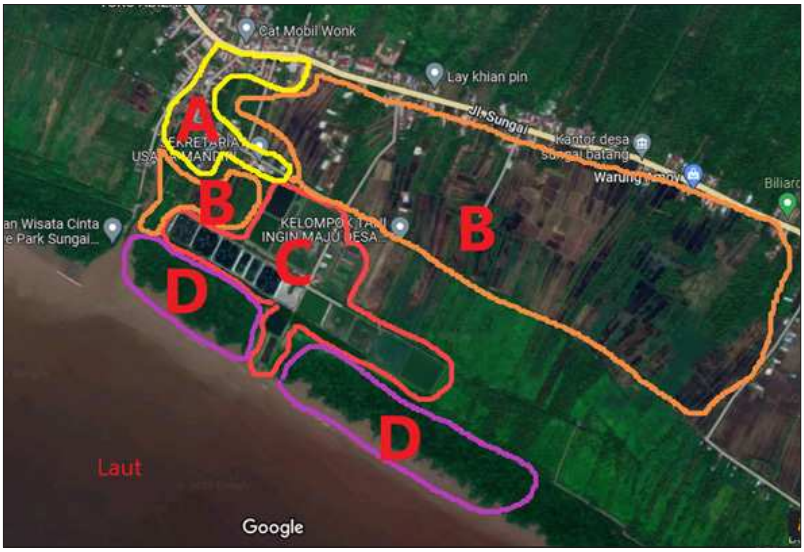

Keterangan: A: Permukiman, B: Lahan Pertanian, C: Tambak Ikan/Udang, D: Bakau
Sumber: Google (t.t.)

Gambar 4.3 Peta Desa Sungai Bakau Besar Laut

berukuran kecil dengan daya angkut maksimal tiga orang. Dengan kondisi tersebut, nelayan hanya mencari ikan di sekitar desa. Potret penduduk selanjutnya ialah penduduk yang mengolah lahan pertanian. Salah seorang perangkat desa mengatakan bahwa dahulu hasil panen dapat mencapai tujuh ton per hektar. Namun, saat ini mendapat dua ton sudah sangat disyukuri warga. Perubahan hasil panen sangat signifikan dan mempengaruhi pendapatan petani lebih dari setengahnya. Ada hal mengapa hasil lahan pertanian terutama padi bisa turun drastis. Perangkat Desa Sungai Bakau Besar Laut menjelaskan bahwa saat ini lahan pertanian sering terendam air pasang laut. Perangkat tersebut tidak menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Dahulu juga sering terjadi banjir tetapi dapat diperkirakan, yaitu ketika akhir atau awal tahun karena hujan. Namun, situasi saat ini berbeda dan tidak dapat diprediksi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Letak geografis yang bersebelahan dengan pantai merupakan berkah sekaligus ancaman. Lokasi ini dipenuhi hutan bakau, yaitu pada huruf D (lihat Gambar 4.3) yang telah lama ada. Seorang perangkat desa menceritakan bahwa dahulu hutan bakau memiliki vegetasi yang baik. Beliau menyaksikan sendiri pengurangan kualitas dan kuantitas hutan bakau tersebut. Upaya untuk memperbaiki kualitas bakau dilakukan hampir setiap tahun. Penanaman melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, penanaman sebagian besar gagal karena arus air kencang tidak dapat membuat bibit tanaman yang ditanam bertahan lama. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan inovasi penanaman bakau agar persentase keberhasilan tumbuh ketika penanaman besar.

Bersebelahan dengan tanaman bakau dibangun tambak yang luasnya hampir menyamai hutan mangrove itu sendiri (lihat Gambar 4.3). Meski pembangunan tambak dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan produk ikan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Terbukti dengan rendahnya jumlah pekerja lokal yang terlibat dalam kegiatan tersebut, bahkan kebanyakan dari mereka berasal dari Pulau Jawa. Tak hanya itu, ternyata lahan tambak tersebut berasal dari konversi lahan pertanian yang dibeli oleh seorang pengusaha asal Pontianak. Beberapa petani pun diperkirakan kehilangan mata pencahariannya karena tidak terpilih sebagai pekerja di usaha tambak tersebut.

Tambak di desa ini dibangun dengan cara menggali lahan hingga mencapai kedalaman dua hingga empat meter. Sisa galian ditimbun di sekitar kolam sehingga ketinggian tanah di sepanjang sisi kolam bertambah beberapa meter. Perubahan aliran air yang terjadi akibat pembangunan tambak dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Aliran air yang tadinya mengalir secara alami, kini terhambat dan dialihkan ke sekitar tambak termasuk lahan pertanian dan permukiman. Dampak yang muncul cukup signifikan, diantaranya rusaknya lahan pertanian di sekitar tambak serta risiko banjir yang mengancam permukiman sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tepat dan terukur untuk mengatasi dampak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.4 Tambak di Desa

yang dihasilkan oleh pembangunan tambak sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

Satu dusun yang berada tepat di depan kantor kepala desa yang dibatasi jalan raya Pontianak-Singkawang kini menjadi langganan banjir. Banjir sudah menjadi ancaman serius. Wilayah satu dusun yang berbatasan dengan laut terkena dampak buruk intrusi air laut. Salah seorang warga mengatakan bahwa kejadian ini intens dalam satu tahun. Saat ini kejadian banjir tidak dapat diprediksikan karena banjir juga berasal dari air laut. Adaptasi warga zaman dahulu adalah dengan meninggikan pondasi bangunan sehingga ketika memasuki akhir hingga awal tahun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Saat ini, banyak warga yang kesulitan untuk melakukan adaptasi. Masyarakat menggunakan mesin pompa untuk mengatasi masalah banjir dan membutuhkan banyak biaya operasional.

Lahan pertanian yang dulunya produktif kini tidak dapat ditanami padi secara maksimal karena terendam air laut dan ditumbuhi rerumputan liar. Meskipun begitu, tanaman kelapa masih dapat tumbuh dengan baik di lahan tersebut. Beberapa petani yang menggantungkan hidup dari usaha pertanian padi terpaksa pindah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ke daerah yang lebih jauh dari pantai atau mencari lahan pertanian di desa lain. Warga setempat juga menyewa lahan dari penduduk di desa tetangga untuk melanjutkan aktivitas pertanian mereka. Namun, keuntungan yang didapatkan harus disisihkan untuk biaya sewa lahan dan transportasi yang cukup tinggi. Selain itu, jika pemilik lahan sewaktu-waktu mengambil kembali tanahnya maka petani penggarap akan menghadapi kesulitan dalam mencari lahan lain. Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya kondisi bagi para petani di daerah yang terkena dampak intrusi air laut.

Tulisan di atas memberi pelajaran bahwa rusaknya lingkungan akan berdampak pada masyarakat. Rusaknya lingkungan karena masuknya air laut bisa jadi disebabkan karena rusaknya ekosistem bakau dan pembukaan tempat usaha tambak. Usaha tambak pada satu sisi menguntungkan secara ekonomi tetapi di sisi lain, daya dukung lahan menjadi tidak seimbang. Masyarakat akan mendapat kerugian banjir dan hilangnya sebagian lahan pertanian. Biaya yang dikeluarkan

Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.5 Seorang ibu rumah tangga mengeluhkan air laut masuk kerumah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

penduduk untuk mengatasi dampak buruk tersebut meningkat dan mengancam masyarakat menjadi rentan terhadap kemiskinan. Kekayaan keluarga yang seharusnya untuk mencukupi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya menjadi terfokus ke penanganan bencana. Kegiatan Regsosek menjadi penting dilakukan karena akan mendorong perubahan kesejahteraan melalui dukungan program pemerintah yang meringankan pengeluaran masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan akibat dampak kerusakan lingkungan. Regsosek menjadi basis data intervensi yang diharapkan mampu menjangkau secara tepat.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Mempawah, sebuah kabupaten di Kalimantan Barat sedang berupaya meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan data melalui Regsosek. Proses bisnis Regsosek menggambarkan strategi dalam pendataan yang lebih berkualitas. Proses tersebut sebagian besar merupakan turunan dari pusat terkait alur dan waktu pelaksanaan. Secara umum, proses bisnis Regsosek dibagi menjadi koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis, pengumpulan data, proses pengolahan data, forum konsultasi publik, dan penyerahan data. Dalam konteks Mempawah, penerapan Regsosek menjadi sangat penting guna mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjalankan kegiatan Regsosek, BPS membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di daerah setempat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada bulan September, BPS Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan unsur-unsur di daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi secara internal dan eksternal. Koordinasi internal melibatkan seluruh BPS di Kalimantan Barat yang ada di kabupaten dan kota. Sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pertemuan di tingkat provinsi untuk menarik dukungan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari instansi-instansi terkait. Tidak lama berselang, setiap kota dan kabupaten juga melaksanakan kegiatan serupa di wilayah masing-masing, termasuk di Mempawah dengan melaksanakan pertemuan dengan *stakeholder* pemerintahan daerah terkait, termasuk dengan Bupati Mempawah. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Regsosek memiliki pemahaman yang sama dan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi ini, BPS juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari kegiatan Regsosek. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memperkuat dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan kegiatan Regsosek dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi kebijakan pembangunan di daerah.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, BPS Mempawah memaparkan tujuan dan manfaat dari kegiatan Regsosek untuk memperkuat dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Diharapkan, dengan partisipasi seluruh pihak, kegiatan Regsosek dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi kebijakan pembangunan di daerah. Sebagai persiapan awal, BPS Mempawah telah melakukan pengumpulan data terkait Regsosek dengan matang melalui basis data satuan lingkungan setempat (SLS). SLS merupakan satuan terkecil dalam pendataan yang biasanya mencakup satu dusun untuk memudahkan pengelolaan data oleh petugas penanggung jawab. Selain itu, BPS Mempawah juga melakukan pengecekan terhadap peta yang akan digunakan dalam aplikasi Wilkerstat, yang menjadi penting sebagai dasar wilayah untuk fokus pengumpulan data.

Untuk mengumpulkan data, BPS Mempawah merekrut personel yang terdiri dari tenaga mitra BPS dan anggota baru yang memenuhi kriteria tertentu. Perekrutan baru dilakukan karena mitra BPS di Mempawah tidak mencukupi mengingat banyaknya penduduk yang akan didata. Anggaran Regsosek di Mempawah mencapai 2,8 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk upah PPL dan PML.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Petugas lapangan yang direkrut mencapai 430 orang dan 10 instruktur, ini menunjukkan keseriusan BPS Mempawah dalam mengumpulkan data terkait Regsosek.

Demi memastikan keakuratan data yang terkumpul, BPS Mempawah memberikan pelatihan kepada petugas terpilih agar dapat memahami pertanyaan secara mendalam dan melakukan pengumpulan data secara akurat. Pelatihan dilaksanakan di Pontianak selama dua hari. Pelaksanaan pelatihan tidak di Mempawah karena keterbatasan tempat untuk menampung banyaknya petugas sehingga harus dilaksanakan di Kota Pontianak yang banyak memiliki tempat yang memadai. Selama pelatihan, BPS Mempawah menekankan pentingnya sensitivitas terhadap kategori keluarga miskin dan tidak miskin. Namun menurut kepala BPS Mempawah, kategori tersebut masih menjadi perdebatan terutama jika diterapkan di daerah yang berbeda-beda. Materi lain yang diberikan, antara lain terkait organisasi lapangan, konsep keluarga dan penduduk, verifikasi keluarga, aplikasi Wilkerstat, tata cara wawancara, pengisian kuesioner, pendataan keluarga penduduk wilayah khusus, pemeriksaan, pengawasan lapangan, dan monitoring. Materi yang dipaparkan dalam setiap sosialisasi telah membekali petugas dengan baik.

Dalam proses perekrutan petugas lapangan, BPS Mempawah mempertimbangkan kepemilikan telepon pintar dengan sistem operasi Android. Hal ini karena terdapat aplikasi yang hanya dapat diakses melalui telepon pintar dengan sistem operasi Android untuk memasukkan data ke dalam *database* BPS. Ada cerita tentang seorang petugas di Kuala Secapah yang membeli *handphone* baru untuk menjadi petugas pencatat BPS, semangat tinggi para petugas dalam menjalankan tugas mereka patut diapresiasi. Dengan persiapan yang matang, pengumpulan data terkait Regsosek di Mempawah diharapkan dapat berjalan lancar dan akurat sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Tahapan persiapan pengumpulan data meliputi pengadaan lembar kuesioner yang sesuai dengan kebutuhan. BPS juga harus mempersiapkan logistik yang dibutuhkan dalam pengumpulan data,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

termasuk memastikan bahwa logistik memenuhi standar kualitas yang baik dan mencakup wilayah yang luas dan memadai untuk melakukan pengumpulan data secara efektif. Pada tahap pengumpulan data, pelaksanaannya di Mempawah mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pusat dan petugas di lapangan berkoordinasi dengan perangkat desa, seperti dusun, untuk mencocokkan data tentang warga yang miskin dan tidak, serta menanyakan lokasi keberadaan rumah atas nama tertentu untuk menghindari kesalahan pencatatan. Petugas pendata juga melakukan pencatatan dengan cara yang sopan dan ramah terhadap tuan rumah, seperti meminta izin terlebih dahulu sebelum memfoto kondisi rumah. Petugas juga mengumpulkan data dari tempat khusus, misalnya barak militer dan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tempat khusus lain yang dijangkau oleh petugas di Mempawah, yaitu ketika malam Regsosek dilaksanakan pada 29 Oktober 2022 bagi awak kapal pada kapal yang berbendera Indonesia dan tunawisma.

Setelah data terkumpul dari petugas di lapangan, data tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan akurasi. Jika ada kesalahan dalam pengumpulan data, petugas diminta untuk mengumpulkan data kembali. Jika terjadi masalah, PPL harus segera melaporkan kepada atasan mereka, yaitu PML. Di Mempawah, kecepatan pencatatan oleh PPL dipengaruhi oleh lokasi pencatatan. Untuk daerah perkotaan lebih sulit, pencatatan mungkin memakan waktu lebih lama. Namun, di daerah pedesaan, pencatatan dapat dilakukan lebih cepat. Di BPS Mempawah, seorang petugas BPS bertugas mencatat hingga maksimal 250 orang. Satu kali wawancara dengan responden memakan waktu 15 hingga 30 menit, tergantung pada pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang digunakan adalah baku yang telah ditetapkan oleh BPS pusat. Namun, ada beberapa pertanyaan yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal karena ada warga, terutama yang berusia tua, kurang memahami pertanyaan tersebut.

Tahap pengolahan data, forum konsultasi publik, dan pengambilan data dilakukan setelah data dikumpulkan. Untuk informasi terkait

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ketiga proses tersebut belum banyak diketahui karena waktu survei Tim BRIN sudah lewat. Namun, seorang pegawai BPS Mempawah mengatakan untuk input data dari hasil survei dilakukan oleh tenaga yang berbeda dari petugas pengumpulan data. Petugas pengumpulan data dapat mendaftarkan diri kembali untuk menjadi tenaga input data dan kesempatan diterima lebih besar. Proses selanjutnya, yaitu Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilakukan sebagai metode untuk memvalidasi data yang sudah ada. Satuan terkecil untuk konsultasi publik adalah SLS. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari masyarakat terkait data yang telah dikumpulkan dan diolah. Pelaksanaan kegiatan FKP dilakukan dengan cara membentuk diskusi terfokus dengan unsur para pihak berkepentingan, seperti camat, kepala desa, dan masyarakat yang dipandu oleh fasilitator yang merupakan PPL/PML.

Tahapan terakhir pelaksanaan Regsosek adalah finalisasi, yang meliputi penyerahan data yang dilaksanakan pada 2023. Pada tahap ini diserahkan hasil pengolahan data kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu instansi pemerintah, swasta, atau masyarakat umum. Beberapa hal yang menantang bagi pelaksanaan Regsosek ialah tenggat waktu yang dipandang sempit mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, menyebabkan persiapan yang kurang matang. Kepala BPS Mempawah pernah mengatakan bahwa pernah meloloskan petugas yang seharusnya tidak diterima. Ketika diadakan pelatihan selama dua hari, salah seorang peserta didapati sedang mengadakan pesta minuman keras di tempat tidur. Kejadian tersebut diketahui ketika pegawai hotel melakukan pembersihan tempat tidur. Setelah mendapat laporan dari pihak hotel, akhirnya peserta pelatihan tersebut dikeluarkan. Kejadian tersebut merupakan salah satu peristiwa yang menjadi pembelajaran bagi pelaksana kegiatan Regsosek. Dengan mengikuti proses bisnis Regsosek secara sistematis dan terintegrasi, diharapkan BPS Kabupaten Mempawah dapat menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Data ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di berbagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bidang, seperti pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan Mendata Regsosek

Pelaksanaan kegiatan Regsosek dilakukan dengan bertanya langsung ke setiap rumah tangga. Data yang terkumpul digunakan sebagai pengambil kebijakan terhadap program-program kesejahteraan sosial. Namun, untuk mendapatkan data yang valid dan detail itu tidak mudah. Cerita dari pihak yang terlibat memberi warna dalam sebuah pengumpulan data Regsosek. Proses pengumpulan data sangat dinamis dan perlu strategi untuk setiap tantangan.

Salah seorang pegawai BPS provinsi menceritakan suka duka dalam pengumpulan data lapangan. Petugas menyadari Regsosek sebagai tugas yang penting sebagai bagian untuk mendorong kemajuan negara. Dalam pelaksanaan Regsosek juga menghadapi tantangan, salah satu tantangan adalah penolakan dari warga. Meskipun jumlah penolakan warga lebih sedikit dari warga yang mau menerima, tetapi cukup menghambat petugas. Setiap wilayah memiliki karakter berbeda yang penanganannya juga berbeda. Jika dibedakan antara kota dan desa, pegawai BPS akan mengatakan bahwa pendataan di kota memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar jika dibanding di desa.

Kota yang masyarakatnya heterogen memiliki kecenderungan kesulitan melakukan pendataan. Penduduk kota memiliki kesibukan sehingga tidak mudah ditemui. Ada cerita dari pegawai BPS bahwa terdapat warga yang tinggal di perbatasan kota provinsi dan kabupaten sering menolak ketika ada pendataan. Penduduk kota Pontianak (KTP Pontianak) yang menetap di Kabupaten Kubu Raya banyak memilih tidak bersedia didata petugas dari kabupaten. Warga ini khawatir pendataan itu berdampak pada statusnya sebagai pemegang KTP Kota Pontianak. Menurut pegawai BPS, hal ini terjadi karena anggapan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahwa pendataan tersebut akan berdampak berkurangnya manfaat sebagai pemegang KTP Kota Pontianak.

Kejadian lain berasal dari seorang Koseka yang pernah mendapat laporan dari PPL di Jungkat karena warga menolak untuk diwawancara. PPL tersebut menceritakan bahwa ketika berkunjung sudah sesuai prosedur dengan mengucap salam kepada pemilik rumah, dan bahkan salam tersebut dijawab oleh pemilik rumah itu sendiri. Namun, pemilik rumah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan petugas. Petugas melaporkan kepada Koseka yang menjadi penanggung jawab di tingkat kecamatan untuk mengatasi hal itu. Kejadian ini menunjukkan pentingnya sosialisasi kepada warga untuk menghindari kecurigaan.

Petugas BPS Mempawah pernah mendapat penolakan pendataan dari ketua RT. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman terkait kegiatan Regsosek. Terkadang masyarakat curiga karena seringnya pendataan tetapi bantuan tidak kunjung datang. Selain itu, kepercayaan terhadap data yang terkumpul menjadi catatan penting bagi penyelenggara agar manajemen data dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga efektifitasnya bertambah baik. Banyak instansi mencari data ke desa-desa untuk tujuan tertentu. Warga merasa data yang sudah ada tidak dimanfaatkan secara maksimal. Petugas berusaha mengatasi berbagai kondisi lapangan. Ketika PPL mendapat kesulitan, PPL meminta bantuan PML. PML umumnya menghubungi perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk meminta dukungan. PML terkadang juga meminta bantuan kepada Koseka secara langsung untuk menyelesaikan masalah.

Tantangan dalam pendataan juga datang dari alam. Petugas melakukan pendataan dalam kondisi banjir dan menyeberang sungai untuk mengunjungi pulau tertentu. Petugas mencoba untuk menghadapi satu persatu tantangan agar tugas segera diselesaikan. Beberapa wilayah di Kalimantan Barat ketika sedang dilakukan pendataan Regsosek mengalami banjir. Banjir terkadang dapat berasal dari air hujan maupun pasang laut. Ada juga cerita dari petugas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: BPS Kalbar (2022)

Gambar 4.6 Tantangan Petugas dalam Mendata

dimana kapal yang gunakan untuk menuju lokasi pendataan terbalik ketika akan menuju ke wilayah tertentu.

Bagi petugas yang pertama kali terlibat, Regsosek memiliki makna mendalam karena memberi pengalaman berharga. Salah seorang PPL di Desa Kuala Secapah mengungkapkan bahwa ketika bergabung dengan Regsosek memperoleh pengalaman berharga terutama untuk belajar menghadapi banyak orang. Petugas mengungkapkan bahwa bertemu dengan orang baru memberi pelajaran dalam meningkatkan kapasitas, seperti kemampuan komunikasi. Ketika di lapangan banyak pelajaran yang dapat diambil untuk membangun karakter individu karena dilapangan akan berhadapan dengan banyak karakter berbeda. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar dengan kerelaan didata membutuhkan jam terbang yang tinggi.

Banyak laporan dari petugas lapangan yang kesulitan menghadapi masyarakat secara langsung. Beberapa warga sulit diajak bekerja sama dalam pendataan yang menyita waktu dan pikiran. Rasa lelah dan bingung kadang muncul ketika apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Warga bertanya kepada PPL dan PPL merasa bukan kewenangannya untuk menjawab. PPL tersebut sering

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mendapat pertanyaan seperti "mengapa sering mendata padahal sebelumnya ada pendataan, kemana data yang lama?", ungkap beliau. Namun, pengalaman ini menjadi pelajaran yang berharga dalam menghadapi masyarakat yang memiliki karakter berbeda-beda. Hal positif yang petugas dapat setelah bergabung dengan Tim BPS ialah petugas menjadi mengenal daerahnya. Petugas yang lahir di wilayah tersebut akan menjadi lebih memahami secara mendalam kondisi warga. PPL merasa lebih mengetahui warga yang mampu dan yang perlu dibantu. Proses pendataan juga dipandang mendorong petugas untuk mengenal banyak orang sekaligus mendekatkan saudara dan tetangga yang sudah lama tidak berjumpa.

Berdasarkan keterangan petugas, umumnya warga yang didata berharap mendapat bantuan sosial. Warga memang tidak tahu mekanisme penentuan pemberian bantuan, tetapi berharap mendapatkan informasi dari pemerintah. Petugas memberikan gambaran secara umum mengenai bantuan yang ada selama ini. Menurut petugas terkadang ada warga yang menutupi informasi kesejahteraannya. Namun, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kuala Secapah malah mengatakan sebaliknya bahwa ada keluarga yang menolak didata petugas karena dianggap tidak mampu. Keluarga tersebut justru tersinggung karena dianggap nanti kalau di data akan dicap sebagai orang tidak mampu dan otomatis menerima bantuan sosial.

Kepala desa mengatakan kesulitan karena mengurus warga yang jumlahnya sekitar sebelas ribu jiwa dengan permasalahannya masing-masing. Kepala desa mengungkapkan suka duka menjadi kepala desa yang terkadang lebih banyak dukanya. Saat bantuan sosial marak terutama ketika pandemi, kepala desa mengaku sangat tertekan dari dua sisi, yaitu dari masyarakat dan pemerintah secara struktural. Beliau mengungkapkan bahwa banyak warga yang seharusnya tidak dapat bantuan justru mendapat bantuan atau sebaliknya. Tekanan dari struktural, yaitu kepala desa harus segera menyalurkan bantuan. Menurut kepala desa, saat ini desa menjadi lembaga yang tekanannya besar karena program-program banyak dibebankan di tingkat desa.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kegiatan yang dahulu dilakukan di tingkat kecamatan saat ini dilakukan di tingkat desa. Pemerintah pusat menurut penuturan beliau bertindak dengan kewenangan yang besar kepada pemerintah desa dengan memberikan banyak penugasan yang intensitasnya semakin banyak. Menurut beliau, peran desa dapat ditingkatkan lebih besar karena informasi terkait kependudukan setempat berada di desa. Data yang digunakan lembaga pusat untuk berbagai kebijakan terutama kesejahteraan sosial merupakan data lama yang belum diperbarui. Perubahan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung cepat dalam hitungan tahun, tetapi hal tersebut tidak diikuti perubahan data di tingkat pusat secara cepat. Itulah harapan desa agar pendataan yang sekarang dilakukan dapat mengumpulkan informasi secara tepat.

E. Dukungan Kelembagaan

Pelaksana Regsosek merupakan kewenangan BPS. BPS menjadi *leading* dengan legitimasi berdasar aturan yang berlaku. Regsosek menciptakan hubungan kerja sama antar lembaga baik di level pusat, daerah, hingga desa. Peran masing-masing pihak pada tiap level memiliki tugas yang berbeda. Peran pemangku kepentingan pada level nasional berupa dukungan kebijakan dan anggaran sangat diperlukan. Peran pemangku kepentingan pada level di tingkat provinsi dan kabupaten ialah dukungan organisasi perangkat daerah dengan beragam kepentingan. Peran pemangku kepentingan pada sisi pelaksana adalah implementasi itu sendiri, yaitu penggalian data dari masyarakat secara langsung. Masyarakat juga memiliki peran dalam membantu menyukseskan kegiatan Regsosek.

Pengorganisasian mulai dari tingkat dasar/lokal hingga tingkat atas sudah diatur terpusat. PPL merupakan petugas di lapangan yang mengumpulkan data primer dari keluarga berdasarkan satuan lingkungan setempat (SLS). Daftar nama keluarga yang akan di wawancara biasanya berada dalam satu dusun. Peran kepala dusun membantu petugas di lapangan terkait daftar warga yang tinggal di wilayah tersebut. Kepala dusun mengetahui warga yang masih menetap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan ataupun berpindah. PPL kemudian berkoordinasi dengan kepala dusun untuk mengetahui tempat tinggal suatu keluarga. Terkadang PPL kesulitan dalam mencari warga yang sudah terdaftar karena tidak menguasai wilayah. Kejadian seperti ini banyak dialami di desa Sungai Bakau Besar Laut dan Kuala Secapah.

Ketika PPL mencari alamat suatu keluarga tetapi tidak kunjung ditemukan maka PPL mengajak kepala dusun untuk mencari rumah yang dimaksud. Hal yang dikuasai PPL ketika berada di lapangan setidaknya, yaitu berkomunikasi dengan sopan kepada warga, menerjemahkan wawancara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, mengoperasionalkan aplikasi Regsosek, menguasai materi pertanyaan, menguasai tujuan Regsosek, dan sebagainya. Ada beberapa pendapat tentang metode penyebaran PPL di beberapa desa di Mempawah. Pendapat pertama adalah PPL diturunkan di daerah asalnya. PPL yang berasal dari lokasi setempat dipandang lebih mengetahui wilayah sehingga pelaksanaan pendataan akan terhindar dari permasalahan, seperti PPL yang tidak tahu rumah warga dan lainnya. Pendapat lain, yaitu PPL ditempatkan pada lokasi yang bukan asalnya. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam pencatatan. Kepala BPS Mempawah pernah menemui kasus dimana penduduk dalam satu wilayah dicatat miskin agar kemudian mendapat bantuan sosial. Setelah ditelusuri, petugas pencatat ternyata memiliki hubungan darah dengan sebagian warga di daerah tersebut.

Partisipasi lembaga/perangkat desa dalam pelaksanaan pendataan tidaklah secara langsung. Kepala desa terlihat kurang memahami mengenai arti Regsosek. Kepala desa mengungkapkan bahwa saat sosialisasi beliau diwakilkan oleh perangkat desa lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sosialisasi Regsosek belum diketahui seluruh perangkat desa karena informasinya terbatas kepada perangkat desa yang ikut sosialisasi. Hal ini ironi jika mengutip Yuwono (2022) dimana pemutakhiran data Regsosek secara *bottom-up,* menempatkan desa sebagai ujung tombak pengelolaan data yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi justru partisipasi dari bawah yang masih perlu ditingkatkan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Jejaring dan distribusi informasi dan komunikasi antara petugas yang satu dengan lainnya, antara PPL dengan PML bahkan dengan Koseka terlihat lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Pengalaman petugas yang bersedia mengatasi masalah menjadi bukti bahwa berbagai kendala dapat dihadapi bersama. Yulianto (2022) menyatakan bahwa rangkaian koordinasi sosialisasi Regsosek dengan kementerian/lembaga terkait dilaksanakan sebagai berikut, (i) penerbitan surat edaran untuk mendukung pendataan dan pemanfaatan Regsosek oleh Pemda hingga desa/kelurahan; (ii) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi masyarakat desa melalui Pendamping Desa dan forum data di tingkat desa; (iii) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi UMKM dan koperasi di seluruh Indonesia; (iv) sosialisasi dan edukasi Regsosek melalui kader dan petugas kesehatan sampai tingkat desa/kelurahan; (v) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi seluruh jajaran TNI dan POLRI, termasuk proses pengamanan pendataan dan dukungan di lokasi sulit; dan (vi) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi klien di LKS dan panti daerah, melalui pekerja dan pendamping sosial.

Sosialisasi kepada masyarakat secara perorangan nampaknya masih belum optimal karena saat PPL mendatangi masyarakat masih banyak yang bertanya mengenai maksud dan tujuan pendataan. Pertanyaan masyarakat, "apalagi yang akan didata, kemarin sudah didata, mengapa di data lagi?". Banyak pula yang bertanya mengenai pendataan yang terhubung dengan bantuan. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui Regsosek dan khawatir akan mempengaruhi bantuan-bantuan yang selama ini telah diterima. Sosialisasi Regsosek sebenarnya sudah dilakukan melalui rapat koordinasi, media sosial, baliho, dan ketua RT, tetapi belum menyentuh masyarakat lokal. Saat ini, BPS membutuhkan dukungan dari banyak pihak mulai dari tingkat provinsi sampai satuan terkecil, seperti Rukun Tangga (RT). Namun, banyak dari lembaga tersebut tidak mengetahui kegiatan Regsosek. Kepala desa dan Ketua RT misalnya ada yang belum mendapat sosialisasi Regsosek. Kepala desa mengetahui Regsosek ketika ada petugas yang datang untuk mendata. Kejadian ini memperlihatkan sosialisasi Regsosek masih belum maksimal. Kesan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

awal masyarakat mungkin akan curiga sebelum petugas menerangkan maksud kedatangan petugas.

Keterlibatan kelembagaan informal dalam proses pendataan secara langsung kurang terlihat karena kegiatan yang telah dilakukan hanya oleh Pegawai BPS Kabupaten Mempawah dengan mitra kerjanya saja. Keterlibatan datang dari lembaga formal, seperti dari jajaran pemerintah daerah (Satpol PP dan Dinas Sosial) dan pihak kepolisian saat pelaksanaan pendataan malam Regsosek. Dukungan yang diharapkan pada pelaksanaan Regsosek sebenarnya adalah dukungan secara berjenjang mulai dari K/L terkait dan instansi vertikal, Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat, Kepala desa dan Lurah, dan Kepala Satuan Lingkungan Setempat (RT). PPL adalah ujung tombak proses Regsosek. PPL mendata dan memeriksa satu persatu kelengkapan hasil wawancara. Jika sudah dianggap cukup memenuhi yang dipersyaratkan, hasil wawancara diserahkan ke PML. PML membimbing PPL saat ada permasalahan di lapangan. PML juga sebagai penghubung BPS dengan pemerintah desa, misalnya sosialisasi kepada perangkat desa. PML juga harus memperkenalkan petugas PPL kepada perangkat desa.

Model pendataan Regsosek berbeda dengan model pendataan BPS sebelumnya. Salah satu perbedaan, yaitu penggunaan aplikasi telepon pintar. PPL dipersyaratkan memiliki ponsel Android dengan spesifikasi tertentu misalnya RAM minimal 4 GB. Perangkat ini berguna dalam menjalankan aplikasi *geo-tagging* untuk mencatat lokasi keberadaan rumah. Keuntungan penggunaan aplikasi untuk mengetahui posisi dan foto rumah secara jelas. Kejelasan data akan sangat membantu dalam pemberian bantuan ataupun kebijakan pemerintah. Masalah yang dialami petugas ialah sinyal internet yang tidak stabil sehingga membutuhkan waktu lebih dalam pendataan. Kepala BPS Provinsi menginginkan agar data yang terkumpul di Regsosek dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh berbagai pihak. Kekurangan dan kelebihan program yang dilakukan pemerintah perlu dievaluasi dengan memanfaatkan data Regsosek. Harapannya hasil pendataan Regsosek dapat digunakan optimal oleh para pemangku

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kepentingan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kegiatan pendataan selanjutnya.

F. Cerita dari Pendata

Petugas pelaksana pendataan Regsosek terdiri dari Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). PPL mendapatkan tugas pendataan maksimal sebanyak 250 kepala keluarga, PML membawahi empat sampai tujuh PPL (maksimal 7 PPL) dan Koseka membawahi delapan PML bahkan hingga sembilan PML agar dapat mencakup satu kecamatan.

Tugas PPL adalah melakukan pendataan keluarga. Tugas PML ialah melakukan pengawasan pendataan dan pemeriksaan dokumen dan tugas Koseka memantau jalannya pendataan dan membantu memberikan solusi jika ada permasalahan. PPL di Kabupaten Pontianak mendata 77.190 kepala keluarga yang didukung oleh 311 PPL, 80 PML, dan 12 Koseka (Mariani, 2022). PML dan PPL direkrut melalui seleksi sebanyak tiga tahap, yang meliputi seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara. Kemudian, Koseka sebagai pegawai yang ditunjuk oleh Kepala BPS Kabupaten Mempawah. Ada salah satu PPL berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1), berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa dia berasal dari keluarga yang mampu. PPL tersebut adalah perempuan yang belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya. Keikutsertaan dalam pendataan Regsosek berawal dari info Instagram Kantor BPS Kabupaten Mempawah yang menyatakan adanya rekrutmen PPL untuk Regsosek.

Pendaftaran dilaksanakan secara *online*, yang lulus diumumkan juga di Instagram BPS, kemudian diumumkan untuk jadwal wawancara. Pendaftar yang lulus tes kemudian mengikuti pelatihan selama tiga hari. Setelah pelatihan, petugas mengambil berkas yang terkait untuk melaksanakan pendataan Regsosek ke lapangan. Salah satu responden (PML) bercerita bahwa pekerjaannya selain

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagai petugas pendata ialah operator di desa dan berwiraswasta. Pendidikannya SMK Otomotif berusia 42 tahun berjenis kelamin laki-laki, sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak. PML tersebut merupakan orang desa setempat, penduduk di wilayah desa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan Regsosek relatif lancar karena banyak responden yang mengenalnya.

Pendataan yang dilakukan melalui wawancara oleh PPL berjalan lancar dan PPL dapat menerangkan dengan baik setiap pertanyaan dalam kuesioner yang kurang dipahami responden. Wawancara dilakukan oleh PPL dengan sopan, terkhusus saat menanyakan hal yang bersifat pribadi dan sensitif didahului dengan kata maaf. Suasana wawancara terlihat akrab dan santai sambil bercanda, terutama pada saat pertanyaan-pertanyaan terakhir. Namun, kadang-kadang responden terlihat serius saat menjawab pertanyaan-pertanyaan. PPL berpakaian rapi dan sopan memulai wawancara dengan menanyakan *fotocopy* kartu keluarga dan ada yang kemudian memintanya. Setelah pengisian kuesioner selesai PPL meminta izin untuk mengambil gambar foto rumah responden bagian depan.

Berdasarkan pengalaman dalam pendataan Regsosek, banyak pengalaman dan pengetahuan yang didapat oleh petugas. Petugas menjadi tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya dan menjadi lebih simpati kepada masyarakat. PPL baru menyadari ternyata masih terdapat warga yang miskin di lingkungannya. PPL menyatakan bahwa pertanyaan dalam kuesioner tidak semua mudah dipahami oleh responden. Pada pertanyaan tertentu harus diterangkan dengan bahasa lokal agar mudah dimengerti oleh responden. Responden dengan tingkat pendidikannya rendah harus dijelaskan dengan baik maksud pertanyaan-pertanyaan yang berimplikasi pada waktu.

Pelaksana Regsosek memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab selama Regsosek. PPL pun memahami tugasnya sebagai pendata lapangan yang menghadapi berbagai situasi sosial. PML di lain sisi turut membantu PPL dengan berkomunikasi dengan kepala desa sebagai bentuk pemberitahuan dan meminta izin untuk menelusuri

Buku ini tidak diperjualbelikan.

desa. PML mengampu empat PPL dan juga terlibat untuk memeriksa dan menyusun kode data. Selanjutnya, Koseka sebagai koordinator kecamatan yang membawahi delapan PML bertugas membangun komunikasi dengan pemerintah setempat, salah satunya kantor kecamatan. Koseka berkunjung untuk memberikan informasi dan meminta izin terkait Regsosek. Koseka kemudian bertugas mengawasi pelaksanaan lapangan, kunjungan ulang, melihat legalitas data, serta melakukan komunikasi kepada PML dan PPL.

Petugas mengemukakan bahwa responden mengungkapkan fakta-fakta lapangan terkait warga penerima bantuan. Salah satu keluhan warga terkait dengan bantuan sosial yang tidak pernah diterima warga. Sementara, tetangga warga yang dianggap berkecukupan justru mendapatkan bantuan. Warga akan menyalahkan ketua RT karena bantuan tidak tepat sasaran. Kejadian pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran tidak menyurutkan warga untuk tetap berharap adanya bantuan selanjutnya. Warga berharap melalui Regsosek ini, bantuan ataupun program pemerintah akan lebih tepat sasaran.

Petugas pendata berupaya menjelaskan maksud dan tujuan Regsosek agar tidak terjadi salah paham. Penjelasan petugas juga menentukan kesediaan warga untuk menjawab pertanyaan. Tantangan selanjutnya ialah adanya warga yang sulit ditemui. Responden umumnya bekerja pada pagi hingga sore hari dan saat ditemui malam hari, mengatakan cukup lelah untuk menjawab pertanyaan petugas. Tantangan geografis juga menjadi hambatan bagi petugas pendata. Petugas perlu menggunakan transportasi air (*speedboat*) selama satu jam dengan cuaca yang kurang bersahabat. Petugas pendata pernah dikira sebagai sales yang menawarkan barang. Kelengkapan tanda pengenal sudah cukup, tetapi belum terlihat bagi warga. Adanya rompi khusus sebagai pengenal seperti sensus sebelumnya akan membantu mempermudah membangun pemahaman warga. Petugas akan lebih mudah dikenali dengan atribut khusus sebagai pendata.

Pendata berharap adanya seragam (PDH) atau topi sebagai pengenal/identitas sebagai pendata Regsosek/petugas Regsosek. *Name tag* yang ada saat ini sebaiknya lebih ditingkatkan kualitasnya agar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mudah dikenal dan tidak mudah rusak untuk pelaksanaan selama satu bulan. Petugas juga mengutarakan bahwa atribut pengenal dapat pula berupa topi, kaos, atau rompi (atribut lengkap) agar lebih dikenal oleh masyarakat dan agar masyarakat yakin terhadap petugas.

G. Cerita dari Keluarga Fokus Data

Regsosek bagi keluarga yang kurang mampu merupakan harapan agar keberadaan keluarga miskin tercatat dalam dokumen kebijakan pemerintah dan program peningkatan kesejahteraan sosial. Pendataan warga untuk kepentingan program pemerintah memang sudah sering dilakukan oleh berbagai instansi yang berbeda. Namun, dinamika di lapangan masih melewatkan warga sebagai penerima manfaat. Ketika ada keluarga miskin yang keberadaannya tidak terekam dalam data induk kesejahteraan masyarakat maka hak-haknya sebagai pihak yang berhak menerima jaminan dari pemerintah menjadi terabaikan. Sebaliknya, apabila ada suatu keluarga yang mendapatkan bagian yang bukan haknya serupa dengan ketidakadilan. Regsosek patut diapresiasi sebagai bentuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat prasejahtera. Ketepatan informasi dalam pencatatan dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat rentan. Data yang valid dan sesuai realitas lapangan merupakan syarat utama dalam proses pendataan. Beberapa keluarga di desa ini sebelumnya telah menerima bantuan sosial dan menyadari pentingnya perhatian pemerintah daerah.

Salah satu responden, yaitu Ibu Umi tinggal di Desa Sejegi, Mempawah Timur. Ketika berada di halaman rumah dan berniat untuk wawancara, petugas mengucap salam kepada pemilik dan dipersilakan masuk. Kemudian, petugas duduk di lantai bertikar. Ibu Umi memiliki seorang anak berumur sekitar tiga tahun. Suami beliau merupakan pekerja yang kembali pada sore hari sehingga untuk urusan Regsosek Ibu Umi bersedia untuk diwawancara. Rumah Ibu Umi terlihat baru dibangun dengan cat tembok berwarna abu-abu. Ruang tamu beliau juga nampaknya baru dipasang keramik. Sementara, ruang keluarga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.7 Suasana Pendataan

dan dapur masih menggunakan alas dari plastik. Tumpukan keramik terlihat di sudut belakang.

Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh PPL diantaranya terkait kepemilikan benda berharga. PPL menanyakan, "Apakah ibu memiliki AC?" Ibu pemilik rumah menyatakan tidak punya. Kemudian, saat pertanyaan kepemilikan kartu jaminan kesehatan, Ibu Umi menjawab

Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.8 Suasana Pendataan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memiliki kartu BPJS. Bu Umi menyatakan jumlah pengeluarannya dalam satu bulan, yaitu sekitar satu juta rupiah. Setelah melakukan wawancara, PPL melakukan *tagging* dan mengambil gambar (foto) rumah tersebut.

Selanjutnya, rumah yang didata petugas berada di pinggir kebun sawit. Dinding dan lantai rumah terbuat dari kayu (lihat Gambar 4.8). Atap rumah terbuat dari seng. Satu buah motor *sport* dan dua motor jenis bebek terlihat di dalam rumah. Halaman rumah yang berupa tanah terlihat bersih dari sampah. Pemilik rumah dan kebanyakan penduduk setempat menampung air hujan untuk kebutuhan makan dan minum. Menurut cerita penduduk lokal, mengonsumsi air hujan tanpa pengolahan yang baik dapat menyebabkan kesehatan gigi terganggu. Keluarga yang mampu dapat membeli air olahan tetapi tidak seluruh keluarga dapat mengonsumsi air minum yang dijual di pasaran.

Rumah tersebut berada disamping kebun sawit yang luasnya sekitar tiga hektar. Kebun sawit yang dikelola sudah berusia sekitar lima belas tahun dan pohonnya sudah tinggi. Keluarga ini mengelola kebun sawit yang letaknya agak jauh dari rumah seluas tiga hektar. Total luas kebun sawit yang dikelola sekitar enam hektar. Pemilik rumah bernama Bapak Zainudin bersama istri bersedia menerima petugas lapangan dengan ramah. Bapak Zainudin mengemukakan bahwa beliau belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, seperti kartu pra kerja dan sebagainya. Beliau hanya menerima bantuan BPJS Kesehatan. Rumah dan tanah yang ditinggali merupakan kepunyaan pemilik kebun kelapa sawit yang mengamanahkan kepada Bapak Zainudin untuk menjaga lahan. Beliau pergi ke kebun untuk membersihkan rumput, memangkas daun, dan memanen ketika buah sudah mulai layak panen. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas berhasil dijawab dengan merespon secara cepat. Pertanyaan mengenai pengeluaran misalnya, beliau menjawab cepat, yakni empat juta rupiah untuk satu bulan. Beliau juga menerangkan bahwa istri beliau turut berjualan gorengan untuk menambah pendapatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Selanjutnya, responden bernama Bapak Sulaiman di Desa Pasir, seorang renta yang tinggal sendiri di rumah kecil ukuran sekitar 30m^2. Usianya mencapai 80 tahun. Rumah beliau berada di lokasi yang cukup jauh dari rumah-rumah tetangganya. Bapak Sulaiman sedang duduk-duduk diteras rumah saat petugas menghampiri. Kemampuan fisiknya sudah sangat lemah, bahkan untuk berjalan saja beliau kesulitan. Toilet beliau juga tidak dapat digunakan. Beliau tinggal sendiri di rumahnya karena anak beliau tinggal terpisah. Anak beliau membantu dalam pembayaran listrik, pembelian gas, dan makanan. Rumah Bapak Sulaiman dikelilingi oleh pekarangan yang rumputnya sudah mulai tumbuh liar. Suasana rumahnya gelap karena lampu penerangan tidak memadai, bahkan lampu dapurnya sudah lama mati. Tetangga beliau banyak yang ingin membantu, tetapi beliau terkadang menolak. Beliau pernah mengenyam sekolah SR (Sekolah Rakyat) di waktu mudanya. Petugas menanyakan KTP beliau dan yang ditunjukkan beliau adalah KTP yang diterbitkan tahun 2000 (KTP model lama). Beliau sebetulnya sudah sulit diajak berkomunikasi dengan baik karena pendengaran mulai berkurang. Ketika ada orang yang ingin mengajak berbicara harus dengan volume suara yang keras. Bapak Sulaiman menjadi bagian prioritas yang dianggap tidak mampu. Petugas kemudian memberi tanda lokasi dan mengambil gambar rumah untuk dimasukan ke *database*.

Cerita dari Ibu Umi, Bapak Zainudin, dan Bapak Sulaiman memberi gambaran pentingnya proses pendataan Regsosek. Ada beberapa yang menjadi perhatian dalam pendataan tersebut, yaitu terkait kedalaman untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat. Validitas data yang diperoleh akan mengungkap kondisi yang sebenarnya. Ketika data yang diperoleh valid dan sesuai fakta yang sesungguhnya maka warga yang kaya akan terdata sebagai orang mampu, dan warga yang miskin akan terdata sebagai kategori miskin. Oleh karenanya, proses menggali data dari lapangan adalah bagian penting dalam Regsosek. Beberapa responden menjawab pertanyaan petugas dengan cepat sehingga perlu diklarifikasi kembali data yang didapatkan oleh PPL. Saat petugas menanyakan kondisi kesehatan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bapak Zainudin mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga beliau sehat-sehat. Namun, ketika ditelusuri lebih ternyata istri beliau pernah menderita penyakit asma. Berkaitan dengan pengeluaran, kepala keluarga menjawab sekitar empat juta, tetapi tidak ditanyakan pendapatan seluruh anggota kepala keluarga termasuk istri beliau yang berdagang. Petugas pendata diharapkan mengumpulkan informasi sedetail mungkin.

Dalam menggali data, peran PPL sangat penting. PPL dituntut untuk kreatif dalam mendapatkan data dari bermacam karakter keluarga. Keragaman latar belakang keluarga yang didata menjadi tantangan bagi petugas lapangan. Pendekatan yang tepat dapat mempercepat penggalian data dalam Regsosek. PPL menceritakan ada salah satu keluarga yang kesulitan dalam memahami pertanyaan dari kuesioner.

> "Itu kan kadang ada pertanyaan apa punya *septic tank*, saya harus jelaskan apa itu *septic tank*, terus saya menjelaskan gorong-gorong. Bahasa sini gorong-gorong atau pakai tempayan dikubur itu sama dengan tempat MCK. Kadang saya menjelaskan *septic tank* itu apa. Terus NPWP terkadang mereka tidak tahu itu. Kita juga harus pandai menyederhanakan kata-kata, agar mudah ditangkap." (Wawancara PPL Desa Pasir, 4 November 2022)

Ada juga cerita dari PPL yang ditemui di Desa Kuala Secapah dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan kekeluargaan.

> "Ketika mengucapkan salam dan dipersilahkan duduk kemudian menjelaskan tentang maksud kedatangan. Namun pemilik rumah berbisik-bisik dengan keluarganya menggunakan bahasa Madura yang intinya penuh kecurigaan pada kita sebagai petugas dan saya khawatir tidak diterima. Saya paham bisik-bisik itu karena saya juga memiliki darah Madura dari garis Ibu. Kemudian saya menggunakan bahasa Madura. Mendengar saya berbahasa Madura, tuan rumah kemudian malah curhat-curhat pada saya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dengan begitu informasi mudah didapat." (Wawancara PPL, 3 November 2022)

Penggunaan unsur-unsur lokal dalam pencarian data memiliki keefektifan disamping dengan cara-cara biasa. Hal ini perlu ditekankan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kebenaran informasi yang diperoleh dalam mendata menentukan efektivitas penggunaan data dalam berbagai kebijakan dikemudian hari.

H. Penutup

Proses Regsosek memiliki makna bagi seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga lembaga pemerintah. BPS mengerahkan berbagai sumber daya untuk mendukung Regsosek di daerah. Hambatan dan kendala dapat diatasi dan menunjukkan bagaimana para pihak turut berkontribusi dalam makna pengabdian untuk negeri. Pelaksana pendataan menekankan pentingnya pemanfaatan data untuk merangkul seluruh masyarakat terkhusus masyarakat yang masih ada dalam kategori prasejahtera. Regsosek di Kabupaten Mempawah juga telah menunjukkan penggunaan teknologi terkini dalam proses pencatatan. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa lembaga negara kaku dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain harus terus berinvestasi dalam inisiatif serupa, serta mendukung upaya untuk meningkatkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih berkelanjutan, khususnya di Mempawah. Sangat penting untuk memastikan data yang sudah terkumpul agar dapat diolah sesuai kebutuhan masyarakat di Mempawah sehingga nantinya akan menghasilkan data yang mendekati keadaan asli masyarakat setempat. Selanjutnya, lembaga terkait perlu berkoordinasi agar data Regsosek membantu dalam program yang khusus di Mempawah.

Regsosek menjadi harapan untuk dimulainya berbagai perbaikan program dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan Regsosek dipandang akan lebih baik apabila tersedia lokasi waktu yang lebih. Tantangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang dihadapi petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian untuk kegiatan pendataan selanjutnya. Selain itu, penghargaan pada kondisi yang beragam dari masyarakat membawa proses regososek semakin berjalan baik. Pengalaman pendataan Regsosek di Kalimantan Barat merupakan salah satu potret yang menggambarkan situasi masyarakat yang hidup jauh dari pusat pertumbuhan. Isu kebutuhan pangan, sanitasi, air minum layak, ketersediaan pekerjaan, dan lingkungan yang sehat patut menjadi perhatian pemerintah selain isu pemberian bantuan. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama berkelanjutan dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, serta integrasi data Regsosek BPS ke dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih luas di tingkat daerah dan nasional.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2022, September). *Penjelasan umum pendataan awal registrasi sosial ekonomi* [Presentasi]. Pelatihan Regsosek, Pontianak.

Google. (t.t.). [Lokasi Kabupaten Mempawah]. Diakses pada 27 November, 2022, dari https://goo.gl/maps/ZeiDEhwhar3Ap8nx6

Google. (t.t.) [Lokasi Desa Sungai Bakau Besar Laut]. Diakses pada 30 Nvember, 2022, dari https://www.google.com/maps/placeSei+Bakau+Besar+Laut,+Sungai+Pinyuh,+Mempawah+Regency,+West+Kalimantan

Hartono, A. (2022, 5 September). *Kolaborasi bersama untuk registrasi sosial ekonomi 2022* [Presentasi]. Rateknas Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022, Bekasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (t.t.). Gambaran umum aspek geografis Kalimantan Barat. Diakses pada 30 November, 2022, dari https://kalbarprov.go.id/page/geografis

Mariani, S. (2022). *Pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dalam pembangunan desa* [Presentasi]. Bahan Paparan Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Yulianto, M. W. (2022). *Pendataan awal registrasi sosial ekonomi: Satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kolaborasi bersama untuk registrasi sosial ekonomi 2022* [Presentasi]. Pertemuan Rakorda BPS Kabupaten Mempawah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mempawah Mempawah, 20 September 2022.

Yuwono, M. (2022, 14 September). Pendataan awal registrasi sosial ekonomi: Satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat [presentasi makalah]. Webinar Nasional Sosialisasi Registrasi Sosial Ekonomi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

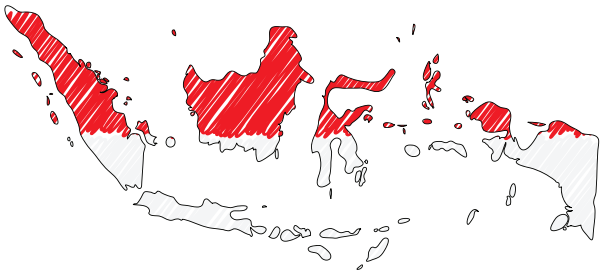

#5

Menelisik Simpang Regsosek di Kabupaten Sampang: Refleksi Kualitatif

Nyi R Irmayani & Pratiwi

A. Mencatat untuk Membangun Negeri

"Selamat datang Mbak di Kabupaten Sampang, kira-kira ini pertimbangannya apa, mengapa Kabupaten Sampang dijadikan salah satu lokus yang mewakili Provinsi Jawa Timur?", demikian ungkapan salah satu perangkat BPS menyambut Tim Peneliti. Proses pengumpulan data berlanjut pada sejumlah permasalahan pembangunan di Kabupaten Sampang. Berdasarkan data pada dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019–2024, Kabupaten Sampang termasuk kabupaten dengan rasio kemiskinan tertinggi, yakni 22,78% (Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2020). Selain persoalan kemiskinan, Kabupaten Sampang juga menghadapi persoalan malnutrisi dan rendahnya partisipasi sekolah.

N. R. Irmayanti,* & Pratiwi
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nyir001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Irmayanti, N. R., & Pratiwi. (2023). Menelisik simpang regsosek di kabupaten Sampang: refleksi kualitatif. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (127–166). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c707 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keberadaan data empiris mengenai kondisi sosial ekonomi di suatu daerah berguna bagi dasar-dasar penyusunan kebijakan di berbagai bidang, salah satunya sosial dan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tantangan sosial dan ekonomi terberat, pemilihan Kabupaten Sampang sebagai lokus inti dari pendataan sosial dan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Pendataan tersebut mencakup keluarga yang tinggal di wilayah pemukiman atau perumahan, keluarga yang ada di kawasan elite dan apartemen, serta lingkungan panti. Kemudian, keluarga yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), suku terasing, dan barak militer. Lokasi pendataan di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang merupakan pemukiman masyarakat nelayan dan petani, sebagian lagi adalah pemukiman karyawan serta pedagang.

Pada pendataan tersebut, setiap keluarga diwawancarai dengan menggunakan moda *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI) atau lebih dikenal dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner cetak. Selain itu, petugas akan menandai koordinat lokasi pada setiap bangunan tempat tinggal. Petugas juga melakukan pengambilan foto bangunan tempat tinggal khusus untuk keluarga kurang sejahtera sesuai pengakuan ketua atau pengurus lingkungan setempat. Pendataan Regsosek mengumpulkan sejumlah variabel, yang meliputi informasi terkait kondisi sosio ekonomi, demografis, kondisi perumahan, sanitasi air bersih, kepemilikan aset, serta kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus. Selanjutnya, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi terkait kondisi ekonomi lainnya.

B. Kehidupan yang Bergantung pada Kebaikan Alam

Dalam perjalanan menuju Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, hutan-hutan kecil tampak rimbun, kemudian diikuti hutan mangrove, dan juga pantai. Transportasi publik yang dapat diandalkan dari desa menuju pusat kota maupun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kota Surabaya hanya bus antar kota yang tidak menentu waktunya atau sewa mobil. Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong di Kabupaten Sampang merupakan salah satu desa yang berada di Pulau Madura dimana mayoritas penduduknya tinggal di wilayah pesisir. Setiap sore, terlihat hiruk pikuk para perempuan yang menggerakan perekonomian keluarga dengan berjualan sehingga kondisi jalan lebih ramai pada sore hari. Meski demikian, pendapatan mereka tidak menentu.

Kondisi alam yang tidak produktif secara langsung berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih tergantung pada alam, yaitu perikanan. Menurut keterangan PJ Kades Dharma Tanjung.

> "Sebanyak 60% mata pencaharian penduduk di desa ini adalah nelayan dan buruh nelayan, sisanya petani, buruh tani, dan pedagang. Walaupun ada juga yang bekerja di pertanian dan peternakan, tapi perikanan laut memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat." (Wawancara PJ Kader Dharma Tanjung, 1 November 2022)

Secara geografis, Kecamatan Camplong menjadi salah satu dari titik-titik kemiskinan di Kabupaten Sampang. Selain bergantung pada hasil laut, penduduk Desa Dharma Tanjung di sebelah Utara desa

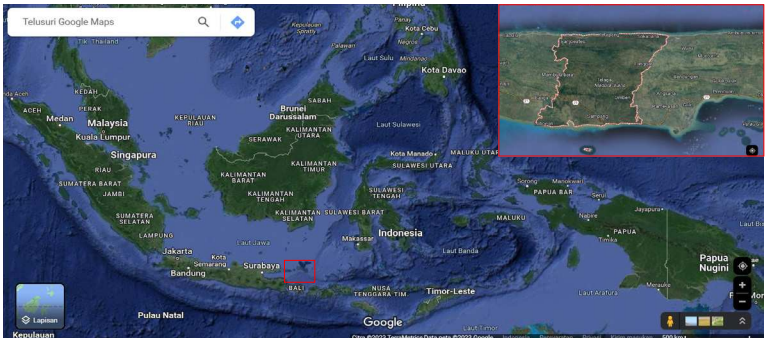

Sumber: Google (t.t.)

Gambar 5.1 Peta Kabupaten Sampang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 5.2 Aktivitas sore penduduk nelayan Desa Dharma Tanjung yang berjualan ikan.

bercocok tanam jagung, tembakau, cabai, dan jenis sayuran lainnya dengan sistem pertanian lahan kering.

Sejarah Desa Dharma Tanjung tidak terlepas dari sejarah masyarakat Tanjung di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Desa ini berdiri sejak 1922. Desa adalah kumpulan dari beberapa pemukiman penduduk yang biasanya disebut kampung. Desa ini memiliki enam dusun yaitu, Tanjung, Manceng, Deman, Dengkah, Majeng, dan Pandiya. Desa Dharma Tanjung terletak kurang lebih 8 km dari Kecamatan Camplong. Sejak Desember 2021, desa ini dipimpin oleh PJ Kades yang ditunjuk dari kecamatan karena belum ada pemilihan kepala desa sampai menunggu pemilihan serentak.

Jarak Desa Dharma Tanjung ke kecamatan sekitar enam kilometer. Desa ini merupakan salah satu desa pesisir di Selat Madura dengan mayoritas sebagai nelayan terbesar di Kecamatan Camplong, yaitu sebesar 7.643 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.022 per km^2 (BPS

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kabupaten Sampang, 2022). Wilayah desa dibagi dua bagian, yaitu pesisir termasuk padat penduduk dibandingkan wilayah pesisir lain di Kecamatan Camplong.

Nelayan di Desa Dharma Tanjung sangat tergantung pada hasil melaut, tetapi tidak semua nelayan mempunyai perahu sendiri. Banyak yang sebagai buruh nelayan yang menyewa perahu dengan yang mempunyai perahu dan hasilnya dibagi beberapa orang yang membantu melaut. Nelayan juga tidak dapat melaut pada musim tertentu, seperti musim angin atau purnama. Hasil penangkapan yang dibawa nelayan akan dijual oleh para istri nelayan. Lokasi berjualan yang digunakan ialah di pinggir jalan raya desa yang merupakan jalur utama transportasi lintas Pulau Madura sehingga pada sore hari ramai dan macet oleh penjual dan pembeli. Nelayan pada umumnya tidak mempunyai simpanan karena habis untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah sedikit-sedikit, seperti untuk lantai dan tembok keramik. Alasannya apabila tidak disemen dan dikeramik maka akan terkikis air laut.

Bagaimana keadaannya pada saat nelayan tidak melaut? Hal ini yang menjadi permasalahan utama. Nelayan yang tidak mendapatkan penghasilan tambahan akhirnya berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nelayan berhutang kepada orang-orang yang keliling menawarkan pinjaman untuk kebutuhan pangan apabila sedang musim tidak melaut dan dibayar pada saat hasil laut terjual. Pembayaran hutang dicicil sesuai kesepakatan dengan yang memberi pinjaman. Istri-istri nelayan turut membantu dengan menjual makanan, seperti gorengan keliling dusun atau mempunyai warung kecil di depan rumahnya. Namun, banyak istri-istri nelayan yang juga hanya menunggu suaminya datang dari melaut dan memilah-milah ikan yang bagus untuk dijual di pinggir jalan.

Ketergantungan pada alam masih menjadi tantangan bagi berbagai pihak untuk mengambil andil memberikan program-program peningkatan kapasitas masyarakat. Edukasi lain yang diperlukan adalah pengelolaan sampah dan tempat MCK umum di daerah pesisir seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 5.3 Aktivitas sore penduduk nelayan Desa Dharma Tanjung mengambil ikan dari melaut.

agar masyarakat tidak membuang kotoran di sungai atau ke pantai lagi. Hal ini penting karena daya serap warga terhadap pengetahuan baru akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) dalam bidang pendidikan. Staf BPS telah menyarankan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kejar paket.

Foto: Peneliti (2022)

Gambar 5.4 Pemukiman Rumah-Rumah Nelayan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Permukiman nelayan di Desa Dharma Tanjung terlihat sangat padat, rumah berdekat-dekatan, tidak ada ruang kosong. Kondisi hunian sebagian besar masyarakat tampak tidak memiliki fasilitas sebagai syarat rumah sehat dan nyaman. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti air bersih, drainase, pelayanan sampah, sanitasi, serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat nelayan. Hanya sebagian rumah di pesisir pantai memiliki fasilitas tempat untuk buang air (WC). Warga Dusun Manceng mengungkapkan bahwa warga buang air menjelang subuh ke pantai. MCK sebelumnya sudah dibangun di dekat pasar dengan dua pintu kamar mandi, tetapi sudah tidak terawat dan tidak dialiri air lagi sehingga warga akhirnya kembali ke pantai untuk buang air. Sungai yang tertimbun sampah juga terlihat di Dusun Dangkah. Sampah berserakan menutupi sungai kecil sehingga apabila hujan, rumah-rumah di dusun ini banjir sampai selutut orang dewasa. Menurut PPL yang bertugas di dusun ini, sungai pernah dikeruk dan bersih, pernah juga ada tempat pembuangan sampah, tetapi karena tidak ada perawatan dan biaya bagi petugas yang mengangkut akhirnya terbengkalai.

Foto: Pratiwi (2022)

Gambar 5.5 MCK warga terbengkalai dan pengelolaan sampah yang kurang sehat di Desa Dharma Tanjung.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tingkat pendidikan di desa ini masih rendah karena kebanyakan anak-anak muda lebih suka melaut dan mendapatkan uang daripada ke sekolah walaupun pada akhirnya lulus minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Kejar Paket A disediakan di desa karena indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli berpengaruh besar terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Sektor kesehatan di desa dapat diakses oleh warga. Warga dapat mengakses fasilitas kesehatan karena adanya kebijakan Bupati Sampang yang menyatakan bahwa setiap warga yang memiliki KTP dan KK Sampang dapat berobat ke Puskesmas. Selain pendidikan, aspek kesehatan menjadi isu yang relevan untuk desa ini. Konsumsi makanan masyarakat desa sangat sederhana karena masyarakat lebih memilih membeli aset pada saat tangkapan ikan bagus, seperti memperbaiki rumah dengan keramik maupun membeli ternak atau sawah. Hal ini yang membuat IPM daerah Sampah terbilang rendah.

Selain desa nelayan, 40% wilayah utara merupakan daerah pertanian sawah tadah hujan yang mengandalkan air hujan untuk sawahnya sehingga hanya dapat panen setahun sekali. Mayoritas warga menjadi buruh tani dan tidak memiliki lahan. Selain lahan persawahan, masyarakat juga memelihara ternak, seperti ayam atau kambing. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari selain nasi ialah sayur-sayuran, seperti bayam, kubis, dan ikan bahkan jarang mengkonsumsi protein. Kesederhanaan konsumsi makanan ini sudah menjadi tradisi karena lebih mengutamakan kepemilikan aset daripada membeli makanan yang memenuhi unsur empat sehat lima sempurna.

Masyarakat Desa Dharma Tanjung bagian Utara sebagian besar merupakan petani. Rumah-rumah antar warga memiliki jarak yang lebih luas dibandingkan rumah warga di daerah selatan. Keberadaan jamban juga lebih baik kondisinya dibandingkan jamban di kampung nelayan. Meskipun kondisi jamban terpisah dengan rumah dan dimiliki oleh lebih dari satu kepala keluarga (KK), mayoritas jamban pada wilayah ini merupakan jamban leher angsa yang tertutup dan dikelilingi tembok. Pengelolaan sampah pada daerah ini juga terlihat lebih bersih karena tidak dibuang sembarangan, melainkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dikumpulkan atau dibakar. Muncul stigma yang berbeda antara wilayah selatan dan utara diungkapkan oleh PPL.

> "Penduduk di bagian utara karakternya lebih jarang berhutang dan rumahnya lebih teratur. Saya sebagai bagian dari mereka *mikir-mikir* lama dahulu sebelum berhutang. Mungkin karena dipengaruhi oleh mata pencaharian dan kondisi geografis. Kedekatan dengan laut dan tereksposnya rumah-rumah dengan air laut membuat rumah lebih mudah rusak. Maka dari itu, mereka memerlukan sumber daya lebih untuk membangun rumah tembok dan keramik." (Wawancara PML E, 3 November 2022)

Gambar 5.6 Pemukiman Petani, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang
Foto: Pratiwi, 2022

Gambar 5.7 Lahan Pertanian Warga di Daerah Pertanian, Desa Dharma Tanjung
Foto: Pratiwi, 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyarakat Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong Sampang Madura sedang bersiap-siap akan menggelar Tasyakuran berupa *Rokat Tase* atau Petik laut yang biasanya berlangsung dua hingga tiga hari. Kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintahan Desa itu akan digelar tanggal 10–12 November 2022 di Instalasi Pelabuhan Perikanan Dharma Camplong. *Rokat Tase* ditandai dengan membuang kepala sapi oleh tokoh masyarakat, serta warga sekitar ke laut menggunakan perahu nelayan. Puluhan perahu nelayan ikut mengantar perahu yang mengangkut kepala sapi dan makanan sambil diiringi musik tradisional Madura *Klenangan*. Sebelum ritual membuang kepala sapi, para pengantar hiruk pikuk menikmati suara merdu sinden di atas perahu.

Menurut Ketua Pelaksana yang juga Sekretaris Desa mengatakan, "Tasyakuran dan *Rokat Tase* itu sebagai wujud syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang melimpah. Kegiatan itu merupakan tradisi leluhur yang turun temurun dilaksanakan warga masyarakat pesisir." Menurut PJ Kepala Desa Dharma Tanjung,

> "*Rokat Tase* adalah kegiatan rutin setiap tahun yang melibatkan tokoh masyarakat serta warga sekitar. Bahkan, warga dari desa lain ikut meramaikan dan mengantar iring iringan perahu sampai ke laut. Ia berjanji akan terus melestarikan tradisi yang ada di masyarakat karena merupakan warisan dari leluhur. *Rokat Tase* merupakan tradisi masyarakat pesisir yang perlu dilestarikan. Sebab, tujuannya positif sebagai wujud syukur dan memohon keselamatan bersama dalam menjalankan tugas bekerja di laut untuk kepentingan keluarga." (Wawancara PJ Kepala Desa Dharma Tanjung, 1 November 2022)

Ditengah kesulitan dan keterbatasan hasil laut, masyarakat desa tetap melaksanakan acara Petik laut dengan menyumbangkan secara sukarela dan mencari donatur demi suksesnya acara tersebut. Sekretaris desa bahkan turut memeriahkan kegiatan dengan mencari donatur. Namun, dibalik meriahnya pesta laut, ada sisi keagamaan yang dibawa, seperti acara pengajian dan bacaan shalawat Nabi. Ada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Pratiwi (2022)

Gambar 5.8 Petik Laut Desa Dharma Tanjung

juga pentas seni, seperti tarian dan alat musik tradisional serta organ tunggal.

Permasalahan lain yang dihadapi ialah Kabupaten Sampang merupakan daerah yang paling rawan bencana di Jawa Timur dengan risiko bencana banjir yang disebabkan permasalahan di daerah aliran sungai. Dalam konteks warga Desa Dharma Tanjung, kini mereka dapat sedikit lega karena persoalan persampahan dan daerah aliran sungai telah tertangani setelah bertahun-tahun sebelumnya tidak ada kejelasan. Hadirnya figur muda sebagai perangkat desa yang pulang ke desa setelah menempuh pendidikan tinggi dan dipercaya banyak warga, cukup berkontribusi untuk menyampaikan aspirasi warga. Keberadaan figur tersebut cukup krusial dengan karakter pendidikan tinggi, partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah desa dan dipercaya oleh warga desa.

C. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Regsosek

Tantangan utama pelaksanaan Regsosek di Sampang terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam rapat IPM, diskursus bersama perangkat BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Bupati Sampang secara frekuentif membahas rendahnya capaian IPM, yakni pada angka 62 dari target awal 64.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam penghitungan IPM, terdapat beberapa indikator, seperti daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Perangkat BPS merekomendasikan dari sisi pendidikan, yakni dengan pemerataan program kejar paket A di semua desa. Menurut perangkat BPS, target 1.700 orang untuk peserta kejar paket A masih terlalu rendah terutama untuk penduduk usia lansia. Permasalahan kedua, yakni pada sisi kesehatan.

> "Masalah kesehatan berada di peringkat 5 terbawah. Kenapa Sampang terendah karena penghitungannya makro hitung konsumsi, dan di Sampang makannya seadanya namun mempengaruhi kalori. Kalori rendah, pengeluaran konsumsi rendah. Kalau ada empat sehat lima sempurna, setiap kesempatan kami sampaikan makan tahu tempe." (Wawancara dengan perangkat Kabupaten Sampang, 3 November 2022)

BPS Kabupaten Sampang turut terlibat dalam diskusi dan upaya penyelesaian masalah di Kabupaten Sampang yang dipimpin oleh Bupati. Saran yang disampaikan BPS juga terkait dengan peningkatan IPM. Meski demikian, selama perhitungan IPM berdasarkan makro konsumsi maka IPM Kabupaten Sampang akan tetap dinilai rendah. Hal ini terkait dengan budaya masyarakat Sampang dari segi asupan protein. Terkait pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Sampang, Kepala BPS Kabupaten Sampang menyebutkan,

> "Total calon petugas yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.468 orang yang terdiri dari Koseka, PPL, dan PML. Selama dua hari, petugas pendataan Regsosek akan menerima materi terkait konsep dan definisi yang digunakan dalam pendataan tersebut. Keseragaman konsep tersebut diperlukan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibandingkan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pelatihan ini menjadi awal dari pendataan Regsosek karena lapangan merupakan ujung tombak dalam pengumpulan data sosial ekonomi yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam melakukan pendataan, nantinya setiap empat orang Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan diawasi satu Pengawas Pemeriksa Lapangan (PML). PML ini akan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bertugas mengawasi kegiatan lapangan dan memeriksa isian kuesioner yang dihasilkan oleh PPL. Memastikan kebenaran isian dan konsistensi masing-masing jawaban menjadi tugas PML agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungajawabkan kebenarannya. Dalam melakukan pendataan, nantinya setiap empat orang petugas pendataan lapangan (PPL) akan diawasi satu pengawas pemeriksa lapangan (PML)." (Wawancara Kepala BPS Sampang, 3 November 2022)

Selanjutnya ditambahkan oleh Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang mengatakan,

"Permasalahan di Madura, terutama Sampang, angka kemiskinan ingin ditekan, tetapi dari desa ingin mengangkat karena ingin dapat bantuan. Selama ini banyak juga yang tidak tepat sasaran ini karena desa seperti raja kecil yang menentukan data. Sering kali ketika diminta itu, pengawasan itu penting, semuanya kan sudah dapat dana, tapi kenapa hasil beda-beda, karena ya kurang pengawasan." (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang, 3 November 2022)

"Program ini untuk mendata seluruh penduduk Sampang dari sisi sosial dan ekonominya. Pendataan akan dilakukan secara komprehensif mulai dari bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan. Setiap warga akan ditanyakan perihal usia, pekerjaan, pendapatan, aset, kondisi rumah, jenis bantuan sosial (bansos) yang diterima, jenis jaminan kesehatan yang dimiliki, dan sebagainya. Pendataan dilakukan secara lengkap. Bahkan lebih lengkap dari program Basis Data pada tahun 2015." (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang, 3 November 2022)

Program basis data pada tahun 2015 hanya mencakup 40 persen, sedangkan Regsosek mencakup keseluruhan penduduk didata, yaitu 100 persen. Oleh sebab itu, Regsosek ini membutuhkan banyak tenaga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk melakukan pendataan ke lapangan sehingga BPS merekrut sebanyak 1.475 tenaga untuk memudahkan proses pendataan. Bahkan, tenaga Regsosek direkrut dari setiap desa. Untuk mendaftar sebagai tenaga Regsosek, calon pendata harus melampirkan surat rekomendasi dari masing-masing kepala desa. Setelah selesai melaksanakan pendataan, tenaga Regsosek menerima honor setiap bulan. Bahkan, dari anggaran Rp10 miliar untuk Kabupaten Sampang sebanyak Rp8 miliar diperuntukkan honor petugas Regsosek. Perbandingan setiap pendata, yaitu satu banding 250 keluarga.

BPS Kabupaten Sampang merasa dilema pada saat perekrutan petugas. Kandidat mahasiswa dipandang akan memberikan kontribusi positif, tetapi disisi lain memiliki kelemahan, yaitu tidak mengenal lokasi dan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, BPS Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada para kepala desa untuk merekrut warga setempat menjadi petugas dengan alasan petugas tersebut mengetahui kondisi masyarakatnya, mengetahui kepemilikan aset warga yang ada di desanya. Kepala desa diharapkan bertanggungjawab atas petugas yang direkomendasikan. Dukungan kepala desa juga turut menjaga agar komitmen petugas pendata tetap terjaga.

1. Proses Persiapan

Awalnya pelaksanaan Regsosek dibatalkan setelah tanggal 17 Agustus 2022, tetapi beberapa hari kemudian ada pemberitahuan dari BPS pusat bahwa kegiatan akan dilanjutkan. Pada saat itu belum adanya informasi terkait anggaran pelaksanaan. Kondisi ini membuat semangat pihak-pihak yang terlibat menjadi tidak menentu dengan waktu yang sempit dan harus merekrut, serta melatih banyak petugas karena harus mendata semua warga masyarakat (*take all*).

Proses awal adalah perekrutan calon petugas dengan persyaratan adalah menyerahkan dokumen KTP dan ijazah untuk melihat tempat tinggal calon tersebut yang akan ditugaskan di lingkungannya sendiri. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang mengatakan,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

"Pelatihan di Surabaya menampung sebanyak 1.475 orang yang dibagi menjadi lima gelombang. Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Hotel Alana & Arya Sentra sebanyak 59 kelas. Pelatihan berlangsung sejak 26 September–11 Oktober 2022. Untuk satu gelombang dilakukan selama empat hari dengan dua hari efektif. Selama pelatihan, kami menyiapkan dokumen PK 1, yaitu surat untuk ke lapangan dan instrumen pendataan. Pada tanggal 11 persiapan surat selesai. Pada tanggal 13 seluruh dokumen di bawa ke kecamatan, diantaranya surat PK 1, surat ke desa, surat tugas,dan *name tag* sudah kami bekali semua. Setelah itu, pada tanggal 15 pendataan dimulai. Pendataan terdiri dari dua tahapan verifikasi keluarga, yaitu melalui ketua SLS terkait keberadaan keluarga dan kondisi sosial ekonomi warga dan data skoring." (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang, 3 November 2022)

Calon petugas mendapat pelatihan mengenai pencacahan, seperti masyarakat yang baru menikah tetapi belum mempunyai dan mengurus kartu keluarga (KK) atau sudah membuat KK, tetapi masih dalam proses. Selain itu, pelatihan dalam penentuan kategori miskin atau sangat miskin. Setelah proses tersebut, petugas dapat melakukan pendataan *door to door*. Tugas selanjutnya, apabila ada keluarga yang ditentukan miskin dan sangat miskin maka dilakukan pengambilan foto dan *tagging* lokasi, dan bagi keluarga yang tidak miskin cukup *tagging* saja dengan menggunakan aplikasi ponsel yang diajarkan selama pelatihan. Kemudian, calon petugas juga diberi penjelasan mengenai haknya berupa honor dan fasilitas yang diterima.

2. Pelaksanaan dan Kendala Regsosek Sampang

Tahapan pelaksanaan pendataan terutama mengenai penentuan miskin dan tidak miskin oleh Kepala Dusun sebenarnya sangat subjektif tetapi tidak dapat dibantah oleh BPS karena ketentuannya seperti itu. Hal ini dinyatakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

"Tahapan verifikasi keluarga *door to door* apabila mampu dilakukan *tagging*. Sebenarnya foto tidak ngaruh, yang ngaruh isiannya, misal lantai keramik tapi penghasilannya di bawah standar. Itu kan dari pelatihan dari Kepala Dusun ya miskin ya sudah. Data ini hanya untuk verifikasi, informasinya ini status miskin/tidak, pemerintah ingin tahu bagaimana persepsi warga setempat. Kita dapat peringatan kalau menurut kadus miskin tapi menurut data tidak miskin, ya kita tidak boleh mengubah. Petugas tidak boleh mengubah karena hal ini subjektif." (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial Regsosek Sampang, 3 November 2022)

Beberapa kendala yang ditemukan selama proses pendataan.

a. Adanya aplikasi kedua yang tidak diajarkan selama pelatihan. Petugas pendataan banyak yang mengkritisi kebijakan yang berubah-ubah. Aplikasi kedua juga tidak diajarkan penggunaannya dalam pelatihan. Petugas akhirnya belajar mandiri untuk memahami fungsi dan fitur aplikasi. Dengan adanya tambahan aplikasi, BPS Kabupaten Sampang membuat video tutorial yang dapat dipelajari oleh petugas pendataan. Selain penggunaan aplikasi, permintaan untuk mengambil gambar/foto kondisi rumah warga dipandang menyulitkan pendataan. Petugas sudah melakukan pendataan sejumlah setengah dari target pendataan. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang mengatakan,

"Ada petugas pendataan juga yang mogok mengancam tidak melakukan tugas, tetapi akhirnya tetap melaksanakan tugas. Saya tekankan yang penting pendataan selesai.. Pendataan di masa mendatang semoga lebih lancar karena kami sudah melibatkan mitra dengan jumlah masif. Jangan sampai ada permintaan data tambahan saat proses pendataan masih berlangsung karena perlu mempertimbangkan banyak hal. Kalau ada PPL yang menolak maka dapat berpengaruh pada pemutusan kontrak. Peraturan perjanjian, seperti pasal karet karena di perjanjian petugas pendata harus melaksanakan sesuai prosedur awal dan ditambah tugas tambahan dari BPS ini yang karet. Pelaksanaan aturan tambahan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

saat berhadapan di level bawah ini sulit. Sementara kami terus melakukan percepatan setiap hari ini agak tidak ada yang mogok para mitra kami. Pendataan sudah berjalan hampir separuh target tetapi adanya tambahan tugas, yaitu tambahan data maka petugas perlu kembali ke awal lagi untuk memenuhi data yang diminta untuk ditambahkan. Pendataan awal, dua tiga hari progresnya lambat, sekarang sudah stabil lagi." (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial Regsosek Sampang, 3 November 2022)

b. Adanya penolakan dari masyarakat yang didata (*non-response*) dan diambil foto dalam rumahnya. Berbagai cara dan pendekatan dilakukan petugas, seperti meminta warga sendiri yang mengambil foto dan menjelaskan alasan pengambilan foto dalam rumah. PPL berusaha menjelaskan bahwa persyaratan ini diharuskan dari BPS pusat untuk membuktikan bahwa rumah yang difoto benar-benar sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
c. Penolakan lain yang dihadapi petugas adalah dari kalangan masyarakat yang menjadi lawan politik kepala desa terpilih. Warga menganggap petugas pendataan adalah orang suruhan kades, walaupun sudah dijelaskan dan diperlihatkan surat tugas dan lain-lain, tetapi tetap menolak memberikan data-datanya. Padahal BPS Kabupaten Sampang telah berkirim surat sebelumnya kepada camat dan kades mengenai adanya pendataan Regsosek.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Sampang dapat diatasi oleh para pihak yang terkait. Para petugas di lapangan, yaitu Koseka, PML, dan PPL mengadakan pertemuan setiap minggu sampai di akhir pelaksanaan Regsosek. Pertemuan ini dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi data. BPS Kabupaten Sampang juga melakukan pendataan malam hari untuk warga yang tinggal di wilayah khusus dan bagi warga yang tidak menetap. Kriteria wilayah khusus misalnya penduduk yang menetap di apartemen, pesantren, penjara, dan pengungsian. Kemudian pada malam hari,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendataan dilakukan kepada warga yang tidak memiliki tempat tinggal seperti tunawisma.

D. Nilai Positif dan Tantangan Pendataan

Petugas PPL di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang menanggapi positif kegiatan Regsosek. Hal tersebut ditandai dengan beberapa diksi selama wawancara yang sering terdengar, seperti sudah baik, sudah bagus, sesuai prosedur, dan mudah dipahami. Dalam melaksanakan tugas sebagai PPL, PPL A mengalami sejumlah kendala. Pertama, resistensi masyarakat yang disebabkan mereka yang kecewa belum mendapatkan bantuan sebelumnya. Dalam mengatasi kendala tersebut, kemampuan mendengarkan dan memberikan pemahaman adalah hal yang penting. Kedua, ada beberapa responden yang tidak ingin memberikan KK karena mereka menunggu keputusan kepala keluarga atau resisten karena bagian dari oposisi kepala desa. Ketiga, terdapat anggota keluarga yang sudah tinggal bertahun-tahun di desa, tetapi tidak memiliki KK. Untuk mengatasi hal tersebut, PPL berdiskusi dengan PML dan memberikan solusi. Keempat, kendala yang menurutnya cukup menurunkan semangat banyak PPL adalah munculnya aplikasi baru pada pertengahan pendataan. Aplikasi baru ini berisi keterangan tambahan berupa gambar-gambar dalam pemukiman warga. Ia mengaku sungkan untuk mengambil foto dalam rumah warga.

> "Mengambil foto depan rumah saja mereka sering menolak, apalagi mengambil foto ke dalam? Itu kan bagian dari privasi. Aplikasi kedua yang muncul pada tengah-tengah proses survei cukup memperlambat kinerja kami. Kami harus mengulang ambil foto dari urutan terdepan. Kadang ada responden yang tidak mau, ya saya minta foto sendiri, jika mereka tidak berkenan ya tidak saya paksa. Memperlambat kinerja, harus ngulang lagi dari depan. Sudahlah kita coba jalanin dulu, kalau ada kurang-kurangnya ya dipenuhi belakangan. Responden sendiri yang foto

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akhirnya. Kalau mereka tidak mau, saya tidak paksa." (Wawancara PPL A, 1 November 2022)

PPL A merasa bersyukur banyak dibantu oleh PML dalam pendataan. Seluruh PPL pun saling membantu dalam melaksanakan tugas. Apabila PPL tidak dapat menyelesaikan target pendataan maka rekan lainnya akan membantu sehingga ada PPL yang dapat melakukan pendataan hingga 600 KK. PPL B juga menghadapi resistensi dari warga. PPL B mengungkapkan, "Mereka yang tidak mau memberi KK malah dari masyarakat yang mampu dan juga oposisi kepala desa." PPL B menghadapi kendala tersebut dan berdiskusi dengan PML. Resistensi lainnya, yakni mengenai pertanyaan penghasilan dan aset. PPL B mengungkapkan, "Banyak dari responden tidak berkata jujur. Misalnya, saya tahu di daerah Utara dia punya lahan, namun dia bilang tidak. Itu masyarakat yang menengah ke atas. Kalau mereka yang penghasilannya rendah, rata-rata menjawab jujur."

PPL B juga memerlukan waktu tambahan karena responden sering menanyakan tujuan Regsosek dan pertanyaan lainnya mengenai bantuan. Hal-hal tersebut telah diantisipasi dengan pelatihan yang ia ikuti. Selain itu, adanya penambahan aplikasi baru yang muncul setelah ia mendapatkan banyak data.

> "Sekarang saya sudah mengumpulkan data dari 169 KK dari target 390 KK. Sekarang sudah tanggal 3 November 2022, tenggat saya 12 November 2022. Harus mengulang dari awal dengan aplikasi ke dua. Kalau di Selatan masih dekat. Kalau ke Utara perlu menggunakan motor. Namun, pendataan saya tidak sampai jauh ke Utara sekali. Setiap KK biasanya saya menghabiskan waktu 15–20 menit. Satu hari biasanya saya 25 KK. Dari pendataan ini juga memberikan pemaknaan tersendiri bagi saya. Saya jadi tahu masyarakat daerah saya sendiri dan saling mengenal." (Wawancara PPL B, tanggal 1 November 2022)

Menurut PPL B, pendataan Regsosek sangat penting sebagai basis data peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Pratiwi (2022)

Gambar 5.9 Proses Diskusi PPL, PML, Koordinator Kecamatan bersama Tim dari BRIN

"Di Camplong ini sangat umum anak putus sekolah untuk membantu keluarganya mencari nafkah, seperti melaut. Saya dulu juga begitu karena keterbatasan. Jadi semoga pendataan ini dapat mengurangi persoalan seperti itu. Kendala terbesar selama pendataan, responden menolak memberikan data KK atau tidak mau menjawab soal aset bagi kalangan menengah ke atas khususnya bagi lawan politik kades. Ada sekitar 60 pertanyaan yang perlu dijawab warga dan apabila warga menolak menjawab maka petugas pendata membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menjelaskan kembali tujuan pendataan. Penulisan nama ada yang berbeda dengan kartu keluarga, PPL B mengikuti nama panggilan masyarakat bagi yang tidak mau menyerahkan kartu keluarga dan KTP (sekitar 5 kepala keluarga). Pengalaman selama pendataan, menjadi lebih tahu dengan kondisi masyarakat di wilayah sendiri. Sehari dari orang yang mau jawab dapat 25 KK, tapi apabila ada yang sulit jawab cuma 15 KK. Terlalu memakan waktu untuk memberikan penjelasan kepada responden. Penentuan KK yang didata sesuai urutan yang disyaratkan BPS. apabila tidak ada orangnya dapat janjian ketemu. Apabila tidak ada KK maka boleh digantikan istrinya." (Wawancara PPL B, 1 November 2022)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Seperti halnya PPL A dan PPL B, PPL C mengalami kendala setelah aplikasi kedua diluncurkan. PPL tersebut tidak begitu familiar dengan aplikasi telepon pintar dan pengoperasian aplikasi. PPL C mengungkapkan, "Kadang-kadang kalau akan unggah foto itu sulit sekali sinyalnya di sini. Tapi saya banyak dibantu PML. Tidak ada anggaran untuk paket data kuota." Meski demikian, PPL C tidak mengalami kendala terkait warga. PPL mengatakan, "Partisipasi warga baik semua. Tidak ada yang resisten daerah sini". Petugas lapangan tentunya bekerja dalam ranah struktur kerja untuk memperlancar pendataan.

Dalam proses Regsosek pada awal November 2022, tidak seperti PPL, PML D, sebagai salah satu PML tidak menjumpai kendala yang signifikan. PML direkrut berdasarkan pertimbangan sebagai mitra lama dari survei-survei BPS sebelumnya. Tantangan seperti resistensi responden adalah hal yang lumrah dan dapat ditangani. "Kendalanya paling yang dialami PPL. Ada beberapa responden yang tidak ramah dan saya dampingi mereka. Harus pintar-pintar ambil hati", ungkap PML. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa bantuan pada masyarakat tidak hanya berbentuk tunai dan pemerintah pusat perlu mengetahui pendataan penduduk sebelum mengambil alternatif kebijakan. Dalam memberikan pemahaman pada responden dan masyarakat, beberapa cara PML D dalam melaksanakan tugas.

> "Sebenarnya kunci dari mengambil hati responden adalah mendengarkan mereka dahulu. Tidak perlu kita jawab. Kita iyakan saja. Baru kalau ada pertanyaan, kita jawab. Jika mereka sibuk, kita tidak paksa. Saya juga berpesan pada PPL dan respoden untuk menulis dan memberikan keterangan apa adanya. Memberi data yang benar itu ibadah. Siapa tahu ini membantu diri mereka sendiri bahkan kelompok yang lebih besar." (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Pada beberapa kasus lain, terdapat responden yang menolak didata karena dikategorikan miskin. Kemudian, PPL melakukan verifikasi dengan data dari desa dan dusun. Kendala lain, yakni meningkatkan semangat PPL terutama setelah aplikasi kedua masuk.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> "Saat capaian mereka sudah banyak, ada aplikasi kedua. Jadi, harus mengulang kembali. Ya tidak apa-apa. Ada PPL yang masih kurang capaiannya ya tidak apa-apa. Paling penting komunikasi dengan PPL setiap hari. Kita kadang kumpulkan mereka sambil bakar-bakar ikan dan evaluasi." (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Bekerja dalam tim bagi PML D berarti kemauan untuk belajar dan menjaga semangat. Menurut PML D, Regsosek sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan kesesuaiannya dengan prosedur pendataan dan sesuai target KK.

> "Menurut saya registrasi masyarakat memang perlu seperti ini. Prinsipnya hampir sama dengan SUSENAS. Indikatornya sudah lengkap menurut saya. Memang dari kuesioner nanti dapat terlihat setiap kategori kemiskinan. Jadi tidak perlu diperdebatkan." (Wawancara PML D, 1 November 2022)

PPL dan PML dibantu Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Koseka E, informan lain menyatakan bahwa untuk memastikan pemahaman PPL mengenai pendataan ini, ia meminta mereka untuk mengisi kuesioner dan mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. "Sehingga mereka paham konteks pengisiannya dengan keluarga lain," jelasnya. Cara kedua untuk mengatasi kendala pemahaman adalah dengan menekankan pendampingan pengawas di awal.

> "Pengawas saya minta untuk mengambil sampel kuesioner yang sudah terisi. Lalu mereka memverifikasi sudah tepat pengisiannya atau belum. Agar tidak ada salah persepsi. Untuk data yang berbeda di masyarakat, saya minta mereka isi yang sebenarnya." (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Menurut Koseka E, Regsosek ini sudah berjalan baik apalagi dengan pelibatan warga lokal sebagai PPL. Koseka mengungkapkan, "Kepala desa sangat mendukung. Malah berharap ini menjadi data yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

benar untuk jadi acuan dan dapat diverifikasi. Sebab bantuan-bantuan sebelumnya macet karena datanya kurang transparan." Pernyataan dukungan perangkat desa di atas serupa dengan pernyataan langsung sekretaris desa yang mendukung Regsosek. "Saya dulu bolak-balik ke dinas sosial mengurus warga yang miskin seharusnya dapat bantuan tapi prosedurnya mereka kurang transparan. Semoga yang ini lebih transparan dan terintegrasi," ujar sekretaris desa. Meski demikian, menurut Koseka, ia berpendapat bahwa beban kerja PPL terlalu besar bahkan satu PPL menangani 300 hingga 600 KK. "Meski pekerjaannya akhirnya dikerjakan berkelompok, beban kerja PML dan PPL terlalu besar menurutku." sambungnya.

Ada dua warga yang juga memberikan respon yang positif terhadap Regsosek. Menurut mereka, penjelasan Koseka sudah cukup jelas. Dua dari tiga responden belum pernah mendapatkan bantuan sosial selain bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa saat pandemi. Warga F memberikan tanggapan bahwa ia menanggapi positif Regsosek ini. "Sudah bagus. Harapan saya ya nanti mungkin saya dan tetangga yang memerlukan dapat bantuan, seperti sembako. Meski nanti saya tidak dapat bantuan. Artinya belum rejeki saya," ungkap warga.

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi terkait pelaksanaan Regsosek. Pertama, tanggapan positif petugas terkait dengan harapan mereka bahwa hasil Regsosek akan dimanfaatkan menjadi satu data yang dapat dipercaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kendala resistensi warga yang dialami disebabkan oleh persepsi dari oposisi kepala desa, mekanisme bantuan yang tidak jelas, dan kekhawatiran kebocoran data. Ketiga, petugas pendataan dan perangkat BPS berharap pada masa mendatang tidak ada lagi perubahan yang tidak diantisipasi di tengah proses pendataan, seperti penambahan aplikasi sebab infrastruktur teknologi informasi di pedesaan relatif terbatas. Keempat, warga mayoritas mendukung pendataan dan tidak banyak mengekspresikan kekecewaan pada bantuan yang belum tersalurkan. Kelima, koordinasi, pengisian

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kuesioner, dan pengontrolan sampel hasil registrasi merupakan hal-hal yang krusial untuk menghindari kesalahan data.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial dan Adat

Kelembagaan Desa Dharma Tanjung terdiri dari kelembagaan sosial dan pemerintahan formal, seperti pemerintahan desa dan perangkat dusun. Partisipasi perangkat desa dan dusun dalam Regsosek cukup aktif dan mendukung. Kepala desa dan sekretaris desa diharapkan memiliki pemaknaan yang lebih dalam terkait Regsosek. Secara formal, desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang pada saat pengumpulan data dilakukan, merupakan seseorang yang ditugaskan dari kecamatan. Secara informal, terdapat tokoh masyarakat yang merupakan warga yang lahir dan telah tinggal lama di desa. Tokoh tersebut menjabat sebagai sekretaris desa dan banyak mendapat kepercayaan warga desa. Menurut tokoh masyarakat yang juga sekretaris desa tersebut, bantuan sosial yang diberikan pada masa-masa sebelumnya banyak yang salah sasaran. Bantuan-bantuan sosial tersebut sebelumnya tidak diberikan berdasarkan data yang diverifikasi penduduk setempat. Tokoh masyarakat mengungkapkan,

> "Ini kan saya masuk ke pemerintahan desa yang baru. Dulu saya pernah berpengalaman menelusuri penanggung jawab bantuan sosial yang kebetulan dari luar desa untuk masyarakat Dharma Tanjung. Taunya masyarakat itu saya kepala desanya. Waktu saya coba cek bantuan program keluarga harapan (PKH). Saya merasa miris karena penerima bukan yang berhak. Namanya sama. Namun, karena ada tiga nama yang sama di desa ini jadi penerimanya bukan orang yang dimaksud meski namanya sama. Kalau diberikan ke yang lebih layak tidak apa-apa. Ini diberikan ke masyarakat yang sebenarnya dia mampu. Malah ada beberapa kartu yang ditahan karena tidak dapat diwariskan ke ahli waris, keluarnya juga lama. Waktu saya minta datanya, tidak diberikan. Bahkan pendamping mengaku tidak tahu. Seharusnya mereka

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanggung jawab. Ada tanggung jawab dari pusat." (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

Sekretaris desa tersebut menyambut dengan senang ketika pendataan Regsosek dilakukan. Ia berharap bantuan-bantuan selanjutnya dapat tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian bantuan dapat lebih mudah.

"Dulu ada yang terkendala di penggesekan kartu. Itu saya antar dan mereka urus sendiri. Terakhir data PKH ada 1.044 KK, yang PKH ada 600 kartu, ke mana sisanya? Ternyata tidak dapat terlacak bahkan sampai ke pendamping dan Dinas Sosial. Semoga lebih baik untuk mekanisme bantuan dan pendataannya." (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

Ketika ditanya mengenai resistensi warga terhadap Regsosek terkait dengan hal-hal yang bersifat politis, sekretaris desa menanggapi dengan lugas.

"Jangan takut, sekarang politik kita singkirkan. Sekarang pelayanan dahulu. Harus didata semua. Saya harap kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi. Saya harap nanti penyalurannya lewat pos saja. Tidak lewat kartu sehingga tidak ada celah kecurangan." (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

Celah-celah kecurangan pemberian bantuan tidak dapat dipungkiri dapat terjadi. Sekretaris desa menghimbau agar warga dapat melaporkan jika ada ketidaktepatan dalam proses pendataan dan pemberian bantuan nantinya. Tokoh masyarakat mengingat bagaimana bantuan-bantuan sosial sebelumnya yang diberikan dengan tidak transparan. Namun, apresiasi lebih juga ia ungkapkan pada mekanisme PPL dari warga lokal dan antusiasme PPL. "Saya salut dengan PPL yang bekerja sampai malam. Kayak begini kerja

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lebih enak, dapat tahu keadaan. Kapan lagi hidup bertetangga. Jadi tahu tetangganya melalui Regsosek ini," ungkap beliau.

Dukungan kelembagaan lainnya ditunjukan oleh perangkat kelembagaan desa yang lain, yakni para kepala dusun. Kepala Dusun F menyambut baik proses Regsosek karena pendataan atau sensus yang sebelumnya tidak dilakukan oleh warga setempat. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas keterlibatan warga setempat. Ia mempersepsikan berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa jika pendata ataupun pendamping bantuan bukan dari warga setempat maka bantuan menjadi kurang tepat sasaran.

Jejaring distribusi dan informasi mengenai Regsosek dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Kepala desa bersama perangkat BPS mensosialisasikan kegiatan Regsosek kepada perangkat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para kepala dusun. Berdasarkan struktur Regsosek, kepala desa dan para kepala dusun kemudian mendiskusikan daftar warga setempat yang dapat dilibatkan menjadi PPL. "Warga yang dilibatkan harus yang berkomitmen, tidak memiliki kesibukan yang padat, pendidikan minimal SMA, dan dapat mengoperasikan aplikasi android," jelas seorang PML. Pada dasarnya, perangkat desa memiliki data warga yang pernah mendapatkan bantuan dan status sosial ekonomi warga berdasarkan pendataan sebelumnya. PPL D menjelaskan bahwa akan ada forum diskusi membahas hasil pendataan.

> "Nanti pada akhir pendataan akan ada semacam *public hearing* lagi yang melibatkan kepala desa, kepala dusun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat meski sebenarnya dari data terkumpul itu sudah jelas dari indikator dan kategori sosial ekonomi setiap KK. Namun, perangkat desa memiliki wewenang untuk menentukan. BPS tidak dapat mengubah." (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Sosialisasi mengenai Regsosek di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dilakukan secara berbeda-beda. Beberapa warga yang terlibat kegiatan rapat pada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tingkat dusun sempat mendapatkan sosialisasi. Namun, mayoritas sosialisasi langsung diperkenalkan oleh para PPL. Sosialisasi dilakukan dengan cara sederhana dan dengan bahasa setempat yang mudah dipahami. Interaksi dengan masyarakat berjalan secara cair dengan menggunakan bahasa daerah. Beberapa warga mendukung proses Regsosek dengan memberikan data-data yang diperlukan. Warga juga membantu PPL sekiranya membutuhkan informasi rumah warga yang kurang dikenal oleh PPL. Seorang Koseka bahkan menjelaskan salah satu pengalaman unik mengenai antusiasme responden.

> "Memang ada responden yang antusias sendiri mendatangi petugas sampai malam. Kemarin kami sudah berikan nomor urut, mulai dari Barat Daya. Nanti, oleh petugas dikunjungi satu per satu. Ada beberapa itu awalnya mereka tidak mau, ternyata mereka malah mengunjungi petugas ke kantor desa. Ternyata petugasnya tidak ada. Warga tersebut kemudian datang ke rumah. Ada sedikit *mis informasi*. Menurut warga ini menduga ada pencurian data. Mungkin dia takut. Tapi sudah dijelaskan dari tetangganya. Kemudian mereka minta dikunjungi lagi, tetangganya juga dikunjungi. Semuanya paham ini petugas dari desa dan BPS. Kalau dari masyarakat ya antusias. Ga tau mereka harap bantuan atau apa. Takut ketinggalan." (Wawancara Koseka A, tanggal 1 November 2022)

Pengalaman tersebut juga dirasakan oleh PPL. PPL tersebut diikuti selama melakukan pendataan dan ditanya oleh warga kapan rumahnya didata. "Mungkin mereka takut tidak didata, tidak mendapat bantuan," kata seorang PPL. Sistem pengawasan terhadap validitas data dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pelibatan PPL dari warga lokal yang mengetahui dan mengenal kondisi sosial ekonomi warga sehingga keterangan warga dapat diverifikasi PPL dan data yang dimiliki desa. Kedua, dengan supervisi PML yang mengontrol ketepatan pengisian kuesioner setiap tiga hari sekali. Ketiga, pelibatan perangkat desa nantinya dalam penggolongan kategori kemiskinan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mekanisme-mekanisme tersebut bukanlah jaminan untuk mendapatkan data yang valid sepenuhnya. PPL memiliki kelemahan untuk menelisik lebih jauh mengenai aset yang dimiliki warga selain dari pertanyaan dan aset yang terlihat. Selain itu, tidak dapat dipungkiri berdasarkan pernyataan salah satu perangkat BPS dan wawancara dengan kepala dusun, perangkat desa memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai standar kemiskinan. "Meski nanti di pengkategorian kuesioner sudah jelas mana warga yang miskin, perangkat desa diperbolehkan memiliki pendapat sendiri," jelas seorang perangkat BPS. "Menurut saya kalau pendapatannya kurang dari Rp100.000,00/hari, satu keluarga itu dapat masuk ke kategori miskin. Sudah tidak mampu dia membiayai keluarga dengan jumlah tersebut," ujar seorang kepala dusun. Setelah musyawarah yang melibatkan partisipan yang relevan, perangkat BPS berharap penggolongan dapat didapatkan secara valid dan terverifikasi data.

Penggunaan perangkat elektronik dan teknologi informasi juga memungkinkan partisipan yang relevan untuk melihat perkembangan pengumpulan data.

> "Meski kadang pusat tidak tahu permasalahan yang terjadi di daerah, seperti teknik penggunaan aplikasi yang baru muncul di tengah-tengah proses itu. Mereka hanya memberikan tutorial video. Namun, penyesuaian di daerah sampai PPL sebenarnya lebih kompleks lagi," (Wawancara Perangkat BPS A, 3 November 2022)

Kompleksitas penggunaan aplikasi, mencakup resistensi warga yang enggan memberikan izin untuk difoto bagian dalam rumahnya, PPL yang kurang familiar dengan aplikasi, dan sinyal yang tidak mendukung. Kurangnya informasi warga mengenai tujuan pendataan dan cara mengadvokasi diri terkait bantuan terkait dengan masalah utama di Kabupaten Sampang, yakni rendahnya partisipasi sekolah. Permasalahan lain adalah malnutrisi, tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur, serta rendahnya jumlah Posyandu dan Puskesmas jika dibandingkan jumlah penduduk.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> "Untuk permasalahan indeks pembangunan manusia (IPM) bidang kesehatan sebenarnya sudah dikejar sejak lima tahun terakhir dan mulai membaik. Meski Kabupaten Sampang masih terendah. Strateginya adalah dengan pemberian insentif bagi petugas posyandu, pelarangan pernikahan anak, dan pemberian nutrisi." (Wawancara Perangkat BPS A, 3 November 2022)

Meski demikian, Kabupaten Sampang masih menghadapi tantangan yang cukup sulit pada peningkatan sumber daya manusia. Perangkat BPS A menjelaskan bahwa ketika melaksanakan rapat dengan Bupati Sampang dan Bappeda Kabupaten Sampang mereka telah menyarankan untuk memeratakan dan memaksimalkan program kejar paket. Mayoritas penduduk tergolong buta huruf dan putus sekolah sehingga target capaian indikator pendidikan masih terlalu rendah. Permasalahan-permasalahan tersebut diamini oleh salah satu perangkat desa atau Tokoh Masyarakat A. Latar pendidikan ini patut diperhatikan bagi petugas pendataan. Kondisi pendidikan responden merupakan petunjuk untuk penggalian pendataan.

F. Cerita dan Pemaknaan Hidup Para Pendata dan Tokoh Masyarakat untuk Perubahan Desa

Terdapat tiga PPL yang mendampingi selama proses observasi dan wawancara proses bisnis Regsosek. Ketiga PPL tersebut memiliki profil yang berbeda-beda. PPL A yang berusia 35 tahun dengan ijazah pendidikan terakhir Sarjana, PPL B yang berusia 23 tahun dengan ijazah pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), dan PPL C yang berusia 30 tahun dengan ijazah pendidikan terakhir SMA. PPL tersebut termasuk ke dalam golongan generasi milenial dengan karakteristik *digital native* atau akrab dengan teknologi digital terbaru, memiliki kebutuhan akan validasi, serta memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang memberi makna meskipun gaji tidak terlalu tinggi (Liu dkk., 2019).

PPL A banyak membantu dalam menemui warga dan PPL lainnya. PPL A juga mendampingi dalam observasi aktivitas

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Pratiwi (2022)

Gambar 5.10 PPL sedang melakukan pendataan

nelayan warga. Melalui lorong-lorong sempit di desa nelayan, PPL A bercerita mengenai mata pencaharian dan kebiasaan warga. PPL A cukup memiliki kepedulian terhadap warga Desa Dharma Tanjung. Mengenai proses Regsosek, awalnya PPL A tidak mengetahui proses rekrutmen PPL untuk Regsosek ini.

Ia juga belum pernah memiliki pengalaman menjadi petugas survei. PPL dihubungi oleh kepala desa dan ditawari menjadi petugas Regsosek. Kepala desa memberikan dukungan melalui surat rekomendasi dengan menimbang kemampuan PPL. PPL bekerja sebagai guru bahasa Inggris pada semua madrasah di Desa Dharma Tanjung. Selain itu, PPL juga membantu orang tuanya dalam persewaan *sound system* jika ada pesta dan hajatan di desa. Dalam memaknai pekerjaannya sebagai guru dan petugas Regsosek, PPL A mengaku hidupnya lebih bermakna ketika dapat memberikan manfaat bagi penduduk desa. Apalagi, pada waktu itu tidak mudah mencari PPL yang berpendidikan dan mengenal banyak penduduk desa. PPL berharap agar data Regsosek ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan yang transparan dan tepat sasaran. "Selama ini bermanfaat untuk warga desa Dharma Tanjung, kenapa tidak?" ujarnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PPL A mengaku banyak belajar dalam memahami masyarakat dari proses pelatihan dan pelaksanaan Regsosek. PPL A mendapatkan target untuk mengumpulkan data pada 228 KK di Desa Dharma Tanjung. PPL A mengaku mendapatkan beberapa pemahaman tentang aspek-aspek dalam survei, seperti pengembangan, pendataan desa, cara meyakinkan masyarakat, dan cara menstimulasi partisipasi masyarakat. PPL A selalu mendapat pertanyaan oleh masyarakat, "Wah, mau ada bantuan apa lagi?" PPL A pun diikuti oleh warga yang rumahnya belum didata meski hanya menunggu urutan pendataan. PPL A mengakui bahwa mereka khawatir tidak mendapat bantuan jika tidak didata. Dalam menghadapi ekspektasi masyarakat, PPL A memberikan pemahaman bahwa pendataan bertujuan untuk mendata kondisi sosial ekonomi warga yang kemungkinan akan dijadikan bahan sasaran kebijakan untuk bantuan. PPL A juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka memberikan data yang sebenar-benarnya agar bantuan tepat sasaran. Meski demikian, masih ada responden yang memberikan informasi yang tidak benar setelah diverifikasi dengan data di tingkat desa, seperti informasi bantuan masa sebelumnya.

> "Jika ada informasi yang tidak benar diberikan, saya *treat* begini, misalnya mereka bilang belum dapat bantuan, saya bilang ke mereka nanti *ga* dapat, *lho*. Kalau sebenarnya dia dapat tapi berkata *ga* dapat, dia yang rugi. Kalau untuk pertanyaan mengenai aset, kebanyakan responden *ga* mengaku mereka punya aset tertentu. Saya tulis yang benar dan yang saya tahu. Jika saya tidak tahu ya sesuai pengakuan responden saja." (Wawancara PPL A, tanggal 1 November 2022)

Keunggulan Regsosek dibandingkan pendataan sebelumnya adalah pelibatan warga lokal sehingga pengumpulan data dapat lebih cepat dan terpercaya. PPL kedua, yakni PPL B. PPL B bekerja sebagai nelayan dan melaut bersama teman-teman sebayanya. Selama pendataan, ia berhenti melaut. Ia mengetahui informasi Regsosek dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kepala desa dan tertarik bergabung dan menyerahkan KTP sebagai syarat.

Menurut PPL B, pendataan Regsosek dapat bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan dan menentukan solusi dalam persoalan kemiskinan. Dalam pengisian kuesioner, PPL B mengaku tidak memiliki kesulitan dalam memahami kuesioner. Proses pendalaman data ia lakukan dengan menanyakan aktivitas sehari-hari warga yang menjadi responden. "Sebenarnya waktu banyak dipakai untuk memberikan penjelasan mengenai Regsosek pada responden, bukan mengenai pengisian Regsoseknya sendiri. Ya harus bersabar," ungkap PPL B. PPL B berharap pelaksanaan Regsosek dapat menjadi basis satu data dalam menanggulangi persoalan kemiskinan warga, terutama dari sisi pendidikan. "Saya dulu sering bolos sekolah untuk melaut. Jadi, seperti itu ya biasa di sini, Mba. Semoga hal ini semakin berkurang," ujar PPL B. Secara geografis, PPL B tinggal di daerah nelayan.

PPL terakhir yang menjadi informan, yakni PPL C yang tinggal di daerah Utara desa. "Tunggu sebentar ya Ibu," kata PPL C saat tim mendatangi kediamannya. Warga terlihat sedang membangun pondokan untuk berkumpul dan beribadah. PPL C tinggal di desa bagian Utara dengan mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Rupanya siang itu PPL C bergotong-royong bersama warga lain untuk membangun pondokan tersebut. "Ya begini di desa ini kalau ingin membangun rumah ataupun acara lainnya, kita lakukan secara bersama-sama," Mata pencaharian PPL C adalah sebagai petani. Setiap hari ia bertani pada pagi hari kemudian memulai pendataan pada siang hari. Lokasi tempat tinggal PPL C berada pada Desa Dharma Tanjung bagian Utara di mana mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Banyak lahan pertanian yang sebenarnya tidak dimiliki oleh warga setempat. Warga setempat umumnya bekerja sebagai buruh tani. Jenis tanaman yang terlihat ialah kacang dan tanaman bambu. Selain bertani, warga di bagian Utara desa juga banyak membuat kerajinan keranjang sebagai bungkus dagangan ikan yang dijajakan di jalan pada sore hari maupun di pasar.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Pratiwi (2022)

Gambar 5.11 Medan yang dilalui untuk menuju desa bagian Utara (kiri) dan proses unggah data aplikasi kedua (kanan)

PPL menyapa warga sekitar dan memberikan informasi bahwa ia sedang melakukan pendataan. Penduduk menyambut dengan menyajikan makanan lokal. "Ya begini kadang yang membuat lamanya survei itu di rumah warga banyak ditanya dan dijamu seperti ini. Jadi, kita makan dan banyak ngobrol dulu. Tidak apa-apa malah jadi lebih mengenal," ujar PPL C. PPL C berharap setelah pendataan dilakukan, warga yang berhak mendapatkan bantuan segera mendapatkan haknya. Dari ketiga PPL tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki harapan besar agar data Regsosek menjadi basis data pemberian bantuan sosial lebih baik dan transparan.

PPL selanjutnya berusia 30 tahun. PPL menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Malang. PPL tersebut memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Desa Dharma Tanjung. PPL memahami situasi permasalahan sosial ekonomi warga desa. Informasi tersebut didapatkan dari tokoh masyarakat.

> "Permasalahan perekonomian warga ini ada pada pendapatan nelayan yang tidak menentu. Mereka tergantung pada alam. Apalagi saat bulan Agustus ini sudah mulai menurun, musim angin dari Selatan. Petani pun juga begitu. Jantung perekonomian desa ini sebenarnya ada di pasar. Namun, sudah lama pasar ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak beroperasi. Dulu, ada pasar tanjung di pinggir pantai, jika Jumat dan Selasa mereka berdagang dari hasil tani dan ternak. Sekarang tidak ada maka saya berfikir akan membangun pasar baru ke dalam. Mungkin dengan cara itu dapat mendobrak perekonomian masyarakat desa. Pasar ini nantinya juga dapat jadi tempat pelelangan ikan (TPI). Di bidang pertanian, kebanyakan warga lahannya sewa. Masyarakat desa terutama Utara ini hanya mengharapkan bantuan. Sampai saya rasa, apa iya yang diharapkan bantuan terus? Padahal jika punya usaha kan enak, tidak perlu berharap pada bantuan. Potensi yang dapat dimanfaatkan dari pertanian. Sayangnya, kebanyakan desa ini yang masih muda pergi keluar daerah. Pada mereka yang memiliki keahlian, pernah saya tanya mengapa tidak berjualan atau coba jualan wirausaha. Keluhan teman-teman saya yang tidak kembali ini karena tidak ada pasar. Kalau ada lahan insyaallah perekonomian desa lebih baik. Jika masih dibangun di pinggir jalan nanti macet. Saya malu kalau temen-temen dari Malang ketemu saya bertanya, apakah masih macet? Iya masih makanya ayo kita ubah." (Wawancara Tokoh A, 3 November 2022)

Tokoh masyarakat mengakui pekerjaan rumah Desa Dharma Tanjung ini memang banyak, tetapi ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan.

"Dana desa dari pemerintahan sebelumnya sepertinya kurang maksimal dimanfaatkan. Dari dinas bilang, di perbatasan tanjung itu ada saluran yang membuat banjir, itu ada rel kereta api, sampah juga menumpuk. Akhirnya, saya diberikan tantangan oleh dinas untuk menyelesaikan masalah banjir. Alhamdulillah saya diberikan izin dan permasalahan banjir terselesaikan. Dinas sampai mempertanyakan kinerja camat sebelumnya maka dari itu sekarang dana desa sekarang difokuskan ke pembangunan lagi. Warga harus aktif semuanya. Jangan sampai ada genangan yang menimbulkan bintik demam berdarah." (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PPL menyadari bahwa persoalan IPM di bidang kesehatan merupakan hal yang krusial. Beberapa strategi yang akan dilakukannya, yakni membangun saluran sanitasi umum, tidak memberikan izin untuk pernikahan anak di bawah umur, pemberian nutrisi pada ibu hamil, serta penambahan insentif bagi kader posyandu. "Katanya temen-temen, PKK, dan posyandu ini PR berat, saya sampai menekankan ke kader posyandu, jangan sampe bertele-tele, kerja *aja*, kalau minta ongkos *tak kasih,* dari dana desa ada untuk operasional, dulu tidak diberikan, makanya agak loyo dulu. Kalau sekarang jangan sampai begitu lagi," ujarnya.

Berdasarkan cerita ketiga PPL dan tokoh masyarakat, pemaknaan partisipan pendataan terutama tokoh desa dan petugas pendata merupakan bagian kunci dari pendataan. Tokoh masyarakat dipandang memiliki kesadaran individu untuk memahami permasalahan di desa dan kesadaran kolektif untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Kehadiran tokoh masyarakat merupakan mitra pemerintah untuk melaksanakan berbagai program yang bersifat pemberdayaan dan penguatan kapasitas.

G. Cerita Keluarga Terdata

Menurut Kepala Desa Dharma Tanjung dan data profil desa, 60% dari penduduk sebagai nelayan, 40% sebagai petani. Kebanyakan penduduk sebagai buruh nelayan dan buruh tani yang tidak memiliki kapal dan lahan sendiri. Hal tersebut membuat penghasilan warga bergantung pada alam. Beberapa warga lain mengungkapkan kekecewaannya ketika tidak mendapatkan bantuan disebabkan pada sumber penghasilan yang bergantung pada alam. Menurut salah satu Koseka yang juga warga setempat, terkait persoalan malnutrisi ini dikarenakan kebiasaan makan warga yang sederhana. Meski demikian, mereka memiliki aset berupa rumah dan ternak.

Keluarga pertama adalah keluarga Ibu S. Jarak rumah keluarga Ibu S tidak begitu jauh dengan balai desa dan jalan utama kabupaten. Rumah Ibu S terletak diantara lorong-lorong sempit di tengah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kampung nelayan. Rumah Ibu S berukuran kurang dari 20 meter persegi dengan dapur terpisah. Dinding rumah Ibu S terbuat dari bambu atau disebut dengan *gedek*. Sehari-hari, setelah bangun pagi, Ibu S beribadah salat subuh, menyiapkan makanan dan merawat suaminya yang sedang sakit. Jika ada permintaan, Ibu S bekerja sebagai pemijat bayi panggilan. "Penghasilan saya sebagai pemijat ya tidak tentu, kadang ada dan kadang tidak. Kalau tidak ada uang sama sekali, berhutang dulu atau makan seadanya," ungkap beliau. Ibu S adalah orang tua dari kepala dusun. Sehari-hari pendapatan Ibu S berasal dari ongkos pijat, dari suaminya yang bekerja serabutan jika sehat, dan dari anaknya yang bekerja sebagai nelayan.

Pertama kali Ibu S mendapatkan informasi mengenai Regsosek dari putranya. Informasi yang didapatkan adalah pendataan mengenai rakyat, masyarakat, kerusakan rumah dan jalan, serta untuk tujuan pemberian bantuan. Ibu S mengaku tidak berharap banyak mengenai bantuan pemerintah sebab terkadang hal tersebut tidak dapat diprediksi. Ibu S pernah mendapatkan BLT desa. "Itu saja BLT yang saya dapat. Bantuan lain tidak dapat. Ya belum rejeki," ujarnya. Menurut Ibu S, pendataan Regsosek ini penting kaitannya dengan bantuan masyarakat. Selama survei berlangsung, ia mengaku tidak kesulitan menjawab pertanyaan dari PPL. Sebab, seluruh pertanyaan ditanyakan dengan bahasa Madura dan dalam waktu singkat. "Ya paling hanya bertanya mengenai mata pencaharian, sekolah, dan yang lain. Kalau aset, kami tidak punya," tambahnya. Selama proses pengumpulan data dengan Ibu S, PPL juga membantu menerjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menyiratkan pentingnya keterlibatan warga lokal sebagai PPL dan pada konteks Sampang masih banyak penduduk usia senior yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Ibu S mengaku tidak sungkan untuk mengobrol dengan PPL yang sudah dikenalnya. Ibu S berharap dari pendataan ini dapat memperlancar distribusi bantuan seperti sembako.

Responden kedua adalah Ibu R. Rumah Ibu R tidak jauh dari rumah Ibu S. Deru kendaraan yang lewat menemani suasana saat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tim berbincang dengan Ibu R, sebab rumah Ibu R berada tepat di pinggiran jalan kabupaten. Saat bertemu dengan Ibu R bercerita,

> "Hari ini masak ikan layur dari hasil melaut. Tidak ada uang untuk beli sayur. Ikan dan nasi saja. Biasanya kalau ada uang, beli sayur ke pasar. Kalau tidak ada, saya biasanya ke Utara ambil daun kelor untuk disayur. Sehari-hari penghasilan dari hasil melaut suami dan anak-anak. Ada sebagian yang dijual. Kami tidak ada tabungan. Jadi hasil hari ini ya dimakan hari ini. Kebetulan ini cuaca sedang bagus, semoga nanti hasilnya baik." (Wawancara Ibu R, 1 November 2022)

Selama hidupnya di Desa Dharma Tanjung, ia belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Ibu R mendapatkan informasi mengenai Regsosek dari PPL yang mendatanginya. Menurutnya, seluruh pertanyaan mudah dijawab. "Jawab apa lagi mbak? Emas tidak ada, perahu tidak ada, sapi, dan kebun juga tidak ada," jawab Ibu R. Harapannya, pendataan ini dapat menjadi keterangan untuk menentukan penerimaan bantuan.

Selanjutnya, tim menuju rumah Ibu D. Ibu D sedang sibuk mengolah dan memisahkan ikan untuk dijual. Kuesioner survei dijawab dengan cukup singkat oleh Ibu D karena kondisi keluarganya tidak ada yang sakit dan ia juga tidak memiliki aset. Menurutnya, seluruh pertanyaan mudah dipahami. Setiap hari paling tidak Ibu D dapat menjual 25 kilogram ikan, meski terkadang ikan tersebut tidak habis dijual. Rata-rata penghasilan Ibu D, yakni Rp200.000,00 per hari. Jika hasil laut sedang bagus, ia mendapatkan uang hingga Rp300.000,00. Ibu D melelang harga ikan yang didapatkan dari nelayan. Anak Ibu D juga membolos sekolah untuk ikut melaut. "Sudah biasa itu (bolos sekolah) di sini," ujarnya. Ibu D memiliki tiga anak. Anak bungsunya masih bersekolah SMA dan kedua lainnya sudah berumah tangga. Ibu D juga tidak banyak berharap dari pendataan survei ini terkait bantuan pemerintah.

Pada saat tim peneliti berbincang dengan Ibu D, hadir pula menantu Ibu D. Menantu Ibu D berusia sekitar 25 tahun dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendidikan terakhir SMA dan suaminya berpendidikan sekolah dasar (SD). Ia menikah pada usia 18 tahun. Anak mereka yang berusia lima tahun memiliki berat badan yang kurang dari standar atau malnutrisi. Pola makan anak tersebut sehari-hari hanya mengonsumsi jajanan di warung. "Untuk memberikan nutrisi yang lebih baik, terkadang dia tidak mau makan. Hanya jajanan saja. Saya sebagai orang tua tidak mau memaksa," ujarnya. Ia mengaku tidak pernah ikut Posyandu. Di sisi lain, penghasilan suaminya sebagai nelayan terkadang tidak dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi keluarga. Fenomena ini mengamini temuan Tahangnacca dkk. (2020) dan Akombi dkk. (2017) bahwa persoalan malnutrisi berasosiasi dengan pendidikan dan pengetahuan orang tua akan nutrisi dalam pola asuh dan kemiskinan. Temuan lainnya yakni rendahnya partisipasi pada layanan kesehatan, seperti Posyandu.

Dari desa nelayan, penelusuran data beranjak ke desa di bagian Utara, yakni desa petani. Salah satu informan di desa petani, yakni Ibu L. Pendidikan terakhir yang ditempuh Ibu L adalah setingkat SD. Mata pencaharian suami dan Ibu L adalah buruh tani. Seluruh pekerjaan domestik dilakukan oleh Ibu L, juga pekerjaan pencarian penghasilan tambahan lainnya. Ibu L sehari-hari juga berjualan soto mie sederhana dan rujak. Meskipun dagangannya tidak diperlihatkan secara terbuka di luar rumah, warga di sekitar dusun mengenal Ibu L yang berjualan rujak dan soto mie. Ibu L mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Ibu L memiliki anak sebanyak lima orang dengan yang paling bungsu berusia dua tahun. "Sebenarnya kami tidak berencana punya anak lagi, Mba. Tapi nyatanya muncul lagi si bungsu." ujarnya. Namun, dua putranya yang lain bekerja di Jakarta dan sudah lulus SMK.

Enam bulan yang lalu putra Ibu L yang berusia dua tahun mengalami malnutrisi atau gizi buruk. Namun, setelah ia mengikuti program nutrisi makanan tambahan dan vitamin dari Posyandu, berat badan dan kondisi anaknya berangsur membaik. Berdasarkan penuturan Ibu L, pola makan keluarganya memang tidak seimbang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

"Biasanya hanya lauk berupa ikan dan nasi. Jarang mereka makan sayur atau protein lainnya," ia menjelaskan. Ia berharap, dengan adanya Regsosek ini permasalahan warga, seperti sekolah dan kurang gizi dapat tertangani.

Dari seluruh informan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang menjadi responden pendataan mendukung Regsosek meski mereka tidak terlalu berharap dengan bantuan yang akan datang. Persepsi masyarakat masih menganggap Regsosek dengan bantuan. Pada sisi yang lain, permasalahan gizi buruk masih dijumpai pada desa lokasi penelitian. Partisipasi aktif kader dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Posyandu berkontribusi pada pengurangan angka kurang gizi pada Desa Dharma Tanjung. Hal penting lainnya adalah keterlibatan warga lokal sebagai pendata.

H. Penutup

Salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data sehingga bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat miskin. Ketersediaan data yang akurat dan tepat menjadi akses program perlindungan sosial. Program-program bantuan sosial untuk rakyat mencakup program indonesia pintar (PIP), program jaminan kesehatan nasional (JKN-KIS), program keluarga harapan (PKH), & bansos rastra/bantuan pangan non tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Keluarga miskin adalah salah satu masalah yang dihadapi masyarakat, kemiskinan ini menjadi cermin ketidakmerataan sosial, pembangunan, dan pendidikan di seluruh Indonesia.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pendataan terhadap jumlah keluarga miskin di seluruh Indonesia. Dengan adanya ketersediaan data jumlah penduduk miskin ini maka diharapkan pemerintah akan dapat melakukan kegiatan pemerataan sosial dan ekonomi secara tepat dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akurat. Melalui pendataan Regsosek diharapkan didapatkan data yang akurat dan tepat tersebut.

Dukungan berbagai pihak pelaksana Regsosek di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang mulai dari BPS Kabupaten Sampang, pihak kecamatan, desa, para kepala dusun, serta Koseka, PML, dan PPL telah mensosialisasikan kepada warga agar memberikan data yang sesuai kondisinya. Berbagai kendala di lapangan, seperti adanya penolakan pendataan terutama dari kalangan masyarakat menengah dan lawan politik Kepala desa atau menutupi jawaban pendataan khususnya tentang aset tidak menyurutkan semangat PPL untuk mendata. Adanya *image* pendataan dengan bantuan sosial terutama pada saat pendataan masyarakat miskin sudah menjadi pembicaraan rutin PPL.

Harapan masyarakat agar dilaksanakannya perbaikan data dan tidak ada lagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kelancaran tersebut tidak lepas juga dari PPL yang berasal dari warga lokal yang paham dan mengetahui kondisi masyarakat serta bahasa lokal sehingga mempermudah pendataan.

Daftar Pustaka

Akombi, B. J., Agho, K. E., Hall, J. J., Wali, N., Renzaho, A. M. N., & Merom, D. (2017). Stunting, wasting, and underweight in Sub-Saharan Africa: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *14*(8), 863. https://doi.org/10.3390/ijerph14080863

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. (2022). *Kecamatan Camplong dalam angka 2022.* BPS Kabupaten Sampang. https://sampangkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/418401207a8b001d0e90259b/kecamatan-camplong-dalam-angka-2022.html

Bappeda Provinsi Jawa Timur. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Jawa Timur 2019–2024*. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

wp-content/uploads/dokren/rpjmd_jatim_2019_2024_official.pdf

Google. (t.t.). [Lokasi Kabupaten Sampang]. Diakses pada 5 Desember, 2022, dari https://goo.gl/maps/GLbzkcHN2SaBZ6a96

Kukutai, T. & Thompson, V. R. (2015). Censuses, population: Comparative international aspects. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Ed*, 290–295. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.41004-4

Liu, J., Zhu, Y., Serapio, M. G., & Cavusgil, S. T. (2019). The new generation of millennial entrepreneurs: A review and call for research. *International Business Review*, *28*(5), 101581.

Tahangnacca, M., Amiruddin, R., Ansariadi, & Syam, A. (2020). Model of stunting determinants: A systematic review. *Enfermeria Clinica*, *30*(4), 241–245. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.076

Thorvaldsen, G. (2017). *Censuses and census takers: A global history*. *Routledge.* https://doi.org/10.4324/9781315148502

Wertheim, W. F., & Nitisastro, W. (1971). Population trends in Indonesia. *Pacific Affairs*, *44*(1), 144–145. https://doi.org/10.2307/2755870

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

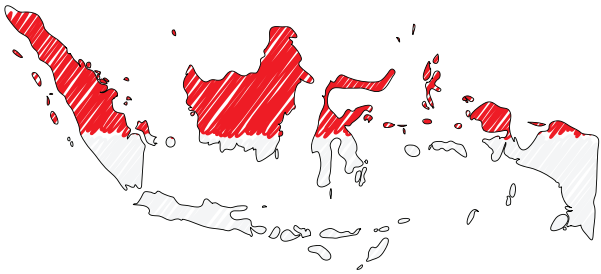

#6

Merefleksikan Makna Pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta

Nuzul Solekhah* & *Rachmini Saparita

A. Mempertanyakan Bantuan Sosial: Pengantar

"*La endi bantuane*, *didata bola bali ki endi bantuane*," celetukan bapak-bapak sambil menyeruput kopi hitam di warung kopi di samping pemakaman tua Kampung Semanggi. Kalimat ini jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti "Mana sih bantuannya, sudah didata berkali-kali, mana bantuannya?" Pertanyaan ini menjadi salah satu topik pembahasan dalam tulisan ini. Perbincangan pembuka di ruang kepala di lantai dua Kantor BPS Kota Surakarta (Solo), berlangsung hangat membahas pengendalian inflasi skala lokal tingkat kota karena prediksi arus keluar masuk aktivitas manusia di kota tersebut.

Pelbagai agenda yang menyedot arus pariwisata di Solo Raya menempatkan Kota terpadat di Jawa Tengah itu menjadi pilihan untuk menginap. Peristiwa ini menunjukkan efek berantai dari urbanisasi

N. Solekhah,* & R. Saparita
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nuzu001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Solekhah, N., & Saparita, R. (2023). Merefleksikan makna pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (167–226). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c708 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sekaligus *urban sprawl* di Solo Raya. Bagaimana magnet aktivitas pembangunan di pinggiran kota berdampak terhadap kebutuhan masyarakat di pusat kota, dan sebaliknya. Bagaimana pekerjaan di pusat kota menjadi daya tarik bagi pekerja dari pinggiran kota. "Ini sebentar lagi hotel di sini penuh saat milad Muhammadiyah pertengahan November nanti bu, efeknya akan terjadi inflasi di tingkat lokal karena mereka pasti akan kuliner, segala macem, harga akan naik, tapi masih terkendali lah," ucap Pak Totok Tavirijanto, Kepala BPS Kota Surakarta.

Masalah utama yang dihadapi Kota Surakarta terkait erat pada isu mengenai kependudukan dan pencatatan administrasi. Masalah sosial semakin kompleks ketika pertumbuhan penduduk semakin tinggi (Ricklefs, 2008). Bruce Curtis, Sosiolog Antropolog mensarikan perspektif Michel Foucault terkait penemuan istilah populasi menjadi titik balik yang cukup signifikan dalam proses transformasi suatu negara. Menurut Foucault, populasi adalah poros yang mengubah transisi dari "kebijakan berbasis otoritas berdaulat" ke dalam "kebijakan yang berbasis pemerintahan" dengan konsekuensi mendesentralisasikan negara di bawah liberalisme (Curtis, 2016).

Dua revolusi besar pada pengaruh penggunaan teknologi dalam kekuasaan sejak zaman klasik ialah perkembangan anatomi teknik politik yang ditujukan untuk tubuh individu dan pengembangan teknik bio-politik yang ditujukan untuk tubuh kolektif atau sosial. Keduanya tidak akan dapat terealisasi tanpa intervensi perhatian terhadap populasi (Curtis, 2016). Lebih lanjut, Foucault menggunakan populasi untuk menelisik tentang kepadatan penduduk (*populousness*) dan tubuh sosial (*social body*). Tubuh sosial merujuk pada kategori organik dan atomik yang dilekatkan pada individu-individu tertentu. Merujuk istilah pendataan yang dilakukan BPS, satuan lingkungan setempat (SLS) adalah suatu wilayah kolektif yang kondisi sosial ekonomi anggotanya tidak merata (BPS, 2020). Ketidaksetaraan kelas dan kondisi tersebut sangat bergantung pada keterjalinan relasi yang terbentuk di dalamnya. Konsep kepadatan penduduk memungkinkan untuk perencanaan kebijakan yang dapat digunakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pada masa mendatang, yang mana menurut doktrin merkantilisme, derajat kepadatan penduduk dianggap sebagai indeks kesejahteraan dan ukuran kebijakan.

Terdapat tiga metode yang lazim digunakan dalam pengumpulan data kependudukan di Indonesia, yaitu survei, registrasi, dan sensus (Tukiran, 2016). Pengumpulan data yang hanya dilakukan pada sebagian dari penduduk yang ada pada suatu waktu dan daerah tertentu biasa disebut sebagai survei. Pengumpulan data yang dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu untuk penduduk yang ada adalah registrasi. Adapun sensus adalah proses pencacahan secara menyeluruh terhadap penduduk yang ada pada suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Ada dua periode pelaksanaan sensus di Indonesia, yaitu sebelum kemerdekaan (1815–1945) dan setelah kemerdekaan (1961–2000) (Tukiran, 2016). Seiring berjalannya waktu, kebutuhan data terpadu di Indonesia diperlukan untuk memangkas anggaran pendataan yang berpotensi diklaim antar instansi/lembaga dengan kepentingan masing-masing. Tahun 2022 adalah tahun awal pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan dengan harapan tidak hanya menjadi acuan data dalam alokasi perlindungan sosial, tetapi juga digunakan oleh berbagai instansi (pusat-daerah) melalui strategi perencanaan yang lebih komprehensif. Pada Tabel 6.1 terlihat dinamika sensus di Indonesia dari periode sebelum merdeka dan setelah merdeka (Tukiran, 2016).

Tabel 6.1 Dinamika Sensus Penduduk di Indonesia

Periode waktu	Tahun Sensus	Keterangan
Sebelum merdeka	1815–1930	Selama 115 tahun dilakukan sepuluh kali sensus dan hanya sensus tahun 1905, 1920, dan 1930 yang dikategorikan memiliki data baik. Data sensus tahun 1930 adalah rujukan data yang banyak digunakan untuk analisis kependudukan pada tahun selanjutnya
	1942–1945	Sensus di tingkat lokal, namun semua data dokumen hasil sensus dinyatakan hilang, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Periode waktu	Tahun Sensus	Keterangan
Setelah Merdeka	1961, 1971, 1980, 1990, 2000	• Provinsi Irian Jaya belum termasuk dalam SP 1960 sehingga belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia • Sebagian wilayah Irian Jaya kota dan beberapa pulau terasing mulai didata pada tahun 1971 • Provinsi Timor Timur belum didata karena belum bergabung dengan Indonesia • Pencacahan 1980 mencakup wilayah lebih luas dengan ketercakupan Provinsi Irian Jaya baik area perkotaan maupun pedesaan • SP 1990 mencakup area terlengkap karena menjangkau daerah terpencil, suku terasing dan pulau kecil, dan wilayah Timur • SP 2000, Timor Timur terpisah dengan Indonesia, dan masalah pengungsian menjadi problem bersama • Sensus 2020 tetap berjalan, tetapi terkendala pandemi

Sumber: Diolah kembali dari Tukiran (2016)

Pada tahun 1971, data penduduk tingkat desa masih belum tersedia karena terjadi realokasi desa di seluruh kecamatan. Kecamatan yang terkena dampak, digabungkan untuk tujuan komputasi jumlah populasi sedemikian rupa sehingga semua realokasi desa terjadi dalam batas unit gabungan yang lebih besar (Chandra, 2019). Pada dasarnya, terdapat tiga jenis sensus yang dilakukan di Indonesia, yaitu sensus pertanian yang dilakukan setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3, sensus ekonomi yang dilakukan setiap tahun yang berakhiran angka 6, dan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun berakhiran angka 0. Proses pendataan penduduk memiliki peran yang sangat penting bagi perencanaan kebijakan, sekaligus sebagai dasar perancangan sistem penyaluran perlindungan sosial agar tidak salah sasaran. Adanya proses pendataan yang masih tumpang tindih dilakukan oleh *stakeholders*, baik pusat maupun daerah menjadi salah satu latar belakang urgensi satu data terpadu terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tahun ini menjadi tahun pertama penyelenggaraan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Regsosek di Indonesia. Proses pendataan Regsosek menyasar sampai unit rumah tangga yang ditandai oleh titik di setiap rumah terdata melalui *Global Positioning System* (GPS). Perkembangan teknologi dan komunikasi turut mempengaruhi dinamika pendataan di Indonesia sehingga data yang terekam dapat lebih akurat.

B. Solo yang Terjepit: Otentisitas Bentang Alam

Target lokasi yang menarik dalam kajian ini diarahkan pada daerah dengan konsentrasi kepadatan penduduk, pendatang, dan menghadapi tantangan multidimensi. Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kota Surakarta, Kelurahan Semanggi adalah lokus yang sesuai. Kampung Semanggi menempati posisi kedua terpadat setelah Sangkrah dan representatif terhadap permasalahan multidimensi. Wilayah yang memiliki penduduk sebesar hampir 24 ribu jiwa (BPS Kota Surakarta, 2021) tersebut, pada awalnya adalah wilayah kumuh yang berdekatan dengan Bengawan Solo. Perubahan kondisi wilayah tentunya menyebabkan dinamika pada kehidupan masyarakat. Berbagai pembenahan dan relokasi Kampung Semangging (Gambar

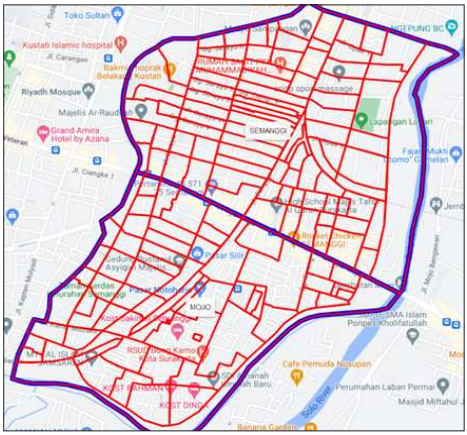

Sumber: BPS Surakarta (2023)

Gambar 6.1 Peta Kelurahan Semanggi dan Mojo, Surakarta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

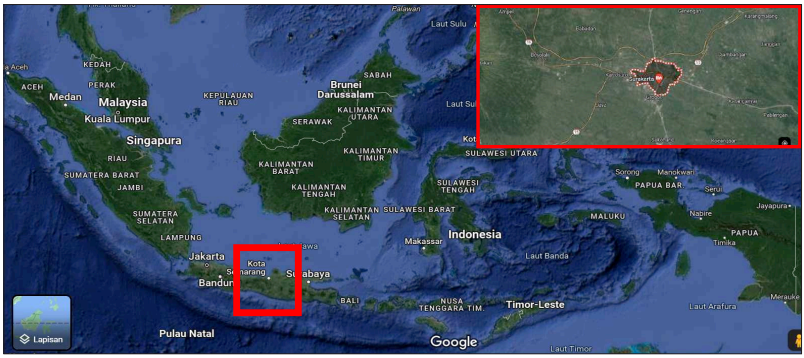

Sumber: Google (t.t.)

Gambar 6.2 Peta Kota Surakarta

6.1) menjadi pilihan yang patut untuk dikaji secara mendalam, terkhusus pada ruang sosial yaitu relasi sosial yang dibangun di atas struktur ruang yang senantiasa mengalami ketegangan.

Kota Surakarta diapit oleh Kabupaten Boyolali, Karanganyar, dan Sukoharjo. Kota Surakarta sebagai kota utama di Solo Raya menjadi magnet bagi para pendatang dari pinggiran Kota Surakarta (Solo). Para pendatang menyebabkan proses perebutan ruang yang oleh McKenzie diistilahkan sebagai invasi atas ruang (McKenzie, 1924). Perebutan ruang di pinggiran perkotaan terjadi sebagai imbas dari perebutan alat-alat produksi. Meskipun urbanisasi di kota di Asia Tenggara tidak serta merta disebabkan oleh industrialisasi semata, tetapi lebih pada ketidakcukupan struktur ekonomi dan sosial kota (Ever & Korff, 2002). Berbagai argumen tersebut tampaknya tergambarkan dari situasi di Kelurahan Semanggi, tepatnya di RT 3 RW 3. Warga paruh baya yang bekerja di ranah informal, seperti buruh bangunan, sopir becak, dan sopir angkot berkumpul di satu warung yang lokasinya berdekatan dengan makam. Warga yang tidak mendapatkan tempat duduk akan duduk di atas kijing makam yang berada satu tenda dengan warung. Pemandangan ini merupakan peristiwa yang lumrah bagi warga. Sejarawan perkotaan, Purnawan Basundoro dalam bukunya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengungkap bahwa saat masyarakat miskin kota tidak mampu mengalahkan manusia yang hidup, maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan ruang layak adalah mencoba mengalahkan manusia yang telah mati, yang tidak mungkin memberikan perlawanan jika dipikir secara logika (Basundoro, 2022).

Keberadaan Kota Surakarta sebagai tanah kelahiran Presiden Joko Widodo rupanya memberi nilai tawar kepada para penghuni kampung di pinggiran kota. Kontestasi politik mempengaruhi proses pembenahan yang kemudian harus dibayar oleh aktor politik jika ingin memenangkan wilayah tersebut. Para penghuni Kampung (Kelurahan) Semanggi mendapatkan angin segar dengan proyek pembangunan fisik yang dengan mulus dapat cepat. Ketua RW Kampung Harmoni membenarkan alasan dibalik kesediaan masyarakat untuk tetap kompak dan bersatu padu melaksanakan relokasi. Nur Rachmad sebagai ketua RW mengatakan, "Kerukunan mbak, kalau semua orang di sini 100 nggak punya semua itu rukun, tapi kalau dari 100 itu yang 20 punya tapi 80 nggak punya wah itu jadi rame." Jawaban Nur Rachmad menggambarkan bagaimana pola relasi di atas kawasan relokasi dapat terbangun. Solidaritas masyarakat terbangun atas kesamaan nasib dan ketidakpastian.

Masyarakat menerima untuk menunggu selesainya proses pembangunan rumah relokasi. Masyarakat mengorganisir diri untuk mencari lokasi tinggal sementara sesuai dengan preferensi informasi dan biaya yang dimiliki. Ada sebagian warga yang mengontrak di dekat lokasi asal, ada sebagian lagi menumpang di rumah saudara ketika proses pendataan Regsosek berlangsung. Koordinasi antara petugas pendata dengan ketua RT dan RW menjadi penentu yang sangat penting karena ketua RT dan ketua RW yang akan menunjukkan dimana lokasi kepindahan penghuni rumah di bantaran sungai.

Berdasarkan penelusuran literatur, Kota Surakarta merupakan kota rawan banjir (Setyaningrum dkk. 2017; Padawangi, 2019). Namun, semenjak pembangunan parapet di tanggul Bengawan Solo, bencana hidrometeorologi sudah jarang masuk ke pemukiman

Buku ini tidak diperjualbelikan.

warga. Hal ini pun dibenarkan oleh Asisten Manajer dan Wartawan Tribunnews.

> "Jadi, saya itu tugas di Solo 2010 masih pak Jokowi, periode kedua, di Solo memang dulu jadi kawasan banjir, terutama pinggiran Bengawan, Jebres, Pasar Kliwon, sama satunya, Laweyan, yang paling parah itu Jebres sama Pasar Kliwon. Dari dulu memang jadi kawasan yg dibilang kumuh. Jadi, kalau masuk kampung jangan heran kalau baunya menyengat. Kaya tengkletek, kaya di labirin di Jakarta, banyak langganan banjir. Dulu kalau banjir rumah-rumah hanya tinggal atap permukiman pucang sawit, dulu sangat mengerikan banjir seatap. Dulu ketika banjir wartawan selalu punya catatan, pagi ini hujan sampai malam, nanti aku mau liput kemana, pasti nanti warga tidur di emperan bantaran. Banjir selutut ya selutut yang kami tulis. (Asep, Tribunnews, Wawancara 2 November 2022)

Program pembangunan fisik perlahan-lahan mulai nampak hasilnya. Mampukah program yang dibangun di ruang fisik tersebut merubah ruang sosial yang tercipta di atasnya? Fakta di lapangan menggambarkan bahwa warga sadar atas stigma yang dilekatkan kepada masyarakat Kampung Semanggi. Relokasi yang menghadiahkan bangunan fisik berupa rumah membawa warga Kampung Semanggi dan Kampung Harmoni pada tahapan equilibrium. Warga Kampung Semanggi dan Kampung Harmoni merasa setara dengan warga yang lain dengan adanya kepemilikan rumah dan tanah sebagai tolak ukurnya. Ketika dilakukan pendataan Regsosek, warga antusias dengan menyebutkan kepemilikan dokumen administrasi, kemudahan akses pada pelbagai fasilitas kesehatan, kependudukan, pendidikan, dan lain-lain. Warga juga menyebutkan lembaga sosial yang ada di lingkungannya, mulai dari PKK, Posyandu Lansia, Kelompok Ilmiah Remaja, dan sebagainya. Pernyataan warga menggambarkan bagaimana kepercayaan diri dalam bersosialisasi meningkat seiring dengan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Rupanya, ruang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

fisik mempengaruhi aktivitas sosial di atasnya sehingga tercipta pola relasi baru seiring dengan pembenahan struktur ruang yang sedang dilakukan.

Kesulitan pendataan justru dialami petugas ketika mendata rumah warga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Salah satunya, wilayah yang penghuninya adalah keturunan pendatang, tetapi sudah lama berada di wilayah Baluwarti. Kriteria bangunan dengan tembok dan pagar yang tinggi rupanya mempengaruhi kontak sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini juga menyulitkan petugas pendata karena membutuhkan waktu lama untuk sekedar permisi dan menyampaikan maksud pendataan. Dari perspektif sosiokultural, Baluwarti adalah kelurahan dengan tingkat kesulitan pendataan yang bertingkat. Pada akhirnya, beberapa petugas terpaksa mengajak ketua RT/RW setempat untuk mendatangi rumah-rumah yang sulit diakses. Selain masyarakat kelas menengah ke atas, rupanya pendataan di kawasan Keraton Surakarta juga membutuhkan strategi khusus. Adanya peraturan adat bahwa keluarga kerajaan yang sudah menikah diharuskan keluar dari lingkungan keraton menyebabkan persebaran keluarga kerajaan tidak hanya di luar Baluwarti, tetapi juga sampai luar wilayah Solo dengan kepemilikan KTP Solo.

Selain proses pendataan warga di pemukiman, pada tanggal 29 Oktober 2022 secara serentak di Indonesia dilakukan malam Regsosek, yaitu pendataan terhadap tunawisma dan warga yang tidak memiliki hunian tetap. Responden yang diwawancarai sebagian berada di atas becak, trotoar, depan toko, dan disanalah mereka tinggal. Responden juga ada yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, sebagian dari mereka ada yang terganggu pendengarannya, memiliki gangguan mental, pikun, dan beberapa kondisi lainnya. Beberapa responden bahkan ada yang tidak memiliki kartu identitas. Kepala BPS Kota Surakarta memberikan surat tugas dengan catatan bahwa semua petugas pendataan dilarang menggunakan baju dinas agar mereka tidak merasa terganggu. Terakhir, mekanisme *tagging* dilakukan di lokasi tempat dimana mereka tidur.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. Menelisik Pemahaman Alur Bisnis Regsosek

Suatu obrolan menyelingi suasana perjalanan menuju kantor BPS Kota Surakarta. Menurut salah satu statistisi BPS RI, Agus Pramono mengistilahkan "keranjang" sebagai kategorisasi terhadap sekian persen masyarakat yang memerlukan intervensi dari pemerintah. Pendataan sosial ekonomi pada ujungnya memang akan digunakan sebagai penunjuk arah kepada siapa intervensi pemerintah akan dilakukan. Selama ini, penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang termasuk kategori 40% penduduk miskin. Namun, pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami dinamika sangat intens.

Pada umumnya, para pihak berpikir bahwa masyarakat miskin ialah kelompok yang memerlukan intervensi program pemerintah. Namun, realitanya masyarakat yang terkena bencana alam maupun sosial juga berpotensi kehilangan aset yang mereka miliki. Selain itu, angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan maupun suntikan dana usaha belum tentu berasal dari kalangan miskin, tetapi dari segi analisis kelayakan mereka berhak mendapatkan intervensi tersebut. Oleh karena itu, "keranjang" yang tadinya digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan tersebut perlu diperbarui. Salah satu upaya BPS sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pendataan adalah melalui kegiatan Regsosek. "Pemerintah butuh data yang komprehensif, bukan hanya data 40% terbawah, tetapi 100% data dari warga. Nah, makanya Regsosek ini didesain untuk memenuhi kebutuhan itu," ungkap Bapak Agus Pramono.

Selanjutnya, hal menarik dari proses pendataan Regsosek ini adalah adanya keterlibatan komunitas dalam proses pendataan. Artinya, data yang terekam bukan murni dari sudut pandang petugas lapangan, tetapi juga hasil diskusi dengan komunitas yang dalam hal ini dipahami sebagai lingkungan dimana warga yang terdata tinggal dan berdomisili. Komunitas tersebut mencakup ketua RT/RW dan tetangga yang mengetahui kondisi riil dari kondisi sosial ekonomi warga yang didata. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengonfirmasi kesesuaian data yang disampaikan oleh warga terdata

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan kesaksian dan pendapat komunitas di sekitarnya. Bapak Agus Pramono mengemukakan, "Kalau dulu ada PPLS, 2011, kemudian PBDT tahun 2015, keduanya adalah untuk menjaring 40% terbawah tadi."

Registrasi sosial ekonomi (Regsosek) merupakan pendataan kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia. Data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan keluarga, melalui kartu keluarga di tempat masyarakat tinggal/menetap. Informasi kondisi sosial ekonomi yang dikumpulkan, meliputi kondisi sosio-ekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya (BPS, 2022). Data Regsosek diharapkan dapat menjadi jembatan berbagai penggunaan data secara lintas lembaga/kementerian dan lintas daerah, hingga tingkat desa/kelurahan karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya. Berbagai media penyebaran dipergunakan BPS untuk sosialisasi kegiatan Regsosek. Gambar 6.3 memperlihatkan aneka bentuk *leaflet* sebagai media penyebaran informasi Regsosek.

Regsosek direncanakan akan diperbarui secara rutin dan dikelola di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kapasitas dan tingkat akurasi yang baik, Regsosek mendukung upaya perencanaan, penganggaran, dan pengendalian yang berbasis bukti dan data sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian berbagai target pembangunan. Cakupan informasi Regsosek mendukung proses perencanaan multisektor di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, perumahan dan permukiman, pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia (BPS, 2022).

Tahun 2022 merupakan tahapan pertama kegiatan Regsosek, yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data, dan pengumpulan data. Sementara tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun 2023, dengan kegiatan pengolahan data, analisis data, dan diseminasi (penyerahan data) masyarakat melalui pemerintah (BPS, 2022). Bagaimana masyarakat memahami

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: BPS berbagai publikasi (2022)

Gambar 6.3 Berbagai informasi Regsosek yang tersebar di masyarakat

data terpadu yang ditawarkan dari Regsosek, dan pendataan apa saja yang kedepannya berpotensi tidak lagi dilaksanakan karena sudah dipangkas oleh Regsosek?

"Mungkin, ini saya bilang mungkin ya, karena kaitannya kan dengan kementerian masing-masing. Kemungkinan nanti pakai data ini, tinggal nanti Bappenas yang mengorganisir. Oh, kebutuhan ini pakai data ini, ini pakai ini, begitu," pendapat Bapak Agus Pramono. Kegiatan Regsosek dipersiapkan dengan cukup singkat, yaitu mulai dari bulan Juli 2021. Koordinasi oleh BPS dengan berbagai pihak dilakukan selama dua bulan (Juli–Agustus 2022), seperti rapat koordinasi daerah, perekrutan pelaksana di lapangan, perekrutan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), maupun Petugas Pendataan Lapangan (PPL).

Kegiatan selanjutnya ialah pelatihan instruktur dan petugas lapangan. Perekrutan dan pelatihan dilaksanakan pada bulan September–Oktober 2022. Pendataan di lapangan dilaksanakan pada periode satu bulan, mulai dari 15 Oktober–14 November 2022. Kemudian, ada pula malam Regsosek juga dilaksanakan di Kota Surakarta pada tanggal 29 Oktober 2022. Pendata didampingi BPS Kota Surakarta menjalankan tugas mulai dari pukul 10.00 malam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keterangan: (a) petugas bersiap dari Kantor BPS Kota Surakarta; (b) mendata warga yang bertempat tinggal di becaknya; (c) mendata warga yang biasa tinggal di emperan toko. Foto: BPS Kota Surakarta (2022)

Gambar 6.4 Malam Pendataan Regsosek 29 Oktober 2022 di Kota Surakarta

sampai pukul 03.00. Pemilihan waktu didasarkan pada kondisi para tunawisma akan berada di tempat mereka beristirahat (Gambar 6.4), baik yang beristirahat di becaknya maupun di emperan toko.

Moda pengumpulan data masih menggunakan kertas dan pensil dalam mewawancara keluarga. Pengumpulan data dilengkapi dengan *geotag* dan foto keluarga miskin. Pendataan awal menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Pendataan lapangan pada tahap awal (2022) diawali dengan koordinasi dan konsolidasi teknis antar petugas lapangan, baik di tingkat kecamatan (Koseka), kelurahan (PML), dan lapangan (PPL). Permintaan izin ketua/pengurus satuan lingkungan setempat (SLS) dilakukan oleh petugas lapangan Regsosek. Disamping permintaan izin, petugas Regsosek dituntut mengenali wilayah kerja mereka. Para ketua/pengurus SLS melanjutkan tugasnya dengan mengidentifikasi status kesejahteraan keluarga secara subjektif. Penyiapan keperluan basis data dan kebutuhan teknis dilaksanakan terlebih dahulu dengan pencetakan instrumen, pengadaan serta perlengkapan pendataan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penilaian status kesejahteraan keluarga ini dilanjutkan secara objektif melalui wawancara langsung ke rumah tangga. PPL juga melakukan *geo-tagging* lokasi keluarga. Hasil kerja PPL diperiksa oleh PML. PML mengawasi kegiatan pendataan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang telah diisi oleh PPL. Setiap PPL diberi tugas mengumpulkan data sekitar 250–400 keluarga, sementara setiap empat PPL dimonitor oleh satu PML. Koordinator (Koseka) mengawasi kegiatan pendataan dari PML dalam lingkup kecamatan dan menyerahkan hasil pendataan ke BPS kabupaten/kota di mana mereka bertugas.

Data yang dikumpulkan secara *door to door* (Gambar 6.5), meliputi data kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, dan pemberdayaan ekonomi. Data tersebut menjadi basis data kependudukan yang terupdate. Verifikasi daftar keluarga, baik keberadaannya maupun status kesejahteraan, dilakukan PML bersama ketua/pengurus SLS, setelah pendataan diselesaikan PPL. Pendataan lapangan dapat dimonitor oleh BPS melalui *dashboard monitoring*.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.5 PPL didampingi PML dan Peneliti BRIN saat mendata Regsosek secara *door to door*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Data sosial ekonomi penduduk Indonesia perlu dikumpulkan secara valid agar pemerintah dapat merespon kebutuhan perlindungan sosial di masyarakat. Basis data sosial ekonomi penduduk bersumber langsung dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu Rukun Tetangga (RT). Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat berbasis data yang akurat. Data akurat diperlukan untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat. Pengolahan data Regsosek direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023. Bagi Pengolah data akan dilakukan *capacity building* pemeringkatan *proxy mean test* (PMT), yaitu untuk memperkirakan kondisi sosial ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga, seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset, dan lain-lain (BPS, 2022). Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga, termasuk oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (TNP2K, 2022). Pelatihan pengolahan data pada pengolah data dilakukan pada tahun 2023.

Pengelolaan data hasil Regsosek dilakukan dengan prinsip integritas dan interoperabilitas sehingga hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengambil kebijakan (BPS, 2022). Hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk. Pelaksana Regsosek tergabung dalam gugus tugas pendataan yang berkoordinasi dengan penyelenggara satu data Indonesia. Kementerian/lembaga yang termasuk dalam gugus tugas adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi, dan Informatika, serta BPS (BPS, 2022).

D. Peran BPS Pusat dan Daerah dalam Regsosek

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Republik Indonesia, 1997), yang berperan sebagai penyedia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga kementerian/lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.

Selaras dengan pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2022 (Kementerian PPN/Bappenas, 2022), Regsosek seluruh penduduk merupakan salah satu reformasi sistem perlindungan sosial melalui perbaikan basis data sosial ekonomi yang mengintegrasikan kebutuhan serta pemanfaatan bersama kementerian dan lembaga. Selain BPS RI, peran Kementerian PPN/Bappenas juga Kementerian Kominfo dalam Regsosek adalah mengorkestrasi seluruh data tanah air sampai ke daerah. Dengan pengalokasian fiskal sedemikian rupa untuk seluruh kementerian/lembaga maka Kementerian PPN/Bappenas mendorong agar terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota (Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

Peran BPS Pusat dan Daerah dalam Regsosek mencakup koordinasi dan permintaan dukungan dari institusi yang sejajar. Koordinasi dan permintaan dukungan dari menteri/kepala lembaga dilakukan oleh BPS RI, sementara hal yang sama juga dilakukan oleh BPS di tingkat provinsi kepada kepala pemerintahan provinsi/gubernur. Begitu juga koordinasi dilakukan BPS wilayah/kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota. Sosialisasi dan edukasi internalisasi serta publisitas dilakukan di setiap level pemerintahan tersebut. Agar Regsosek dapat dimanfaatkan secara luas dan dalam jangka panjang maka proses pemutakhiran data Regsosek direncanakan secara berkala dan terintegrasi (BPS, 2022). Pemerintah pusat dan daerah dapat memanfaatkan data dari Regsosek sebagai bahan pembuatan kebijakan dan program khususnya untuk penerima bantuan sosial, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pemberdayaan masyarakat secara tepat, baik sasarannya, waktunya, dan jumlahnya, serta dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi. Pendataan Regsosek akan menghasilkan data terpadu, data itu tidak hanya digunakan untuk program perlindungan sosial saja, melainkan digunakan untuk keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1. Kepentingan Daerah pada Data Regsosek

Regsosek merupakan langkah untuk mendukung program pembangunan yang komprehensif di bidang sosial ekonomi agar data yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menyalurkan program yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Selama ini, kerap kali data penerima manfaat bantuan saling tumpah tindih dan terkadang sulit untuk diakses secara terbuka. Sebaliknya, pemerintah daerah yang memiliki program dan inisiatif penyaluran bantuan memerlukan data pelayanan/program tersebut. Namun, data komprehensif mengenai target dan kriteria masyarakat penerima manfaatnya belum tersedia. Fungsi pendataan memegang peran vital sebagai kunci pengalokasian sasaran program dan bantuan. Ketersediaan basis data dapat membantu menilai ketepatan target penerima manfaat. Di sisi lain, pembaruan data perlu terus menerus dilakukan sejalan dengan dinamika masyarakat.

Regsosek memiliki peran penting karena kemampuannya menghasilkan satu data dalam mendukung program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Regsosek diharapkan dapat menjawab permasalahan yang kerap muncul terkait program pemerintah. Selama ini, data perlindungan sosial terpisah-pisah. Masing-masing kementerian dan dinas memiliki data sendiri-sendiri sesuai kebutuhan mereka dan sering kali muncul persoalan ketika ada program intervensi dari pemerintah. Data sering tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena tidak ter*update* secara cepat dan dapat pula tidak akurat. Ada warga yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak mendapatkan, demikian sebaliknya, warga yang tidak termasuk kriteria penerima justru mendapat bantuan. Kegiatan Regsosek pun tidak sebatas pendataan, namun merupakan pengelolaan data secara berkelanjutan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Reformasi sistem kerja pada pelaksanaan Regsosek 2022 dilakukan di tingkat kabupaten/kota, melalui kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah. Bupati/wali kota mendapat arahan dari presiden melalui gubernur dengan memberi instruksi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung dan berkolaborasi dengan BPS di tingkat kabupaten/kota. Sementara di tingkat kecamatan, Koseka berkoordinasi dengan camat untuk mendapat dukungan kegiatan Regsosek. PML dapat berkoordinasi dengan lurah/kepala desa, dan PPL dapat berkoordinasi dengan ketua/pengurus SLS dalam rangka pelaksanaan pendataan lapangan.

D. Pelaksanaan Regsosek di Kota Surakarta

Target pendataan Regsosek di Kota Surakarta (Solo) adalah seluruh penduduk yang bermukim di Kota Surakarta, baik penduduk yang ber-KTP, atau ber-KK (kartu keluarga) di Kota Surakarta maupun yang tidak (ber-KTP dan ber-KK) Solo, tetapi tinggal di Solo. Kepala BPS Kota Surakarta harus memastikan tidak ada penduduk yang terlewat. Jika mengacu pada sensus penduduk 2022 (BPS Kota Surakarta, 2020), jumlah penduduk di Kota Surakarta sekitar 522 ribu orang, dan pada 2022 jumlahnya sudah berkembang lagi.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, pelaksanaan Regsosek di Kota Surakarta (Solo) berjalan lancar. Berbagai upaya dari Pemerintah Kota Surakarta telah dilakukan. Wali Kota Surakarta mengintruksikan bahwa seluruh kades, lurah, camat, beserta lembaga/dinas mendukung penuh kegiatan Regsosek. Regsosek memiliki basis data tunggal sebagai arah tujuan pembangunan sehingga semua program perlindungan sosial masyarakat dapat berjalan lancar. Sejalan dengan penyampaian Kepala BPS Kota Surakarta, BPS RI, dan BPS Provinsi Jawa Tengah di awal November (Gambar 6.6), menyatakan ada tiga hal penting dalam pelaksanaan Regsosek, yaitu kolaborasi, koordinasi, dan integrasi. Kepala BPS Kota Surakarta menyampaikan bahwa kolaborasi dilakukan antara OPD dan BPS Kota Surakarta. Koordinasi dilakukan dengan keterbukaan komunikasi antar OPD

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.6 Pertemuan Peneliti BRIN bersama Kepala BPS Kota Surakarta, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Pusat

untuk kelancaran Regsosek. Integrasi antar OPD dan BPS dilakukan agar data yang dihasilkan BPS dapat dipergunakan secara bersama. Dengan tiga hal penting tersebut, data yang terkumpul diharapkan merupakan data yang berkualitas.

Mayoritas petugas lapangan yang menjadi mitra BPS Kota Surakarta adalah mahasiswa, dan Karang Taruna. Petugas lapangan mendapatkan pelatihan selama dua hari dengan 16 instruktur daerah. Petugas pendataan lapangan diterjunkan di lima kecamatan di Kota. Setiap petugas pendataan lapangan ditargetkan mengumpulkan data sebanyak 250 kepala keluarga (KK). Di Kota Surakarta telah direkrut 800 petugas lapangan, yang terdiri dari 20 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), 156 Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan 624 Petugas Pendataan Lapangan (PPL).

Mekanisme perekrutan petugas lapangan dilakukan melalui metode seleksi dari *database* mitra yang memenuhi kriteria. *Database* mitra merupakan sekumpulan informasi yang berisi biodata serta rekam jejak mitra BPS yang pernah/sedang bertugas dalam sensus/survei yang dilakukan BPS. Melalui *database* mitra ini, BPS Kota Surakarta memperoleh petugas yang cukup berkualitas. Para mitra

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.7 Koordinasi untuk berkomunikasi dengan pemangku wilayah.

BPS yang telah terseleksi mendapat pelatihan, dilanjutkan dengan berbagai kesempatan untuk berdiskusi sebelum terjun ke lapangan.

Berbagai kendala yang mungkin terjadi di lapangan sudah diantisipasi oleh BPS Kota Surakarta, khususnya terkait kesediaan warga untuk menerima kedatangan Tim Pendataan. Melalui rapat koordinasi antar OPD, BPS juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku wilayah (Gambar 6.7), bahkan sampai ke tingkat RT. Koordinasi ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ditemui di lapangan dan warga yang didata menerima dan memberikan informasi dengan jujur.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.8 Konsolidasi Mitra BPS Kota Surakarta dalam Penentuan Strategi Pendataan Regsosek

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berbagai lika-liku proses pendataan dialami petugas pendata. Para petugas pendata melaksanakan beberapa konsolidasi (Gambar 6.8) dan merumuskan strategi pendataan untuk menghindari dan mengantisipasi kendala yang muncul. Strategi yang dirumuskan dan dijalankan di lapangan dianggap berhasil oleh para pendata, yaitu secara rutin bertemu dengan PML dan Koseka di wilayah kerja masing-masing.

Penelusuran informasi tersebut juga dilaksanakan oleh peneliti BRIN, BPS di level Pusat, Provinsi Jawa tengah dan Kota Surakarta (Gambar 6.9) sehingga informasi yang disampaikan PPL, PML, Koseka, dan BPS adalah valid. Teknik ini merupakan teknik triangulasi data, seperti yang dijelaskan Sugiyono (2016).

Pendataan Regsosek mencakup dua tahap. Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan pendataan, dan pada tahun 2023 merupakan tahap pengolahan data dan konsultasi publik. Forum konsultasi publik adalah forum penyampaian hasil Regsosek kepada masyarakat pada tahun 2023. Meskipun Regsosek sedang berjalan, Pemerintah Kota Surakarta sudah meminta BPS Kota Surakarta memperbarui (*updating*) data sensus Regsosek 2022. *Updating* data ini menurut Pemerintah Kota Surakarta cukup penting untuk kebutuhan program-program pemerintah kota, khususnya dalam hal intervensi pemberdayaan

(a) (b)

Keterangan: (a) Diskusi dengan BPS Kota Surabaya; (b) Observasi Lapang Proses Pendataan
Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.9 Peneliti BRIN, BPS Pusat, Provinsi dan Kota Surakarta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(a) (b)

Keterangan: Penjelasan disampaikan di (a) ruang kantor secara formal, (b) lapangan

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.10 Peneliti BRIN mendapat penjelasan pelaksaaan Regsosek dari BPS.

masyarakat. Dengan data yang *up to date*, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan penyusunan APBD kota dapat disiapkan satu tahun atau minimal enam bulan sebelumnya. Sementara pada kasus kegiatan yang mendesak, data Regsosek dapat memberi gambaran data paling aktual. Penelaahan tentang Regsosek dilakukan pendamping kegiatan lapangan dari BPS RI. BPS Provinsi turut terlibat sebagai koordinator kegiatan lapangan dalam cakupan wilayah Jawa Tengah. Penanggung jawab Regsosek Kota Surakarta (Kepala BPS Kota Surakarta) pun turut memantau Koseka, PML, dan PPL.

Para pengelola kegiatan Regsosek sangat memahami pentingnya Regsosek untuk pencapaian satu data Indonesia. Penjelasan dan pendampingan dari BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kota Surakarta memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang mekanisme dan alur kerja Regsosek (Gambar 6.10). Seluruh komponen dari BPS turut membantu petugas lapangan agar pelaksanaan pendataan berjalan dengan lancar (Gambar 6.11). Seluruh komponen dari BPS ikut mensosialisasikan kegiatan Regsosek agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pendataan.

"Kami mengajak masyarakat dan kita semua mendukung terlaksananya pendataan Regsosek di Kota Solo untuk terwujudnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.11 Peninjauan pelaksanaan Regsosek di Kelurahan Semanggi

satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," ungkap kepala BPS Kota Surakata (Gambar 6.9). Seluruh aparat pemerintah kota, menurut Kepala BPS juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Regsosek adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Pemanfaatan Regsosek harus dimaksimalkan untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan di pemerintah kota sampai unit terkecil (RT).

Proses identifikasi program bantuan dapat berjalan cepat dan sesuai target yang disasar apabila menelaah komponen data dalam

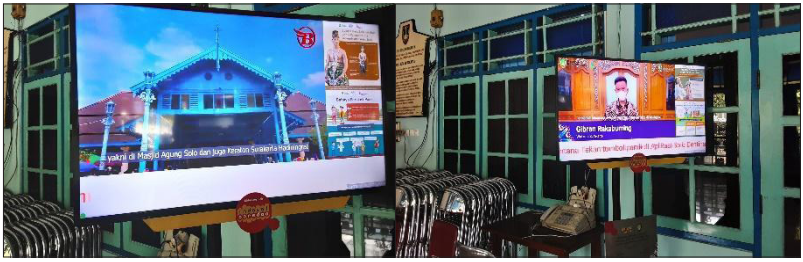

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.12 Informasi Regsosek dan Program Pembangunan di Kota Surakarta di TV Lokal

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Regsosek yang sudah komprehensif. Pemahaman para pengelola Regsosek yang baik ini disosialisasikan oleh pemerintah kota secara masif melalui saluran televisi lokal yang dipasang di setiap kelurahan (Gambar 6.13), bahkan di beberapa titik sampai ke RT agar masyarakat memahami kegunaan Regsosek dan tidak salah memahami tujuannya. Regsosek yang merupakan basis data lengkap sehingga perlu dimutakhirkan secara berkala hingga di tingkat kelembagaan masyarakat yang terkecil (RT/RW).

E. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Seorang pria paruh baya berusia 66 tahun dengan sabar menunggu petugas pendata dan pendamping. Antusiasmenya terlihat dari raut muka dan intonasi bicaranya yang ingin segera berbagi banyak cerita tentang kampung yang sedang berbenah, yang saat ini berganti nama menjadi Kampung Harmoni (Gambar 6.13). Bersama dengan dua ibu rumah tangga penerima manfaat, pemuda tersebut menunjukkan jalan menyusuri gang ke lokasi bangunan rumah yang akan ditempati sebagai hunian baru setelah serah terima fasilitas relokasi. Di tengah perbincangan, beliau memperkenalkan diri, "Perkenalkan, saya Nur Rachmad, usia 66 tahun, anak 7, istri 1, Ketua RW 23 Kampung Semanggi yang kini menjadi RW 1 RT 2 Kelurahan Mojo setelah pemekaran." Beliau melanjutkan, "Saya asli putra daerah, Mbak. Sejak muda jadi ketua RW di sini, sekarang jadi RW 1 RT 2 Kelurahan Mojo, kalau dulu RW 23 sini, Mbak."

Beliau menceritakan dengan sangat runtut dan cepat bagaimana arus berbagai program keluar masuk ke kampungnya setelah dinyatakan sebagai kampung paling kumuh se-Kota Solo berdasarkan peringkatpendataan yang ditengarai dari OPD (Gambar 6.13). Bantuan yang pernah masuk mulai dari *World Bank*, SMF, Gojek, PLN, PDAM, Bank Solo, Bang Jateng dan diceritakan oleh Pak Nur dengan kontribusinya masing-masing. Perbaikan fasilitas air layak minum, fasilitas sanitasi, listrik, pembangunan infrastruktur paving

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jalan, sampai dengan lampu penerangan. Tingginya arus migrasi dari pinggiran Solo menyebabkan daerah tersebut menjadi kawasan kumuh dan padat penduduk.

Secara historis kampung tersebut awalnya adalah kandang ayam. Pelaku ekonominya adalah pendatang dari luar Semanggi. Sejak zaman kolonial maupun pasca kemerdekaan, kenaikan jumlah penduduk di perkotaan menjadi fenomena yang kurang mendapatkan antisipasi baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun Indonesia (Basundoro, 2022). Selain upaya preventif seperti pembatasan jumlah kelahiran dan pengurangan arus migrasi, rupanya juga dibutuhkan penggerak ekonomi sebagai daya dukung yang memadai.

Menurut beberapa penelitian demografis, beberapa kota mengalami lonjakan migrasi karena minimnya perkembangan di kota sehingga arus perpindahan penduduk hanya mengalir di kota-kota tersebut. Beberapa kota tersebut adalah Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, dan Makassar pasca perang (Wertheim & Giap, 1962).

Apabila dirunut dari sejarah tata ruang, kota-kota di Indonesia, pada masa kolonial memang tidak didesain untuk menampung

(a) (b)

Keterangan: (a) saat meninjau perumahan dari pemerintah; (b) Saat wawancara berlangsung

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.13 Bersama Ketua RW 01 dan Kader PKK Kelurahan Mojo

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tingginya lonjakan penduduk (Heuken & Pamungkas, 2021). Surakarta merupakan kota utama di Solo Raya yang menanggung efek domino dari urbanisasi.

Urbanisasi berlebih pada titik tertentu akan menghasilkan beberapa kondisi, yaitu pengangguran, setengah pengangguran, dan pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi. Perubahan struktur kota secara terus menerus akan menyebabkan kondisi yang disebut *transplosi*, yaitu suatu perluasan mendadak dari masyarakat kota yang mendorong perebutan ruang. Nur Rachmad sendiri menyadari bahwa Kampung Semanggi mayoritas dihuni oleh pendatang dengan ekonomi sangat rendah, yakni sekitar 56 unit rumah di tanah Bengawan Solo. Kondisi ekonomi pendatang yang rendah dan jauh dari lokasi asal, membuat mereka menggelar alas tidur di atas lokasi kandang, setelah selesai berjualan ayam. Pak Nur menerangkan, "Dahulu bukan untuk hunian. Dahulu sini itu kandang ayam, Mbak lalu dijual jadi kandang kambing dan sekarang jadi kandang orang. Dahuulu kalau hujan susah, pasti bocor dan banjir."

Saat ini lokasi tersebut sudah aman dari banjir. Banjir yang tercatat paling parah menurut kesaksian Nur Rachmad dan warga setempat adalah pada tahun 1966, setelah peristiwa G30S PKI terjadi banjir besar. Pada saat itu, belum terdapat parapet seperti sekarang sehingga tiap bulan dapat dipastikan selalu banjir saat musim hujan. Tahun 2007 adalah tahun terakhir bagi warga Nur Rachmad dan warga Kampung Harmoni merasakan banjir besar. Beliau menjelaskan, "Sewaktu bapak kecil, ngungsi ke barat tanggul. Dahulu ngungsi itu yang dibawa alat rumah tangga yang terbuat dari tanah, seperti lemper, gentong, pengaron, jembangan, klenting, dan sebagainya karena belum ada *magic com* elektronik seperti sekarang".

Mekanisme pemindahan warga calon penghuni Kampung Harmoni menggunakan skema *Land Consolidation*, yakni warga dipindahkan sementara kemudian dipindahkan kembali setelah lahan selesai ditata. Warga yang dipindahkan sementara menempati Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan membayar kontribusi sebesar Rp130.000,00 per bulan sejak tahun ini, setelah sebelumnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

digratiskan selama dua tahun pertama. Kondisi ini menurut Nur Rachmad belum tentu dinikmati oleh warga dari RW lain karena beliau mengaku jika fasilitas tersebut didapat dengan proses panjang dan juga negosiasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan bantuan tersebut agar terealisasi di kampungnya. Pak Nur Rachmad menjelaskan alasan dibalik usahanya untuk memperjuangkan warganya. Beliau menegaskan bahwa kondisi riil dirinya dan warganya harus dilaporkan apa adanya. Beliau mengatakan, "Itu kan ada pasal untuk memanipulasi data kena denda uang lima puluh juta kan, jangan sampai menipu tim survei. Jadi, apa adanya saja, jangan karena ingin bantuan lalu merubah data, kami yang dituakan harus cerewet."

Sebelum tertata seperti saat ini (Gambar 6.14), memperkenalkan diri sebagai warga Kampung Semanggi menjadi beban tersendiri bagi gadis dari kampung tersebut. Pasalnya, selain kumuh, Kampung Semanggi berdekatan dengan lokalisasi Kampung Silir. Kenyataan ini tentu berpengaruh terhadap pola interaksi dan relasi sosial yang terbangun antara pemuda di kampung tersebut dengan masyarakat luas. Remaja gadis yang berasal dari kampung tersebut dulunya merasa malu ketika berkenalan dengan pemuda dari luar kampungnya. Sekilas terdengar biasa saja, tetapi kondisi ini menyebabkan mereka pada akhirnya menikah dengan sesama warga kampung tersebut sehingga kondisi sosial ekonomi cenderung tidak mengalami perubahan. Pasca

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.14 Perumahan yang disiapkan Pemerintah Kota Surakarta bagi Warga Kampung Harmoni

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kampungnya dijuluki sebagai kampung kumuh, berbagai program dan bantuan berdatangan demi menghilangkan stigma kumuh yang terlanjur melekat selama bertahun-tahun.

Berbagai bantuan itu tidak serta merta merubah jenis pekerjaan dan penghasilan warga, tetapi Nur Rahmat mengakui bahwa setidaknya apa yang diintervensikan ke Kampung Harmoni selama ini dapat mengubah perilaku warganya untuk menghindari perilaku kumuh seperti yang melekat pada kampung mereka selama belasan tahun. Penataan kampung yang difasilitasi tempat/taman rekreasi warga kampung yang dilengkapi himbauan dipasang sebagai pembelajaran warga (Gambar 6.15).

Saat ini, para pendatang yang menetap di Semanggi sudah memiliki dokumen kependudukan dan administrasi untuk mengakses berbagai jaminan dan program pemerintah seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, dsb. "Kalau untuk fasilitas hidup, di Solo ini memang sangat dimanjakan," ungkap Nur Rachmad. Nur Rachmad bercerita panjang tentang bagaimana perbedaan pembangunan saat ini dengan yang pernah dia saksikan di masa lalu.

(a) (b)

Keterangan: (a) Perahu Rojomolo; (b) Himbauan di bawah perahu Rojomolo Kampung Harmoni

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.15 Tempat Rekreasi Warga Kampung Harmoni

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada tahun 1988, ia dan warga Kampung Semanggi yang tinggal di atas tanggul diharuskan untuk pindah. Beliau menolak untuk pindah karena merasa harga tanah lebih mahal lima kali lipat dari uang ganti rugi pemerintah. Pada akhirnya, Nur Rachmad sempat dituduh sebagai eks-PKI karena penolakannya terhadap relokasi dianggap mengganggu program pembangunan nasional. Kesaksiannya terhadap dinamika pendataan maupun program pemerintah menggambarkan perbedaan yang signifikan, terutama terkait asas keterbukaan.

> "Dulu namanya ganti rugi memang rugi betul, Mbak. Kalau sekarang ganti untung, sekarang rumah yang kami tempati semua punya IMB. Anak saya namanya proyek, Mbak karena lahirnya pas banyak proyek. Dulu mau diukur buat apa, ditanya jawabnya tertutup, kalau sekarang semua terbuka, Mbak. Sekarang *nguwongke*, Mbak. Mau pendataan apa-apa ke RW dulu, *home visit* sekarang langsung meng-*uwongke* sama lembaga, sebelum ke lapangan ke RW dulu, lantas ke RT, sosialisasi nya banyak kalau ada bantuan pasti kami kawal sekecil apapun itu." (Nur Rachmad, November 2022)

Mudahnya penerimaan warga di RW yang ditempati oleh Nur Rachmad terhadap proses pendataan berkaitan dengan realisasi program-program yang selama ini dapat mereka akses dan meningkatkan taraf hidup mereka. Di satu sisi, pada awalnya Nur Rachmad dan warga yang lain merasa malu setelah mendengar bahwa menurut data pemeringkatan kampung mereka menduduki posisi teratas kampung terkumuh di kotanya. Namun, stigma tersebut justru menjadi pintu masuk berbagai program yang saat ini mereka rasakan. Nur Rachmad sebagai ketua RW bertahan dari tahun ke tahun melihat hal tersebut sebagai peluang sekaligus tantangan di kampungnya. Dia sadar bahwa "data" memiliki kekuatan yang besar untuk menggerakkan jejaring intervensi terhadap permasalahan sosial-ekonomi di kampungnya. Ketika kami menanyakan terkait bagaimana persepsi warga RW 01 Kampung Harmoni terkait pendataan, menurut mereka pendataan identik sebagai salah satu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rangkaian proses sebelum mendapatkan bantuan. Dengan *track record* penyaluran bantuan di Kampung Harmoni, mereka terbuka dengan pendataan apapun. Sampai seorang penerima manfaat bernama Denis mengatakan bahwa kami ini miskin ekstrim mbak, meskipun dalam gaya bahasa bercanda, tetapi setidaknya mereka juga mengobservasi pendata. Mereka menemukan istilah miskin ekstrim dari kuesioner maupun instrumen yang tidak sengaja mereka lihat ketika menanyakan pendataan apa yang sedang mereka hadapi.

Tantangan yang berpotensi dihadapi di masa mendata adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendataan bukan hanya tentang proses terhadap akses bantuan, melainkan pendataan merupakan rangkaian proses untuk mengetahui kondisi riil kependudukan sesuai dengan apa yang mereka alami saat ini. Meskipun hal ini sudah berulang kali disampaikan kepada perangkat desa sampai tingkat RT, tetapi masyarakat terutama lansia tetap menaruh harap terhadap bantuan di kemudian hari. Tantangan kedua adalah tentang kepadatan penduduk yang terlihat dari masing-masing rumah yang rata-rata dihuni antara 5—7 orang. Secara teknis, jumlah penghuni dalam satu rumah menentukan durasi pengisian kuesioner proses pendataan Regsosek, apalagi dengan informasi bersifat privasi dan tidak semua anggota keluarga mengerti sehingga harus diklarifikasi kepada yang bersangkutan dan belum tentu dapat ditemui dalam satu waktu. Hal ini menjadi tantangan pendataan di kampung padat penduduk.

F. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan

1. Kelembagaan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat dalam Proses Pendataan Regsosek

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memiliki keterikatan terhadap kelompok yang mengikatnya melalui norma dan aturan, yang mana pengaturan tersebut berkaitan dengan penggunaan ruang secara fisik. Sebagaimana yang sering diajarkan di bangku sekolah,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bahwasannya keberadaan lembaga sosial disinyalir mempunyai peran dan arti yang sangat penting untuk mencapai keteraturan sosial yang memungkinkan struktur sosial di masyarakat mampu berperan dan berfungsi dengan baik (Padmiati, 2013). Solo masih memiliki peninggalan berupa Keraton Surakarta Hadiningrat yang kini menjadi simbol warisan budaya. Keberadaan Keraton Solo memberi warna tersendiri bagi dinamika lembaga sosial yang ada di kota Surakarta dengan luas sekitar 44 kilometer persegi dan berpenduduk sekitar 523 ribu jiwa (BPS Kota Surakarta, 2020). Segala aturan mengenai kehidupan sosial di wilayah keraton diatur oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta. "Kerajaan Surakarta sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka," ungkap Gusti Moeng.

Di awal proses pendataan, Gusti Moeng selaku Ketua Lembaga Dewan Adat memberikan pengantar singkat mengenai kejayaan masa lalu yang dipimpin oleh trah leluhurnya. Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan pemukiman keluarga Raja Sri Susuhunan Pakubuwana XIII, berada di wilayah Kawasan Baluwarti, yang dibatasi oleh dua tembok tinggi (benteng) dan besar seperti terlihat saat akan memasuki wilayah Kraton Surakarta (Gambar 6.16).

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.16 Berkumpul di Depan Benteng Keraton Kasunanan Surakarta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Wilayah Baluwarti berada di lingkaran ke dua (di luar/setelah) tembok Kedhaton. Hanya Raja (Sri Susuhunan Pakubuwana XIII) yang menempati Kedhaton. Di luar (tembok) Kedhaton inilah terdapat kompleks (bangunan) yang dihuni oleh para pangeran, bangsawan, kerabat, dan abdi dalem. Ada dua pintu (Kori Brajanala (Gapit)) di dalam benteng Keraton Surakarta (Baluwarti), yaitu di bagian utara dan selatan, sebagai akses penghuni berhubungan dengan masyarakat luar.

Keraton Surakarta Hadinigrat merupakan salah satu kerajaan yang masih berdiri meskipun tidak memiliki kekuasaan dalam mengatur tata pemerintah saat ini. Keraton Surakarta hanya sebagai simbol budaya (Walikota Surakarta, 2011). Kegiatan budaya terus dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta demi menjaga warisan budaya, seperti koleksi peninggalan kerajaan (Gambar 6.17) untuk tetap dilestarikan dari masa ke masa dengan bantuan para abdi dalem.

Para keturunan kerajaan tetap merupakan warga negara yang dikunjungi oleh petugas Regsosek dan berkewajiban menyampaikan informasi terkait kondisi sosial ekonominya. Salah satu peraturan keraton mengharuskan keturunan yang sudah menikah harus meninggalkan keraton. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.17 Berbagai Peninggalan Kerajaan yang diabadikan di Museum Keraton Kasunanan Surakarta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dalam proses pendataan (Regsosek) karena mereka berdomisili di luar keraton Surakarta, tetapi tetap dengan KTP di Kedaton.

Namun, mengacu pada ketentuan Regsosek, maka keluarga raja (pangeran, bangsawan, kerabat raja) didata di tempat tinggal masing-masing, kecuali Ketua Lembaga Adat Keraton. Pendataan di lingkungan keraton didampingi oleh Kepala BPS Solo secara langsung meskipun proses pengisian kuesioner tetap dilakukan oleh PPL dan dipantau oleh PML yang bersangkutan. Berkaitan dengan strategi momentum dalam pendataan, maka proses pendataan Ketua Lembaga Adat Keraton Surakarta dilakukan di keraton (Gambar 6.18). PPL yang dipilih adalah PPL yang muda sebagai strategi dalam menanyakan beberapa hal yang menyangkut kepemilikan pribadi, penyakit dan lain-lainnya. Dengan strategi tersebut, keluarga keraton yang didata bersedia menceritakan data dengan sejujurnya.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.18 Pendataan di Keraton Surakarta

Sebagai kelembagaan Adat, Keraton Surakarta tidak terlibat secara langsung dalam pendataan Regsosek warganya. Namun, beberapa kerabat masih tergabung sebagai perangkat kalurahan. Berbeda halnya dengan Keraton Yogyakarta yang masih aktif dalam politik pemerintahan, Keraton Surakarta hanya berdiri sebagai simbol dan warisan budaya sehingga apabila kerabat dan keturunan keraton

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ingin berpartisipasi terhadap politik pemerintahan formal, mereka harus memperoleh status sosial itu melalui proses pemilihan umum. Hal ini yang dilakukan oleh Gusti Raden Ajeng Koes Moertiyah (Gusti Moeng), putri Susuhunan Pakubuwono XII, beliau sempat menjadi anggota DPR. Pengalaman di dunia politik membuat beliau terbiasa dengan proses pendataan karena setiap pemilihan di ranah politik pasti melalui pendataan kekayaan.

Dalam lembaga adat, terdapat masing-masing pembagian urusan yang didalamnya diketuai oleh anak cucu raja. Masing-masing urusan memiliki abdi dalem sebagai penggerak roda di aras paling bawah. Sampai saat ini, Indonesia berkali-kali mengalami dinamika sosial ekonomi, krisis dan inflasi. Namun, gaji abdi dalem tidak mengacu pada dinamika tersebut, melainkan ketetapan raja dengan bersandar pada nilai "*ngalap berkah ndalem*". "Sepuluh ribu dari raja sama sepuluh ribu dari kita bagi mereka itu beda, Mbak," ungkap Pak Bambang yang merupakan perwakilan pihak BPS.

Pak Bambang yang notabene namanya masih mengandung unsur kerajaan karena berawalan dengan huruf R, menjelaskan bagaimana para abdi dalem memandang harta dan pengabdian. Mereka merasa cukup tinggal di rumah tua yang dipinjamkan oleh raja, sebagian dari mereka mengais rejeki dari sumber pendapatan lain seperti berdagang. Secara turun temurun, mereka menempati rumah di atas lahan milik raja. Gaji yang diberikan kerajaan untuk abdi dalem bervariasi, tergantung urusan apa yang mereka pegang, dengan nominal yang berada di bawah UMR. Kondisi ini tentu berbeda dengan kondisi masa lalu, dimana kerajaan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan sehingga dapat mengatur segala urusan dan kebijakan. Saat ini, keberadaan kerajaan hanya sebagai simbol dan kebutuhan abdi dalem sebagai warga tentu mengacu terhadap harga yang ditetapkan secara nasional. Begitu pula kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan, iuran kesehatan, tagihan listrik, dsb. Kebutuhan hidup yang meningkat rupanya tidak diimbangi dengan perubahan sistem penggajian abdi dalem. Cara pandang terhadap harta dan pengabdian yang seperti ini memerlukan intervensi dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pemerintah agar mereka tidak terjebak dalam kemiskinan kultural maupun struktural.

Dengan menempati rumah di lahan milik keraton, mereka tidak memiliki sertifikat tanah sehingga mereka tidak dapat mengakses bantuan, baik dari pemerintah seperti bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) seperti di wilayah Semanggi dan Mojo maupun CSR dari perusahaan swasta. Pemerintah Kota Surakarta berusaha menyalurkan program di Kelurahan Baluwarti, tetapi terkendala dengan kepemilikan sertifikat lahan yang ditempati. Salah satu syarat realisasi program RTLH adalah calon penerima manfaat harus memiliki sertifikat tanah yang ditempati. Tanah itu bukan milik pemerintah kota, maka pembangunan daerah tersebut sedikit sulit direalisasikan. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi Kampung Harmoni yang berbenah dari penduduk pendatang tanpa kepemilikan tanah hingga memiliki bangunan serta kelengkapan surat yang menyertai. Meskipun hal ini bukan termasuk kendala dalam pendataan Regsosek, tetapi kasus ini menjadi salah satu temuan permasalahan kependudukan terkait bagaimana kepemilikan aset dan modal menjadi salah satu unsur penting yang memengaruhi terwujud atau tidaknya suatu program pemerintah. Namun demikian, proses pendataan para abdi dalem berjalan dengan lancar.

2. Partisipasi Perangkat Desa dalam Pendataan Regsosek

Di sela perjalanan menuju Kampung Semanggi, diskusi yang terbangun ialah mengenai bagaimana penanggulangan kemiskinan di Kota Solo dan bagaimana keterlibatan personil yang ada terhadap proses Regsosek ini. Kota Surakarta memiliki Institusi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tetapi mereka tidak dilibatkan dalam proses pendataan Regsosek. Selain karena mengikuti instruksi rekrutmen dari BPS Pusat, rupanya menurut informasi dari BPS Kota Surakarta, mereka ingin melakukan pendataan secara objektif dalam memandang kondisi sosial masyarakat. KPKD

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dianggap sebagai institusi yang mengeksekusi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Melalui penyebutan Satuan Lingkungan Setempat (SLS), proses pendataan Regsosek memberikan gambaran betapa pemaknaan status sosial ekonomi warga bukan hal yang sederhana. Untuk memberikan justifikasi apakah seseorang masuk dalam kategori cukup, miskin, atau sangat miskin rupanya perlu verifikasi dari komunitas setempat. Dalam hal ini, peran ketua RT dituntut untuk memiliki pengetahuan terhadap masing-masing kondisi rumah tangga yang ada di lingkungannya. Apabila proses pendataan ini berhasil dan dilakukan ulang sesuai periodenya, hal ini akan membentuk semacam struktur pengetahuan di benak masyarakat bahwa kondisi ekonomi *household* (rumah tangga) menjadi bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi wacana komunitas. Metode verifikasi semacam ini mendorong individu-individu anggota rumah tangga menempatkan diri untuk menampilkan citra keluarganya di lingkungan komunitas. Setidaknya, mekanisme semacam ini memberikan semacam sistem pengawasan di tengah urbanisasi yang mendorong individu semakin abai terhadap lingkungan sekitar. "Kami merasa di-*uwongke*, Mbak. Jadi, tidak langsung ke warga, ke kami dulu." (Nur Rachmad, Ketua RW Kampung Harmoni).

Dukungan lembaga atau perangkat warga, seperti ketua RW dan RT cukup besar di Kota Surakarta. Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Semanggi menyampaikan informasi bahwa sebelum Regsosek dilaksanakan, perangkat RW dan RT sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta mengumpulkan para camat, sementara camat mengumpulkan para lurahnya, dan kelurahan mengumpulkan RW-RW di lingkungan kelurahannya. Ketua RW juga mengumpulkan para RT. Kemudian, Ketua RT 03 di RW 03 ini mengumpulkan warga setiap minggu. Pada perkumpulan mingguan itulah pak RT menyampaikan informasi mengenai Regsosek sehingga warga mendapat informasi sebelum Petugas Pendata Lapangan (PPL) datang *door to door*. Adapun warga yang menolak saat pendataan adalah mereka yang kebetulan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak hadir saat sosialisasi Regsosek oleh RT. Jika ada yang menolak, ketua RT merasa berkewajiban mendampingi pendata agar diterima di rumah warga tersebut. Selain itu, dari Pemerintah Kota Surakarta sendiri memfasilitasi media penyampaian informasi secara terpusat melalui saluran televisi lokal yang sudah secara otomatis tersambung dengan informasi resmi Pemerintah Kota Surakarta. Program tersebut adalah program Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta.

3. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Pendataan

Sistem informasi dan teknologi pendataan Regsosek cukup canggih. *Dashboard monitoring* (Gambar 6.19) Regsosek memberi manfaat untuk melihat berbagai hasil dalam waktu tertentu. Pada Gambar 20 terlihat status pendataan pada titik waktu tertentu di (a) Kecamatan Pasar Kliwon, dan (b) di Kota Surakarta secara kumulatif. Hal ini sangat membantu para petugas di BPS dalam memonitor ketercapaian petugas pendataan di lapangan.

BPS Kota Surakarta pun membuat sistem informasi sendiri untuk memonitor segala kemajuan pendataan Regsosek. Dengan sistem informasi yang dibangun oleh BPS Kota Surakarta sendiri, Kepala BPS dapat memonitor berbagai kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan.

(a) (b)

Keterangan: (a) Di Kecamatan Pasar Kliwon; (b) Di Kota Surakarta
Sumber: BPS (2022)

Gambar 6.19 Tampilan Sistem Infomasi Regsosek melalui *Dashboard Monitoring*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

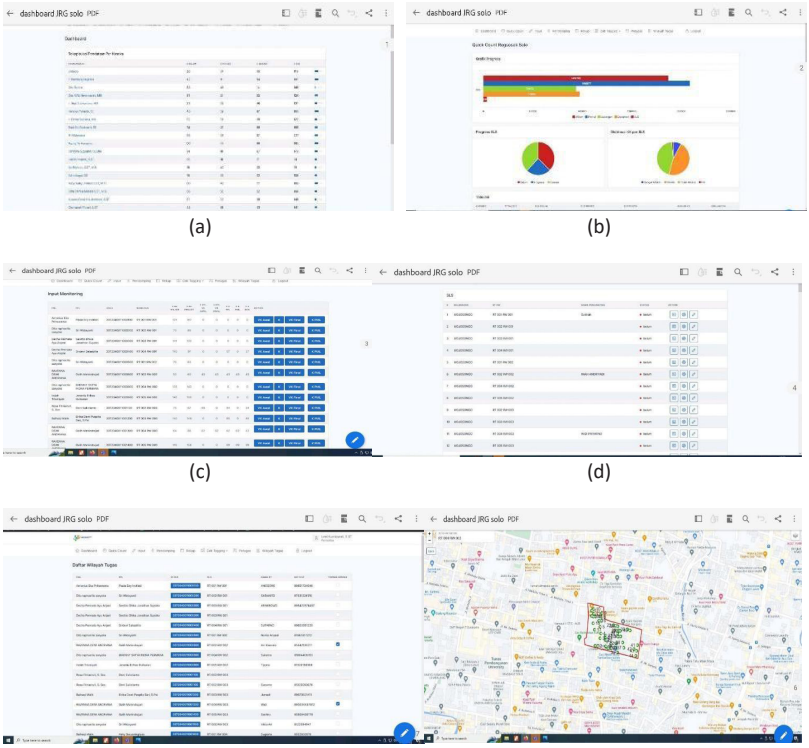

Keterangan: (a) Rekapitulasi Pendataan per Koseka; (b) *Quick Count* Regsosek Solo; (c) Input *Monitoring*; (d) Daftar Pendamping; (e) Daftar Wilayah Tugas, (f) GeoTagging di Kota Solo

Sumber: BPS (2022)

Gambar 6.20 Sistem informasi Regsosek Solo yang dibangun sendiri oleh BPS Kota Surakarta

G. Cerita Kehidupan Pendata

Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta merupakan dua kelurahan dengan pemukiman penduduk yang padat. Berada di dekat bantaran sungai Bengawan Solo, kedua wilayah ini memang sering dilanda banjir. Awalnya,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kedua kelurahan ini merupakan satu kelurahan, yaitu Semanggi. Seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk, maka kelurahan tersebut mengalami pemekaran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kelurahan Semanggi lebih dari 23 ribu jiwa, sementara penduduk yang berdomisili di Kelurahan Mojo berjumlah hampir 14 ribu jiwa (BPS Kota Surakarta, 2020).

Kelurahan Semanggi dan Mojo merupakan wilayah dengan program Penataan Kawasan Permukiman Tingkat Kota Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kedua kelurahan menjadi sampel karena keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program Kotaku dan keberhasilan masyarakat dalam menerima dan bertransformasi, dari kebiasaan yang kumuh menjadi kebiasaan sehat dengan hunian sehat meskipun masih ada beberapa penduduk yang belum berpindah. Salah seorang penduduk yang belum pindah di wilayah Bantaran Sungai (Gambar 6.20.a) terlihat sangat kumuh dan tidak layak. Mereka menunggu kesiapan rumah yang sedang dibangun pemerintah Kota Surakarta untuk ditempati (Gambar 6.20 b).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, bantaran merupakan ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan

(a) (b)

Keterangan: (a) Sebelum direkolasi; (b) Rumah layak huni yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk relokasi warga di bantaran sungai Bengawan Solo.
Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.21 Tempat Tinggal di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kota Surakarta.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

palung sungai, yang sebenarnya berada di dalam sempadan sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan dataran, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu, bukan untuk pemukiman.

Pada bagian ini, kami berusaha memotret proses pendataan yang dilakukan oleh PPL dan PML di wilayah Kampung Harmoni dan Semanggi. Karakteristik ruang sosial yang berhimpitan dan padat penduduk rupanya membutuhkan strategi khusus agar pendataan berjalan secara runtut dan sistematis. Berikut adalah beberapa cerita pendata yang tangguh yang dapat kami temani saat satu hari pendataan berlangsung.

1. ES–PML di Kelurahan Semanggi

Seorang remaja perempuan berbaju hitam sudah menunggu kedatangan kami di pintu gang RT 3 RW 3 Kampung Semanggi. Perempuan berinisial ES ini berusaha untuk tetap terlibat dalam obrolan dengan sesekali melihat ponsel yang ia genggam. Sebagai Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dirinya harus *stand by* di depan layar ponsel untuk memantau keluhan dan progres pendataan dari masing-masing PPL yang dinaunginya. Kebetulan jarak usia ES dengan PPL tidak jauh berbeda sehingga pemaknaan terkait koordinasi lapangan menjadi lebih cair.

ES adalah salah satu petugas PML Regsosek di Kota Surakarta yang pada tahun ini baru saja menyelesaikan studi S-1-nya di UMS. ES berpengalaman menjadi panitera pengecekan kelengkapan berkas perkara. ES mengungkapkan bahwa salah satu alasannya menjadi petugas Regsosek adalah karena kebetulan mengetahui ada program Perekrutan Regsosek dari teman sehingga mencoba melamar. Regsosek merupakan pengalaman pertama ES bergabung, sebagai mitra BPS. Sebelum mendaftar, ES mempelajari Regsosek, bagaimana fungsi dan mekanisme kerjanya sehingga setelah mendaftar dan wawancara beliau diterima sebagai petugas pengawas lapangan (PML) di wilayah Semanggi. Pelatihan yang singkat (26–28 September 2022) tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

membuat surut semangat. Selama pelatihan ES mencoba mengenal lebih dekat dengan PPL yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagi pengalaman dan diskusi dengan PPL merupakan metode ES untuk saling mengenal karakter dan kemampuan. ES bukanlah warga lokal Semanggi sehingga ES melakukan survei ke lokasi sasaran kegiatan, bertemu dan diskusi dengan PPL, serta menyerahkan berkas yang perlu diisi datanya.

Tanggal 15 Oktober merupakan pendataan hari pertama Regsosek. Hari itulah ES mulai bekerja di lapangan dan mulai memantau PPL secara bergantian. Setiap tiga hari sekali data dari PPL dikumpulkan ke ES (PML). Verifikasi data dilakukan oleh ES setiap dokumen datang. Berdasarkan kinerja PLL, terdapat dua PPL berkinerja kurang sehingga harus dipantau secara ketat dan didampingi saat mendata masyarakat. Beberapa permasalahan pendataan di masyarakat masih ditemui, antara lain masih ada yang tidak mau menerima petugas pendataan. Oleh karena itu, ES mempersuasif warga dan meminta bantuan pak RT setempat untuk menjelaskan maksud pendataan di Regsosek. ES juga membaca buku pedoman atau diskusi dengan PML lain yang sudah berpengalaman atau berdiskusi dengan Koseka agar tidak salah melangkah.

2. NS–PML di Kelurahan Semanggi

NS merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro semester tujuh, yang bergabung dengan BPS pada program Regsosek ini. Meskipun masih tergolong muda, NS sudah banyak berpengalaman dalam pendataan sebagai mitra BPS. Sebelum di Regsosek, NS berpengalaman sebagai mitra BPS pada kegiatan Pemetaan Sensus Penduduk BPS tahun 2019, Sensus Penduduk tahun 2020, Sensus Penduduk *Long Form* tahun 2020, serta pemetaan Sensus Pertanian tahun 2022. Jadi, NS sudah bergabung dengan mitra BPS sejak 2019.

Saat itu NS sedang menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa baru, mendapat *broadcas*t pendaftaran mitra pemetaan sensus penduduk oleh BPS. Dengan informasi yang didapat, NS

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mencoba mendaftarkan diri. Melalui berbagai tahapan pendaftaran, antara lain seleksi berkas, seleksi tertulis, dan wawancara, akhirnya NS dinyatakan lolos sebagai mitra BPS. Selesai kegiatan pemetaan Sensus Penduduk BPS tahun 2019 tersebut, pada tahun 2020 ketika ada pandemi Covid-19 dan perkuliahan dilakukan secara online, NS mendapatkan kembali informasi dari Koseka di BPS terkait kegiatan Sensus Penduduk. Kembali, NS mendaftarkan diri sebagai petugas pencacah lapangan sensus penduduk 2020.

Pada tahun 2022, NS mengikuti 3 pendataan yang dibuka BPS, yakni pemetaan Sensus Pertanian, Sensus Penduduk *Long Form* dan Regsosek. Jika dalam sensus sebelumnya NS menjadi Petugas Pendataan Lapangan (PPL), pada Regsosek NS sebagai pengawas lapangan (PML) yang bertugas mengawasi empat PPL di Semanggi. Menjelang pelaksanaan, seluruh petugas secara serentak mendapat pelatihan dari BPS Kota/daerah masing-masing. Setelah mendapatkan wilayah tugas dan dokumen yang dibutuhkan, NS dan PPL di bawah koordinasinya, berkumpul lalu secara bersama meminta izin ke kelurahan, sebagai tanda atau bentuk legitimasi kegiatan, dengan meminta (mendapatkan) tanda tangan lurah setempat dalam surat tugas sebagai petugas dan pengawas lapangan kegiatan Regsosek.

Setelah mendapatkan bukti legitimasi, NS dan para PPL di bawah koordinasinya (termasuk juga PML dan PPL di wilayah lain), melakukan penelusuran wilayah tugas dan mencari keberadaan rumah RT setempat. Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui batas wilayah tugas, perizinan, dan koordinasi dengan RT setempat bahwa NS dan 4 PPL yang diberi melakukan pendataan Regsosek di wilayah SLS (RT). Setelah memastikan tidak terjadi perubahan batas wilayah, NS dan empat PPL melakukan verifikasi dengan ketua RT mengenai nama penduduk yang tinggal di wilayah tersebut dan status kesejahteraannya. NS dan PPL juga meminta ketua RT wilayah sasaran pendataan untuk memberikan informasi kepada warganya agar warganya menerima petugas saat pendataan. Kemudian, pendataan dimulai di masing-masing wilayah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Setiap pendataan berlangsung, NS meminta PPL yang di bawah koordinasinya memulai pendataan dari muatan terkecil, yaitu keluarga dengan jumlah anggota yang sedikit agar lebih mudah pengerjaannya. Mengingat tiga dari empat PPL di bawah koordinasi NS merupakan petugas yang baru pertama kali melakukan pendataan, maka strategi memulai dari jumlah keluarga terkecil, memudahkan mereka dalam menyelesaikan pendataan. Setiap dua atau tiga hari, mereka bertemu untuk mengumpulkan berkas pendataan dan melakukan evaluasi pada tahap pendataan yang telah dilakukan. Dengan berkumpul, mereka dapat bertukar pikiran dalam menyelesaikan permasalahan, misalnya ketika ada petugas yang kesulitan melakukan geotagging karena akurasi HP-nya terlalu tinggi, maka petugas lain dapat memberikan solusi berdasarkan pengalamannya saat melakukan *geotagging*.

Dalam berinteraksi dengan PPL, NS menjalin komunikasi melalui grup Whatsapps dan personal *chat*, untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi, NS mengajak petugas untuk berkumpul dan NS mendampingi PPL turun ke lapangan secara bergilir. Pada awal pendataan memang ada PPL yang sulit diajak berkumpul, bahkan jika dihubungi hanya dibalas dua hari sekali. Untuk kondisi tersebut, NS mencari informasi penyebabnya. Rupanya PPL tersebut sedang mengerjakan banyak kesibukan di kampus. Sebagai sesama mahasiswa, NS cukup paham, tetapi untuk mendisiplinkan diri pada tugas, NS memberikan waktu *deadline* pengumpulan berkas agar target PPL dalam menyelesaikan pendataan tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Permasalahan tersebut terjadi pada minggu pertama pendataan. Saat ini, PPL tersebut sudah melaporkan perkembangan penyelesaian tugasnya secara rutin.

Di dalam pendataan sendiri berbagai permasalahan dijumpai petugas lapangan, antara lai, masyarakat yang tidak ingin didata karena identitasnya khawatir disalahgunakan. Selain itu, banyak juga masyarakat yang sulit ditemui karena bekerja atau KK tidak sesuai kondisi keluarga saat ini. Jika NS menemukan warga yang tidak bersedia didata, PPL memberikan penjelasan secara terperinci kepada warga tentang maksud pendataan Regsosek ini, baik dari segi manfaat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

maupun cakupan data yang dikumpulkan. Apabila warga yang di data tetap menolak, PML menghadiri rumah tersebut dan menjelaskan pentingnya pendataan Regsosek bagi masyarakat. Jika mekanisme tersebut dijalankan belum membuahkan hasil, NS mengajak ketua RT agar warga tersebut percaya bahwa pendataan ini sudah mendapatkan izin dari RT dan dilakukan serentak se-Indonesia.

Menurut NS, sejauh ini permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pendampingan dari ketua RT (saat pendataan). Masalah lain adalah PPL yang tidak memenuhi target. Pada satu kasus, dalam 3 hari sudah disepakati setiap PPL dapat mengumpulkan 30 dokumen K, tetapi ada PPL yang hanya mampu mengumpulkan 20 dokumen K. Biasanya hal tersebut terjadi karena sulitnya PPL bertemu dengan responden. Pada saat pagi-siang masyarakat sedang bekerja dan saat sore/malam hari cuaca tidak mendukung atau hujan deras sehingga pendataan tidak memenuhi target. Untuk memenuhi target pendataan, NS menetapkan *deadline* pendataan sehingga jika ada petugas yang tidak melakukan pendataan selama dua hari, pada hari selanjutnya ia harus melakukan menutupi ketertinggalannya sesuai target.

1. BP–PPL di Kelurahan Semanggi

BP adalah Mahasiswa UNS semester akhir yang sempat magang dalam persiapan pendataan sensus pertanian 2023 (Gambar 6.22). BP juga terlibat pada kegiatan BPS untuk demografi sosial serta Surakarta dalam Angka 2021. Di kampus pun pada, tahun 2021 BS menjadi ketua Program Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Holistik (PHP2D) yang merupakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan oleh mahasiswa melalui uit kegiatan mahasiswa (UKM) dan/atau lembaga eksekutif mahasiswa di universitas tempat BP menimba ilmu.

Pertama kali BP menjadi mitra BPS adalah sejak magang di BPS Surakarta pada bulan Januari–Februari 2022 dalam pendataan Pemutakhiran Kerangka Geospasial & Muatan Wilayah Kerja Statistik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.22 BP bersama staf BPS dan peneliti BRIN saat bertugas mendata Regsosek

ST2023, dilanjutkan untuk kegiatan Regsosek bulan Oktober–November 2022 ini. Mendaftar di kegiatan Regsosek setelah mendapat informasi dari web BPS kemudian BP mengikuti *open recruitment* mulai dari tes sampai wawancara. Setelah dinyatakan lolos, BP mengikuti pelatihan selama 3 hari dan lanjut pada pendataan sejak tanggal 15 Oktober 2022. Interaksi dengan PML biasanya terfokus pada informasi awal yang diperlukan dalam Regsosek. Komunikasi berlanjut terkait tindakan yang harus dilakukan ketika ada kejanggalan/ketidak-biasaan kondisi di lapangan. Interaksi dengan PML juga dilakukan terkait penyerahan dokumen hasil pendataan untuk pengecekan (oleh PML). Dari pengalaman di lapangan, tidak semua penyelesaian permasalahan di lapangan secara pasti diketahui PML. Oleh karena itu, BP sebagai PPL bersama koordinator lapangan (PML), BP membawa permasalahan yang harus dipecahkan ke Koseka sehingga menemukan solusi dan memperjelas tindakan yang harus dilakukan PPL di lapangan.

Selama bertugas mendata di lapangan, ada masyarakat yang kurang kooperatif. Sebagai PPL, BP mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dan manfaat pendataan Regsosek kepada responden, serta meyakinkan responden/masyarakat dengan menunjukkan kartu identitas (*id card*), surat tugas, hingga dokumen

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang distempel oleh RT. Apabila masih ada yang meragukan, BP meminta tolong PML untuk menemani dan meyakinkan responden yang kurang kooperatif ini. Jika masih saja belum kooperatif, BP sebagai PPL dan PML menginformasikan kepada ketua RT dan meminta tolong ketua RT yang meyakinkan warganya. Namun, sejauh ini BP belum menemukan kasus ada warga yang belum mau membuka diri untuk pendataan. Penyelesaian sampai di ketua RT, sudah memberi jalan pada BP untuk dapat mendata warga sasaran, yaitu di Kelurahan Semanggi.

Masalah yang sering dihadapi BP adalah ada beberapa responden yang tidak dapat menunjukkan informasi KK karena sesuatu hal. Hal ini diselesaikan dengan menanyakan berkas KK warga kepada ketua RT dengan terlebih dahulu meminta izin kepada keluarga responden untuk mengambil informasi KK dari berkas yg ada di ketua RT. Masalah lain adalah pengejaran target. Untuk mencapai penargetan, BP menerapkan target harian yang harus dicapai agar pendataan dapat diselesaikan sebelum *deadline*, baik mendata wawancara, melakukan *geotagging* dan foto kondisi rumah serta merapikan berkas hasil wawancara sebelum diserahkan ke PML. Permasalahan responden yang susah ditemui yaitu jarang berada di rumahnya karena bekerja di tempat lain. Hal ini diantisipasi oleh BP dengan meminta tolong kepada tetangga atau saudara terdekat atau ketua RT untuk menanyakan waktu luang warga agar PPL dapat datang saat warga berada di rumahnya.

Beberapa masalah lapangan sering dihadapi adalah cuaca yang mengharuskan BP untuk menyiapkan berbagai perlengkapan, seperti jas hujan, payung, dan plastik untuk melindungi dokumen agar tidak basah. Ada hal yang menyenangkan yang dirasakan BP sebagai PPL. Kebaikan masyarakat sekitar kepada PPL, seperti memberikan jamuan minuman, membantu menunjukan rumah, membantu memanggilkan tetangga yang susah untuk ditemui, hingga membantu menjelaskan kepada masyarakat lain yang kurang paham. Hal ini sangatlah menyenangkan dan memberikan semangat kerja. Selain itu, bsa menjadi lebih banyak mengenal orang dengan berbagai keadaan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Apabila dalam sehari sudah mencapai target (harian), terkadang BP lebih melamakan waktu wawancara agar warga dapat bercerita lebih lama dan PPL dapat menanyakan beberapa informasi lain yang diperlukan.

2. Pendata: Mitra Kerja BPS

Ada tiga kriteria petugas pendata yang kami temui di lapangan, dua diantaranya merupakan mitra BPS (PPL dan PML), sedangkan Koseka adalah bagian yang terintegrasi dengan BPS. Skema perekrutan yang berbeda ini tentu saja membawa implikasi berupa relasi bisnis yang terjalin antara keduanya. Mitra akan direkrut ketika suatu lembaga sedang membutuhkan tenaga meskipun dengan kriteria yang sudah disebutkan secara jelas, tetapi kegiatan kerja tidak terikat secara tetap. Untuk menjadi petugas pendata Regsosek, seorang mitra harus setidaknya memiliki kecerdasan spasial dan argumentasi yang cakap di lapangan. Dari ketiga petugas yang kami temui, rata-rata adalah pendatang dari luar Solo yang sedang atau baru saja menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Mereka diharuskan untuk mengetahui topografi suatu ruang perkampungan, dibekali peta per lokasi yang menjadi tanggung jawab penelitiannya dengan rute yang ditentukan.

Berbekal peta penunjuk arah dan *device*, mereka harus mencatat kondisi sosial ekonomi masing-masing rumah tangga yang notabene tidak mereka ketahui secara riil, tetapi harus mereka catat se-objektif mungkin. Rupanya penyebutan mitra dan mekanisme rekruitmen yang berdasarkan pada *track record* kerja di bidang pendataan dan enumerator mendorong mereka untuk bekerja secara profesional karena taruhannya adalah *track record* kerja di bidang tersebut. Melalui monitor kepala BPS, kinerja mereka terpantau *by device* sehingga terlihat persentase progres masing-masing petugas. Apabila diketahui performa mereka tidak optimal, hal ini akan mempengaruhi perekrutan di project BPS selanjutnya. Hal ini yang mendorong para petugas mitra melakukan segala cara dan strategi untuk mempermudah pengerjaan di lapangan. Ada sebagian dari mereka yang survei lokasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terlebih dahulu, membangun rapor dengan perangkat desa, ada pula yang mengulang-ulang pertanyaan yang sama ketika bertanya hanya demi menguji konsistensi data. Kesalahan sebutir angka nol pun bagi petugas adalah representasi catatan kinerja mereka.

Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terus menerus oleh Koseka untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan terkait keterlibatan dalam Regsosek di Kota Surakarta. Berulang-ulang kepala BPS dan petugas BPS Pusat menyampaikan, "Konsepnya harus sama, jika konsep yang dipegang berbeda, nanti akan lari kemana-mana." Konsep yang dimaksud adalah bagaimana translasi dari pemahaman terkait pendataan, siapa yang dimaksud penduduk, bagaimana mekanisme *crosscheck* dan sebagainya ini ke dalam pemaknaan yang harus berada di luar kepala. Pertemuan antara Koseka, PML, dan PPL dilaksanakan untuk mengoreksi silang (*crosscheck*) antar petugas pendataan yang telah dilakukan oleh PPL. Pertemuan juga bertujuan mencari solusi untuk kendala atau permasalahan yang dihadapi di lapangan. Selain itu juga untuk menyamakan persepsi dan konsep para petugas Regsosek (PPL). Bagi Koseka, pertemuan antara PML dan PPL menjadi ajang memonitor perkembangan dan hasil pendataan Regsoses di tahap awal. Para petugas baik PPL dan PML diminta Koseka untuk selalu berkoordinasi dengan sesama atau dengan Koseka jika ada kendala-kendala di lapangan.

Salah satu kejadian tidak mengenakkan dialami oleh PPL di Kota Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan mojosongo, yaitu ada satu responden yang tidak ingin rumahnya diambil foto, padahal tingkat kesejahteraannya rendah (miskin) dan kondisi rumah harus diambil foto sebagai bukti kepada pemerintah, bahwa keluarga tersebut memang miskin. Hal ini pun dikonfirmasi oleh ketua SLS (RT) bahwa responden termasuk kategori miskin. Setelah responden diberi pengertian bahwa BPS perlu bukti, maka responden berkenan rumahnya di foto, tetapi hanya ingin diambil foto yang bersangkutan (responden), khususnya bagian toilet. Pada saat itulah HP jatuh (atau dijatuhkan?) ke toilet. HP milik PPL rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan yang menyedihkan adalah responden marah-marah,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memarahi PPL, sampai PPL menghentikan pendataan. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Koseka dari BPS Kota Surakarta.

Kasus penolakan juga terjadi di Wilayah Mojo Semanggi, terdapat satu keluarga yang menolak pendataan oleh petugas Regsosek. Kedatangan PPL ditolak, begitu juga pendamping lapangan (PML) pun ditolak. Oleh karena itu, Koseka datang membantu dan menyampaikan bahwa penolakan adalah hak masyarakat, tetapi masyarakat yang menolak diminta memberikan surat pernyataan, bahwa mereka menerima apabila mereka tidak termasuk ke dalam program bantuan sosial atau program pembangunan lainnya ketika pemerintah melaksanakannya.

Pendampingan dan sosialisasi sejauh ini sudah dilakukan secara masif, antara petugas lapangan, bersama perangkat desa atau tetangga (RT RW) agar kedatangan petugas BPS di lapangan (PPL) diterima di masyarakat. Namun, permasalahan tidak hanya terletak pada sosialisasi semata. Rupanya pemaknaan masyarakat menjadi salah satu kunci berhasil atau tidaknya pendataan tersebut. Sebagian masyarakat yang mendapat bantuan rupanya memiliki ketakutan terhadap graduasi. Sebaliknya, sebagian masyarakat merasa bosan dengan pendataan yang dilakukan terus menerus, tetapi jarang mendapatkan bantuan. Dua hal ini seolah berlawanan, tetapi pada prinsipnya pemaknaan pendataan di benak kedua kelompok masyarakat ini adalah sama-sama terkait bantuan.

Proses sosialisasi pada masa mendatang sebaiknya lebih menekankan terkait proyeksi penggunaan data berdasarkan irisan kebutuhan lintas *stakeholder*. Misalnya, bagaimana data kesehatan rumah tangga dapat menjadi acuan bagi BPJS untuk menyalurkan jaminan kesehatan, bagaimana bencana menyebabkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga diperlukan pendataan ulang, dsb. Hal-hal semacam ini seharusnya lebih ditekankan dalam proses sosialisasi, di samping intensitas dan frekuensi yang masif, tetap dibutuhkan penekanan terkait struktur pemahaman masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPS "Konsepnya harus jelas!".

Buku ini tidak diperjualbelikan.

H. Cerita Kehidupan Keluarga Fokus Data: Harapan terhadap Akses Dana Bantuan

Sudut Kampung Semanggi memperlihatkan goresan himbauan pemerintah pada sebuah dinding di samping Masjid yang bertuliskan "Ayo Ikut KB, Kampung KB Mrantasi RW 03 Semanggi". Rupanya saat menyusuri gang sempit, banyak sekali anak-anak berlarian selepas pulang sekolah. Ada anak-anak yang sudah berganti baju santai dan hendak bermain di rumah teman sebayanya, ada pula yang masih berseragam sekolah sambil menikmati coklat. Keberadaan anak-anak tersebut menggambarkan bahwa angka kelahiran di kampung tersebut masih tinggi. Sepetak rumah kecil dengan jemuran baju yang menghiasi sepanjang jendela rumah warga. Sambil memijat kaki yang sedang diperban, seorang mbah dengan malu-malu menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas lapang Regsosek. Mbah itu bernama Siti Rokhani. Perempuan kelahiran 1968 itu kini mendiami rumah ukuran 5x5 meter dengan biaya sewa tiga juta rupiah per tahunnya. Beliau menempati rumah selama kurang dari satu tahun dan sebelumnya beliau dan suaminya tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo.

Di balik daster dan jilbab hitam, Mbah Siti berusaha mengingat jawaban dari setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas pendata. Rumahnya terdiri dari satu ruang tamu kecil yang langsung berhadapan dengan meja, TV dan meja makan. Satu-satunya kamar di rumah tersebut malah tidak dijadikan sebagai tempat tidur, melainkan sebagai tempat penyimpanan barang seperti kulkas, lemari, helm, dan barang lainnya. Maklum, dengan ukuran tersebut rumah itu tidak dapat diisi lebih banyak barang, kalaupun dapat akan memakan tempat bagi penghuninya. Sebuah guling lusuh dan bantal yang tak berbalut kain tergeletak di ruang tamunya, ditemani dengan sapu lidi sebagai penebah kasur busa yang sangat tipis. Kasur itu ditempatinya bersama suaminya saat malam hari. Pagi harinya, sang suami bekerja mencari rongsokan dari jam tujuh pagi sampai jam tiga sore.

Awalnya hampir tidak ada libur untuk pekerja seperti Pak Sukadi, nama suami Mbah Siti yang tidak sengaja terbaca oleh saya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di kartu keluarganya. Di kartu keluarga, tercatat pekerjaan Pak Sukadi adalah karyawan swasta, padahal kenyataannya Pak Sukadi bekerja serabutan. Begitulah potret pencatatan jenis pekerjaan pada dokumen administrasi di Indonesia, apapun pekerjaannya biasanya akan tertulis sebagai karyawan swasta karena tolok ukurnya adalah bukan PNS dan bukan wirausaha. Kaki suaminya itu pernah dioperasi karena menjadi korban tabrak lari tiga tahun lalu, kini tumpuan kakinya tidak sekuat dulu lagi. Dalam seminggu, ia hanya bekerja 2-3 kali, dan ketika dirasa cukup, maka dia akan istirahat di rumah. Ketika sedang kambuh, kaki suaminya akan ngilu. Setiap kali hal itu terjadi, Mbah Siti akan membeli obat di apotek. Mbah Siti sendiri mengidap penyakit gula darah selama lebih dari enam tahun dan saat ini masih menggunakan suntik insulin setelah menjalani tiga kali operasi. Selain itu, dirinya mengaku sudah mulai lupa menaruh sesuatu.

Saat petugas PPL menanyakan, "Apakah Ibu memiliki emas lebih dari 10 gram?" Mbah Siti Sambil tertawa dan memegang kakinya, "*Emas nopo, ndak ada, pun entek-entekan niki,* kemarin baru jual elektronik." Barang berharga yang menjadi tumpuan perekonomian setiap harinya adalah motor untuk mencari rongsokan di kampung-kampung dan ponsel milik Mbah Siti untuk mem-*posting* jualan masakan milik juragannya. Sejak kakinya dioperasi, Mbah Siti belum dapat bekerja lagi. Dalam sehari, pasangan lansia tersebut mengeluarkan uang untuk keperluan makan sekitar 30—40 ribu rupiah, sedangkan untuk membayar listrik per dua minggu sekali adalah Rp22.000,00.

Mbah Siti memperlihatkan ruangan sekitar 1x2 meter yang digunakan sebagai kamar mandi sekaligus tempat masak dalam satu pintu tanpa sekat. Kamar mandi tersebut tidak dilengkapi dengan WC sehingga jika malam-malam saat Mbah Siti ingin buang air besar dia harus cepat-cepat lari ke toilet umum dengan saluran IPAL komunal. Kira-kira lokasi toilet umum tersebut sekitar 50 meter dari rumahnya, berada di luar gang, belum lagi jika harus mengantri dengan yang lain. Mbah Siti terkadang buang air besar di tempat anaknya, yang terletak tidak jauh dari gang rumahnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Setiap bulannya, Mbah Siti membayar iuran Rp15.000,00 untuk keperluan air, sedangkan untuk menggunakan IPAL Komunal dia harus membayar Rp5000,00 per bulan. Jika ditotal, pengeluaran per bulan mereka sekitar Rp1.200.000,00. Rupanya, hampir setiap rumah di gang perkampungan yang ditempati Mbah Siti rata-rata tidak memiliki toilet sendiri. Keterbatasan ruang dan akses pembuangan saluran limbah, menjadi permasalahan di kampung padat penduduk seperti Semanggi sehingga mereka menggunakan toilet umum untuk keperluan mandi dan buang air besar.

Mbah Siti menceritakan bagaimana dia bertemu dengan suaminya saat mengikuti program transmigrasi di Riau bersama orang tuanya.

> "Ketemunya di transmigrasi dulu, bedol desa ibu saya sama bapak saya tuh ikut daftar, ke Riau, dulu saya masih kecil. Pulang ke sini bapak saya meninggal tahun 1984, waktu anak saya lahir. Ibu saya janda, akhirnya dipulangkan sama pemerintah, dulu kan anu, kalau janda *dipulangken*. Saya yang tinggal sana dapat *bojo*, bapaknya anak-anak itu. Ibu saya langsung pulang, saya *ndak* ikut, saya di sana. Saya pulang tahun 1992, sepuluh tahun di sana, terus punya anak dua itu baru enam tahun, adiknya baru setahun pulang." (Wawancara dengan Mbah Siti, November 2022)

Rupanya program transmigrasi itu belum dapat menyejahterakan keluarga lansia tersebut ketika harus kembali ke Solo. Ketika petugas pendata menanyakan, "Apakah sering dilakukan pendataan di rumah ini?" Satu kata yang terucap dari Mbah Siti adalah *mboten*. Ketika kami menanyakan terkait persepsi tentang pendataan, jawaban Mbah Siti, "Kalau ada bantuan ya alhamdulillah, kalau *ndak* ada ya di bawah kita kan masih ada. Kemarin barusan jual barang elektronik, perkakas-perkakas rumah tangga." Dalam benak Mbah Siti, pendataan adalah dana bantuan. Kegiatan pendataan identik dengan proses untuk mendapatkan pencairan bantuan. Persepsi semacam ini hampir kami temui di setiap rumah tangga yang didata. Padahal, hampir di setiap sudut pos RW di Kota Solo memiliki saluran televisi yang secara otomatis tersambung dengan iklan layanan pemerintah, dimana

Buku ini tidak diperjualbelikan.

informasi tentang Regsosek sudah gencar disiarkan. Selain itu, jajaran pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai RT-RW sudah melakukan sosialisasi terkait proses pendataan Regsosek ini. Namun, persepsi masyarakat tentang simplifikasi makna pendataan dengan bantuan masih sering tumpang tindih.

Selain Mbah Siti, kisah Sutanto menambah gambaran kondisi masyarakat di Kampung Semanggi. Bapak Sutanto, seorang duda 57 tahun yang ditinggal mati istrinya dan saat ini bekerja sebagai Linmas Kelurahan Semanggi. Rumah beliau berukuran 4x7 meter dengan 5 penghuni dalam satu rumah. Penghuni rumah selain Bapak Sutanto dan anaknya, ialah seorang menantu dan seorang keponakan. Bapak Sutanto memasukkan nama keponakannya ke dalam kartu keluarganya agar dapat mendaftar atlet karena pada waktu itu tempat tinggal keponakannya berada di Sukoharjo. Saat wawancara, beliau memberikan dua kursi pendek kepada tamu untuk duduk, sementara beliau mengalah tidak menggunakan kursi. Sepintas, terlihat ada cincin akik yang melingkar di jari tangan kirinya, ditambah dengan jam tangan bercorak kuning. Saat menahan beban tubuhnya sambil jongkok, Bapak Sutanto memegang dinding pintu agar tidak terjatuh saat menjawab PPL mengisi kuesioner. Dia menjawab pertanyaan seperti sedang berteriak, maklum, pendengarannya sedikit terganggu.

Meskipun secara ukuran rumah Bapak Sutanto sedikit lebih besar dari rumah Mbah Siti, tetapi rumah tersebut sama-sama memiliki satu kamar. Hanya anak gadisnya yang menempati kamar dan selebihnya tidur di ruang tamu. "*Yo wes di sini mbak, ber lima gek gedhi-gedhi*," ungkap beliau. Kalimat Bapak Sutanto jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia 'Ya di sini Mbak tidurnya, berlima, mana kami ini besar-besar semua badannya'. Kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh Bapak Sutanto dan keluarganya saja, banyak rumah tangga yang penghuninya lebih dari lima orang dalam satu atap, dan rumah-rumah tersebut belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Air dari pencucian di dapur rumah Pak Sutanto langsung mengalir ke pipa samping rumahnya sehingga baunya tercium dari gang depan rumahnya. Hampir sama seperti rumah Mbah Siti, kondisi dapur

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berada sangat dekat dengan kamar mandi dan tidak ada ventilasi yang cukup.

Keberadaan anggota keluarga yang cukup banyak membuat durasi pengisian kuesioner jadi lebih panjang. PPL bernama Bayu secara berulang menanyakan pertanyaan yang sama untuk mempertanggungjawabkan inkonsistensi data yang diperoleh. Langkah tersebut merupakan strategi Bayu ketika mewawancarai rumah tangga dengan penghuni yang banyak karena terkadang informan yang didata mengalami kerancuan data saat menyampaikan informasi yang bukan tentang dia personal. Dari kelima anggota di kartu keluarga, hanya Risa yang menempuh kuliah, sedangkan lainnya berpendidikan SMP. Adapun anak laki-lakinya menempuh kejar paket C untuk melamar menjadi Linmas dan petugas kebersihan di Pasar Ayam Mojosongo.

Salah satu anak Bapak Sutanto yang bernama Ryan memiliki usaha jual beli bibit anggur dan beberapa buah-buahan. Menurut penuturan sang bapak, usaha anaknya itu sudah mulai merambah ke Youtube untuk promosi, tetapi pembeli kadang ingin melihat langsung ke lokasi. Rupanya, saluran teknologi informasi menjadi alternatif di tengah keterputusan sekolah para pemuda di Kampung Semanggi. Selain itu, Ryan dan bapaknya juga memanfaatkan relasi di kantor kelurahan dalam memasarkan produknya. Untuk menjalankan usaha tersebut, dia rela mengontrak satu rumah untuk budidaya bibit bersama dengan adiknya. Rumah tersebut hanya digunakan untuk usaha, meskipun omzet per bulannya kurang lebih sekitar lima juta rupiah, mereka tetap memilih untuk tidur di rumah Pak Sutanto.

Kondisi rumah dengan kapasitas berlebih ternyata tidak hanya dialami oleh keluarga Bapak Sutanto. Jemuran baju yang menghiasi sepanjang gang sempit dan didominasi oleh popok dan baju anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kelahiran baru sedang terjadi di perkampungan tersebut. Gambaran anak yang sudah berkeluarga tetapi masih tinggal dengan orang tuanya banyak ditemui di Kampung Semanggi. Jumlah anggota keluarga makin bertambah, tetapi mereka tetap berada di rumah orang tuanya. Alasannya beragam, entah karena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

uang simpanan yang tersedia sedang digunakan untuk mencoba usaha mikro seperti mas Ryan, atau karena menyesuaikan dengan lokasi kerja yang berada di dekat rumah orang tua.

Kampung Semanggi saat ini, mungkin sedang berbenah dari stigma kumuh yang dilekatkan dari masa ke masa. Namun, masalah kepadatan penduduk dan roda perekonomian di pinggiran kota menyebabkan mereka terjebak di lingkaran setan penghidupan yang mengharuskan mereka untuk tetap berdekatan dengan anggota keluarga satu sama lain. Kondisi Mbah Siti dan Bapak Sutanto yang berusaha hidup berdekatan dengan anak cucunya menunjukkan bahwa keluarga memberikan rasa nyaman dan aman di tengah situasi ketidakpastian.

Ketidakpastian yang dihadapi keluarga ini baik dalam aspek ekonomi maupun ketidakpastian menempati rumah di tanah milik PT KAI yang sewaktu-waktu dapat diminta berpindah. Di lokasi permukiman ini, anak yang telah berkeluarga masih berada satu atap dengan orang tuanya. Perkara ini bukan hanya karena anak merupakan jaminan sosial bagi orang tuanya, melainkan karena mereka merasa lebih lengkap ketika berada berdekatan di tengah ketidakpastian.

I. Penutup

Proses pendataan Regsosek menjadi momentum untuk melihat bagaimana wajah dinamika demografi di Kota Surakarta. Kedekatan relasi pusat-daerah tergambar dari berjalannya proyek-proyek pembangunan fisik dan pemukiman sampai pada wilayah pinggiran seperti Kampung Semanggi dan Kampung Harmoni. Kemudahan penyaluran bantuan dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan jaminan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan menjadi salah satu indikator kelancaran proses pendataan di kota paling padat penduduk di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai saluran, salah satunya yaitu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

iklan layanan masyarakat yang terhubung langsung dengan setiap TV di pos RT/RW se-Kota Surakarta.

Di sisi lain, rupanya masih terjadi simplifikasi pemahaman di kalangan masyarakat bahwa pendataan adalah bagian dari penyaluran bantuan. Hal ini juga menjadi tantangan proses pendataan ke depannya karena fungsi pendataan tidak hanya sebagai proses penyaluran bantuan. Oleh karena itu, terjadi beberapa kasus penolakan warga terkait pendataan karena khawatir bantuan yang mereka terima akan dicabut. Proses sosialisasi diharapkan tidak hanya berjalan secara masif, tetapi juga dapat menyasar struktur pengetahuan masyarakat dalam memahami apa itu data dan proses pendataan. Artinya, tumpuan keberhasilan sosialisasi bukan hanya pada intensitas frekuensi, tetapi lebih pada penyamaan struktur pengetahuan terkait pendataan.

Tantangan lainnya adalah terkait kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Surakarta. Kota tersebut memang sudah berbenah secara fisik, tetapi kepadatan penduduk terus meningkat baik karena angka kelahiran maupun urbanisasi harus diantisipasi sesegera mungkin. Banyaknya layanan dan bantuan berbagai program dari Pemerintah Kota Surakarta secara laten berpotensi memicu faktor penarik urbanisasi ke dalam kota tersebut. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan perbaikan struktur sosial dan ekonomi akan menimbulkan melubernya penduduk ke arah pinggiran kota. Dalam hal pendataan, jumlah penghuni yang banyak dalam satu rumah akan mempengaruhi alokasi waktu yang lebih panjang dalam mengisi kuesioner pertanyaan.

Beberapa keluarga baru sengaja masih menetap di rumah orang tua mereka sehingga dalam satu rumah di Kampung Semanggi maupun Kampung Harmoni terdapat lebih dari satu keluarga inti. Rupanya, kondisi ketidakpastian ekonomi mendorong mereka untuk berkelompok sehingga tidak jarang kami temui satu rumah dihuni oleh sekitar lebih dari lima orang. Kepadatan penduduk yang mengakar sampai pada masalah kultural semacam ini berdampak pada rantai ekosistem secara lebih luas, seperti permasalahan sampah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rumah tangga, akses sanitasi dan air bersih yang layak, dan kelayakan kondisi rumah tinggal.

Pendataan Regsosek diharapkan mampu menjadi tumpuan data terpadu yang dapat secara fleksibel dan terbuka diakses oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk keperluan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan tunggal perangkingan urgensi dari berbagai langkah penanganan terhadap permasalahan sosial yang ada baik di tingkat lokal maupun nasional.

Daftar Pustaka

Basundoro, P. (2022). *Merebut ruang kota: aksi rakyat miskin kota Surabaya 1900-1960an*. Marjin Kiri.

BPS. (2020). Mencatat Indonesia [Salindia]. Diakses pada 5 November 2022 dari https://www.bps.go.id/sp2020/faq/detail/117

BPS. (2022). Registrasi sosial konomi (Regsosek). Diakses pada 1 November 2022 dari https://www.bps.go.id/ Regsosek/

BPS Kota Surakarta. (2020). Hasil sensus 2020. BPS Kota Surakarta.

BPS Kota Surakarta. (2021). Monografi kota Surakarta. BPS Kota Surakarta.

Chandra, S. (2019). Glimpses of Indonesia's 1965 massacre through the lens of the census: The role of trucks and roads in "crushing" the PKI in East Java. *Indonesia*, *108*(1), 1-21). doi:10.1353/ind.2019.0010

Curtis, B. (2016). Foucault on governmentality and opulation: The impossible discovery. *Canadian Journal of Sociology*, *27*(4), 505-533. doi:10.2307/3341588

Ever, H. D., & Korff, R. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Google. (t.t.). [Lokasi Kota Surakarta]. Diakses pada 5 Desember, 2022, dari https://goo.gl/maps/t5i2evQxskzurxw6.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Heuken, A., & Pamungkas, G. (2021). *Menteng 'kota taman' pertama di Indonesia*. Cipta Loka Caraka.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022, Oktober 11). Percepat Pencapaian Pembangunan, Regsosek Upaya Kementerian PPN/Bappenas Kembalikan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data. Diakses pada 6 November, 2022 dari https://www.bappenas.go.id/ berita/percepat-pencapaian-pembangunan-Regsosek-upaya-kementerian-ppnbappenas-kembalikan-perencanaan-dan-penganggaran-berbasis-data-jBiN9

McKenzie, R. (1924). The ecological approach to the study of the human community. *American Journal of Sociology*, *30*(3), 287–301. doi:10.1086/213698

Padawangi, R. (2019). Forced evictions, spatial (un) certainties and the making of exemplary centres in Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, *60*(1), 65–79. doi:10.1111/apv.12213

Padmiati, E. (2013). Menuju masyarakat berketahanan sosial melalui pemberdayaan lembaga sosial lokal di provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *12*(3), 263–275.

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta.

Setyaningrum, A., D. R., & Marfai, M. A. (2017). Kerentanan sosial terhadap banjir di bantaran sungai Bengawan Solo paska relokasi mandiri. *Majalah Ilmiah Globë*, *19*(2), 105–112. doi:10.24895/mig.2017.19-2.467

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. PT Alfabet

TNP2K. (2022). Basis data terpadu. TNP2K.

Tukiran, T. (2016). Sensus penduduk di Indonesia. *Populasi*, *11*(1), 17–34. doi:10.22146/jp.12328

Walikota Surakarta. (2011). Rencana tata ruang wilayah kota Surakarta 2011–2031. Pemkot Surakarta.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Wertheim, W. F., & Giap, T. S. (1962). Social change in Java, 1900-1930. *Pacific Affairs*, *35*(3), 223-247. doi:10.2307/2753184

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

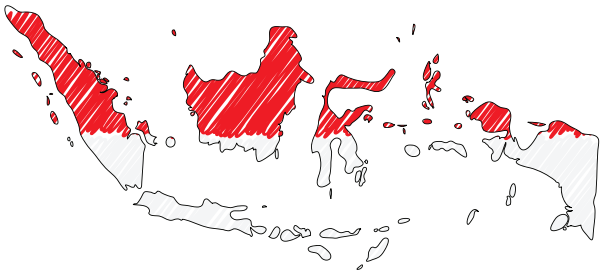

#7

Registrasi Sosial Ekonomi di Indramayu: Memahami Kemiskinan dengan Kelindan Persoalan Sosial di Wilayah Agraris–Maritim

Nurul Hilmiati & Dian Karinawati Imron

A. Berlari Keluar, Lupa Kemiskinan: Pengantar

Justifikasi pemilihan Kabupaten Indramayu sebagai lokasi kajian karena persentase keluarga pra-sejahtera tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Kuningan dengan persentase sebesar 13,04% pada tahun 2021 (BPS, 2022). Selain itu, Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang mengirim pekerja migran Indonesia terbesar di Provinsi Jawa Barat (BP2MI, 2022). Kemiskinan, PMI, kompleksitas persoalan sosial, dan potensi wilayah untuk peningkatan kesejahteraan warga merupakan aspek-aspek utama yang digali dalam kajian ini. Dengan demikian, narasi dari perspektif responden dapat memberi makna dibalik angka-angka yang tercatat dalam Regsosek. Penarasian ini diharapkan akan memberikan gambaran utuh kepada para pemangku kepentingan tentang akar permasalahan kemiskinan,

N. Hilmiati,* & D. K. Imron
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nuru053@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Hilmiati, N., & Imron, D. K. (2023). Registrasi sosial ekonomi di Indramayu: memahami kemiskinan dengan kelindan persoalan sosial di wilayah agraris–maritim. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (227–270). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c709 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

khususnya di Indramayu dan kaitannya dengan proses Regsosek. Pemahaman yang lebih komprehensif diharapkan akan melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat desain, tepat metode, tepat sasaran, dan tepat tujuan.

B. Bentang Alam dan Kondisi Sosial Indramayu

1. Agroekologi dan Komoditas Unggulan

Kabupaten Indramayu terletak sekitar 200 km sebelah timur ibu kota negara, Jakarta (Gambar 7.1). Dengan luas sekitar 2.000 km^2, kabupaten ini merupakan salah satu dari enam kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Kota Cirebon. Wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa dan wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 309 desa dan 8 (delapan) kelurahan.

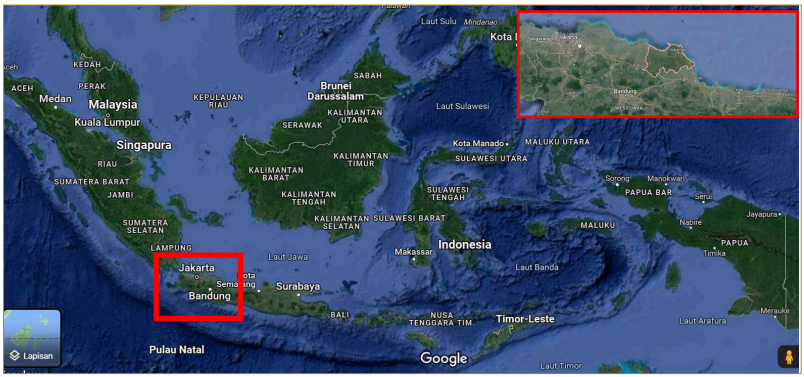

Sumber: Google Maps (t.t.)

Gambar 7.1 Kabupaten Indramayu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada beberapa desa di Kecamatan Juntinyuat, di antaranya Desa Juntikebon, Desa Juntikedokan, dan Desa Dadap. Mayoritas penghidupan warga desa di Indramayu ditopang oleh beberapa sektor, yaitu pertanian, perikanan, pertambangan dan jasa.

Kabupaten Indramayu memiliki sekitar 122 ribu hektare lahan sawah yang sebagian besar memiliki irigasi teknis (Gambar 7.2). Namun, pola pertanaman di Indramayu hanya dua kali dalam satu tahun yang didominasi oleh padi di musim hujan (MH) dan padi atau palawija di musim kemarau I (MK I). Indramayu terkenal dengan berasnya dan merupakan salah satu penghasil padi yang penting di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, pada musim kemarau II (MK II), sebagian besar lahan pertanian dibiarkan *berau* (kosong) karena tidak cukupnya air irigasi untuk mengairi pertanian. Sawah akan digarap kembali pada musim hujan berikutnya. Kepemilikan lahan di Indramayu berkisar antara 0.2—1.5 ha/keluarga. Namun, ada beberapa wilayah dimana lahan pertanian sebagian besar dikuasai oleh orang-orang berada di wilayah tersebut atau di luar wilayah sementara sebagian besar penduduknya hanya sebagai buruh tani.

Selain padi, Indramayu telah dikenal secara nasional sebagai wilayah penghasil mangga, seperti mangga cengkir, manalagi, harum

Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.2 Bentangan Lahan Pertanian di Kabupaten Indramayu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

manis, dan yang paling terkenal adalah mangga gedong gincu. Jenis mangga yang terakhir ini sangat atraktif dengan warna kulit yang merah kuning merona. Mangga merupakan sumber penghasilan yang penting bagi sebagian warga. Mangga ditanam diantara pematang-pematang sawah atau khusus dibuat menjadi kebun mangga. Satu pohon mangga dapat mendatangkan penghasilan sekitar Rp300.000,00 setiap kali panen. Dengan jumlah yang melimpah, mangga belum diolah menjadi berbagai jenis produk turunan sebagai bentuk peningkatan nilai tambah produk. Mangga pada umumnya dijual dalam bentuk segar dengan target utama pasar di wilayah Jabodetabek.

Selain sektor pertanian, warga Indramayu mengandalkan hasil tangkapan laut. Salah satu desa nelayan dengan karakteristik alam yang menarik untuk dikaji ialah Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat (Gambar 7.3). Menurut seorang kepala dusun, masa produktif nelayan melaut hanya enam bulan, pada saat musim angin Timur dari bulan April–September. Musim angin Timur musim adalah musim banyak ikan besar dan kecil yang tertangkap. Kemudian, musim angin Barat (Oktober–Maret) menunjukkan hal yang berbeda yaitu nelayan sulit untuk melaut karena faktor alam (curah hujan tinggi, gelombang

Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.3 Salah satu sudut Desa Dadap, sebuah desa nelayan di Kecamatan Juntinyuat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tinggi, dan angin kencang). Nelayan menghabiskan waktunya untuk menyulam kembali jaring penangkap ikan yang robek dan memperbaiki perahu yang rusak pada masa tidak melaut. Ukuran perahu nelayan-nelayan di Desa Dadap bervariasi. Uniknya, ada warga yang menangkap ikan menggunakan perahu yang terbuat dari gabus *styrofoam* yang dirakit menjadi sampan. Menurut penuturan kepala dusun, nelayan-nelayan di Desa Dadap sudah sangat akrab dengan laut dan dengan perahu gabus tersebut dapat memperoleh penghasilan hingga Rp200.000,00 per hari.

Dengan mayoritas warga sebagai nelayan, Desa Dadap telah memiliki empat pelelangan ikan (TPI) dan koperasi yang mengelola pelelangan. Akan tetapi, patut disayangkan bahwa keberadaan TPI dan koperasi nelayan di Desa Dadap belum mampu mengangkat kesejahteraan warga karena beberapa faktor, antara lain: 1) manajemen dan pengelolaan koperasi yang tidak transparan dan didominasi oleh segelintir elit, 2) sistem penetapan harga lelang oleh koperasi yang tidak berpihak pada nelayan, dan 3) dibatasinya pembeli dari luar. Perangkat Desa Dadap sangat merasa prihatin dengan kondisi ini, tetapi di lain pihak, tidak mampu untuk berbuat banyak untuk mengubah keadaan. Pemerintah Desa Dadap beberapa kali telah melakukan upaya untuk mengakuisisi dan mereformasi koperasi nelayan, tetapi mendapatkan resistensi. Kepengurusan dan pengelolaan koperasi sangat tertutup yang dikuasai oleh beberapa elit yang juga merupakan pengusaha ikan. Kalaupun ada rapat anggota koperasi, hanya bersifat formalitas belaka.

Sistem penetapan harga lelang dan pembatasan pembeli dari luar oleh koperasi dirasakan sangat merugikan masyarakat nelayan. Menurut perangkat Desa Dadap, orang-orang yang ikut lelang hanya yang itu-itu saja sehingga harga yang ditawarkan juga cenderung menekan nelayan. Fasilitas yang belum memadai seperti *cold storage* menjadi pertimbahan bagi nelayan sehingga terpaksa menjual hasil tangkapannya daripada ikan menjadi busuk. Sebelumnya, pernah ada pembeli luar yang mencoba datang untuk ikut lelang ikan di dengan harga yang lebih bersaing. Namun, saat perjalanan pulang,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembeli tersebut mendapatkan ancaman dan perlakukan fisik yang dirasa membahayakan dirinya. Pembeli luar enggan untuk datang ke TPI Dadap setelah kejadian. Dugaan yang muncul dari fenomena itu adalah adanya monopoli koperasi dalam penentuan harga lelang ikan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan kondisi ini, hasil tangkapan ikan yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Sebagai contoh, satu *impling* ikan (±13 kg) dengan kondisi normal bernilai Rp160.000,00. Namun, saat tangkapan nelayan melimpah, harga penjualan yang ditetapkan koperasi anjlok, hanya Rp40.000,00 hingga Rp50.000,00. Dengan kondisi jumlah pembeli yang itu-itu saja dan tidak ada pembeli luar yang dapat menciptakan persaingan harga, kembali lagi, nelayan terpaksa melepas ikan tangkapan daripada membusuk.

Carut marut penetapan harga lelang ikan di TPI Dadap telah merugikan nelayan. Diskusi dengan aparat desa menyebutkan bahwa seharusnya pedagang yang ikut lelang menyetorkan uang terlebih dahulu ke koperasi sejumlah barang yang akan dibelinya. Kenyataannya, sering kali para pedagang ini menyetor uang dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan barang yang dibawa pergi. Salah satu warga mencontohkan bahwa pedagang A meletakkan deposit di koperasi sejumlah 10 juta rupiah untuk ikut lelang. Namun, pedagang membawa ikan nelayan senilai 20—30 juta rupiah. Menurut istilah masyarakat Dadap, banyak pedagang yang membawa pistol dengan bunyi "tarr…tarr." Pedagang tersebut membayar ikan nelayan dengan "ucapan" saja dan ketika ditagih mulai mengeluarkan pistolnya "Taarr…. Besok," "Taarr…. Lusa," "Taarr… Minggu depan". Nelayan hanya bisa pasrah.

Kabupaten Indramayu juga diuntungkan dengan pembangunan kilang minyak di Balongan yang merupakan milik PT. Pertamina, Indonesia. Kilang minyak ini mengolah minyak mentah *(crude oil*) menjadi produk-produk BBM, non-BBM, dan petrokimia. Pembangunan kilang ini tentu saja menjadi peluang lapangan kerja bagi warga sekitar. Hanya saja, menurut beberapa responden,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kebanyakan pegawai yang bekerja di kilang minyak Balongan berasal dari luar wilayah Indramayu. Warga lokal biasanya hanya mengerjakan beberapa pekerjaan level bawah sebagai penjaga keamanan, *cleaning service*, atau tenaga buruh.

2. Persoalan Pendidikan, Kemiskinan, dan Kompleksitas Sosial: Sebuah Kelindan

Posisi dan letak Kabupaten Indramayu yang berada di Pulau Jawa dan relatif tidak jauh dari ibu kota negara, Jakarta, semestinya menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu kabupaten yang maju dengan tingkat pendidikan warga yang baik. Program nasional Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun misalnya selayaknya dapat dipenuhi seluruh warga. Namun, realitanya tidak demikian. Menurut seorang staf BPS kabupaten, rata-rata lama pendidikan formal di Indramayu pada tahun 2021 hanya 6,1 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indramayu hanya menyelesaikan pendidikan formal selama enam tahun (SD). Menurut beliau, hal ini sudah jauh meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya yang hanya 5,9 tahun saja. Artinya, rata-rata penduduk Indramayu pada lima tahun lalu tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar enam tahun.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat mengikuti sekolah, meliputi kemiskinan, persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan persepsi masyarakat terhadap ukuran dan standar keberhasilan. Faktor kemiskinan merupakan faktor yang sering disebutkan oleh responden sebagai penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan formal di Indramayu. Menurut staf BPS Kabupaten Indramayu, wilayah ini masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini cukup mencengangkan apabila dilihat dari segi kondisi agroekologi Indramayu sebagai lumbung beras dan potensi komoditas lain yang ada, seperti komoditas perkebunan dan perikanan.

Rendahnya tingkat pendidikan berkelindan dengan dua faktor lain. Pertama, persepsi masyarakat terhadap pentingnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, tersirat dan tersurat bahwa banyak masyarakat Indramayu yang lebih mementingkan anaknya dapat menghasilkan uang daripada menyelesaikan pendidikan. Ada kecenderungan masyarakat bahwa lebih cepat bekerja dan menghasilkan uang, lebih baik daripada bersekolah lama-lama. Menurut seorang responden, orang tua bersedia melepas anak-anaknya yang masih berusia sekolah untuk dibawa oleh orang lain bekerja di luar Indramayu. Perempuan-perempuan muda Indramayu ditengarai turut bekerja di dunia hiburan orang dewasa.

Faktor kelindan lain akan rendahnya tingkat pendidikan di Indramayu adalah persepsi masyarakat terhadap ukuran keberhasilan dan kesuksesan individu yang berorientasi materi. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan pimpinan wilayah menyebutkan bahwa masyarakat umumnya ingin cepat kaya. Penampilan fisik sebagai refleksi dari kekayaan itu menjadi sangat penting bagi sebagian besar warga. Oleh karena itu, warga cenderung berlomba untuk memperlihatkan capaian-capaian finansialnya untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi diri. Rumah-rumah megah nan indah berjajar rapi hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun, para responden mengingatkan agar jangan terkecoh dengan tampilan fisik rumah tersebut karena warga yang ada di dalam rumah tersebut belum tentu sejahtera. Rumah-rumah mewah kebanyakan dibangun dari hasil sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Para warga bekerja keras agar dapat membangun rumah yang minimal sama bagusnya dengan milik tetangga. Hal itu lebih karena pada faktor "gengsi". Ungkapan kata ini terdengar dari sebagian besar responden. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya gengsi pada hal-hal kepemilikan yang bersifat materi telah berurat berakar di kalangan masyarakat Indramayu. Ungkapan masyarakat yang sering terdengar ialah warga rela makan susah selama memiliki rumah bagus. Warga desa mencoba untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dalam waktu secepatnya.

Selain budaya gengsi, ada hobi berbiaya tinggi yang sangat lazim di kalangan masyarakat Indramayu, yang pada gilirannya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.4 Rumah-rumah di Kecamatan Juntinyuat

berkontribusi pada kondisi kemiskinan. Hobi tersebut adalah *nyawer* pada acara hiburan yang biasanya terbuka untuk umum. *Nyawer* telah menjelma menjadi ajang untuk mendapatkan pengakuan akan eksistensi dan keberadaan sosial seorang laki-laki. Menurut seorang responden, banyak para laki-laki yang banting tulang bekerja baik di darat maupun laut, tetapi merelakan begitu saja uang ratusan hingga jutaan rupiah untuk *nyawer*. Kebanggaan para penyawer ini adalah saat ia memberikan uang kepada biduanita lalu sang biduanita menyorongkan mikrofon agar sang penyawer dapat menyebut namanya dengan lantang dan bisa didengar oleh khalayak ramai. Seperti contoh, "Fulan…… Seratus ribu," "Fulan…. Dua ratus ribu." Sang biduan pun akan memancing agar para penyawer saling berlomba memberikan sawer yang lebih besar. Tanpa disadari, uang hasil kerja keras tersebut lenyap dalam sekejap demi kesenangan dan kebanggaan untuk disebut nama. Sang penyawer kembali tidak punya uang saat pulang dan kemiskinan pun kembali melilitnya.

3. Pekerja Migran dan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Kondisi kemiskinan ekstrem dan pengaruh tuntutan sosial telah membuat sebagian warga Indramayu memilih menjadi pekerja migran. Daerah ini merupakan pengirim tenaga migran terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2022), pada tahun 2021 setidaknya 5.262 tenaga kerja dari Indramayu mendapatkan penempatan kerja di luar negeri. Jumlah total tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tahun yang sama sejumlah 72.642 orang. Sementara itu, data pada tahun 2019 (sebelum Covid-19) memperlihatkan 23.360 orang dari Indramayu diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri (BNP2TKI, 2019). Menurut salah seorang kepala dusun, desa nelayan ini dipadati oleh 6.000 keluarga dan 2.000 diantaranya sedang bekerja di luar negeri. Pada 10 tahun yang lalu, pekerja migran ini didominasi oleh kaum hawa dengan tujuan utama wilayah Timur Tengah. Namun, beberapa tahun terakhir, PMI ini pun mulai sangat diminati oleh kaum adam. Hal ini seiring dengan terbukanya tujuan-tujuan baru yang menggeser dominasi wilayah Timur Tengah, seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Hongkong. Pendapatan bulanan yang berkisar delapan hingga sepuluh juta rupiah per bulan, telah memikat banyak warga Indramayu untuk merantau menjadi pekerja migran. Pekerjaan sebagai pekerja migran telah menjadi sangat popular dan dianggap sebagai jembatan emas yang akan mengantarkan orang memenuhi kebutuhan finansial sekaligus mengangkat derajat dan status sosial dengan kepemilikan benda-benda material.

Namun, ada satu pertanyaan mendasar dengan fenomena pekerja migran ini. Apabila pekerjaan ini menghasilkan cukup materi dan telah berlangsung selama puluhan tahun, mengapa Indramayu masih berada dalam kemiskinan ekstrim? Sesuatu yang sepintas tampak saling bertolak belakang. Seorang PML yang memiliki pengalaman sebagai pekerja migran menuturkan bahwa umumnya orang yang menjadi pekerja migran akan selalu ingin kembali lagi bekerja di luar negeri. Situasi ini tidak mengherankan apabila setelah pulang dari luar negeri, pendapatan pekerja migran tidak bertahan lama. Selama bekerja di luar negeri, pekerja migran juga mengirim untuk biaya hidup keluarga sehari-hari. PMI juga mengirim biaya hidup terlebih apabila PMI menitipkan anak kepada keluarga. Penyebab lain hasil kerja PMI tidak bertahan lama adalah gaya hidup yang berubah. PMI menerangkan bahwa setelah pulang bekerja dari luar negeri, ada tuntutan sosial di masyarakat. PMI yang baru pulang bekerja harus memiliki penampilan dan gaya hidup yang berbeda dari saat sebelum berangkat. Beberapa tuntutan sosial tersebut seperti rumah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

harus lebih bagus, penampilan, dan kendaraan baru, serta berbagai gaya hidup yang berorientasi materi. Pekerja migran menghabiskan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang ketika kembali ke kampung dan setelah kembali sering kali bingung harus bekerja apa.

Fenomena pekerja migran ternyata telah berdampak pada berbagai kondisi sosial yang pelik bagi masyarakat Indramayu. Dampak terbesar yang dialami pekerjaan migran adalah kehidupan rumah tangga. Seorang tokoh masyarakat di Desa Dadap mengungkapkan, "Hasil bekerja sebagai PMI tidak sebanding dengan dampak pada kehidupan." Ada nada dan roman muka sangat pedih sekaligus geram ketika beliau menyampaikan hal tersebut. Hal senada juga didapatkan dari responden lain. Tak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan PMI memiliki andil dibalik tingginya angka kawin-cerai di Indramayu. Saling berjauhan kemudian berada di negeri dengan norma pergaulan yang bebas telah menjadikan pasangan suami-istri rentan untuk saling meninggalkan. Perempuan pekerja migran pun tidak sedikit yang mengirim hasil kerjanya kepada suaminya dikampung, tetapi digunakan untuk berfoya-foya, seperti main judi, perempuan, dan mabuk. Pasangan pun ada yang berpisah karena kejadian tersebut. Kejadian lain, laki-laki pekerja migran memilih menikah dengan perempuan lain selama berada di luar negeri dan istrinya akhirnya memilih menikah lagi di kampung dengan laki-laki lain. Kemudian, wanita pekerja migran ada yang pulang membawa "oleh-oleh" dalam istilah masyarakat berupa anak dari lelaki asing negara tempat wanita tersebut bekerja. Anak-anak ini juga menghadapi tantangan terkait pendataan akta kelahiran dan mengikuti jenjang pendidikan formal.

Dampak tidak kalah menyedihkan dari pekerjaan PMI ini adalah pada pengasuhan anak. Sering kali, para PMI meninggalkan anak-anak yang masih berusia balita dan dititipkan pada nenek atau keluarga dekatnya. Perhatian dan kasih sayang yang didapatkan untuk anak tumbuh dan berkembang tentu saja tidak akan pernah sama dengan orang tua kandungnya. Dampak keadaan ini terlihat pada pada pemenuhan gizi dan sekolah anak. Sering kali, sang nenek kurang memahami kebutuhan gizi sang anak. Anak diberikan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

makanan seadanya sehingga banyak kasus anak-anak *stunting* yang justru tinggal di dalam rumah-rumah dengan kondisi layak. Masalah lain yang juga sering timbul ialah perhatian yang diberikan lebih pada untuk memenuhi permintaan anak yang berupa benda-benda material seperti ponsel atau sepeda motor.

Persoalan demi persoalan yang ada seolah seperti lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Satu sama lain berkelindan dalam sengkarut yang sangat kompleks menyangkut aspek pendidikan, ekonomi, nilai-nilai agama, dan norma-norma sosial. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan kesungguhan, keikhlasan, dan keberanian para pemegang kepentingan. Penyelesaian berbagai permasalahan juga memerlukan waktu yang tidak pendek, bahkan mungkin memerlukan perubahan lintas generasi. Sungguh, sebuah ironi di wilayah lumbung pangan dengan hasil alam yang melimpah.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

1. Proses Regsosek

Regsosek yang dilaksanakan dari akhir bulan Oktober–November 2022 telah melalui sejumlah rangkaian persiapan. Menurut seorang staf BPS Pusat, perbincangan awal pada level pimpinan dimulai pada bulan Juni 2022 ketika Bappenas mengundang kementerian terkait untuk merancang sebuah survei yang bertujuan untuk memutakhirkan data kondisi sosial ekonomi seluruh warga Indonesia. Dengan segala dinamika yang berkembang, termasuk ketidakpastian anggaran hingga bulan Agustus 2022, akhirnya para pihak kemudian menyepakati rancangan model dan pelaksanaan Regsosek yang berlangsung selama sebulan penuh dari tanggal 24 Oktober hingga 24 November 2022. Hal ini tidak terlepas dari dukungan lintas kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri yang menyetujui untuk menggerakkan organisasi kecamatan dan desa untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaan Regsosek. Dukungan penuh datang dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan menyediakan perangkat informasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

teknologi dan *platform* penyimpanan *big data* Regsosek. Pimpinan TNI/POLRI pun tak ketinggalan memberikan dukungan dengan membuka akses untuk melakukan pendataan ke seluruh satuan-satuan tugas tentara/polisi.

Persiapan pelaksanaan Regsosek tergolong singkat. Hanya ada waktu empat bulan untuk segala persiapan dan apabila dibandingkan dengan sensus lain seperti Sensus Pertanian yang memiliki waktu persiapan dua tahun sebelum pelaksanaan. Ada beberapa tahapan pelaksanaan Regsosek di tingkat lapangan antara lain: 1) penyiapan bahan seperti kuesioner serta sarana prasarana pendukung; 2) koordinasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten dengan para pihak terkait; 3) rekrutmen petugas pelaksana; 4) pelatihan petugas; 5) pelaksanaan sensus; 6) pengelolaan data dan berkas hasil sensus; 7) *entry* data dan analisis; dan 8) forum komunikasi publik.

Kepala BPS dan Ketua Tim Pendataan Lapang Regsosek Kabupaten Indramayu mengungkapkan dalam sensus regular yang lain, semua perlengkapan dan sarana pendukung seperti kuesioner, perlengkapan lapangan, dan bahan pendukung lainnya disiapkan oleh BPS Pusat. BPS Kabupaten hanya sebagai pelaksana kegiatan. Namun, dalam Regsosek ini, seluruh pengadaan dan diserahkan kepada BPS Kabupaten. Hal ini dibenarkan oleh seorang staf dari BPS Pusat. Strategi ini dilakukan mengingat sempitnya jeda waktu persiapan sehingga bila menggunakan sistem terpusat, dikhawatirkan bila terjadi kegagalan atau tidak berjalan sesuai harapan, maka Regsosek terancam gagal total. Namun, dengan sistem terdistribusi ini, kemungkinan tersebut diperkecil. Apabila terjadi kegagalan pada satu kabupaten, tidak akan memengaruhi kabupaten yang lain dan apabila ada satu kabupaten yang gagal, masih ada banyak kabupaten yang dapat melaksanakan Regsosek.

Hasil wawancara di BPS Kabupaten Indramayu menunjukkan adanya beberapa tantangan pada tahap persiapan, yaitu koordinasi para pihak dan pelatihan petugas pendataan. Tantangan terbesar bagi BPS kabupaten dalam persiapan adalah pengadaan kuesioner dan bahan pendukung lainnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rekanan di daerah dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Selain itu, juga proses administrasi keuangan dengan volume yang besar membutuhkan kerja ekstra dari semua staf BPS yang hanya berjumlah 35 orang termasuk pimpinan. Namun, dengan pendampingan dari BPS Provinsi Jawa Barat, tahapan pengadaan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sementara itu, koordinasi dengan pihak bupati untuk dukungan pelaksanaan juga mengalami tantangan. Surat edaran bupati kepada seluruh OPD sangat diharapkan terbit segera untuk mendukung pelaksanaan Regsosek. Selain itu, bupati juga diharapkan muncul dalam tayangan-tayangan di media promosi Regsosek. Namun, faktanya sosialisasi Regsosek dengan *g*ambar pimpinan daerah tidak dapat ditayangkan. Tantangan lain untuk tahapan persiapan Regsosek di Kabupaten Indramayu adalah pada pelatihan petugas. Menurut ketua tim pendataan lapang, kegiatan Regsosek ini melibatkan petugas dengan total jumlah 3.152 personil yang terdiri dari 27 orang organik BPS, 614 orang Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), 2449 orang Petugas Pendataan Lapangan (PPL), dan 62 orang Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Seluruh petugas, tentu perlu mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum terjun melaksanakan Regsosek. Sementara itu, pelatihan petugas didesain untuk waktu dua hari. Hal ini berarti peserta pelatihan harus diinapkan demi efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan. Di sisi lain, Kota Indramayu tidak memiliki fasilitas hotel dengan aula pertemuan yang dapat menampung banyak peserta. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pelatihan dilaksanakan di Kota Cirebon dengan daya tampung hotel besar dan fasilitas pendukung pelatihan yang lebih baik.

Namun, pelatihan pembekalan petugas Regsosek yang dilaksanakan di Kota Cirebon memunculkan tantangan lain. Beberapa daerah sekitar dengan kondisi yang sama juga memiliki pemikiran untuk menggunakan hotel yang sama, seperti dari Kabupaten Majalengka, Kuningan dan Kota Cirebon sendiri. Akibatnya, terjadi rebutan hari pelaksanaan dan harus dilaksanakan secara bergelombang. Pelatihan akhirnya dilaksanakan sebanyak 16 gelombang di mana

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masing-masing gelombang terdiri dari 4—5 kelas dan setiap kelas berisi sekitar 40 petugas. Dengan terbatasnya instruktur pelatihan dari kantor BPS, gelombang pelatihan ini menimbulkan tekanan beban kerja bagi para instruktur. Namun, dengan semangat dan kerja keras semua pihak, pelatihan ini akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Materi pelatihan menurut PML dan PPL yang diwawancarai terdiri dari dua bagian. Materi pertama adalah pengenalan alat sensus berupa kuesioner, pemahaman arti dari istilah-istilah yang digunakan, dan pemahaman maksud dari pertanyaan. Materi kedua meliputi teknik-teknik wawancara dan strategi untuk mendapatkan serta informasi yang akurat. PML dan PPL responden menyampaikan bahwa pelatihan yang didapatkan sudah cukup sebagai bekal untuk melaksanakan sensus Regsosek. Namun, dalam pelaksanaan pendataan, sering kali PPL kembali lagi ke PML untuk menanyakan beberapa hal yang dianggap kurang jelas.

Tahapan selanjutnya dari proses Regsosek adalah rekrutmen petugas pelaksana. Menurut Kepala BPS dan Ketua Tim Pendataan Lapang Regsosek Kabupaten Indramayu, rekrutmen dilakukan dengan sistem terbuka dengan memasang pengumuman melalui media sosial, seperti Facebook dan grup Whatsapps. Rekrutmen memang dilakukan melalui sistem terbuka, tetapi berdasarkan wawancara dengan beberapa PML mengindikasikan bahwa PML-PML yang telah lama menjadi mitra BPS mengidentifikasi individu di sekitar wilayahnya yang kira-kira dianggap mampu, cakap, dan bertanggung jawab untuk menjadi PPL. Individu-individu ini kemudian disarankan untuk mendaftar melalui rekrutmen terbuka. PML-PML yang sudah lama menjadi mitra BPS ini juga memberikan rekomendasi dan catatan pada tahap seleksi petugas pencatat lapangan. Tenaga PPL yang direkrut ini umumnya berasal dari wilayah desa setempat dengan pertimbangan lebih mengenal medan dan masyarakat yang akan didata. Namun, ada juga yang bertugas lintas desa, tetapi tidak sampai melewati batas kecamatan.

Berdasarkan struktur pelaksanaan Regsosek, koordinator kecamatan dapat berasal dari organik staf BPS kabupaten. Namun,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kondisi staf tidak mencukupi maka direkrut mitra BPS. Umumnya, mitra yang ditunjuk sebagai Koseka adalah orang-orang yang telah berpengalaman lama mengikuti kegiatan sensus-sensus BPS dan telah memahami pola kerja serta manajemen pelaksanaan sensus. Adapun pembagian wilayah kerja bagi PPL berdasarkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang dapat berupa RT atau pembagian khusus seperti Nagari yang ada di Sumatra Barat. Satu desa dapat terdiri dari tiga hingga empat PML. Kemudian, di antara PML di desa menyepakati wilayah kerja serta PPL yang berada di bawahnya. Salah satu kasus PML yang dijumpai di Desa Juntikedokan ialah PML tersebut memilih wilayah kerja dan PPL di luar kampungnya dengan alasan bahwa bekerja di wilayah kampung sendiri akan kurang dihargai. PML tersebut memilih bekerja di wilayah kampung sebelahnya.

Secara struktur, PPL bertanggung jawab kepada PML. Apabila ada kendala baik dalam memahami kuesioner maupun teknis pelaksanaan sensus, PPL akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PML. Apabila PML mengalami kebingungan dan kendala, akan berkoordinasi dengan Koseka. Setelah PPL melaksanakan survei pada hari tersebut, maka berkas-berkas diserahkan ke PML untuk diperiksa akurasi serta validitas data. Data yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada PPL untuk di *cross check* kembali di lapangan. Sebagaimana yang peneliti saksikan di Desa Junti Kedokan, masih ada berkas kuesioner tidak lengkap isian kolomnya. PML saat itu langsung meminta PPL untuk datang ke rumahnya memperbaiki kuesioner. Kemudian, ada kasus lainnya yaitu PML kebingungan dengan salah seorang responden yang tidak diketahui pasti keberadaannya dan tidak menetap. PML tersebut menanyakan kepada Koseka bagaimana menghadapi kondisi demikian.

Komunikasi dan koordinasi setiap level pelaksana berjalan dengan baik. Salah satu media komunikasi yang digunakan dan dianggap penting untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi adalah media Whatsapps, terutama untuk saling mengingatkan instruksi dan hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan. Seorang PML di Juntikebon mengakui bila dalam Regsosek ini dia memiliki banyak sekali grup

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.5 PML dan PPL berdikusi terkait pendataan

Whatsapps, antara lain grup PML dengan Koseka, grup PML dan PPL, dan grup satu desa untuk memastikan tidak ada informasi dan instruksi yang terlewatkan. Beberapa kali perubahan instruksi di tengah jalan, seperti keharusan mengambil gambar kamar mandi bagi rumah tangga miskin, cukup menantang bagi PML untuk menjelaskan kepada PPL. Hal ini karena instruksi baru berarti PPL harus kembali lagi ke tempat semula melakukan pendataan dan seperti bekerja dua

Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.6 Pengumpulan Berkas Registrasi oleh Para PML

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kali. Di sisi lain, PPL dituntut untuk menyelesaikan tugas dengan seksama dan secepatnya. Namun, dengan komunikasi dan pendekatan yang baik, hambatan-hambatan ini berhasil diatasi oleh para PML dan Koseka.

Tahap selanjutnya dari berkas kuesioner registrasi adalah pengumpulan. Setelah PPL mengumpulkan kuesioner ke PML, berkas-berkas tersebut kemudian diperiksa satu-persatu dan disusun per satuan lingkungan setempat (SLS) dan per desa. Berkas biasanya dibawa ke kantor BPS kabupaten oleh Koseka saat turun lapangan melakukan pendampingan kepada para PML. Berkas-berkas dari seluruh kecamatan ini kemudian disimpan dalam gudang penyimpanan. Menurut salah seorang responden karena kondisi Gedung BPS Indramayu yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk penyimpanan berkas dari seluruh wilayah kabupaten, BPS telah menyewa sebuah bangunan khusus digunakan sebagai gudang penyimpanan berkas Regsosek.

Tahap berikutnya setelah penyimpanan berkas kuesioner adalah tahap *entry* data. Menurut ketua bidang IT BPS Indramayu, *entry* data akan dilaksanakan mulai bulan Januari–Maret tahun 2023. BPS Kabupaten Indramayu saat ini sedang melakukan proses rekrutmen tenaga-tenaga untuk *entry* data. Proses rekrutmen ini juga dilakukan secara terbuka dan diutamakan pada tenaga muda yang baru lulus

Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.7 Petugas BPS kabupaten melakukan seleksi administrasi untuk tenaga *entry* data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.8 Seleksi Petugas *Entry* Data untuk Kecepatan dan Ketepatan Mengetik dan Spesifikasi Laptop

kuliah atau maksimal berusia 35 tahun. Ada sekitar ±400 pelamar dan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sekitar ±200 pelamar. Adapun proses seleksi berikutnya adalah seleksi spesifikasi laptop karena pelamar diharapkan memiliki laptop sendiri, seleksi kecepatan dan ketepatan *entry* data, dan kesanggupan mentaati syarat dan ketentuan yang berlaku bila diterima sebagai tenaga *entry* data.

Bagian terakhir dari proses Regsosek setelah *entry* dan analisis data adalah forum konsultasi publik (FKP) yang akan dilaksanakan di masing-masing desa. Menurut salah seorang Koseka, pada tahapan ini, BPS akan memaparkan hasil Regsosek kepada para pemangku kepentingan di desa untuk validasi hasil. Tahapan ini akan menjadi sangat penting karena menjadi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memperbaiki data jika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan yang ada.

2. Kepentingan Daerah terhadap Data Regsosek

Regsosek dari perspektif penelitian ini memiliki nilai dan kegunaan yang sangat penting dan strategis sebagai landasan penyusunan berbagai macam program pembangunan, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Camat Juntinyuat menekankan pentingnya hasil data Regsosek agar program-program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran. Pimpinan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kecamatan ini juga menyampaikan harapan agar hasil Regsosek disampaikan kepada pihak kecamatan. Selama ini, sang camat menyampaikan hasil-hasil pendataan di wilayahnya sering kali tidak dikembalikan kepada pemerintah wilayah setempat sebagai acuan dalam penyusunan program.

Selain pihak kecamatan, pihak pemerintah desa pun sangat mengapresiasi kegiatan Regsosek, seperti yang diungkap oleh Pak Kuwu, Desa Dadap. Data yang dikumpulkan akan sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi wilayah dan sektor-sektor mana yang perlu untuk diperhatikan. Kepala desa jebolan UIN Bandung ini mengungkapkan bahwa saat pertama Desa Dadap terbentuk di tahun 2018, desa ini tergolong sebagai desa tertinggal karena di sistem pencatatan nasional tercatat hanya ada 250 jiwa penghuni, padahal dalam kenyataannya ada ribuan jiwa warga. Selain itu, data-data profil desa juga sangat kurang. Sang Kuwu kemudian secara mandiri memperbarui data-data profil desa yang diperlukan dan akhirnya berhasil membawa Desa Dadap menjadi Desa Mandiri hanya dalam satu tahun. Berangkat dari pengalaman itu, Pak Kuwu sangat mengapresiasi kegiatan Regsosek karena data yang dikumpulkan sangat penting. Hanya saja, Pak Kuwu mengharapkan agar data Regsosek yang menyangkut Desa Dadap dapat dibagikan BPS ke pemerintah. Namun, kembali pada peraturan perundangan yang berlaku, bahwa BPS tidak boleh mengeluarkan data individu, tampaknya harapan pihak Kecamatan Juntinyuat dan Desa Dadap akan mengalami kendala.

E. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

1. Perspektif Pelaksana terhadap Regsosek dan Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Indramayu relatif berjalan dengan baik, lancar, dan tidak mengalami kendala yang berarti.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hal ini terindikasi dengan tingginya capaian hasil sebelum tenggat waktu penyelesaian Regsosek. Lancarnya pelaksanaan Regsosek di Indramayu tidak terlepas dari sistem pemantauan yang dilakukan oleh BPS setempat. Ketua tim pendataan lapang menyampaikan bahwa ia memonitorprogres harian dengan melihat *dashboard* pantauan data Regsosek dari aplikasi yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dari hasil pantauan selanjutnya dilakukan evaluasi per hari. Jika ditemukan ada anomali, Koseka diminta untuk segera turun memastikan kondisi lapangan. Apabila Koseka tidak dapat menyelesaikan masalah, ketua tim pendataan lapang sendiri yang akan turun langsung. Selain strategi memonitor *dashboard*, ketua tim pendataan lapang ini meminta petugas untuk segera mengunggah data karena ada potensi hilang jika tidak dilakukan segera. Apabila data sudah diunggah, data tersebut akan tersimpan dengan aman.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Pendataan

Banyaknya bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera selalu diawali dengan pendataan yang menimbulkan stigma pro-kontra di masyarakat, termasuk Regsosek. PML dan PPL menyampaikan hal senada bahwa pada umumnya masyarakat mengidentikkan pendataan dengan turunnya bantuan. PPL pun mengalami peristiwa langsung. Warga secara terang-terangan bertanya, "Kapan bantuannya datang?" Beberapa warga juga sempat melampiaskan kekecewaan kepada PPL karena sudah didata berkali-kali, tetapi bantuan yang diharapkan tidak juga kunjung datang. Sementara, bagi warga yang pernah mendapatkan bantuan, warga antusias dengan pendataan dan berharap namanya akan terus berada pada daftar penerima bantuan.

Adanya stigma tersebut membuat sebagian warga menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Tujuannya agar masuk dalam daftar penerima bantuan. Beberapa PPL menuturkan banyak warga yang tidak mau mengakui kepemilikan aset emas dan tanahnya. Warga diketahui ada yang memasukkan TV-nya ke dalam kardus dan menyembunyikan motornya. Namun, PPL juga tidak mau kehilangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

akal. Untuk aset emas, petugas tidak menanyakan langsung, tetapi memperhatikan penampilan istri dan anak perempuannya. Untuk kepemilikan TV, PPL biasanya memperhatikan antena yang yang tampak, sedangkan untuk kepemilikan aset lahan, PPL menggunakan pendekatan ketersediaan pupuk bersubsidi. Jika warga tidak terus terang dengan luas lahan yang dimiliki, nanti saat penebusan pupuk bersubsidiwarga tidak akan mendapatkan jatah. Cara ini dipandang efektif untuk mendata kepemilikan aset.

3. Harapan Masyarakat atas Pendataan

Berbagai harapan besar masyarakat disandarkan pada pendataan Regsosek ini. Menurut PPL dan PML yang diwawancarai, sebagian besar masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Warga yang sudah mendapatkan bantuan tunai dalam berbagai skema mengharapkan akan terus mendapatkan bantuan sementara yang belum mendapatkan mengharap agar datanya bisa masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah. Bahkan menurut PPL, ketika petugas turun untuk mendata, sebelum PPL mulai bertanya, responden sudah terlebih dahulu bertanya, "*Ndi bantuan ne*?" 'Mana bantuannya?'. Oleh karena itu, PPL harus menjelaskan kembali maksud dan tujuan Regsosek.

Warga juga mengungkapkan harapan terkait Regsosek agar program-program kesejahteraan dari pemerintah dapat tepat sasaran. Rumah tangga yang diwawancarai mengungkapkan sering kali program bantuan hanya menyasar keluarga yang itu-itu saja karena faktor kedekatan dengan perangkat desa/dusun yang mendata warga. Beberapa wilayah kemudian mengambil kebijakan untuk memasang stiker atau cat permanen di rumah-rumah yang menerima bantuan untuk memberikan efek kontrol sosial. Warga yang merasa mampu, tetapi menerima bantuan kemudian dengan sukarela mengembalikan kartu bantuannya agar rumahnya tidak diberikan tanda sebagai warga pra-sejahtera.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

F. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan

Kelembagaan sosial hari ini tetap otentik diantara berbagai perubahan dan disrupsi global. Kelembagaan sosial menggambarkan tata perilaku interaksi masyarakat dalam bangunan norma dan ikatan sosial. Elemen penting dari kelembagaan sosial ialah himpunan norma-norma kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya (Soekanto, 1990). Kelembagaan memengaruhi bagaimana kehidupan sosial diatur dan memfasilitasi fungsi sistem sosial (Messner dkk., 2013). Karakter kelembagaan sosial perdesaan membawa nilai-nilai lokal telah berperan sebagai pedoman perilaku dan menjaga keutuhan masyarakat. Ada pula mekanisme kontrol dan mekanisme mencapai tujuan bersama yang didorong oleh berbagai bentuk kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial di wilayah perdesaan menjadi salah satu wujud kelembagaan yang dapat berperan dalam mendukung kegiatan pendataan.

Dukungan kelembagaan sosial dalam Regsosek pada desa-desa di Indramayu dilakukan secara formal dan informal. Sejalan dengan pandangan Guerrero & Urbano (2020), kelembagaan meliputi kelembagaan formal (kebijakan dan peraturan) dan informal (nilai, norma, dan tingkah laku). Secara formal, kepala desa dan ketua rukun tetangga (RT) terlibat dalam proses sosialisasi Regsosek kepada masyarakat. Surat pemberitahuan dari pemerintah daerah juga disiapkan untuk mendukung kelancaraan koordinasi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan organisasi masyarakat yang ada di desa. Walaupun, surat tersebut dipandang akan sangat membantu apabila disebarkan lebih awal. Dukungan kelembagaan sosial terlihat dari adanya inisiatif sebagian kepala desa dan RT untuk melakukan pertemuan regular selama proses Regsosek sebagai bentuk pemantauan pelaksanaan. Beberapa pemerintah desa melakukan apel siaga untuk *stand by* membantu proses Regsosek. Beberapa kepala desa dan ketua RT pun ada yang merespons biasa kegiatan Regsosek ini dan memilih tidak terlalu terlibat. Pelibatan ketua RT dalam proses Regsosek dipandang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebagai salah satu mekanisme yang membantu PML dan PPL dalam memberikan informasi dasar terkait kondisi kehidupan warga. Di sisi lain, keterlibatan ketua RT turut menjaga apabila terjadi konflik ataupun jika ada penolakan warga.

Sejauh ini, dukungan kepala desa, ketua RT, dan kelompok masyarakat terkhusus di Desa Dadap, Desa Juntikebon, Desa Juntiweden, dan Desa Juntikedokan telah membantu proses identifikasi data awal warga dan menjadi penghubung antara PML, PPL dengan warga. Namun, bukan tanpa tantangan bahwa masih ada ketua RT yang kesulitan dalam menentukan kategori sejahtera atau pra-sejahtera warganya. Untuk situasi di Indramayu, jika menggunakan kategori kemiskinan berdasarkan kondisi rumah, maka akan ditemui banyak rumah-rumah dengan kondisi layak bahkan megah. Namun, apabila dilihat lebih dalam, keluarga pemilik rumah merupakan pekerja dengan penghasilan tidak menentu, menganggur, bahkan juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa contoh ialah fenomena PMI yang mampu membangun rumah dengan kualitas baik ataupun nelayan yang memiliki berbagai barang elektronik dengan harga tinggi. Ketua RT merasa khawatir apabila menyebutkan sebagian warga masuk dalam kategori sejahtera, maka akan kecil kemungkinan menjadi sasaran penerima bantuan atau program pemerintah lainnya. Protes warga menjadi salah satu pertimbangan dan apabila masyarakat merasa pemberian bantuan tidak merata, ketua RT dan pemerintah desa akan mendapat pertanyaan warga.

Dukungan kelembagaan sosial selain dari pemerintah juga tampak dari masyarakat di beberapa lokasi. Kesamaan yang ada memunculkan ciri serupa yaitu dimana PML/PPL yang merupakan tokoh penggerak di wilayah tersebut, maka dukungan masyarakat terhadap pendataan akan terlihat. Bentuk dukungan masyarakat dapat diamati dari penerimaan dan keterbukaan masyarakat terhadap PPL, sikap kooperatif dalam pengisian data, dan menyebarkan informasi kepada warga lainnya terkait proses pendataan. PML dan PPL menceritakan bagaimana masyarakat yang ditemui menyebarkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

informasi kepada teman-temannya dan bagaimana masyarakat menerima PPL dan mendukung PPL dalam melaksanakan tugasnya di wilayah yang ditetapkan.

1. Mekanisme Komunikasi

Salah satu desa terpadat di Kecamatan Juntinyuat adalah Desa Dadap dengan jumlah ±6.000 KK dan ±17.000 warga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, PML dan PPL dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendataan. Kepala desa dan ketua RT melakukan sosialisasi pada pertemuan warga dan pertemuan RT serta pertemuan informal seperti saat kegiatan kebudayaan ataupun keagamaan. Desa juga ada yang melakukan inisiasi dengan mengundang PML untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Regsosek. Komunikasi awal yang terbangun dan terus dijaga ialah antara PML dan PPL dengan ketua RT. Sebelum PPL melakukan pendataan *door to door*, ketua RT terlibat dalam identifikasi awal situasi sosial ekonomi warga dan saat terjadi penolakan warga ataupun ada warga yang tidak dapat ditemui, maka PPL akan meminta bantuan PML dan ketua RT. Mekanisme komunikasi yang terbangun antara pemerintah desa dan ketua RT dengan PML dan PPL berlangsung dengan fleksibel, dimana kepala desa dan ketua RT dapat berkomunikasi dengan PML dan PPL secara langsung baik pertemuan maupun telefon dan pesan, bahkan jika diperlukan dapat menghubungi Koseka. Hanya saja pada praktiknya, ketua RT yang memiliki frekuensi tinggi untuk berkomunikasi dengan PML dan PPL.

Komunikasi dibangun melalui pertemuan langsung dan dengan menggunakan platform digital. *Flyer* cetak atau brosur belum terlihat di desa sehingga informasi mengenai pendataan Regsosek memang belum dapat menjangkau warga. Forum perkumpulan warga sebenarnya menjadi salah satu sasaran untuk perluasan informasi Regsosek. Kemudian, perlu juga mempertimbangkan pusat-pusat perkumpulan warga seperti sekolah, pasar, dan tempat pelelangan ikan (TPI), serta kegiatan kesenian/kebudayaan yang dilakukan di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lokasi dekat dengan pemukiman warga sebagai tujuan sosialisasi, baik lisan, melalui percakapan, maupun tulisan (*flyer*). Cara ini dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait tujuan pendataan, akan meminimalisir kekhawatiran warga terkait informasi aset dan pekerjaannya sekaligus simpang siur pemanfaatan data.

2. Sistem Pengawasan Validasi dan Pengendalian Data

Kelembagaan sosial masyarakat turut berperan dalam menjaga objektivitas informasi dan membangun mekanisme kontrol, terkhusus apabila ada bias dan ketidaksesuaian informasi yang disampaikan. *Cross-check* data dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat atau pihak-pihak yang dipandang memahami kondisi warga. Selain memperhatikan data yang bersumber dari masyarakat, prosedur Regsosek untuk memperhatikan data yang dikumpulkan PPL, yaitu harus tepat dan objektif sesuai kondisi warga. PPL memastikan data yang dikumpulkan dengan membandingkan jawaban warga dengan pengamatan lapangan. Apabila PPL tidak datang langsung menemui warga dan hanya melakukan *tagging*, data yang terkumpul dapat diperiksa oleh PML sebagai bentuk mekanisme kontrol. PML yang notabenenya merupakan warga wilayah tersebut dapat melakukan *cross-check* informasi baik melalui warga langsung ataupun kenalan warga yang dikenal PML. Kemudian, untuk validasi data, PPL dan PML dapat bekerja sama untuk *cross-check* data jika dirasa ada informasi yang tidak tepat.

Data yang dikumpulkan PPL akan diperiksa PML dan juga di cek kembali oleh Koseka. Hasil himpunan data akan di input pada *dashboard* yang terpantau oleh ketua tim pendataan lapang. Apabila ada anomali data atau terpantau lambat pergerakannya, ketua tim pendataan lapang akan berkomunikasi langsung dengan Koseka dan PML. Terlepas dari struktur yang ada, setiap pihak memanfaatkan platform digital untuk saling berbagi pesan dan berkoordinasi. Terdapat berbagai macam pemanfaatan aplikasi dan media digital,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

seperti Wilkerstat dan web untuk memantau pelaksanaan Regsosek. PPL, PML, Koseka, dan PJK juga menggunakan platform digital untuk saling bertukar informasi, bertanya, dan menyampaikan kendala yang dialami. Komunikasi yang terbangun cukup intensif dan mendukung kelancaran pendataan.

G. *Life Story* Pendata

Bapak Munardi atau yang lebih akrab disapa Pak Uun sudah aktif terlibat dalam kegiatan sensus selama 22 tahun, sejak tahun 2000. Bagi beliau, mendukung kegiatan pendataan warga sejalan dengan minatnya, terkhusus keinginan kuatnya untuk menyampaikan data masyarakat yang dipandang mampu mendorong perubahan. Bapak Uun lahir di Kabupaten Indramayu dari keluarga yang kesehariannya bersandar pada pertanian. Beliau turut terlibat dalam berladang dan mengelola sawah. Beliau merupakan salah satu dari empat warga desa yang menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA) pada masanya. Bapak Uun menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat di desanya menempuh pendidikan pada tingkat SD dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Berbagai faktor memengaruhi kondisi tersebut, yaitu kondisi ekonomi dan perspektif yang memandang pendidikan bukan hal yang penting. Bapak Uun memiliki pandangan dan tekad untuk menyelesaikan pendidikannya. Selepas menamatkan pendidikan, Bapak Uun sempat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan. Saat kembali ke Indonesia, Bapak Uun mulai menata kegiatannya dan bekerja di Indramayu. Sembari bekerja, Bapak Uun mendapat tawaran untuk membantu kegiatan sensus.

Pengalaman mendata menarik beliau pada kegiatan sensus selanjutnya. Beliau meningkatkan kapasitasnya untuk memahami proses "mendata" bertemu dengan berbagai pihak, baik pemerintah lokal dan masyarakat desa. Sejalan dengan peningkatan kapasitas, jejaring perkenalan beliau juga meluas. Pemerintah desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten mengenal beliau sebagai salah satu penggerak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dalam masyarakat. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada Bapak Uun terbangun dengan baik. Beliau disebutkan sebagai seorang yang disiplin, pekerja keras, dan kawan belajar. Beliau berupaya untuk mendorong pendata agar menghasilkan data sesuai standar dan tepat waktu. Disisi lain beliau mampu merangkul rekan-rekan yang baru beradaptasi dan membutuhkan bantuan dalam proses mendata. Bagi Bapak Uun, tugas yang menantang terkait kerja tim ialah mendorong petugas pendata untuk disiplin menyelesaikan tugas. Pada akhirnya, beliau mengapresiasi hasil kerja rekan-rekannya.

Dalam proses Regsosek, Bapak Uun mengikuti tahap dan prosedur pemilihan petugas pemeriksaan lapangan (PML). Beliau terpilih menjadi salah satu PML di Kabupaten Indramayu dan bertanggung jawab atas empat petugas pendataan lapangan (PPL). Tugas utama beliau adalah mengoordinasi jalannya pendataan, memeriksa hasil pendataan PPL, dan memastikan validitas data lapangan kepada Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Beliau juga turut turun lapang dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi PPL saat mendata. Beliau membantu rekan PPL yang kesulitan menghadapi warga apabila ada penolakan.

> "Saya datang ke warga yang menolak tanda tangan *form*. Pas dia lihat wajah saya, dia senyum, langsung tanda tangan. Ternyata dia kenal saya. Saya diminta masuk rumah dan kita banyak cerita, Regsosek ini juga. Pokoknya kalau ada warga yang sulit ditemui PPL, saya kunjungi. Alhamdulilah warga disini, saya banyak kenal." (Wawancar dengan Bapak Uun, 8 November 2022)

Beberapa warga menyatakan keberatan untuk didata dan tidak bersedia tanda tangan pada *form* kuesioner, bahkan menolak kehadiran PPL. Apabila keadaannya menjadi sulit, PPL menghubungi Bapak Uun. Bapak Uun akan langsung mengunjungi rumah warga dan menjelaskan kepentingan Regsosek. Kehadiran Bapak Uun mampu meredam penolakan warga. Seluruh pengalaman seperti ini dapat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diselesaikan Bapak Uun secara kekeluargaan. Warga yang dikunjungi Bapak Uun pun ternyata mengenal Bapak Uun. Pada akhirnya, warga yang menolak bersedia mengenal Regsosek.

Bapak Uun sebagai PML tidak hanya memiliki kapasitas sebagai seorang petugas pendata. Beliau memiliki pengaruh, mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan jeli terhadap karakter masyarakat. Beliau mampu mengomunikasikan kepentingan Regsosek dalam bahasa yang dimengerti masyarakat. Pengalaman Bapak Uun dalam Regsosek tahun ini disebut beliau penuh tantangan dan hal baru. Beliau menyebutkan substansi pertanyaan kuesioner sebagai salah satu faktor yang menyebabkan beberapa responden menolak memberitahukan informasinya. Ada pula warga yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya, bahkan ada warga yang mendorong warga lainnya untuk menyembunyikan aset yang dimiliki seperti TV dan motor agar tidak diketahui petugas pendata. Dalam mengatasi hal ini, petugas PML dan PPL perlu cermat menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Untuk memastikan validitas data, PPL melakukan *cross check* dengan warga yang mengenal responden. Di sisi lain, petugas PML dan PPL merupakan warga setempat sehingga sudah memahami latar belakang responden untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Sebagai contoh, pertanyaan terkait kepemilikan motor, PPL mengetahui kondisi kepemilikan motor karena mengenal keseharian responden sehingga walaupun motor disembunyikan warga, petugas tetap mengetahui situasi yang sebenarnya.

Pertanyaan kuesioner yang sulit untuk dijawab adalah terkait pekerjaan dan aset. Mayoritas warga bekerja sebagai petani sehingga saat musim tanam selesai, petani tidak melakukan kegiatan apapun. "Pekerjaan serabutan" menjadi jawaban yang membingungkan PPL karena tidak sesuai dengan pilihan jawaban kuesioner. Bapak Uun sebagai PML memastikan pekerjaan responden sesuai dengan jawaban yang disediakan dalam kuesioner. Bapak Uun turut mencari informasi dan memeriksa kembali data jenis pekerjaan serta membantu PPL untuk menentukan jenis pekerjaan dalam isian kuesioner. Beliau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengharapkan isian data PPL sesuai dengan ketentuan, tetapi saat di lapangan banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai sehingga PPL kesulitan mengisi beberapa data.

Pertanyaan mengenai aset seperti emas dan sawah menjadi contoh yang sering terjadi dimana masyarakat tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Faktor utamanya karena warga tidak mengingat jumlah gram emas yang dimilikinya dan faktor lainnya karena warga menganggap informasi tersebut sebagai hal privat. Hal ini perlu menjadi perhatian, bahwa penggalian informasi mengenai aset warga perlu dilakukan secara hati-hati. Kemudian, pada pertanyaan mengenai luasan sawah, ada beberapa warga yang enggan memberikan informasi. Bapak Uun menanggapi hal tersebut dengan memberikan pernyataan, "Datanya bisa digunakan kalau ada pembagian pupuk nanti." Responden kemudian bersedia menyatakan jumlah lahannya. Bapak Uun juga memberikan pemahaman kepada warga bahwa pendataan Regsosek bukan untuk memberikan bantuan, tetapi sebagai data dasar yang dapat menjadi rujukan berbagai pihak untuk memberikan intervensi program. Pak Uun sebagai PML mengatasi berbagai pertanyaan dan penolakan warga dengan tenang.

PML memiliki peran untuk memastikan jawaban kuesioner sesuai dengan kondisi responden. Bapak Uun membangun komunikasi reguler dan aktif dengan PPL, Koseka, dan PJ kecamatan untuk memastikan isian kuesioner tidak hanya terjawab, tetapi memiliki kualitas dan validitas yang tepat. Bapak Uun menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul bagi sesama rekan PML dan PPL untuk saling menginformasikan capaian pekerjaan hingga tempat berbagi cerita. Bapak Uun, rekan PML dan PPL berkumpul hampir setiap malam untuk saling memeriksa hasil pendataan. Beliau menyediakan teh hangat, kopi, dan gorengan sebagai bentuk kedekatan dalam menyelesaikan tugas bersama.

Tantangan yang dihadapi Bapak Uun selain terkait substansi pertanyaan ialah cara pandang masyarakat bahwa dalam pendataan pasti akan ada "pemberian bantuan". Pemikiran inilah yang turut memengaruhi penerimaan warga atas kedatangan PPL. Kekhawatiran

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat apabila menyebutkan jumlah aset maka tidak akan mendapat bantuan pemerintah. Istilah "*bestie*" muncul di desa untuk mewakili fenomena dimana orang terdekat dari pihak tertentu saja yang menerima bantuan. Adanya kecurigaan masyarakat dalam pemberian bantuan sebelumnya memengaruhi cara pandang warga terhadap Regsosek. Warga setempat pernah merasa mengalami ketidakadilan pembagian bantuan sehingga kegiatan pendataan yang tidak memberi manfaat bagi warga, hanya dipandang sekadar mempermainkan warga. PML dan PPL memaklumi situasi ini, selama warga bersedia bekerja sama pada pendataan. PML dan PPL tetap berupaya menyampaikan tujuan Regsosek dan membangun pemahaman mengenai pentingnya data.

PML dan PPL mendapatkan surat tugas, *nametag*, tas, dan insentif untuk menunjang kinerja di lapang. Bagi petugas yang sudah sering terlibat pendataan, petugas tidak terlalu sulit untuk memahami konsep dan prosedur Regsosek. Namun, bagi petugas baru, petugas mengaku bahwa membutuhkan waktu lebih dan pendampingan langsung untuk memahami dan mempelajari alur dan proses bisnis Regsosek. Setelah mengikuti pelatihan, PML dan PPL membangun komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Regsosek dengan penanggung jawab kabupaten (BPS Indramayu), penanggung jawab kecamatan, dan koordinator sensus kecamatan (Koseka). Koordinasi dan komunikasi sangat terbantu dengan menggunakan platform/media digital. Pada setiap pelaksana kegiatan, terdapat grup platform digital untuk saling berkomunikasi, memantau perkembangan, dan berbagai informasi.

Pelaksanaan Regsosek dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) secara *door to door*. Kegiatan ini sekaligus membantu untuk verifikasi keluarga baru dan rumah baru. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam 1 (satu) bangunan rumah dapat diisi oleh 2 (dua) keluarga atau lebih. Petugas pendataan perlu menyesuaikan pendataan pada tiap keluarga. Sebelum mendata *door to door*, petugas berkomunikasi dengan RT untuk mengidentifikasi awal informasi keterangan miskin dan tidak miskin pada warga. Informasi ini hanya berfungsi sebagai latar belakang dan tidak dijadikan sebagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

acuan data. Penyertaan RT dipandang diperlukan untuk memberi dukungan proses pendataan Regsosek dan membantu mediasi apabila terjadi konflik antara petugas dan warga. Pelaksanaan Regsosek yang membuat petugas kesulitan ialah adanya permintaan foto (atap, lantai, dinding, dan toilet) warga. Petugas mendapatkan permintaan ini saat sudah setengah perjalanan proses Regsosek. Petugas dan bersama penanggung jawab kabupaten dan tim memutuskan apakah mengulangi dari awal untuk melengkapi foto atau tetap melanjutkan pendataan dengan tambahan permintaan tersebut. Keputusan yang diambil ialah tetap melanjutkan pendataan dan tidak kembali untuk melengkapi data sebelumnya. Hal ini dipilih dengan mempertimbangkan waktu Regsosek dan target untuk menyelesaikan pendataan.

Bapak Uun memperhatikan pentingnya indikator kemiskinan yang digunakan di desa. Beliau memikirkan penentuan kategori miskin dan perlu meninjau aspek basis data dan situasi lapangan. Kemudian, pernyataan batasan miskin dipandang bias jika diterapkan langsung tanpa melihat kondisi yang sebenarnya secara mendalam. Sebagai contoh, ada warga yang memiliki rumah dengan kondisinya baik tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, ada warga yang tidak memiliki aset tetapi mendapat kiriman biaya dari keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Kedua contoh tersebut memperlihatkan adanya *gap* mengenai situasi lapangan dan pertanyaan kuesioner. Kejadian ini mengangkat pentingnya mengakomodasi situasi lapangan dalam pendataan selanjutnya.

Aspirasi Bapak Uun terkait pelaksanaan Regsosek ialah basis data digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian, terkait pelaksanaan Regsosek ialah peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yaitu petugas pendata. Terkait SDM, satu PPL mendapatkan tugas tanya jawab dengan responden untuk mengisi kuesioner, tugas melakukan *tag* rumah, dan apabila pendataan di rumah warga yang masuk kategori miskin, tugas foto menjadi wajib

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dilakukan. Bapak Uun mengungkapkan apabila terdapat dua PPL untuk satu rumah tangga, maka akan meningkatkan efektifitas pekerjaan. Bapak Uun juga menyuarakan pentingnya penambahan durasi pelatihan terkhusus studi kasus atau praktik lapangan yang memperluas pemahaman masyarakat terhadap situasi sosial dan budaya masyarakat.

Lesson learnt kegiatan mendata cukup mendalam bagi Bapak Uun. Beliau menyebutkan bahwa kapasitas pribadi benar-benar diuji. Beliau yang awalnya gugup berbicara, belajar menguasainya, membangun komunikasi interaktif, belajar menyuarakan kepentingan masyarakat, dan beliau menjadi dikenal banyak orang. Pengalaman mendata inilah yang membawa beliau pada kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Pernyataan masyarakat lokal, "Orang yang terlibat sensus, akan dipakai masyarakat." Maknanya, orang-orang yang memiliki pengalaman pendataan mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas pemerintahan. Bapak Uun pun sebelumnya pernah menjabat sebagai sekretaris desa pada tahun 2007. Hal ini juga terjadi pada rekan-rekan petugas pendata yang dipercayakan masyarakat dan pemerintah lokal.

Selain Bapak Uun, perjalanan Regsosek menarik lainnya diceritakan Mbak Dewi. Mbak Dewi merupakan salah satu PPL berlatar belakang pendidikan sarjana bahasa (S-1) yang mendapat tugas di Desa Juntikedokan. Mbak Dewi mendapat tugas untuk mendata 2 Ssatuan Lingkungan Setempat (SLS) sejumlah 138 KK pada SLS pertama dan 124 KK pada SLS kedua. Mbak Dewi mengakui membutuhkan waktu lima hari untuk benar-benar fasih mengutarakan pertanyaan kuesioner. Awal pengenalan Mbak Dewi dengan kegiatan pendataan ialah saat beliau menjadi salah satu responden. Beliau menggali lebih dalam mengenai pendataan kepada petugas. Pemahaman yang beliau dapatkan mendorong beliau untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pendataan selanjutnya. Beliau memberanikan diri untuk bertanya mengenai peluang untuk menjadi petugas pendata kepada salah seorang rekan yang kemudian menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PML. Beliau mengikuti seleksi petugas pendata lapangan dan diterima untuk turut terlibat dalam Regsosek.

Motivasi yang mendorong Mbak Dewi untuk mengikuti seleksi petugas pendata ialah keinginannya untuk belajar dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Suami dan anak beliau merantau ke Taiwan untuk bekerja sebagai PMI sehingga beliau merasa mengisi waktu sebagai petugas pendata merupakan pengalaman positif. Mbak Dewi menyadari betul bahwa Regsosek adalah pengalaman pertama beliau sehingga berbagai persiapan termasuk memahami strategi untuk bertanya dan mengisi data sangat penting untuk dikuasai. Mbak Dewi mengutarakan pertanyaan yang mudah dipahami warga dan tidak secara langsung menyinggung informasi yang dianggap sensitif bagi warga. Beliau menggunakan pertanyaan sederhana dengan memperhatikan situasi emosi respondennya. Beliau berbincang lebih dahulu untuk membangun keakraban. Kemudian mengutarakan pertanyaan mengenai aset, seperti "Sapi ibu ada sepuluh ya, Bu?" dengan intonasi ramah. Beliau pun merasa banyak diterima oleh responden bahkan beberapa warga datang ke rumah beliau untuk bertanya apakah sudah terdata atau belum. Responden beliau juga memberikan mangga, biskuit, dan semangka. Utamanya adalah ibu-ibu yang ada di desa. Terlepas dari berbagi makanan, Mbak Dewi mengakui bahwa beliau mendapatkan banyak kenalan dan membangun pertemanan dengan warga desa. Hal ini memudahkan untuk memberikan pemahaman mengenai Regsosek.

Secara personal, beliau mengungkapkan kesempatan sebagai petugas Regsosek memperluas pemahaman beliau terkait pembangunan berbasis data. Mbak Dewi berlatih untuk menyampaikan maksud dan tujuan Regsosek kepada warga walaupun ada beberapa warga yang merasa keterangan tersebut bukan hal penting. Sebagai PPL, beliau berkomunikasi langsung dengan PML apabila ada kendala di lapangan. Beberapa kendala yang beliau alami: 1) kesulitan sinyal saat proses tag rumah responden (lokasi tag dapat bergeser hingga 30 m dan mengalami *lag*, 2) aplikasi yang digunakan terkadang tidak dapat diakses atau lambat, 3) kesulitan mengisi data responden, 4) warga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang tidak dapat ditemui, dan 5) kondisi hujan yang menghambat akses jalan. PML akan membantu dan menyelesaikannya apabila masih kesulitan, PML akan berkomunikasi dengan Koseka. Grup platform media *chat* adalah wadah yang mempermudah komunikasi dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan masalah di lapangan.

Mbak Dewi juga mengungkapkan pentingnya *power bank* untuk menunjang pekerjaan dan berharap ukuran *font* tulisan kuesioner dapat lebih besar karena mempengaruhi kecepatan kerja. Pengalaman Bapak Uun dan Mbak Dewi menggambarkan bagaimana rekan-rekan petugas pendata mengerahkan kemampuan terbaik yang dapat dilakukan. Petugas pendataan menyadari terkadang lambat pada masa awal pendataan, tetapi kemudian meningkatkan performa kinerja dengan saling berbagi strategi dengan PML, Koseka, PJK, dan Ketua Tim Pendataan. Berbagai tantangan ini dapat diselesaikan bersama. PML dan PPL terbuka untuk meningkatkan kemampuannya. Kesempatan pendataan memberikan pengalaman, pembelajaran, dan memperluas jejaring persahabatan dengan masyarakat.

H. *Life Story* Keluarga Pekerja Migran Indonesia: Mengenal Data, Melindungi Diri

Pilihan migrasi sebagai pekerja migran di luar negeri mengisahkan bagaimana pekerja migran menjadi ringkih jiwanya, di atas identitas kewarganegaraan dan perasaan sebagai bagian negara. Pekerja migran melihat tidak akan ada perubahan dengan kondisinya jika tetap di desa. Di sisi lain, negara lain memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Pekerja migran mendapatkan perspektif baru dalam memaknai ke-Indonesiaannya saat berada di negeri yang berbeda. Berbagai tantangan yang dirasakan pekerja migran, diantaranya beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun pertemanan dan ikatan sosial, kerelaan untuk terpisah dari keluarga, dan usaha untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga di desa. Berbagai alasan ekonomi dan sosial juga mendorong warga mencari pekerjaan hingga ke negeri seberang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Konstruksi kesejahteraan yang terbangun oleh masyarakat umumnya diorientasikan pada tampilan rumah yang besar, kepemilikan motor dan barang elektronik diatas kebutuhan keseharian, biaya pendidikan, serta keguyuban dan kesatuan. Masyarakat menilai kepemilikan rumah dan barang-barang lainnya sebagai bentuk keberhasilan. Dibalik penilaian ini, ada motivasi tentang pengakuan diri. Sejalan dengan argumentasi Fukuyama (1992) yang menerangkan pemikiran Hegel bahwa penggerak sejarah manusia didasarkan pada perjuangan untuk diakui. Motif pengakuan dipandang sebagai pendorong utama disamping motif materialistik. Masyarakat menentukan definisi keberhasilan, bekerja di luar negeri, dan membangun rumah merupakan standar untuk diakui sebagai warga yang berhasil.

Kemampuan untuk mengonstruksi kesejahteraan, selain dalam bentuk materi menjadi perhatian PML dan pemerintah Desa Dadap. PML mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang menjadi korban penipuan agen-agen pengirim PMI yang tidak resmi, bahkan terbawa hingga ke ranah hukum. PML di Desa Dadap berupaya membantu warga untuk dapat melindungi diri, tidak mudah percaya dan tidak memberikan data pribadi kepada agen-agen yang baru dikenal. Salah satu PML di Desa Dadap, membangun jejaring informasi dan aktif menyuarakan pentingnya menjaga data pribadi warga serta melakukan dialog-dialog edukatif terkait isu PMI, pemberdayaan nelayan, dan pembangunan desa. Realitanya, memang belum seluruh warga menjadikan isu tersebut sebagai perhatian bersama. PML mengakui, penerimaan terhadap nilai-nilai baru umumnya diterima oleh kelompok pemuda yang ada di desa.

Mbak Lia mewakili keluarga yang memiliki visi yang sama terkait *melek data* untuk menjaga warga dari berbagai penipuan. Keluarga dengan latar belakang usia muda yaitu 33 tahun melalui waktu dengan pengalaman menjadi PMI selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Mbak Lia berangkat ke Taiwan untuk bekerja dan setelah selesai kontrak sekitar 2 (dua) tahun beliau kembali ke Indonesia, menjalani kehidupan sebagai warga desa dan menikah. Kemudian,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mbak Lia berangkat untuk kedua kalinya sebagai PMI ke Taiwan. Ada perbedaan pada keberangkatannya yang kedua dengan keberangkatan pertama. Beliau membayar belasan juta kepada agen dan dipotong gaji selama 9 (sembilan) bulan yaitu 50% untuk keberangkatan pertama. Saat keberangkatan kedua, Mbak Lia memberanikan diri untuk berangkat tanpa melalui agen di Indramayu, tetapi langsung kepada agen pertama di Jakarta dan pemotongan gaji beliau hanya selama 6 (enam) bulan. Suami beliau juga menyusul sebagai PMI dan bekerja di pabrik industri di lokasi yang berjarak sekitar dua jam perjalanan dari lokasi Mbak Lia bekerja.

Kondisi rumah dengan anggota keluarga yang bekerja di luar negeri juga menjadi tantangan bagi PPL. Dalam 1 keluarga, terdapat anggota yang bekerja di luar negeri ataupun sepasang suami-istri sama-sama tidak ada di rumah. Hanya ada orang tua dari PMI yang menjaga cucunya atau saudara yang menjaga keponakannya. Kemudian, jawaban mengenai aset dan penghasilan terkadang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, seperti data aset. Mantan PMI memiliki rumah dengan kondisi layak, bahkan mewah. Namun, tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak mampu menyekolahkan anak, dan membangun usaha.

Mbak Lia mengungkapkan prioritas penghasilan keluarganya memang ditujukan untuk perbaikan rumah. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai PMI, keluarga ini pun mulai memikirkan bahwa penghasilan yang didapatkan tidak dapat dihabiskan hanya untuk rumah. Keluarga ini menyadari pentingnya mengumpulkan modal usaha dan tabungan pendidikan anak. Keluarga ini memutuskan untuk merintis usaha bengkel jika memiliki modal yang cukup sembari aktif pada platform jual-beli *online*.

Kondisi lingkungan sosial meyakini bahwa memiliki penghasilan dalam jumlah besar adalah salah satu pencapaian hidup. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan menjadi alasan keluarga ini mencoba bekerja sebagai PMI. "Ingin kerja, disini pekerjaan susah ya. Jadi, tertarik sama teman-teman yang sudah berangkat kerja ke luar," ungkap Mbak Lia. Pilihan menjadi PMI pun bukan tanpa pengorbanan dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

risiko. Warga perlu membayar kepada sponsor/agen untuk jaminan dan setelah bekerja pun potongan penghasilan diberlakukan sebagai imbal jasa. "Kalau dulu *mah* gampang ya, bayar 4 juta bisa. Kalau sekarang ada yang 14-15 juta rupiah," terang beliau. Banyak pula kasus keluarga PMI yang memberikan surat tanah sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa saat sudah selesai membayar jasa, maka surat tanah tersebut dikembalikan. Namun, pada kenyataanya masih ada warga yang tidak mendapatkan kembali surat tanahnya.

Keluarga Mbak Lia adalah salah satu keluarga di Desa yang menjadi PMI. Mayoritas warga yang ditemui PPL merupakan keluarga-keluarga PMI dan termasuk petugas pendata sendiri (PPL dan PML) pun banyak yang memiliki pengalaman sebagai PMI. Dengan kesamaan tersebut, pendata dan responden membuka pembicaraan terkait pengalaman bekerja di luar negeri. Keluarga Mbak Lia sering dijadikan *sample* pendataan karena kemampuannya dan keterbukaannya untuk menjawab pertanyaan sehingga pendataan Regsosek kali ini dihadapi dengan santai. Saat ditanya mengapa ia begitu santai dan terbuka menjawab pertanyaan, Mbak Lia menerangkan bahwa beliau memahami pendataan merupakan kegiatan resmi pemerintah dan data yang disampaikan kepada petugas juga turut membantu pemerintah. Bagi keluarga seperti Mbak Lia, ia tidak memiliki prasangka negatif ataupun terlalu memedulikan pernyataan orang jika ada yang mengatakan pendataan sebagai kegiatan yang tidak penting, sia-sia, atau stigma buruk lain. Mbak Lia memandang kehadiran PPL sangat membantu keluarganya memahami data dan hubungan data dengan berbagai aspek kehidupannya. Pada awalnya, keluarga ini menganggap pendataan sebagai hal wajar yang dilakukan pemerintah dan tidak memahami detail perbedaan pendataan. Rekan PML memberi penjelasan terkait perbedaan satu data dengan data lainnya dan pemanfaatan data hingga pentingnya menjaga data.

Bagi keluarga beliau, mengungkapkan informasi dan situasi keluarganya untuk pendataan adalah bentuk penerimaan beliau terhadap kegiatan Regsosek. Beliau tidak ragu menyebutkan informasi yang dibutuhkan. Beliau awalnya tidak memahami tujuan dari

Buku ini tidak diperjualbelikan.

setiap pertanyaan, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari rekan PPL dan PML, beliau memahami bahwa data yang dikumpulkan penting dan terkait dengan kebutuhan hidup orang banyak. Beliau mengakui bahwa salah seorang PML, Mas Eko merupakan kawan yang mendorong tumbuhnya pemikiran-pemikiran kepedulian terhadap desa dan masyarakat. PML yang memiliki peran sebagai penggerak masyarakat memberikan pengaruh signifikan dalam proses pendataan Regsosek di lapangan. PML bercerita mengenai bagaimana faktor eksternal dan internal mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik baik PMI, petani dan nelayan di tengah ketidakpastian cuaca dan rendahnya dukungan kelembagaan sosial serta konflik laten yang menciptakan jarak antara masyarakat dengan peluang perbaikan kesejahteraannya.

Bagi keluarga Mbak Lia, Mas Eko berperan besar dalam memperluas pandangan keluarga ini tentang data, bagaimana menjaga data dan kritis terhadap pendataan. Mbak Lia menjadi lebih mawas terhadap data penting dan turut menjaga lingkungannya dari penipuan ataupun agen yang menawarkan pekerjaan tidak jelas status legalnya. Mas Eko melakukan upaya-upaya untuk turut memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga data KTP, KK, dan surat aset-aset berharga. "Untungnya kita dapat teman yang kasih pengaruh baik," ungkap Mbak Lia sembari melihat rekan PML. Interaksi Mbak Lia dengan rekan-rekan petugas pendataan merupakan lingkaran pertemanan sehingga beliau lebih mudah untuk bertanya dan memberikan saran. Mbak Lia berharap data yang sudah dikumpulkan dapat diakses pemerintah desa dan daerah serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang tepat sasaran.

I. Mengikat Tugas Individu dalam Kepentingan Negara

Kegiatan Regsosek secara tidak langsung menjadi ruang untuk membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan Negara. Para pihak pengampu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanggung jawab pendataan baik dari sisi struktur dan kultur mengupayakan pelaksanaan Regsosek secara akuntabel, inklusif, dan kolaboratif. Di sisi struktur, terdapat BPS RI, BPS Provinsi, BPS Kabupaten Indramayu, sedangkan di sisi kelembagaan sosial, terdapat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan perwakilan masyarakat yang mengambil peran sebagai petugas pendataan. Badan Pusat Statistik RI melakukan persiapan baik dari sisi substansi, manajemen, dan teknis. Beberapa panduan dan prosedur serta manajemen kontrol disiapkan untuk pelaksanaan Regsosek. Staf BPS Pusat mengungkapkan beberapa hal yang menjadi perhatian saat pelaksanaan kegiatan: 1) manajemen lapangan, 2) menyediakan prosedur generik untuk seluruh kawasan Indonesia, dan 3) penyimpanan data agar tetap *confidential*. Tentunya berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan proses Regsosek. Pada tingkat pemerintah pusat, Regsosek merupakan kegiatan pendataan mewakili jejaring lintas kementerian/lembaga. Pada tingkat daerah, kepentingan pendataan diharapkan menjadi basis data para pemangku kepentingan dalam melaksanakan intervensi kebijakan. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pihak dalam mendesain dan memperhatikan pendekatan (*engagement*) untuk membangun kesamaan tujuan dan semangat Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia menjadi frasa yang dapat mengikat kesadaran para pihak dalam mewujudkan perubahan positif dan berkontribusi dalam pembangunan. Penekanan makna kesatuan dan gotong royong membuka kesempatan bagi para pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk aktif berpartisipasi mendukung perbaikan pendataan. Namun, pada prosesnya dibutuhkan usaha untuk menyamakan pemahaman dan kolaborasi para pihak. Semangat kooperatif di daerah tecermin dari BPS Indramayu, petugas pendata, dan penggerak-penggerak lokal yang berpartisipasi dalam kegiatan Regsosek. Secara garis besar, potret pelaksanaan Regsosek di Indramayu mendapati pemangku kepentingan di tingkat daerah melalui BPS Kabupaten dan petugas pendata mengerahkan sumber daya manusia dengan prinsip kerja

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tim. Pemimpin BPS Kabupaten, Penanggung Jawab Kabupaten dan Kecamatan, tim IT, tim administrasi, petugas pendata, mitra, dan pihak lainnya memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan dan kontrol kualitas kegiatan menjadi kunci pelaksanaan Regsosek. Para pihak yang terlibat umumnya meluangkan waktu dan tenaga di luar hari kerja.

Memaknai bagaimana individu melaksanakan tugasnya berarti pula berupaya menemukan motivasi dan menelusuri ruang sadar para pihak. "Mengikat tugas individu dalam kepentingan Negara" bagi Penanggung Jawab Kabupaten berarti komitmen mendukung tim mencapai tujuan, menyelaraskan gerak setiap pihak, dan terlibat langsung dalam mengatasi masalah. Bagi Penanggung Jawab Kecamatan, "Mengikat tugas individu dalam kepentingan Negara" berarti kesediaan untuk selalu bersama dan turut membantu PML dan PPL melaksanakan perannya.

Bagi petugas pendataan, "Mengikat tugas individu dalam kepentingan negara" sesederhana ketulusan mendengarkan cerita responden, mendengar suara warga negara, yang berarti juga menuangkan realitas kehidupan warga ke dalam data. Petugas mengungkapkan tidak sedikit masyarakat yang bercerita mengenai kehidupannya, keluh kesah, dan harapannya. PML dan PPL dibekali pemahaman bahwa Regsosek adalah pekerjaan penting terkait isu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip kebenaran dan menjunjung objektivitas. Kepentingan pendataan juga dipahami sebagai kegiatan merekam kondisi masyarakat yang sebenarnya. Petugas pendata memaknai tugasnya sebagai kesediaan untuk berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat. PML dan PPL menyadari pengalaman pendataan membantu PPL menjadi berkembang pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilainya selama proses Regsosek terutama membangun kepedulian terhadap sekelilingnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

J. Penutup

Sejatinya, Regsosek menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk mencapai target pendataan. Regsosek dan kegiatan pendataan-pendataan lainnya ada dalam ruang pikir, ruang personal, dan ruang sosial budaya masyarakat. Proses pendataan selama ini terekam dalam kesadaran masyarakat, menjadi dasar pemahaman masyarakat atas pendataan. Ada rupa lain (dibaca: pengaruh) yang dibawa dalam kegiatan pendataan. Hal ini penting untuk ditangkap pemangku kepentingan bahwa pendataan dapat dikuatkan sebagai upaya berbagi pemahaman dan edukasi. Pendataan selayaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut memahami data dalam bahasa yang sederhana, memahami hubungan data dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, membangun kepekaan, dan kritis terhadap situasi sekelilingnya.

Proses pendataan di lapangan memiliki dampak beruntun terhadap bagaimana masyarakat memahami data, terlebih apabila proses pendataan menjadi ruang penyadaran untuk melindungi data pribadi yang berarti pula melindungi diri. Dalam konteks situasi sosial di Indramayu, isu penipuan pekerja migran dan penipuan atas nama petugas sensus telah dialami warga desa. *Melek data* yang berarti pula *melek informasi* dapat membantu menguatkan masyarakat desa untuk mampu melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan.

Pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan dalam kerangka manajemen kualitas PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), tergambar dari alur kerja dan komunikasi BPS Indramayu hingga pelaksana pendataan lapangan. Strategi manajemen Regsosek di Kabupaten Indramayu berupaya memadukan unsur struktur dan kelembagaan sosial, tetapi tidak dapat dipungkiri kelembagaan sosial belum optimal terlibat dalam Regsosek. Secara umum, para pihak mulai dari Kepala BPS Indramayu, Tim IT, Tim Administrasi, Ketua Tim Pendataan Lapang, PJ Kecamatan (PJK), Koseka, PML, dan PPL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengerahkan kemampuannya untuk mencapai target pelaksanaan Regsosek yang berkejaran dengan waktu.

"Kerja tim" menjadi kata yang menggambarkan bagaimana Regsosek menyatukan pemerintah, pendata dan masyarakat dalam misi yang sama. Menariknya, motivasi para pihak didasari oleh nilai yang serupa: kepedulian, kesetaraan, perubahan, dan integritas. Para PPL, PML, Koseka, dan PJK (Penanggung Jawab Kecamatan) duduk bersama mencari solusi tanpa membuat masalah berlarut-larut. PML dan PPL pun bukan hanya petugas pendata formal, melainkan juga bagian masyarakat yang memiliki pengaruh dan tidak sedikit yang merupakan penggerak masyarakat.

Beberapa catatan sebagai hasil dari saling belajar dan berbagi pengalaman dengan rekan BPS Indramayu dan masyarakat, tetap layak diperhatikan dalam pendataan selanjutnya, yaitu: 1) sosialisasi dan edukasi terkait data dan urgensinya dalam aspek kehidupan masyarakat, 2) dukungan SDM pelaksana hingga tingkat lokal dan sistem manajemen pelaksana, 3) memadukan unsur struktur dan kultur secara fleksibel, 4) *confidential* data dan perangkat digital yang menyertainya, 5) terbuka atas situasi lapangan yang terkadang belum tentu terakomodir dalam prosedur, dan 6) mitigasi risiko apabila proses pendataan masih melewatkan warga dan mekanisme Forum Konsultasi Publik (FKP). Berbagai tantangan dan kendala yang dialami selama Regsosek sepatutnya menjadi dasar perbaikan untuk pendataan selanjutnya. Terlebih, apabila pemangku kepentingan dapat menghasilkan inovasi dalam mengatasi kendala pendataan sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Tindak lanjut dari perbaikan siklus perencanaan-mitigasi perlu menjadi pembelajaran sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Daftar Pustaka

BPS. (2022). *Jawa Barat dalam angka*. BPS Provinsi Jawa Barat.

BNP2TKI. (2019). *Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia 2019.* BNP2TKI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BP2MI. (2022). Data pekerja migran Indonesia periode tahun 2021. BP2MI. Diakses pada 20 November, 2022, dari https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021

Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man.* Avon Books

Guerrero, M., & Urbano, D. (2020). Institutional conditions and social innovations in emerging economies: Insights from Mexican enterprises' initiatives for protecting/preventing the effect of violent events. *J Technol Transf*, *45*, 929–957

Google. (t.t.) [Lokasi Kabupaten Indramayu]. Diakses pada 7 November 2022, dari https://www.google.com/maps/place/Indramayu

Messner, S. F., Rosenfeld, R., & Karstedt, S. (2013). Social institutions and crime. Dalam Cullen, F. T., & Wilcox, P. (Eds.), *The Oxford handbook of criminological theory* (405–423). Oxford University Press.

Soekanto, S. (1990). *Sosiologi: Suatu pengantar.* PT Raja Grafindo Persada.

Tukiran, T., Sukamdi, S., & Effendi, S. (1989). *Pelaksanaan registrasi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

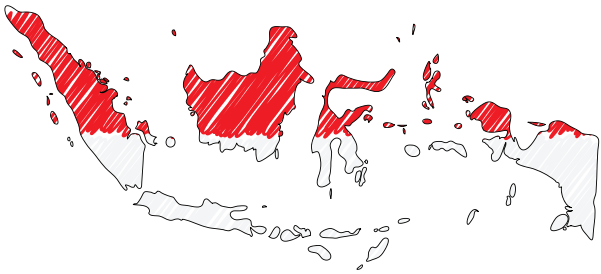

#8

Mendata Lampung, Menemukan Potensi

Slamet Rahmat Topo Susilo & Habibullah

A. Menyibak Gerbang Pulau Sumatra: Pengantar

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 Oktober–14 November 2022 melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 di seluruh provinsi di Indonesia. BPS Kabupaten Lampung Selatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan Regsosek tahun 2022 di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang Pulau Sumatra, letaknya strategis sebagai pintu masuk ke Pulau Sumatra dan jalan tol melintasi sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Keberadaan jalan tol dan posisi strategis Kabupaten Lampung Selatan semestinya membawa kesejahteraan bagi 1.071.727 jiwa penduduknya yang tersebar di 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan.

S. R. T. Susilo,* & Habibullah
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: slam024@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Susilo, S. R. T., & Habibullah (2023). Mendata Lampung, menemukan potensi. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (271–304). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c710 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data awal mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan sebelumnya hanya diketahui melalui survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang hanya terbatas kepada sampel yang terpilih. Berbagai survei tersebut menghasilkan angka atau persentase mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat baik pada kategori sangat miskin, miskin, maupun tidak miskin, tetapi tidak mampu menunjukan siapa yang masuk kategori sangat miskin, miskin, dan tidak miskin tersebut. Berdasarkan data Kabupaten Lampung Selatan dalam angka tahun 2022 (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2022), dari 1.071.727 jiwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan terdapat sebanyak 145.850 Jiwa penduduk miskin (14,19%). Jumlah penduduk miskin tersebut menempatkan Kabupaten Lampung Selatan pada urutan ketiga, setelah Kabupaten Lampung Timur (159.790 Jiwa) dan Lampung Tengah (155.770 Jiwa) pada urutan pertama dan kedua (BPS Provinsi Lampung, 2021). Kepadatan penduduk di Lampung Selatan tahun 2021 mencapai 508 jiwa/km. Kepadatan penduduk di 17 kecamatan cukup beragam, padatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jati Agung dengan kepadatan sebesar 787 jiwa/km dan terendah di Kecamatan Rajabasa sebesar 249 jiwa/km.

Pengukuran kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh BPS secara nasional. Pengukuran tersebut menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun sebesar Rp439.421,00 (BPS Provinsi Lampung, 2021).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

B. Bentang Alam Tersulit dalam Pendataan Khusus

Kabupaten Lampung Selatan (Gambar 8.1) secara geografis berada di ujung selatan Provinsi Lampung dan merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan. Sebanyak 4 kelurahan tersebut hanya berada di ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kecamatan Kalianda.

Ketinggian rata-rata di ibu kota kabupaten adalah 33 m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Lampung Selatan adalah dataran, dimana jumlah desa yang berada di dataran sebanyak 238 desa, sedangkan sisanya 22 desa terletak di lereng/puncak dan di lembah. Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai teluk besar, yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang sebagai tempat kapal-kapal dalam dan luar negeri berlabuh. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung sejak tahun 1982. Pelabuhan Panjang sendiri termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Apabila dilihat dari sisi ketinggian, wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak terdapat bentang alam yang sulit dijangkau untuk dilaksanakan pendataan awal Regsosek pada tahun 2022. Namun, pada saat kegiatan pendataan awal Regsosek, setidaknya ada 13 desa di 5 kecamatan terendam banjir, yakni Desa Padang Cermin, Desa Sanggi, Desa Gayau, Desa Durian, Desa Banjaran, Desa Sukamaju, Desa Sidodadi, Desa Suka, Desa Suka Banjar, Desa Sidomulyo, Desa Sidawaluyo, dan Desa Talang Baru. Banjir terjadi tanggal 27 Oktober 2022 dan menewaskan 3 orang tersebut terjadi sebelum peneliti mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan.

Pada saat peneliti berkunjung, Menteri Sosial RI juga berkunjung menyerahkan bantuan kepada korban banjir. Banjir di Kabupaten Lampung Selatan merupakan banjir akibat luapan air Sungai Sekampung saat intensitas curah hujan tinggi, baik curah hujan di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bagian hulu sungai maupun curah hujan lokal. Terdapat beberapa faktor penyebab banjir lainnya, yaitu kemiringan lereng, tutupan lahan, dan jenis tanah. Banjir tersebut menurut beberapa Koseka di Lampung Selatan, cukup mengganggu proses pendataan awal Regsosek. PPL maupun PML yang terdampak banjir diberi peringatan oleh Koseka untuk mengamankan kuesioner agar tidak basah dan hilang.

Tantangan bentang alam adalah untuk menjangkau penduduk yang berada di beberapa pulau. Kabupaten Lampung Selatan memiliki pulau yang terletak di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Katibung, Rajabasa, Ketapang, dan Bakauheni. Pulau terbanyak ada di Kecamatan Rajabasa, yaitu sebanyak 16 pulau. Di Kecamatan Rajabasa ada Pulau Sebesi, yaitu pulau yang terluas di Kabupaten Lampung Selatan (4.643 Ha). Ada juga Pulau Krakatau, Pulau Sebuku, Pulau Rimau dan Pulau Kandang. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dataran dengan ketinggian dari permukaan laut bervariasi. Daerah dataran tertinggi berada di Kecamatan Merbau Mataran dengan ketinggian

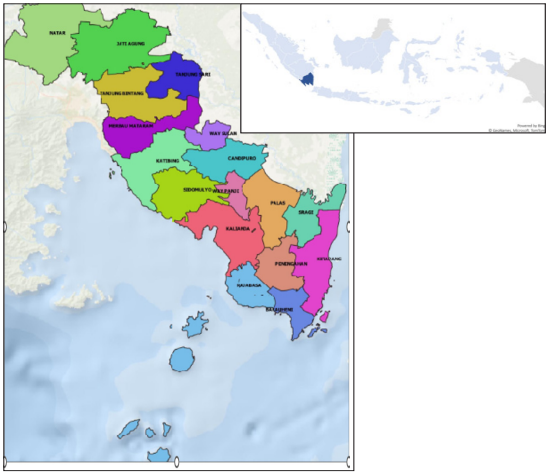

Sumber: BPS Lampung Selatan (2022)

Gambar 8.1 Peta Kabupaten Lampung Selatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

102 m dari permukaan laut. Kalianda sebagai ibu kota kabupaten memiliki ketinggian 33 m dari permukaan laut.

Desa Tejang Pulau Sebesi merupakan desa yang mempunyai bentang alam yang sulit untuk dijangkau. Desa ini merupakan bagian Kecamatan Rajabasa, untuk menjangkaunya harus terlebih dahulu menyeberang dari Dermaga Canti ke Pulau Sebesi. Penyeberangan Dermaga Canti ke Pulau Sebesi dapat menggunakan perahu motor dengan harga 20—30 ribu rupiah per orang atau 1—2 juta rupiah per rombongan. Pulau ini merupakan daratan yang paling dekat dengan Gugusan Krakatau dan turut menjadi saksi kedahsyatan letusan besar Krakatau tahun 1883. Sejak dulu Pulau Sebesi sangat terkenal akan kesuburan tanahnya. Salah satu dorongan kuat mengapa Pulau Sebesi tetap dihuni karena tanahnya yang memang terkenal subur. Selain perikanan, warga di pulau ini juga berkebun. Kini, selain memiliki keunggulan di sektor perkebunan, pulau ini juga sedang dikembangkan sebagai tujuan wisata andalan Lampung Selatan, selain Krakatau dan sejumlah pantai, seperti Merak Belantung, Kalianda resort, dan lainnya. "Bentang alam yang sulit dijangkau adalah Desa Tejang Pulau Sebesi karena terpisah dengan daratan Sumatra pulau tersendiri," demikian ungkap seorang Koseka Lampung Selatan.

Desa Tejang Pulau Sebesi dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Masyarakat setempat yang kebanyakan berdarah Banten biasa memanggil kepala desanya dengan sebutan *Jaro*'. Kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa. Selain itu, kepala desa dibantu oleh sejumlah kepala urusan (Kaur) di sejumlah bidang, seperti pemerintahan, kependudukan, pembangunan, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa juga dibantu oleh kepala dusun yang membawahi masing-masing dusun. Kepala dusun setingkat RW dibantu oleh ketua RT. Pelaksanaan pendataan awal Regsosek di Pulau Sebesi dilaksanakan PPL setempat dan dilaksanakan supervisi oleh Koseka dan BPS Lampung Selatan tanggal 10 November 2022 sehingga peneliti tidak berkesempatan melakukan wawancara dan observasi, yang merupakan bentang alam tersulit di Kabupaten Lampung Selatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bentang alam Kabupaten Lampung Selatan mempunyai keunikan tersendiri apabila dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung. Beberapa wilayah Kabupaten Lampung Selatan telah dimekarkan menjadi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan harus melewati wilayah Kota Bandar Lampung baru ke Kalianda sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Selatan dan terasa jauh jaraknya dengan ibu kota kabupaten. Kecamatan Natar merupakan kecamatan yang terjauh dari ibu kota kabupaten Lampung Selatan (83 km), Kecamatan Jati Agung (74 KM), dan Tanjung Bintang (63 km).

> "Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten lama dan beberapa dimekarkan menjadi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung bentang alamnya dan pembagian wilayahnya unik karena harus melewati Kota Bandar Lampung dulu baru bisa ke Kecamatan Jati Agung, Natar dan Tanjung Bintang." (Wawancara dengan responden, 2022)

Keterkaitan pembagian wilayah administrasi dengan bentang alam Kabupaten Lampung Selatan menjadi tantangan dalam pendataan awal Regsosek. Menurut Kepala BPS Lampung Selatan, penduduk Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Natar, Jati Agung, dan Tanjung Bintang secara *de facto* bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tetapi secara administrasi kependudukan, beberapa penduduk tercatat memiliki KTP dan KK Kota Bandar Lampung. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penduduk wilayah perbatasan ini lebih memilih secara administrasi menjadi penduduk Kota Bandar Lampung. Pertama, secara jarak Kota Bandar Lampung lebih dekat dibandingkan ibu kota Kabupaten Lampung Selatan di Kota Kalianda sehingga untuk biaya transportasi proses pengurusan administrasi lebih murah dan tidak memerlukan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

waktu yang lama untuk menjangkau pelayanan publik tersebut. Kedua, pelayanan publik seperti rumah sakit pemerintah, sekolah pemerintah lebih banyak tersedia di Kota Bandar Lampung sehingga jika terdaftar sebagai penduduk Kota Bandar Lampung, maka urusan administrasi lebih mudah. Ketiga, berbagai bantuan dari pemerintah lebih banyak jika sebagai penduduk Kota Bandar Lampung.

Pada pendataan awal Regsosek, petugas mengalami kesulitan dalam mendata penduduk daerah perbatasan ini. Perlu kesepakatan antar petugas maupun antara BPS Kabupaten Lampung Selatan dan BPS Kota Bandar Lampung serta antar pemerintah desa/kelurahan di 2 wilayah ini. Bentang alam bukan menjadi tantangan utama dalam pendataan awal Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan. Namun, proses pendataan terkendala di beberapa tempat disebabkan sulitnya petugas menemukan penduduk yang didata. Pada daerah perkebunan dan pertanian pada pagi sampai sore hari pada saat jam kerja, penduduk tidak ada di rumah, akan tetapi berada di tempat kerja seperti di sawah dan kebun. Demikian juga pada penduduk bermata pencaharian nelayan, penduduk tidak dapat ditemukan pada saat sedang melakukan pendataaan karena sedang berada di laut. Pada daerah penyangga Kota Bandar Lampung berupa perumahan, petugas juga mengalami kesulitan untuk ketemu penduduk pada pagi hari karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor formal seperti pemerintahan, perusahaan swasta, maupun pabrik.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Regsosek

Menurut Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan proses bisnis pendataan awal Regsosek dilakukan secara cepat. "Kami mulai kegiatan Regsosek setelah Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2022," ungkap Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan. Pada tingkat BPS Kabupaten, kegiatan pendataan awal Regsosek dirasakan mulai ada kegiatan setelah Pidato Kenegaraan Presiden RI pada penyampaian RUU APBN tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2022. Pada pidato

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tersebut dinyatakan bahwa reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima, melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penunjukan BPS sebagai pelaksana pendataan awal Regsosek tahun 2022 sangat tepat dengan berbagai alasan sebagai berikut.

1) BPS mempunyai lembaga dan sumber daya manusia, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dengan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), hingga mitra pengumpul data lapangan sehingga ada jaminan mekanisme dan prosedur kerja untuk pendataan dapat dilakukan secara seragam.
2) BPS berpengalaman dalam melaksanakan sensus maupun survei rutin, seperti Sensus Penduduk, Survei Tani, Survei Sosial Ekonomi Nasional, maupun dalam Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 dan 2011.
3) Intervensi dari berbagai pihak agak susah dilakukan jika pendataan dilakukan BPS. BPS merupakan instansi vertikal sampai ke daerah, akan tetapi intervensi dari berbagai pihak di daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
4) Proses rekrutmen dan pelatihan PPL dan PML dilakukan sendiri oleh BPS Kabupaten dan PPL dan PML berasal dari daerah setempat sehingga biaya menghemat biaya operasional pada saat pengumpulan data. BPS hanya menyediakan honor dan premi iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kontrak kerja, sedangkan operasional seperti penginapan dan transportasi tidak disediakan oleh BPS karena PPL maupun PML merupakan masyarakat setempat.

Pada saat peneliti ke lokus penelitian, Regsosek sedang dilaksanakan. Proses pengumpulan data dilakukan oleh Petugas Pendataan Lapangan (PPL). PPL dalam melaksanakan tugasnya dipimpin Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML). PPL maupun PML direkrut oleh BPS berasal dari masyarakat setempat sehingga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memudahkan dalam proses pengumpulan data. PPL maupun PML sebelum melaksanakan tugas mendapatkan pelatihan terkait mekanisme dan prosedur pendataan. PPL direkrut berasal dari yang berpengalaman atau yang belum berpengalaman dalam kegiatan yang dilaksanakan BPS, sedangkan PML dapat berasal PML yang berpengalaman sebagai PML atau pernah terlibat sebagai PPL pada kegiatan BPS.

Sebelum melaksanakan tugasnya, petugas Regsosek mendapatkan pelatihan secara berjenjang. Pada saat pelatihan juga melibatkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Selatan sebagai peserta pelatihan *sit in*. Pelibatan peserta dari OPD bertujuan untuk memberikan masukan, sekaligus meminta dukungan dalam pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022.

Koseka merupakan unsur penting dalam pengoordinasian lapangan kegiatan pendataan awal Regsosek. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek, BPS Kabupaten Lampung Selatan menugaskan sebanyak 32 Koseka. Dari 32 Koseka tersebut, sebanyak 22 Koseka berasal dari pegawai BPS Kabupaten Lampung Selatan dan 10 Koseka berasal dari mitra BPS. Mitra BPS yang dapat menjadi Koseka adalah mitra BPS Kabupaten Lampung Selatan yang sudah berpengalaman dalam mengikuti berbagai kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS. Koseka tersebut sudah berpengalaman menjadi PPL dan PML sehingga diharapkan Koseka ini dapat mengkoordinasikan PPL dan PML dalam pengumpulan data.

Pelaksanaan pendataan awal Regsosek masih menggunakan moda PAPI (*Paper Assisted Personal Interviewing*) atau menggunakan kertas sebagai pencatat hasil dari wawancara dengan penduduk. Penggunaan kuesioner tercetak merupakan pilihan yang terbaik dalam pendataan awal Regsosek tahun 2022 (Gambar 8.2).

Pengisian kuesioner tercetak tidak memerlukan aplikasi dan perangkat tertentu dan tidak tergantung dengan koneksi internet. Pada pendataan dengan menggunakan aplikasi dengan metode *paperless*, memang secara efisiensi pembiayaan relatif lebih murah dan lebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Slamet (2022)

Gambar 8.2 Pendataan Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan

cepat dalam pengolahan data, akan tetapi pada saat pengumpulan data lapangan mengalami kendala. Menurut beberapa Koseka untuk penggunaan aplikasi dan metode *paperless*, mengalami kendala sebagai berikut.

1) Diperlukan perangkat pengumpul data berupa HP, tablet maupun laptop yang bisa dibawa pada saat di lapangan. BPS tidak menyediakan pembiayaan pembelian atau penyewaan perangkat pengumpul data tersebut. Apabila dibebankan kepada petugas pengumpul data, perangkat pengumpul data yang dimiliki oleh petugas mempunyai spesifikasi yang beraneka ragam dan belum tentu *compatible* dengan aplikasi yang digunakan.
2) Diperlukan koneksi internet ketika pengumpulan data di lapangan. Koneksi internet menjadi kendala petugas pengumpul data, yaitu harus ada paket kuota internet dan wilayah menjadi tempat pengumpulan data tersebut sudah terjangkau dengan sinyal internet yang stabil pada saat pengiriman data ke server.
3) Diperlukan server yang memadai untuk menerima data yang dikirim oleh pengumpul data secara bersamaan. Jika tidak didukung oleh server yang memadai, akan menghambat proses pengiriman data dan juga pengumpulan data di lapangan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penggunaan aplikasi dilakukan terbatas untuk *geotagging* dan foto melalui aplikasi Wilkerstat BPS. Wilkerstat digunakan sebagai petunjuk PPL dalam melaksanakan pengumpulan data. Pada aplikasi ini terdapat peta yang menunjukkan kedudukan penduduk pada GPS. Saat pendataan Regsosek, pengumpul data melakukan *geotagging* untuk semua keluarga, sedangkan pada keluarga yang termasuk keluarga sangat miskin dan miskin dilakukan pengambilan foto pada 4 sisi bagian rumah.

Penentuan keluarga sangat miskin dan miskin tersebut berdasarkan hasil konsultasi petugas dengan perangkat desa setempat atau pengurus RT dan RW. Meskipun dirasakan penentuan tersebut mungkin ada unsur subjektivitas, suka atau tidak suka oleh perangkat desa/RT/RW setempat terhadap keluarga yang dikategorikan keluarga sangat miskin, miskin, atau tidak miskin. Semestinya PPL tidak hanya mengategorikan keluarga sangat miskin, miskin dan tidak miskin hanya berasal dari informasi perangkat desa/RT/ RW setempat, akan tetapi juga melihat kondisi keluarga tersebut baik yang disampaikan melalui wawancara atau berdasarkan observasi tempat tinggal serta melihat data penerima bantuan sosial melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/. Jika tidak mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, dikhawatirkan banyak penerima bantuan sosial yang sebelumnya menerima bantuan sosial akan dikeluarkan dari hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Pendataan awal Regsosek tahun 2022 merupakan pendataan pertama untuk Registrasi Sosial Ekonomi dan berbeda dengan SUSENAS. Penyiapan untuk pendataan awal Regsosek tahun 2022 dilaksanakan secara singkat. Mulai dari pelatihan, penyiapan data SLS, penyiapan logistik pengumpulan data, rekrutmen petugas, dan pengumpulan data hanya dilaksanakan secara singkat dari pertengahan Agustus

Buku ini tidak diperjualbelikan.

2022 sampai dengan pertengahan Oktober sudah dilaksanakan pengumpulan data. Selain itu, beda antara Regsosek dengan survei sosial ekonomi. Pada kuesioner Regsosek yang ditanyakan kepada keluarga tidak terlalu banyak dibanding dengan kuesioner pada Survei Sosial Ekonomi Nasional.

> "Biasanya kami melakukan survei berbasis rumah tangga, pada Regsosek berbasis keluarga sehingga konsep tersebut harus dipahami oleh petugas." (Wawancara dengan responden, 2022)

Pembeda lainnya konsep yang diterapkan pada Regsosek adalah keluarga. Hal ini berbeda dengan konsep survei atau pendataan yang dilakukan oleh BPS sebelumnya, yaitu menggunakan konsep rumah tangga. Pada konsep rumah tangga dalam 1 bangunan atau memiliki 1 dapur dihitung 1 kuesioner, akan tetapi pada konsep keluarga, yang menempati 1 bangunan dan 1 dapur bisa terdiri dari beberapa keluarga. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri pada pelaksanaan Regsosek.

Tantangan berikutnya adalah pada pendataan Regsosek dilakukan kepada seluruh keluarga yang menempati SLS tanpa memandang, termasuk kategori sangat miskin, miskin, dan tidak miskin. Pendataan untuk seluruh keluarga pada satu sisi memudahkan pendataan. Penduduk tidak merasa curiga ketika tetangganya didata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan penduduk tersebut tidak didata, maka kemungkinan penduduk tersebut tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan pendataan untuk semua keluarga tersebut tidak muncul kecurigaan/kecemburuan warga ketika pendataan awal Regsosek dilaksanakan. Namun, pendataan untuk seluruh keluarga mendapatkan tantangan untuk mendata keluarga yang tidak miskin. Beberapa keluarga pada awal pendataan menolak untuk didata karena belum mendapatkan sosialisasi, pemberitahuan dari pemerintah setempat, dan takut data yang diberikan disalahgunakan. Koseka menceritakan ada beberapa PPL mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan pada oknum PNS kemudian PPL tersebut melapor ke PML dan Koseka. Koseka tindak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lanjut dengan pemberian sosialisasi kepada PNS tersebut bahwa pendataan awal Regsosek adalah program pemerintah dan PNS wajib menyukseskan kegiatan ini.

Pendataan awal Regsosek tahun 2022 untuk seluruh keluarga merupakan tantangan, khususnya untuk mendata keluarga yang mampu sehingga diperlukan dukungan dan sosialisasi yang masif. Di Kabupaten Lampung Selatan sosialisasi secara formal dilakukan dengan mengundang seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), camat seluruh Kabupaten Lampung Selatan, serta di-*launching* oleh Bupati Lampung Selatan. Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta berbagai media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Lampung Selatan, seperti Facebook, Instagram, dan Tiktok. Harapannya, semua elemen masyarakat mengetahui dan mendukung pendataan awal Regsosek tahun 2022.

Pendataan awal Regsosek mendata semua penduduk yang menempati pada wilayah tertentu tanpa kecuali, penduduk yang menempati asrama, panti asuhan, dan lembaga pemasyarakatan juga dilakukan pendataan. Pendataan terhadap penduduk tersebut dinamakan pendataan wilayah khusus. Kabupaten Lampung Selatan sebagai penyangga dari ibu kota provinsi terdapat beberapa tempat yang merupakan termasuk kategori pendataan wilayah khusus seperti adanya asrama mahasiswa Institut Teknologi Sumatra (ITERA) yang ditempati ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pendataan wilayah khusus juga dilakukan pada penduduk yang tinggal di Lapas Perempuan Kelas II A, Lapas Narkotika Way Huwi, Rutan Way Huwi, Lapas Kelas II A Kalianda. BPS Kabupaten Lampung Selatan juga melakukan pendataan malam pada tanggal 29 Oktober 2020 yang ditujukan kepada tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Pendataan malam dilakukan pada malam hari dengan rentang waktu pada pukul 21.00—06.00 WIB. Tim Koseka, PML, dan PPL menelusuri lokasi-lokasi yang diperkirakan didiami oleh tunawisma, seperti di bawah kolong jembatan, pasar, emperan toko, dan rumah kosong.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. Pandangan Pemerintah Desa terkait Kepentingan Pendataan Awal

Pemerintah Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan sangat mendukung pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022. Dukungan Pemerintah Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan terhadap pelaksanaan kegiatan BPS tidak hanya dilakukan pada kegiatan Regsosek saja, tetapi juga dukungan terhadap program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) di mana Desa Pasuruan merupakan salah satu Desa Cantik di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan umum dari Desa Cantik adalah meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tujuan berikutnya yaitu standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. Selanjutnya, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa/kelurahan tepat sasaran. Tujuan yang terakhir adalah untuk membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan.

> "Kami mengembangkan Desa Cantik (Gambar 8.3). Sebenarnya kebijakan 1 kabupaten membina 1 desa cantik, tetapi kami membina 4 desa cantik yang kami anggap mampu menyajikan data statistik secara baik." (Wawancara dengan responden, 2022)

Desa Pasuruan sudah mempunyai sistem informasi menggunakan platform OpenSID. Pelayanan publik mulai dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi serta menampilkan data dan informasi desa melalui web https://pasuruan-lampungselatan.id/ sehingga dengan kondisi demikian ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi desa menjadi salah satu unggulan desa ini.

Kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022 sangat penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui secara persis kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Meskipun Desa Pasuruan sudah memiliki data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, tetapi dengan adanya pendataan awal Regsosek diharapkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakatnya lebih *update* lagi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Tangkapan Layar Instagram BPS Lampung Selatan (2022)

Gambar 8.3 Pencanangan Desa Cantik di Kabupaten Lampung Selatan

Harapannya, hasil pendataan ini disampaikan kepada pemerintah Desa Pasuruan sehingga dapat melengkapi data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pasuruan.

Dukungan pemerintah desa terhadap pendataan awal Regsosek diantaranya melibatkan perangkat desa sebagai PPL. Pelibatan perangkat desa sebagai PPL diharapkan memudahkan komunikasi antar berbagai elemen terkait dengan Regsosek di Desa Pasuruan yaitu pihak BPS Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Pasuruan.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan

Saat kunjungan ke kantor Kepala Desa Pasuruan, desa sangat mendukung pelaksanaan pendataan awal Regsosek tahun 2022.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bahkan, kepala desa menugaskan Kepala Seksi Pelayanan, Sugeng Hariono, untuk menjadi PPL sekaligus menjadi penghubung antara BPS, lembaga desa, dan masyarakat. Penugasan Kasie Pelayanan sebagai salah satu PPL mempertimbangkan juga kompetensinya dalam hal pendataan, penguasaan teknologi, dan aspek pemahaman PPL terhadap lingkungan.

Informasi mengenai pendataan awal Regsosek didapatkan oleh pemerintah desa melalui informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah kabupaten dan BPS Lampung Selatan menginformasikan kepada seluruh OPD dan amat di Kabupaten Lampung Selatan melalui pertemuan Rapat Koordinasi Pendataan Awal Regsosek tahun 2022, dipimpin langsung oleh Bupati Lampung selanjutnya dan surat edaran resmi yang ditujukan kepada OPD, camat, dan kepala desa seluruh Kabupaten Lampung Selatan (Gambar 8.4).

Dari kegiatan tersebut, informasi mengenai pendataan awal Regsosek menyebar ke berbagai media yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Pemberitaan melalui media konvensional, seperti siaran TV lokal (TVRI Lampung, Saburai TV, dan Radar Lampung TV) siaran radio FM (RRI dan DBFM),

Sumber: Portal Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (2022)

Gambar 8.4 Rakor Pendataan Awal Regsosek 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan surat kabar lokal (Radar Lamsel dan Lampung Post). Selain itu, juga berbagai media sosial resmi dari pemerintah, baik itu melalui Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok dan Youtube. Penyebaran informasi melalui berbagai media tersebut diharapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa penduduk di Desa Pasuruan, Sido Mulyo, maupun Kalianda mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai pendataan awal Regsosek melalui berbagai media tersebut. Namun, ada juga yang sama sekali belum mengetahui pendataan ini sehingga mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan PPL ke rumah penduduk tersebut. Penyebaran informasi yang cukup efektif pada saat ini adalah melalui pesan berantai pada aplikasi Whatsapps. Informasi itu disebar melalui pesan pribadi maupun grup-grup Whatsapps instansi pemerintah maupun grup Whatapps Desa, RW, dan RT. Penggunaan pesan melalui Whatspps juga dilakukan untuk menyebarkan informasi mengenai pendataan awal Regsosek baik dilakukan berjenjang,, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan maupun tingkat RT/RW, serta komunitas nonformal lainnya.

Adanya penyebaran informasi dan komunikasi yang baik tentang pendataan Rrgsosek di Kabupaten Lampung Selatan menyebabkan masyarakat mendukung kegiatan pendataan ini. Bentuk dukungannya adalah memberikan informasi yang benar mengenai kondisi sosial ekonominya. Bahkan, penduduk yang didata menunjukan dokumen-dokumen yang sebetulnya bersifat rahasia, seperti dokumen sertifikat tanah dan bangunan. Tidak ada yang ditutupi mengenai aset, harta, dan kekayaannya. Dukungan tersebut tidak terlepas dari keinginan masyarakat agar berbagai program pemerintah berdasarkan data dan informasi yang valid dan *update* sehingga tidak terjadi ketidaktepatan pelaksanaan program pemerintah. Masyarakat berharap tidak ada lagi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Masyarakat menyampaikan bahwa masih ditemukan masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan sosial, tetapi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak mendapat bantuan sosial. Sementara, ada juga yang tidak layak mendapat bantuan sosial, tetapi malah mendapatkan bantuan sosial.

Penjaringan informasi pada pendataan awal Regsosek menggunakan kuesioner yang ditanyakan langsung kepada penduduk yang didata. Penjaringan informasinya dilakukan secara bertingkat dimulai dengan adanya informasi awal berupa verifikasi daftar keluarga, keberadaan dan status kesejahteraan dengan ketua/pengurus SLS. Pada pendataan awal Regsosek, informasi awal dari status kesejahteraan keluarga berasal dari ketua/pengurus SLS setempat. Ketua SLS memberikan petunjuk awal untuk kategorisasi keluarga, yaitu keluarga sangat miskin, miskin, dan tidak miskin. Untuk kategori miskin dan sangat miskin nanti akan difoto pada 4 sisi rumahnya oleh PPL dan akan diberi kode status keluarga oleh PPL. Keterlibatan ketua SLS ini merupakan wujud upaya untuk memvalidasi data kepada ketua/pengurus SLS yang mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya. Namun, pelibatan ini mengakibatkan adanya subjektivitas dari ketua/pengurus SLS dalam menentukan kategori sangat miskin, miskin, dan tidak miskin karena dalam pikiran ketua SLS yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Jadi, validitas data Regsosek dimulai dari verifikasi data awal oleh ketua/pengurus SLS.

Setelah mengetahui kategorisasi oleh ketua/pengurus SLS, PPL akan melakukan wawancara berdasarkan kuesioner. PPL akan mengisi kuesioner berdasarkan jawaban dari penduduk yang diwawancarai serta didukung dokumen terkait seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta pernikahan, sertifikat tanah, BPKB, buku tabungan, Kartu BPJS, dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan jawaban penduduk dan data pendukung, PPL juga bisa mengisi kuesioner berdasarkan pengamatan seperti untuk keterangan rumah, kepemilikan usaha, kondisi kesehatan dan program perlindungan sosial, keikutsertaan program, layanan dan kepemilikan aset.

Validitas data dilakukan dengan cara pengambilan *geotangging* setiap keluarga yang diwawancarai yang menghasilkan *ID Landmark Wilkerstat*. Identitas (ID) ini harus diisi sebagai salah satu keterangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tempat di kuesioner dan hal ini merupakan salah satu kendali untuk memastikan bahwa kuesioner diisi berdasarkan data pengumpulan data di lapangan, bukan hanya berdasarkan data pendukung, seperti KK. Setiap mengakhiri proses wawancara mengharuskan penduduk yang diwawancarai menandatangani pernyataan bahwa informasi yang diberikan adalah benar, dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah serta dilengkapi dengan nomor ponsel yang bisa dihubungi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memvalidasi data bahwa informasi yang diberikan sudah benar dan bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah.

Bentuk pengendalian data pada tingkat PPL juga dilakukan dengan cara setiap kuesioner yang diterima, rusak, maupun dikembalikan lagi ke BPS Lampung Selatan harus dibuatkan berita acara penerimaan kuesioner. Pada kuesioner yang sudah terisi juga harus menandatangani kuesioner dengan pernyataan telah melaksanakan pendataan sesuai dengan prosedur. Demikian juga PML menandatangani kuesioner dan menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur (Gambar 8.5).

Foto: Slamet (2022)

Gambar 8.5 Proses Pemeriksaan Kuesioner oleh PML

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada kegiatan Regsosek memang tidak sepenuhnya dilakukan secara *paperless* yang dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam prosesnya, masih tetap menggunakan kertas, tetapi didukung dengan teknologi komunikasi dan informasi untuk *geotagging* melalui aplikasi Wilkerstat. Penggunaan aplikasi tersebut mendukung penggunaan kuesioner yang berbasis kertas. Sangat berisiko jika hanya menggunakan aplikasi tanpa ada *back-up* kuesioner berbasis kertas untuk pendataan di seluruh wilayah Indonesia dan untuk semua keluarga di Indonesia.

F. Pemuda Ponorogo Mengadu Nasib ke Lampung: Sugeng Haryono (PPL)

Sugeng Haryono, lahir di Ponorogo. Dari kecil, hidupnya sudah penuh dengan hal-hal yang mengasyikkan. Sejak umur 5 tahun, sudah menumpang orang lain dan membantu mereka agar dapat melanjutkan sekolah. Ketika bersekolah di SMA pun sempat putus sekolah karena keadaan ekonomi yang minim sehingga menuntut untuk bekerja membantu keadaan ekonomi keluarga. Berbagai profesi telah dilakoni, dari kuli bangunan hingga pengelola perpustakaan. Hari demi hari dilalui, banyak hal yang bisa didapatkan, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Kejadian demi kejadian menjadi sejarah dalam perjalanan hidup beliau.

Cerita berawal saat itu berniat untuk mencari penghidupan dan harapan hidup baru, maka berangkatlah dari Ponorogo dengan menjual motor satu-satunya untuk ongkos dan biaya hidup nanti di tanah rantauan. Apa daya Allah Swt menakdirkan berbeda. Dalam perjalanan, dari Ponorogo dengan naik bus merajut impian dalam lamunan menghanyutkan melihat pemandangan yang terpampang di depan di balik kaca jendela bus yang melaju dengan tujuan Pelabuhan Merak Banten. Uang 700 ribu rupiah di kantong (hasil penjualan motor) pun tinggal 300 ribu rupiah saat turun dari bus menginjakkan kaki di tanah Banten. Karena pengetahuan yang kurang banyak tentang kerasnya hidup di pelabuhan, bertemu dengan calo

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bus jurusan Medan. Di sini ia tertipu naik mobil yang harusnya 60 ribu rupiah, tetapi dikenakan biaya ongkos sebesar 260 ribu. Sebuah pengalaman yang tidak terlupakan.

Pertama kali tiba di Lampung dia bekerja pada bengkel Pak Basuki. Saat bekerja, ia tidak dibayar. Ia hanya mendapatkan tumpang tinggal dan dapat makan gratis. Setelah itu, dia dapat ide buka tambal ban, mulai dari sini ia pun dapat uang. Dari sini ide membuat perpustakaan muncul ketika malam hari habis bekerja ingat kebiasaan dulu membaca. Setelah itu tekadnya untuk membuat perpustakaan tidak terbendung, terlebih melihat anak-anak di sekitarnya haus akan buku bacaan. Genap dua bulan setelah buka tambal ban, ia telah memiliki tabungan 500 ribu rupiah. Dengan uang tabungan itu, ia belikan Motor GL MAX tahun 1986 di tukang rongsokan, seharga 450 ribu rupiah. Saat itu, mesinnya mati dan tanpa roda depan dan belakang.

Pada bulan Maret 2014, tanggalnya sudah lupa, Motor Pustaka yang ia impikan sebelumnya, ia wujudkan dengan motor yang ia beli. Setelah diservis dengan baik, motor itu sudah bisa hidup dan bisa jalan. Bermodalkan buku-buku dari tukang rongsokan sebanyak 60 exsemplar seharga 15 ribu rupiah itu, mimpi mempunyai perpustakaan sudah terwujud. Awalnya, masyarakat tidak terlalu tertarik dengan kegiatan ini, terbukti dari pertanyaan masyarakat, "Mang jualan apa? Mas jualan apa? Om jualan apa?" Pertanyaan seperti itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mencoba dan menyosialisasikan bahwa ini Motor Pustaka, perpustakaan keliling dengan metode baca pinjam buku gratis. Masyarakat pun akhirnya antusias untuk membaca dan meminjam buku-buku yang dibawanya.

Setelah itu ada ide untuk meminta sumbangan buku dari rumah ke rumah. Ada sekitar dua ratusan rumah yang diketuk pintunya dan maksud dan tujuan itu pun disampaikan dengan baik. Beragam tanggapan masyarakat muncul. Ada yang mendukung, bahkan ada juga yang mencaci maki, menghina dengan kata kata yang sangat pedih, "Mas, mas … sampean ini lho … Mengapa mau melakukan kegiatan seperti ini? Sampean ini hidupnya masih numpang, bisa makan setiap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hari saja sudah untung, kok masih juga mau keliling nyari-nyari buku. Seharusnya sampean kerja getol tambal ban, biar hidup sampean lebih mapan" Semua itu bukan menyurutkan semangatnya, melainkan sebaliknya menambah dan menjadi pemupuk semangatnya. Dari 200-an rumah yang dikunjungi, ia pun mendapatkan 42 eksemplar buku berbagai macam judul.

Dari situ perjuangan dilanjutkan, dan pertama keliling setelah mendapatkan buku-buku hasil dari minta sumbangan itu adalah teriakan, "Buku baru… Buku baru…" Walaupun sadar, bahwa itu bukan buku baru yang baru dibeli dari toko buku atau masih terbungkus plastik. Dari sini antusiasme masyarakat naik luar biasa. Masyarakat bagaikan lapar dengan bahan-bahan bacaan. Ternyata bukan buku baru yang mereka butuhkan, tetapi semata-mata buku yang terbarukan lebih tepatnya.

Pada Gambar 8.6 Presiden RI memberikan apresiasi terhadap kegiatan Motor Pustaka. Inisiator Motor Pustaka menyampaikan pengalaman perjalanan saat mengembangkan Motor Pustaka ke daerah-daerah di Lampung. Berbagai tantangan juga diceritakan.

Foto: Sugeng Haryono (2017)

Gambar 8.6 Pak Jokowi sedang mencoba Motor Pustaka.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sugeng Haryono (2022)

Gambar 8.7 Aktivitas Motor Pustaka

Satu bulan rutinitas keliling dilakukan (Gambar 8.7), ternyata ada pertanyaan, "Mas, enggak ada buku buku yang baru? Bukunya *kok iki iki wae*?" Lalu mas Sugeng berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan buku-buku baru karena ia tidak mau masyarakat kecewa. Akhirnya, keesokan hari mencoba membuka Facebook yang selama di Lampung tidak pernah membukanya. Untung masih ingat *password*-nya. Dari obrolan dengan teman-teman di Facebook itu, banyak masukan. Usulan yang paling menginspirasi itu adalah, "Mengapa tidak diambil foto dan Kamu *upload* di Facebook?"

Setelah mendapatkan foto-foto dokumentasi lalu ia unggah di warnet (warung internet). Di Lampung Selatan, khususnya tempat mas Sugeng akses internet masih begitu susah. Bahkan, karena terlalu susahnya, untuk unggah satu foto saja membutuhkan dua jam. Padahal penggunaan internet di warnet itu satu jamnya sebesar Rp6.000,00. Jadi setiap unggah foto harus punya uang sebesar Rp12.000,00. Akhirnya, perjuangan itu membuahkan hasil dengan adanya tanggapan dari teman Facebook setelah melihat postingan kegiatan Motor Pustaka. Medsos dalam hal ini Facebook benar-benar menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

wahana promosi gratis yang sangat efektif. Respon dari masyarakat pun semakin menguatkan semangatnya untuk memposting kegiatan Motor Pustaka di berbagai wilayah pelayanannya.

1. Aparat Desa: Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan

Pada tahun 2019 Pak Sugeng diminta oleh Kepala Desa Pasuruan untuk menjadi aparat desa, dengan alasan bahwa Pak Sugeng memiliki ide-ide dan kreativitas yang selama ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika ditanya terkait motivasi menjadi aparat desa, secara diplomatis beliau menjawab, "Hanya ingin berkontribusi membangun desa. Saya ingin anak cucu nanti berkembang dan hidup di lingkungan yang kita harapkan. Negeri ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi hanya titipan dari anak cucu kita." Semenjak menjadi aparat desa, banyak gebrakan yang dilakukan olehnya. Salah satunya adalah pengembangan *Smart Village* di Desa Pasuruan.

Program *Smart Village* atau desa cerdas merupakan perwujudan peran pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan agar lebih baik, partisipatif, terkendali, dan akuntabel. Dalam prosesnya, ada dukungan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Selain itu, desa sebagai unit dari bagian pemerintahan dalam struktur pemerintahan di Indonesia juga memerlukan pembaruan dan adopsi terhadap perkembangan teknologi informasi sehingga dengan menerapkan teknologi informasi akan mendorong percepatan pembangunan. Apresiasi atas adopsi teknologi di desa mendapat perhatian oleh Presiden RI. Perwakilan pemerintah desa mendapat kesempatan untuk menyampaikan pengalaman pengembangan adopsi teknologi di desa kepada Presiden RI. (Gambar 8.8).

Program kerja *Smart Village* setidaknya ada tiga pokok kegiatan. Pertama, digitalisasi pelayanan publik di desa, yaitu menyelesaikan seluruh kegiatan pemerintahan desa dengan digital seperti pelayanan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Sugeng Haryono (2017)

Gambar 8.8 PPL Diundang Pak Jokowi

surat menyurat, kependudukan, dan lainnya. Kedua, pemberdayaan ekonomi, yaitu mendorong desa atau masyarakat mampu meningkatkan melalui *e-commerce, marketplace*, *cashless,* dan lainnya. Ketiga, inkubasi pemerintah desa, mendukung SDM pemerintah desa dan masyarakatnya untuk dapat berperan aktif menggunakan fasilitas *Smart Village*, agar sejatinya pembangunan desa dapat tercapai, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program *smart village* sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, diantaranya pengurusan surat-surat sudah berbasis IT, warga tinggal mengunduh aplikasinya, setelah itu mengisi apa keperluannya. Bahkan, ketika bertamu ke kantor kepala desa untuk mengisi buku tamu sudah menggunakan *barcode* yang tidak lagi buku manual.

2. Petugas Pelaksana Lapang (PPL) Regsosek

Pertama kali mendengar akan dilakukan pendataan Regsosek, Pak Sugeng langsung berdiskusi dengan kepala desa terkait adanya program tersebut (Gambar 8.9). Mereka berpendapat bahwa pendataan ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sangat penting dan harus diintegrasikan dengan program-program desa, artinya bahwa data dari Regsosek harus sinkron dengan data desa. Seandainya seluruh PML dan PPL yang ada di desa semua terdiri dari masyarakat desa, maka desa akan sulit mengakses data tersebut dan akan bolak-balik menanyakan kepada petugas (PML dan PPL). Agar informasi tidak terputus informasi Pak Kades mengijinkan Pak Sugeng untuk menjadi PPL. Dalam ketentuan terkait rekrutmen calon petugas Regsosek, memang diutamakan *warga setempat dan seandainya aparat desa harus persetujuan atasannya.*

Persyaratan warga setempat dimaksudkan agar petugas dikenal warga sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Aparat desa harus seizin atasannya dimaksudkan bahwa tugas PPL sangat berat dan dibutuhkan waktu lebih kurang 2 bulan. Jangka waktu yang cukup lama ini nantinya akan mengganggu tugas sebagai sebagai aparat desa.

Pada dasarnya Pak Sugeng sangat suka dan hobi terkait hal-hal yang inovatif, IT, dan juga hal lain yang masih baru dan berguna bagi warga. Dia berkeyakinan menjadi PPL tidak jauh beda dengan dengan apa yang selama ini dia kerjakan. Hal yang menarik selama mengikuti pelatihan menjadi PPL, rasa keinginan tahunya yang sangat besar sehingga selama pelatihan, beliau yang paling banyak bertanya. Banyak hal baru yang ia ketahui terkait BPS dan pendataan sungguh merupakan ilmu baru.

Materi pelatihan yang diberikan berupa konsep yang digunakan dalam dalam Regsosek seperti informasi demografi, kepemilikan aset, bangunan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk menyeragamkan pemahaman para petugas terhadap konsep, defenisi, dan manajemen lapangan pendataan awal Regsosek sehingga petugas mampu memahami materi dan tata cara pengisian kuesioner pendataan lapangan dengan baik dan lancar.

Dalam pelatihan disampaikan bahwa tujuan dari pendataan awal Regsosek. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terhadap kondisi bencana. Prasyarat utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial adalah transformasi data menuju Regsosek untuk seluruh penduduk. Perubahan penyediaan data sosial ekonomi ini meliput cakupan seluruh penduduk Indonesia, standar dan metodologi yang sama, pemutakhiran regular, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan.

Dalam pelatihan juga dikatakan bahwa data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pendataan Regsosek merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data utama ini akan dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah agar lebih terarah.

Wilayah kerja Pak Sugeng sebagai PPL di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Pasuruan berpenduduk 4.115 Jiwa/1.248 KK. Dalam satu desa terdiri dari 4 PPL, masing-masing PPL kurang lebih mendata 300 KK. Penduduk Pasuruan rata-rata sebagian besar bekerja sebagai petani, pekerja swasta, jasa, dan kerajinan, serta PNS dan TNI Polri. Di lihat dari

Foto: Olahan Peneliti (2022)

Gambar 8.9 Pak Sugeng sebagai Petugas PPL Regsosek

Buku ini tidak diperjualbelikan.

suku, penduduk Desa Pasuruan rata-rata keturunan Jawa, Lampung, Padang, dan lainnya.

Bagi Pak Sugeng, pertama kali melakukan pendataan agak kesulitan/belum familier terkait *pengodean* sehingga terkadang bolak-balik dalam melihat lembar pertanyaan. Namun, setelah 2–3 hari, ia pun dapat menyesuaikan dan bisa lancar. Masyarakat rata-rata sudah tahu akan adanya pendataan Regsosek ini karena dari pihak desa sudah melakukan sosialisasi baik melalui pertemuan, rapat-rapat, grup WA, maupun dari FB, Instagram, dan juga masyarakat melihat langsung di televisi. Demikian juga ketika turun lapang, tidak banyak kendala karena mereka sudah kenal sehingga tidak ada penolakan. Sebaliknya, hal yang terasa justru setiap berkunjung ke rumah warga selalu disuguhi kopi dan juga diberikan makanan ringan dan mengobrol ke sana-ke sini. Proses pendataan seperti inilah yang membuat pendataan akan menjadi lama. Namun, keadaan ini tentu menguntungkan karena masyarakat menjadi terbuka dan tidak ada yang dirahasiakan. Masyarakat juga rata-rata sangat ingin tahu terkait pendataan Regsosek ini, apa tujuannya, dan apa pula manfaatnya. Selama ini setiap kali ada pendataan/sensus masyarakat selalu mengira akan ada bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan bagi yang tidak didata dan juga tidak dapat bantuan.

Ada suatu pengalaman unik yang dialami Pak Sugeng dalam pendataan, yaitu ketika mendata satu keluarga yang terdiri dari ibu dan tiga anaknya. Kebetulan ketiga anaknya sakit jiwa. Waktu itu Pak Sugeng tidak berani masuk ke rumahnya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia berpikir keras bagaimana cara mendatanya. Dia bertanya ke tetangga sekitarnya. Atas saran tetangga, Pak Sugeng dianjurkan balik lagi besok sebelum jam 6 pagi karena pada jam tersebut ibu dari ketiga anak tersebut keluar rumah untuk membeli sayur ke pedagang sayur keliling. Pada hari selanjutnya, petugas dapat menemui ibu tersebut dan pendataan dilakukan dibawah pohon nangka di pinggir jalan. Untungnya ibu tersebut sangat baik dan tidak malu ditanya terkait kondisi anaknya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengalaman unik dan juga menegangkan adalah ketika mendata salah satu warga yang memiliki usaha peternakan yang besar. Untuk menjaga keamanan ternaknya, sang warga memelihara beberapa ekor anjing. Pak Sugeng tidak sadar kalau di rumah tersebut ada peliharaan anjing. Saat itu anjingnya sudah keluar mengejar sembari menggonggong keras. Untungnya, sang pemilik anjing segera keluar dan menghentikannya. "Alhamdulilah. *Selamet, deh*," celetuknya.

Sebenarnya banyak pengalaman menarik lainnya, tetapi setidaknya ada dua catatan penting proses pendataan Regsosek yang dilakukan para PPL dan PML. Pertama, petugas PPL dari warga di lingkungan setempat sangat membantu sekali dalam pendataan. Penerimaan warga akan petugas dan juga tingkat kepercayaan yang tinggi disebabkan karena sudah kenal. Hal ini tentu memudahkan komunikasi serta keterbukaan akan data dan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kedua, BPS memiliki struktur organisasi vertikal dari pusat sampai kabupaten dan juga memiliki kemitraan dengan masyarakat yang telah berpengalaman membantu kerja BPS, sehingga memudahkan mobilisasi tenaga lapang. Pendataan Regsosek yang persiapannya hanya 3 bulan tidak lepas dari bantuan para mitra di masyarakat dalam mensukseskannya.

G. *Life Story* Keluarga Fokus Data

1. Eko Wahyudi

Lahir pada bulan Oktober 1985, dan memiliki satu orang istri dengan dua orang anak. Anak pertama kelas 3 SD dan anak kedua umur 3 tahun. Rumahnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sido Dadi, Kabupaten Lampung Selatan. Pendidikan lulus SMA. Dulu waktu merantau ke Bandung sempat mengikuti di ITB dan diterima. Namun, karena berasal dari keluarga tidak mampu, oleh orang tuanya disarankan kerja saja. "Ngapain sekolah-sekolah, uang gak ada," demikian jawaban bapaknya ketika menyampaikan bahwa dirinya diterima di ITB.

Desa Sidorejo sendiri merupakan desa eks permukiman transmigrasi sehingga secara etnis hampir sebagian besar merupakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

keturunan Jawa serta bermata pencarian sebagai petani. Memasuki desa ini, terlihat rumah-rumahnya tertata rapi dengan nama-nama jalan bernuansa Jawa. Demikian juga masyarakatnya, kebanyakan berbahasa Jawa sehingga memasuki desa ini seperti tidak asing lagi bagi peneliti yang merupakan orang Jawa. Dilihat dari kondisi rumahnya, Pak Eko ini kelihatan mampu, rumah sendiri tidak ngontrak, atapnya ada plafon, dindingnya bata, dan lantainya sudah pakai keramik. Apalagi, di rumahnya sudah ada TV *flat*, kulkas, dan AC.

Pengalaman kerja beliau sangat banyak, mulai dari kuli pasar, tukang batu, sampai tukang parkir. Sebelum Covid-19, ia bekerja di PT Mitra Insani dan saat pandemi, ia pun terkena PHK. Saat ini, beliau bekerja sebagai jasa kemasyarakatan seperti mengurus KTP, KK, dan surat-surat lain. Penghasilan dari jasa ini tidak menentu karena dia tidak pernah pasang tarif, cuma seikhlasnya dan kesadaran masyarakat yang sedang membutuhkannya. Apalagi jika yang meminta bantuan adalah orang yang tidak mampu, malah ia tidak akan tega meminta bayaran. Selain jasa kemasyarakatan, usaha lainnya adalah *Gado Sawah*/*Maron.* Artinya, dia menyewa tanah, lalu orang lain yang mengerjakan dan hasilnya akan dibagi dua. Dalam setahun, ia akan dapat panen 2 kali. Setiap panen akan dapat hasil 1,2 ton atau jika diuangkan akan mencapai jumlah sekitar 4,5 juta rupiah. Penghasilan kotor dalam setahun sekitar Rp9.000.000,00 dibagi dua, yaitu Rp4.500.000,00.

Istri memiliki usaha sendiri, yaitu jualan nasi kuning, bubur ayam, dan burger di KPK (Kampung Paguyuban Kreasi). KPK merupakan sebuah *event* yang diadakan tiap hari minggu pagi, dari jam 6–11 siang. *Event* berupa olah bersama/senam dan ajang jualan warga disertai musik yang diikuti oleh warga desa. Sebelum ada KPK, dahulu disebutnya sebagai Kampung Okey. Setelah itu, berubah lagi menjadi Paijo dan terakhir KPK. Hasil dari usaha jualan di KPK setiap hari minggu mendapatkan hasil kotor sekitar Rp900.000,00. Artinya, setiap bulan Rp3.600.000,00. Selain jualan di KPK, sang istri kadang mendapatkan order untuk acara hajatan, dan pengajian atau ulang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tahun. Namun, pesanan ini tidak menentu, kadang dalam seminggu, ia mendapatkan 3 kali, tetapi kadang juga tidak ada pesanan sama sekali.

Ketika ditanya terkait Regsosek, Pak Eko mengetahuinya dari media sosial (grup WA, Instagram, Facebook) dan juga obrolan di warung kopi. Menurut pengakuannya, dia tidak tahu sama sekali terkait pendataan Regsosek. Pengalaman yang ada, hanyalah sensus atau pendataan yang arahnya untuk mendapat bantuan. Selama ini beliau tidak memiliki BPJS, KIP, dan pada setiap ada bantuan, keluarganya juga terlewati. Satu-satunya bantuan yang ia dapat berupa bantuan sosial tunai.

Berkaitan dengan PPL dan PML yang mendata Regsosek dirasakan cukup ramah dan mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara runut dan tidak mengulang-ulang. Dari cara komunikasinya, PPL dianggap masih baru dan terkesan malu-malu ketika menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Keadaan ini dapat ditutupi dengan status PPL yang merupakan warga penduduk setempat dalam satuan lingkungan sehingga tidak ada kendala dalam penerimaan dan juga komunikasinya lancar.

Harapannya terkait pendataan Regsosek, semoga warga yang benar-benar tidak mendapat bantuan dapat diberikan haknya dan juga mendapatkan perlindungan lainnya, seperti BPJS, pendidikan, modal, dan pelatihan. Tujuannya agar mereka dapat meningkatkan ekonominya. Dalam kapasitas tertentu, para petugas pendataan (Koseka, PML, dan PPL) dianggap sedang melakukan pekerjaan yang mulia sehingga pemerintah selayaknya dapat menghargai mereka. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada aparat RT, dukuh dan kepala desa yang memberikan bantuan, khususnya saat mulai Covid-19.

2. Ibu Yuliani

Kisah hidup Ibu Yuliani sangat menarik dan unik. Beliau adalah seorang ibu dari keluarga miskin yang tinggal di Perumahan Mustika

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Raya II, Desa Seloretno, Kecamatan Sidodadi. Seorang ibu berusia 43 tahun dengan tiga orang anak yang masih kecil dan bersuamikan buruh di Pelabuhan Bakauheni dengan penghasilan yang tidak menentu. Sang suami jarang pulang karena sering kali ia tidak mendapatkan uang yang cukup. Kadang orang beranggapan bahwa yang tinggal di perumahan dianggapnya selalu mampu sehingga jika mereka mendapatkan bantuan, akan dianggap salah sasaran atau kurang tepat (Gambar 8.10). Bu Yuliani tinggal di perumahan atas bantuan seseorang yang merasa kasihan melihat ibu Yuliani yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah tinggal di pinggir jalan.

Permasalahan menjadi rumit. Ia tinggal di perumahan, tetapi secara kependudukan ia bukanlah warga perumahan. Setiap kali ada bantuan yang mensyaratkan ber-KTP setempat, tentu keluarga Ibu Yuliani selalu tidak dapat. Sementara, bantuan yang diberikan untuk lingkungan perumahan sudah sesuai dengan KTP sehingga ketua RT atau Pak Dukuh tidak dapat menyisihkan untuk orang yang benar-benar tidak mampu dan tidak ber-KTP di lingkungan tersebut. Karena

Foto: Slamet (2022)

Gambar 8.10 Kondisi Rumah Bu Yuliani dari Luar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

beberapa kali terlewatkan bantuan, oleh perangkat desa, dukuh, dan RT kemudian dibuatkan surat domisili. Tujuannya, agar saat ada bantuan, ia akan dapat diusulkan untuk menerima bantuan itu.

Ibu Yuliani sebagai kepala keluarga (suami kerja di luar daerah) memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek untuk mengantar anak-anak sekolah. Dia memiliki pelanggan tetap sebanyak dua orang anak sekolah. Dari kedua pelanggan tersebut, hasilnya disimpan untuk kebutuhan sekolah anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia pun mengojek di pangkalan yang hasilnya juga tidak menentu. Keadaan ini dipersulit dengan pembayaran sewa motor yang digunakannya. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan air, ia pun menumpang dari sumur tetangga. Di rumah yang sempit tersebut belum ada pompa air.

Ketika ditanya terkait ada pendataan Regsosek dia tidak tahu informasi sebelumnya, tiba-tiba ada petugas datang ke rumah menanyakan macam-macam (umur, jumlah anggota KK, kerjaan, penyakit, dan lain-lain). Selama ini dia merasa tidak pernah didata, mungkin karena tidak ber KTP di lingkungan dia tinggal.

Terkait PPL yang mendata, dia kenal dan orangnya baik, ramah karena petugasnya masih tetangga. Bu Yuliani sangat berharap dengan adanya pendataan Regsosek tidak akan terjadi lagi bantuan yang salah sasaran, seperti yang selama ini dia alami. Menurut Bu Yuliani, sebenarnya secara pribadi malu meminta-minta bantuan sehingga walau kadang sering terlewatkan dari bantuan dia tetap diam, dan malah orang lain yang memperjuangkan. Ucapan terima kasih kepada tetangga sekitar, RT, dukuh dan kepala desa atas perhatiannya selama ini.

H. Penutup

Proses pendataan Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa hal menarik untuk diperhatikan, antara lain:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1) Wilayah Kabupaten Lampung Selatan luas dan menyebar, baik berupa dataran rendah, perbukitan, kepulauan, perdesaan, dan wilayah perkotaan sehingga menjadi tantangan dalam pendataan Regsosek.
2) Pendataan Regsosek di Kabupaten Lampung Selatan berjalan lancar karena didukung oleh berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3) Wilayah Kabupaten Lampung Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, masyarakat diwilayah perbatasan lebih menyukai sebagai warga Kota Bandar Lampung dibanding dengan warga Kabupaten Lampung Selatan meskipun menempati wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Daftar Pustaka

BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2022). *Kabupaten Lampung Selatan dalam angka 2022*. Diakses dari https://lampungselatankab.bps.go.id/publication/2022/02/25/f632d36ce14cd17032812ae6/kabupaten-lampung-selatan-dalam-angka-2022.html

BPS Provinsi Lampung. (2021). Jumlah penduduk miskin (Ribu jiwa), 2019–2021. Diakses dari https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html

Portal Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2022). Rakor pendataan awal Regsosek 2022, Pemkab Lampung Selatan dukung realisasi satu data nasional [Gambar]. https://www.lampungselatankab.go.id

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2015). *Basis data terpadu 2015*: *Untuk memilah penerima manfaat program penanganan fakir miskin berdasarkan kriteria program*. *I*, 1–97.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

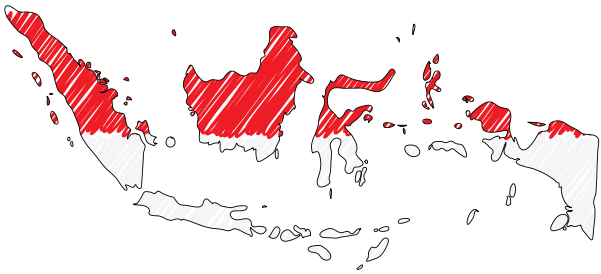

#9

Dari Km 0 (Nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna di Balik Data

Eko Wahyono & Badrun Susantyo

A. Sebuah Pengantar: Regsosek di Aceh Besar

Data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mutlak harus dimiliki sebagai dasar pembangunan nasional. Tanpa ada data yang akurat, arah pembangunan akan kabur dan tidak tepat sasaran. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai agenda pembangunan nasional memiliki kebutuhan data yang akurat dan holistik. Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan sebuah ikhtiar untuk menyatukan data yang terserak diantara kementerian/lembaga yang menjadi *stakeholder* kunci pembangunan nasional. Instrumen penelitian, petugas pelaksana teknis, dan nonpetugas merupakan piranti penting yang menjamin ketersediaan dan keakuratan data (Feeney & Feeney 2019).

E. Wahyono & B. Susantyo
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: ekow005@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Wahyono, E., & Susantro, B. (2023). Dari km 0 (nol), ujung barat Indonesia: mencari makna di balik data. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (305–346). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c711 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kedatangan tim peneliti BRIN ke Aceh sebagai salah satu bagian dari kegiatan Regsosek dan bagian dari Satu Data Indonesia (SDI). Aceh sebagai sebuah provinsi memiliki karakteristik yang sangat unik, baik dari topografi, budaya, dan etnis masyarakat. Mendatangi Aceh dengan antusias yang tinggi, iming-iming kopi dengan cita rasa yang khas serta makanan yang kaya bumbu tak lepas dari imaji. Kami dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) bertugas sebagai tim supervisi proses kegiatan Regsosek 2022 di Provinsi Aceh khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pahlawan nasional, Cut Nyak Dhien dilahirkan di Lampadang yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar ini. Seperti namanya, kabupaten ini sangat lah besar dan luas, tak kurang 2.969,00 km^2 total wilayah kabupaten ini terbentang dari ujung paling barat Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 407.775 jiwa dengan kepadatan penduduk 137/km^2 (350/sq mi), dari 23 kecamatan dan 604 gampong. Dengan bentang alam yang luas dan beragam topografi dari kepulauan sampai pegunungan ini, tentu memberikan tantangan sendiri bagi petugas BPS untuk mencacah dan mencatat data dari semua penduduk.

Upaya terstruktur dan sistematis tentu sudah dimiliki oleh lembaga se-kaliber BPS untuk melaksanakan tugas ini. BPS Aceh Besar dengan sepenuh hati mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk menunaikan *hajatan nasional* tahun 2022. Sebanyak 13 kecamatan dengan jumlah 122.497 kepala keluarga (KK) harus tuntas dalam tempo 1 bulan, target yang tidak mudah. Untuk melaksanakan misi ini, tak kurang 29 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), 144 Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) dan 539 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dikerahkan untuk menuntaskan tugas sensus ini. Artinya, terdapat 712 anggota tim di lapangan yang setiap hari berjibaku mengumpulkan data dari pagi sampai malam.

Cerita suka duka dan harapan teman-teman di lapangan datang silih berganti, baik dalam bentuk diskusi maupun curhatan. Beberapa kondisi hambatan umum yang dialami adalah kondisi cuaca hujan, petugas kurang sehat, petugas kurang paham dengan konsep definisi,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan tentu responden (masyarakat) yang sulit untuk dijumpai menjadi kendala utama pada sensus Regsosek tahun ini.

Di lapangan, tim peneliti BRIN sebenarnya lebih banyak menemani dan belajar dari kawan-kawan BPS serta menggali ilmu dari masyarakat. Proses pencacahan data, secara teknis membutuhkan pemahaman konsep, ketelitian, dan *cross check* yang berulang-ulang antara PPL, PML, dan Koseka. Namun, tantangan tidak hanya itu saja, kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter masyarakat dan bentang alam yang tidak mudah untuk dilalui. Untuk mendapatkan data, seorang PPL bahkan harus mendatangi rumah sampai 4 kali (baru berhasil). Melintasi jalan terjal, perbukitan, melintasi lautan, sungai tanpa jembatan, dan hutan menjadi hal biasa bagi seorang pencatat data.

B. Aceh Besar diantara Bentang Alam Tersulit: Tanpa Menyerah!

Kabupaten Aceh Besar memiliki bentang alam yang sangat luas dan beragam. Terbentang dari wilayah kepulauan ujung barat Indonesia sampai dengan wilayah Pegunungan Seulawah di timur laut. Pada sisi barat wilayah Kabupaten Aceh langsung berbatasan dengan Samudra Hindia dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka pada wilayah timur. Kondisi kepulauan dan pegunungan ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pencacah dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa wilayah seperti Pulau Breueh dan Pulau Nasi harus dijangkau dengan kapal kayu selama kurang lebih 2 jam perjalanan dari Banda Aceh menuju Pulo Aceh. Keterbatasan infrastruktur jalan dan telekomunikasi juga ikut andil sebagai kendala dalam menjaring data di lapangan. Pada saat di Desa Malingge, Kecamatan Pulo Aceh, tim PML kesulitan untuk menghubungi teman-teman PPL yang berada di lapangan (karena ketiadaan jaringan telekomunikasi), alhasil kami harus menyusuri satu persatu lorong rumah agar dapat berjumpa. Begitu juga pada saat di sepanjang pesisir Pantai Sanay,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.1 Bersama tim Regsosek Kab. Aceh Besar menuju Pulau Aceh (P. Breuh) menggunakan kapal motor (kapal kayu)

tim Regsosek juga cukup kesulitan dalam sinyal, dibutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten (Gambar 9.1).

Perjalanan ke lembah Seulawah juga sarat akan perjuangan, puluhan kilometer jalan yang terjal dan berliku serta rimbunnya hutan dan kebun-kebun masyarakat, perlu dilalui untuk menuju lokasi ini. Sabang, kota paling utara juga menjadi magnet daya tarik dan perlu diketahui proses pencacahan Regsosek. Ekspedisi bentang alam kali ini akan kami buat dalam berbagai episode. Setiap episode memiliki memiliki makna yang berbeda dengan episode yang lainnya.

1. Episode Pulau Breueh

Bentang alam tersulit, salah satunya bisa ditemui di Gampong (desa) Malingge, Kecamatan Pulo Aceh, Pulau Breueh. Jika dihitung jarak dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar (Kota Jantho), membutuhkan kurang lebih 6 jam perjalanan (4 jam darat dan 2 jam laut). Gampong Malingge di Pulau Breueh ini merupakan desa paling barat di Indonesia karena tidak ada lagi desa setelah wilayah ini.

Selasa siang, 1 November 2022 bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir, tim peneliti BRIN diantar oleh tim Regsosek BPS Provinsi Aceh sampai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ke pelabuhan untuk menyebrang ke Pelabuhan Gugob Sueurampong, Pulau Breueh. Perjalanan ke Pulau Breueh kali ini, kami ditemani oleh Bapak Mustafa (Bidang Manajemen Lapangan Regsosek BPS Kabupaten Aceh Besar), belakangan ini kami memanggilnya Cek Mus, panggilan akrabnya di kantor. Pada awalnya saya bertekad sendirian meliput kegiatan teman-teman PPL di lapangan, tetapi Cek Mus datang menyusul ketika kami makan siang dan hendak naik kapal kayu.

Lalu-lalang penumpang terlihat sangat sibuk, beberapa sepeda motor dan juga beberapa ekor hewan ternak (kerbau) diangkut ke atas kapal kayu, bahan sembako, dan material bangunan juga semua dimasukkan ke dalam lambung kapal. Puluhan jerigen solar di tata rapi, solar ini digunakan untuk menghidupi listrik penduduk di Pulau Breueh. Sekitar pukul 14.00 mesin kapal sudah berderu, tanda kapal akan segera berlayar. Kami duduk di bagian belakang kapal, bersama rombongan guru sekolah dasar dari Malinggae.

Siang itu kondisi laut cukup baik dengan ombak yang tenang dan cuaca cerah. Sekitar pukul 17.00 WIB kapal kami tiba di Pelabuhan Gugob Sueurampong. Akhirnya, tiba di Pulau Breueh. Pulau yang konon hanya 30% penduduknya yang selamat dari gelombang tsunami. Sekitar 70% sisanya ikut hanyut terbawa arus gelombang air. Sebagian besar penduduk yang selamat dari terjangan tsunami adalah mereka yang mampu menyelamatkan diri menuju ke perbukitan tinggi di Pulau Breueh.

Tim PML sudah menunggu kami di warung kopi di samping pelabuhan. Setelah menghabiskan satu cangkir kopi, kami pun bergegas ke lokasi PPL bertugas. Untuk sampai ke Gampong Lempuyang, diperlukan waktu sekitar 20 menit menggunakan kendaraan motor roda dua dari pelabuhan dengan menyusuri bibir pantai dan perbukitan. Untuk sampai kerumah-rumah penduduk, beberapa jalan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua, kendaraan kita parkir di pinggir jalan dan kita masuk ke lorong-lorong rumah penduduk. Dua PPL dan satu PML sedang mencacah warga di rumah kayu panggung. Ketiganya adalah perempuan, hebat dan tangguh

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah kata yang disematkan untuk mereka bertiga. Selanjutnya, tim lapangan segera bergegas ke salah satu rumah penduduk, seorang nenek tua kita temui. Agak samar nenek tersebut menyatakan bahwa usianya sekitar 70 tahun. Beberapa percakapan kurang bisa dipahami karena penduduk yang berusia lanjut hanya bisa menggunakan bahasa asli, dan kurang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk *cross check* ulang percakapan antara PPL dengan penduduk.

Dengan sabar dan ketelatenan, petugas PPL menanyakan satu persatu pertanyaan di kuesioner. Ketika salah satu petugas PPL sedang melakukan pencacahan, petugas PPL lain dan PML ikut *cross check* dan membantu jika ada pertanyaan yang terlewat atau terjadi kesalahan dalam mengisi. Detail mengenai pertanyaan dan jawaban di telisik satu persatu, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan satu kuesioner.

Jika respondennya berusia lanjut dan tidak bisa membaca, tentu akan menjadi tantangan tersendiri dan sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menjawab. Responden harus menjawab satu persatu jawaban sambil mengingat ingat pertanyaan dan jawaban apa yang akan diberikan. Beberapa kali responden menanyakan ulang mengenai apa yang ditanyakan oleh petugas PPL. Dengan penuh sabar dan ramah, petugas PPL akan mengulangi pertanyaan kembali jika diperlukan. Jika perlu, dijelaskan dan *cross check* ulang kembali. Setelah selesai melakukan pencacahan, petugas PPL mengambil sejumlah foto rumah dengan menggunakan kamera ponsel untuk *tagging*. Saya melihat petugas PPL mengitari rumah sambil mengadahkan *handphone* ke langit, berharap dapat menangkap sinyal lebih kuat. Kami pun pamit dari rumah warga dan melanjutkan perjalanan untuk mencacah penduduk lainnya.

Satu tim rombongan yang terdiri dari PPL, PML, dan Koseka menyusuri lorong-lorong jalan rumah warga yang tidak bisa dilalui dengan menggunakan sepeda motor. Batas antara rumah warga satu dengan yang lain dipagari dengan tanaman gamal. Hampir di sepanjang pemukiman dan perkebunan warga ditanami jenis tanaman

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.2 Perbincangan di kedai kopi adalah hal lazim di sebagian besar masyarakat Aceh sebagai media silaturahmi dan memperkuat akar kebersamaan.

ini sebagai tanda pembatas alami. Setiap kali masuk ke rumah warga terdapat semacam pintu gerbang yang terbuat dari kayu. Kami memasuki pemukiman rumah warga yang akan dicacah setelah berjalan kaki sekitar 100 meter. Sepasang kakek-nenek yang berusia lebih dari 70 tahunan sudah menungggu di rumahnya (Gambar 9.2).

Pencacahan dengan keluarga R (Inisial) di lakukan secara bersama-sama, pengisian dilakukan oleh PPL dengan didampingi oleh PML dan Koseka. Kali ini proses pencacahan berlangsung cukup lama karena pada satu waktu kami mencacah 3 anggota keluarga yang berusia lanjut. Adzan magrib yang menghentikan dialog antara petugas PPL dengan warga. Rencana awal, tim peneliti akan menginap di *guest house* milik gampong (desa), tetapi karena penuh diisi oleh PPL (yang berasal dari luar pulau) kemudian tim peneliti menginap di gedung serba guna Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Menyadari akan jauhnya jarak tempuh dari rumah, dan harus menyebrangi laut ke lokasi pencacahan para petugas PPL harus fokus di Pulau Breueh dan tidak pulang sampai tugas diselesaikan. I (Inisial) merupakan salah satu PML yang selama 3 hari setia menemani tim peneliti.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Malam itu I menceritakan bagaimana perjuangan teman-teman PPL di lapangan. Tak luput juga dia menceritakan bahwa bagaimana upaya yang dia lakukan untuk menyelamatkan diri dari gelombang tsunami di tahun 2004. Kami mengobrol sampai kira-kira pukul 23.00 WIB untuk merencanakan kegiatan esok hari di sekitaran Gampong Malingge. Saatnya pulang dan beristirahat.

Pagi selepas subuh, beberapa kerbau dibiarkan lepas mencari makan dengan sendirinya di sekitaran Pantai Lempuyang. Pagi itu aktivitas di pelabuhan kecil sudah ramai. Tampak beberapa nelayan sudah mondar-mandir mengendalikan perahu motor untuk melaut. Kopi saring robusta disajikan pada saat panas, aromanya tercium tercampur udara khas pantai. Sebelum menyeruput kopi saring ala Aceh ini, saya memesan sebungkus nasi lemak ikan. Dua meja panjang, tak kurang dari 10 orang penuh diisi oleh masyarakat lokal dan beberapa teman dari BPKS. Secara alami, seolah olah tim peneliti, BPS, dan warga sedang melakukan *focus group discussion* yang sudah direncanakan sebelumnya. Isu-isu krusial yang didiskusikan adalah mengenai potensi lokal, kehidupan nelayan, tsunami, sensus penduduk, harapan kepada negara dan juga keluh kesah keseharian masyarakat pinggiran. R (Inisial) menceritakan bahwa dahulu kelapa dijual dari Pulau Breueh ke Banda Aceh, akan tetapi pada saat ini justru kelapa dan minyaknya didatangkan dari daratan. Sumber daya yang seharusnya mampu dihasilkan sendiri tetapi justru didatangkan dari luar pulau. Tangkapan ikan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada dua dekade sebelumnya ikan sangatlah mudah dijumpai di sekitar pantai. Akan tetapi saat ini, nelayan harus melaut sampai ke tengah untuk mendapatkan tangkapan ikan.

Sekitar pukul 09.00 WIB tim peneliti tiba di *basecamp* para PPL. *Basecamp* ini ditempati PPL untuk mengefektifkan waktu, beberapa PPL berasal dari Pulau Nasi. Artinya, PPL harus menyebrang pulau dan menyewa kapal untuk sampai pada lokasi pencacahan penduduk. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, terlebih sebagian besar pencacah merupakan perempuan. Pagi itu tim peneliti mewawancarai PPL yang bernama M (Inisial) di depan *Guest House* Meurandeh (Gambar 9.3).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.3 *Guest house* Meurandeh, tempat menginap dan *basecamp* Tim Regsosek Kecamatan Pulau Aceh (P. Breuh).

M merupakan PPL yang berasal dari Pulau Seberang, yakni dari Pulau Nasi. Pagi ini M sembari menyiapkan berkas kuesioner untuk persiapan pencacahan di Malingge. Tim PPL membawa bekal nasi untuk di sanpap di perjalanan dan lokasi pencacahan. Perbekalan makanan perlu disiapkan, mengingat jarang ditemukan penjual makanan di Pulau Breueh. Setiap pagi PPL menyiapkan kuesioner yang disusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan kuesioner yang kosong, yang sudah diisi dan yang sudah di verifikasi.

Tim peneliti menanyakan mengenai pengalaman M dalam mengambil data dan bagaimana saja proses dan tantangannya. "Ya biasa melintasi pulau untuk mencacah data, Pak. Ke sini, saya menggunakan kapal *boat* yang harus disewa. Di sini, saya tinggal di penginapan ini karena tidak mungkin bolak-balik dari rumah," jawab M. M merupakan PPL yang terampil dan lincah, berlatar belakang pendidikan Kesehatan, tetapi tetap sigap dalam mengisi data data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sensus. Dalam melaksanakan tugasnya, M dan PPL lain terkadang sampai lupa makan siang. Pada saat asyik bercerita mengenai mekanisme kerja pencacah, tiba-tiba hujan turun membubarkan diskusi. Seketika berkas-berkas yang disusun di atas meja teras rumah tanpa atap ini harus kami selamatkan terlebih dahulu. Kami pun melanjutkan cerita dan keluh kesah mengenai proses pencacahan penduduk. Ternyata hujan turun tidak sampai 5 menit, mungkin hujan hanya lewat dan mengajak bercanda. "Sudah siap? Mari berangkat!" ucap seseorang dari luar rumah. Tim pun bersiap untuk melakukan pendataan lagi. Sebelum berangkat, seluruh anggota berfoto-foto bersama di depan *guest house* untuk mengabadikan momen pagi ini.

Kira-kira dibutuhkan perjalanan satu jam untuk sampai ke Gampong Malingge. Jalan menyusuri bibir pantai, dengan pemandangan perbukitan dan persawahan menjadi sajian utama dalam perjalanan kali ini. Jalan berliku, berkelok naik turun, dan beberapa titik terdapat jurang dan badan jalan yang longsor menjadi hal yang sepertinya biasa dilalui oleh petugas lapangan tim Regsosek. "Petugas lapangan BPS tak boleh cengeng, Pak!" kata-kata yang paling ku ingat pada saat perjalanan. Hal ini juga yang kemudian menguatkan dan membuat saya menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugas. Totalitas! Setelah satu jam perjalanan dengan penuh perjuangan mengendalikan laju dan kendali motor, kami tiba di gampong. Kami langsung ke rumah warga. Sudah ada Pak I (inisial) di dalam rumah warga. Rumah panggung yang terbuat dari kayu ini terasa damai dan rapi. Kami menunggu dari luar, beberapa menit kemudian Pak I keluar dan menyapa kami. Saya mengenalkan diri dan kemudian saya langsung wawancara dengan Pak I. Saya meminta izin untuk membuat video wawancara dengan latar belakang perbukitan dan suasana khas ala pedesaan.

Dalam wawancara ini, dijelaskan bahwa jarak yang jauh dan juga kondisi hujan menjadi salah satu kendala. Sebagian besar warga berprofesi sebagai nelayan dan perlu waktu khusus untuk dapat menjumpai warga. Sore hari merupakan waktu yang paling mujarab dan efektif. Sinyal juga menjadi kendala dalam men-*tagging* data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

penduduk. Ketika saya tanyakan apakah ada warga yang menolak untuk disensus, ternyata tidak banyak dan hampir tidak ada warga yang menolak untuk disensus. Pada dasarnya mereka terbuka dan tidak merasa terbebani dengan sensus penduduk. Beberapa warga justru menyiapkan jamuan atau memberikan oleh-oleh makanan ke petugas sensus. Peran sosialisasi dan *keuchik* (kepala desa) dalam mengabarkan sensus menjadi salah satu kunci, terlebih petugas sensus juga dilengkapi dengan data diri yang lengkap dan berasal dari daerah sekitar lokasi sensus. Seusai wawancara dengan PPL kami duduk istirahat sebentar di sebuah teras rumah kosong miliki penduduk.

Setelah cukup istirahat perjalanan dilanjutkan menuju gampong di ujung pulau, sebagian tim PPL sampai ke pantai untuk mencari sinyal. Beberapa PPL yang sudah di lapangan tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal. Gampong Malingge, desa paling barat di Indonesia yang memiliki puluhan pantai indah nan asri. Beberapa turis internasional kami lihat berada di sekitaran pantai. Karena sinyal yang cukup susah, kami tetap mencari PPL dan menyisir perumahan warga. Ternyata PPL sudah selesai mencacah dan bersiap-siap ke lokasi yang lainnya. Tim kemudian singgah di Menara Williams Toren III. Para PPL mengajak singgah di sini untuk melihat pantai sembari makan siang bersama di atas menara. Perlu menaiki ratusan tangga untuk sampai pada puncak menara ini. Dinding setebal 1 meter masih terlihat kokoh, meskipun menara ini sudah berdiri sejak dua abad yang lalu. seluruh tim menyantap makan siang sambil melihat Pulau Weh (Sabang) dan luasnya lautan dari atas menara.

Setelah selesai menyantap makan siang, semua tim pun turun dari menara dan siap untuk melakukan pencacahan jiwa lagi. Petugas PPL yang setengahnya lebih perempuan, cukup lihai dalam mengendarai motor roda dua. Medan yang berat seperti jurang dan perbukitan dilewati untuk mendapatkan data yang akurat. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyerah dan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebuah dedikasi yang luar biasa. Malam hari sekitar jam 20.00–23.00 WIB seluruh tim berkumpul bersama untuk membahas dan mengevaluasi kinerja kita hari ini di *Guest House* Meurandah Gampong Ulee Paya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Paginya jam 07.00 WIB tim peneliti BRIN dan petugas BPS tiba di pelabuhan Lempuyang, menunggu kapal kayu menuju pelabuhan Banda Aceh. Pagi ini berbagai jenis binatang ikut masuk di atas kapal, tak kurang dari dua ekor kerbau, dua ekor sapi, dan dua ekor kambing ikut berlayar dari Pulau Breueh menuju Banda Aceh. Puluhan atau mungkin ratusan tabung gas kosong elpiji 3 kg masuk dengan cepat ke lambung kapal. Puluhan kilogram ikan juga siap di bawa ke Banda. Kapal kayu Pulau Breueh ke Banda Aceh hanya ada pemberangkatan satu kali sehari (jam 08.00 WIB) tanpa tiket dan tanpa asuransi keamanan. Namun, masyarakat seperti sudah biasa dan tanpa rasa khawatir menikmati perjalanan sambil sesekali menghisap rokok di atas kapal.

2. Episode Lhoong

Bentang alam dan tantangan sulit lainya adalah Kecamatan Lhoong. Sebuah wilayah yang lokasinya berada diantara gunung dan laut. Keberangkatan dari Banda Aceh menuju Kecamatan Lhoong, selepas rapat dengan seluruh Koseka di Kota Aceh Besar. Perjalanan di mulai selepas salat zuhur dan makan siang. Perjalanan kali ini terasa spesial (Gambar 9.4) karena kami didampingi Bapak Irnanto (Kepala BPS Kabupaten Aceh Besar), Pak Mustafa (Manajemen Lapangan BPS Aceh Besar), dan Pak Badrun (BRIN).

Kurang lebih pukul 13.00 WIB perjalanan dimulai dari Energy Coffee, *base camp*nya para PPL, PML, dan Koseka BPS Aceh besar. Mengecek data sambil ngopi dan diskusi kurang lebih seperti itu aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Belum 1 kilometer perjalanan roda berjalan, kami sudah disambut hujan rintik-rintik. Mendung juga bergelayut di antara perbukitan yang sepanjang jalan di lewati. Di sepanjang jalan di diskusikan mengenai permasalahan kependudukan dan pencacahan yang dilakukan oleh BPS Aceh Besar. Kali ini menjadikan pak Irnanto sebagai narasumber selama di perjalanan. Pak Ir menggambarkan bahwa sepanjang jalan yang dilewati pernah habis diterpa ombak tsunami. Salah satu lokasi paling parah terkena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dampak gelombang air, tetapi kini kondisinya sudah jauh lebih baik dan bisa dikatakan kembali seperti semula. Beberapa masyarakat sangat sulit di deteksi keberadaanya karena berpindah pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jalan menuju Kecamatan Lhoong sangatlah lebar.

"Jalan ini sangat lebar dan bagus, dibangun oleh Amerika," ungkap Pak Ir. Di sebelah kiri berjejer perbukitan yang panjang dan luas, sedangkan di sebelah kanan terhampar pantai dan Ssamudra Hindia yang jelas tampak. Perjalanan menuju Lhoong itu cukup jauh dan melewati beberapa kawasan hutan lindung. Di sepanjang jalan pun banyak monyet hutan yang lalu lalang, bahkan bermain di tengah jalan. Setelah kira-kira perjalanan dua jam, akhirnya sampai di Gempong Umong Seuribee. Pak Suwardi, Koseka Kecamatan Lhoong sudah menunggu di persimpangan jalan dan mengarahkan kita untuk masuk ke lorong-lorong jalan di desa-desa. Tim BPS dan BRIN memasuki jalan kampung yang kira kira 2 kilometer dari jalan raya. Dua petugas PPL sudah mencacah warga di teras rumah. PPL menjelaskan bahwa sejauh ini masih aman dan pekerjaan bisa dijalankan dengan baik. Yang menjadi kendala adalah cuaca hujan yang sering datang dengan tiba-tiba. Hal ini bisa diatasi dengan jas hujan di saat mengendarai sepeda motor.

Setelah selesai melihat proses pencacahan di gampong Umong Seuribee, perjalanan berlanjut ke Gampong Sanay. Perjalanan ke Ga/mpong Sanay ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Desa ini dulunya penuh dengan warga, tetapi semenjak gelombang tsunami tahun 2004 menggulung daratan ini, seluruh warga pindah ke desa seberang. Desa ini menjadi sekarang menjadi desa kosong tanpa penghuni. Hampir tidak kami temukan bekas rumah dan pemukiman warga. Mungkin hampir sepenuhnya rumah di sini habis disapu ombak yang dahsyat itu. Pada awalnya tim BPS akan mendatangi dan mencacah salah satu warga yang masih tinggal di lokasi Pantai Sanay ini, tetapi setelah ditunggu hampir selama satu jam belum juga bertemu dengan penghuni rumah tersebut. Rumah yang di datangi adalah rumah satu-satunya di kawasan ini, jaraknya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak sampai 100 meter dari bibir laut. Rumah ini berada di tengah, di antara pantai dan tambak ikan/udang. Rumah ini berbahan utama kayu dan bambu, tampak sangat sederhana. Pak Suwardi menceritakan bahwa rumah ini masih ditinggali oleh sepasang penduduk. Mereka digolongkan sebagai warga kelas bawah dan menjadi salah satu prioritas untuk dicacah dan dicatat keberadaanya. Kondisi rumah warga yang di datangi cukup memprihatinkan, beberapa terbuat dari bambu dan beralaskan tanah. Lokasi nya pun sangat berbahaya karena tepat di depan pantai. Jika ada ombak atau air pasang, akan rentan tenggelam atau tersapu oleh ombak.

Pada saat menunggu sang pemilik rumah datang, Pak Suwardi banyak menceritakan kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Beliau sangat paham mengenai *mapping* karakteristik masyarakat masyarakat Aceh Besar. Beliau ternyata orang lama di BPS, bahkan lebih dari 15 tahun bekerja sama, baik secara organik dan non organik dengan BPS. Sebuah dedikasi dan pengalaman yang panjang. Berbagai macam jenis sensus dan survei pernah beliau jalankan. Berbagai macam posisi

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.4 Kepala BPS Aceh Besar menjelaskan aplikasi Regsosek 2022 bersama Penanggung Jawab Lapangan Regsosek Aceh Besar (Cek Mustafa) dan Koseka Kecamatan Lhoong (Pak Suwardi)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

seperti pencacah lapangan dan koordinator pernah dijalankan. Hal yang menarik, peran yang dijalani tidak selalu naik perannya di lapangan tetapi sesuai peran kondisi di lapangan. Misalkan pada saat ini menjadi Koseka, periode selanjutnya bisa saja kembali menjadi PPL. Pak Irnanto juga menjelaskan, rata-rata yang menjadi mitra BPS di lapangan, terutama Koseka merupakan mitra lama yang sudah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun. Mitra seperti ini yang kemudian dipercaya dan sangat membantu kinerja BPS karena benar benar memahami lapangan dan bekerja dari hati. Bahkan dalam beberapa kegiatan, mereka rela tidak dibayar dalam melaksanakan tugas dan merasa bahagia bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Setelah sekian menunggu dan bercerita, satu rombongan yang ditemani oleh 2 PPL dan 1 PML (semuanya perempuan) melanjutkan perjalanan ke sebuah warung kopi di dekat pantai.

Tim BRIN dan petugas BPS di lapangan berdiskusi di sepanjang perjalanan. Diskusi dan bercerita mengenai proses pengambilan data di Kecamatan Lhoong dengan mobil bak terbuka, sambil menikmati angin dari arah pantai. Ketiga perempuan ini adalah perempuan hebat dan tangguh. Medan yang cukup berat mampu dihadapi tanpa menyerah untuk mengumpulkan data demi data. Tantangan di Lhoong ini cukup terjal, wilayahnya berpantai pantai dan berbukit membutuhkan konsentrasi lebih dalam mengendarai motor. Hampir seluruh PPL yang ditemui di lapangan sebagian besar adalah perempuan dan menggunakan sepeda motor dari satu rumah kerumah yang lain. Pendataan dan pencacahan terkadang dilakukan sampai larut malam.

Setelah beberapa saat kita berdiskusi di atas mobil bak terbuka, kita diberikan tanda untuk berhenti sejenak di warung kopi di dekat Pantai Sanay. Satu rombongan ini turun dan memesan kopi. Beberapa gorengan seperti pisang goreng, tempe goreng, dan tahu goreng tersedia di sini. Sebagian besar pelanggan adalah nelayan dan petani yang ada di sekitar Pantai Sanay. Rombongan petani semangka memberikan semangka hasil dari panen petani hari itu. “Maaf, Pak.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Semangkanya segar, tetapi kurang manis, maklum karena tiap hari hujan," celetuk salah satu petani yang menawarkan semangka.

Tim peneliti dan tim BPS banyak berdiskusi dengan warga lokal yang istirahat sejenak di warung kopi. Mereka sangat ramah dan cukup terbuka dengan masyarakat baru. Budaya ngopi menjadikan kegiatan kali ini agak terbantu karena berbagai informasi dan isu di masyarakat bisa didapatkan secara mudah dan asli. Sambil menikmati buah semangka, kami berdiskusi mengenai isu di desa dan isu mengenai pertanian.

Hari semakin gelap dan mendung sudah bergelayut di langit langit Lhoong. Tim BRIN dan Regsosek beranjak pamit pulang dari warga masyarakat. Tepat jam 17.30 WIB, tim pulang menuju Banda Aceh dengan estimasi perjalanan selama dua jam. Pada saat makan malam hari, penerangan jalan raya sangat minim. Kanan kiri merupakan hutan yang sangat lebat. Dapat dibayangkan perjuangan pencacah dan koordinator lapangan, mengingat medan dan bentang alam yang di lewati terasa sangat menantang dan berliku.

3. Episode Pegunungan Seulawah

Pagi itu tim peneliti BRIN dijemput di hotel oleh Cek Mus sekitar jam 08.00 WIB pagi. Perjalanan dilanjutkan menuju Jantho, ibu kota Kabupaten Aceh Besar, dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam perjalanan. Terlintas hanya beberapa mobil saja yang melintas di jalan tol ini. Bisa dihitung dengan jari tangan. Tim peneliti tiba di kawasan perkantoran pemerintah daerah sekitar jam 09.00 WIB dan berdiskusi dengan beberapa pegawai BPS Kabupaten Aceh Besar mengenai pelaksanaan Regsosek tahun 2022. Tim peneliti meminta izin membawa beberapa berkas dari BPS untuk saya bawa pulang. *Banner* Sensus Pertanian 2023 sudah terpajang di dinding utama kantor BPS. "Pak Eko dan Pak Badrun nanti diantarkan oleh pak Baha, ya," ucap Cek Mus di kantor BPS Kabupaten. Cek Mus harus mengurus beberapa administrasi di kantor sehingga belum bisa mengantarkan kami kali ini. Tujuan kami di hari Jumat ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah ke Pegunungan Seulawah. Kawasan ini berada di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Sungguh perjalanan yang panjang dan terjal. Dari Jantho, ibu kota kabupaten, kira-kira membutuhkan waktu dua jam perjalanan. Perjalanan menggunakan mobil diesel, yang konon katanya memang cocok untuk melewati lokasi-lokasi yang ekstrem. Jalan yang di lewati merupakan jalan beraspal yang sebagian sudah rusak. Beberapa jembatan juga sudah rusak dan cukup sulit untuk dilewati bagi yang belum berpengalaman di lokasi ini. Di sepanjang jalan masuk ke desa, kurang lebih 10 km dengan hutan di sepanjang jalan. Desa yang di tuju adalah Gampong Panca Kubu. Tim peneliti BRIN ditemani oleh dua orang anggota PPL dan 1 Koseka. Ketiganya merupakan perempuan hebat yang pantang menyerah untuk mengumpulkan data lapangan.

Setiba di lokasi, K (Insisial) sudah menunggu kedatangan tim peneliti BRIN dan tim BPS. Warga pun sudah siap menunggu dan mempersiapkan masuk ke rumah warga. Wawancara dilakukan di ruang belakang rumah (dapur), beberapa ekor kambing berada pas di samping kami. Pencacahan berlangsung cukup lancar karena penduduk yang dicacah tergolong masih muda dan sangat kooperatif kepada PPL (Gambar 9.5).

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.5 PPL melakukan pendataan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Target responden kedua untuk dicacah adalah seorang ibu-ibu rumah tangga yang sedang menggendong dan menidurkan anaknya di teras rumah sambil menjaga warung kelontong. Tanpa perlu waktu lama, petugas PPL yang memang berdomisili di wilayah ini cepat untuk menanyakan pertanyaan dan mengisi kuesioner. Tak perlu waktu lama untuk berbasa-basi karena mereka sudah saling mengenal dan bahkan memang keluarga dekat. Kendala kali ini datang dari jaringan internet karena perlu beberapa foto yang harus di-*tagging* ke dalam ponsel. Petugas PPL berkeliling rumah untuk mengambil gambar (foto) dan mengunggahnya. Namun, ada terkendala jaringan internet.

Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB, hari ini adalah hari Jumat yang artinya harus melaksanakan jumatan. Masjid yang di datangi cukup terpencil dan saya ingat hanya ada satu saf (barisan) laki-laki dewasa (termasuk kami) dan setengah saf anak-anak di barisan kedua. Jumlahnya sangat sedikit dan tak sampai 40 orang yang mengikuti salat Jumat kali ini. Setelah salat Jumat, kami bergegas pulang karena hujan deras nampaknya akan datang. *Driver* takut tidak bisa menyebrang sungai karena memang tidak ada jembatan. Benar saja hujan turun lebat, untungnya tim sudah melewati sungai. Setelah jumatan, wawancara dilanjutkan kepada PPL, PML, dan Koseka selama kurang lebih satu jam di rumah penduduk, sambil berharap hujan reda. Infrastruktur jalan, telekomunikasi, dan jarak tempuh menjadi hambatan dan tantangan bagi PPL dalam mengambil data lapangan.

4. Episode Sabang

Sabtu pagi jam 06.30 WIB tim peneliti BRIN berangkat menuju Pelabuhan Ulee Lheue. Tiket ke Sabang dengan menggunakan kapal cepat Express Bahari seharga 100 ribu rupiah. Sebenarnya ada kapal lain, yakni kapal feri, harganya pun lebih murah, Rp28.000,00. Permasalahannya, kami sudah ditunggu di jam 09.00 WIB oleh Koseka BPS Sabang di kantornya, di Jalan Teuku Umar, nomor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

28, Sabang. Tepat jam 08.00 WIB kapal sudah bergerak meluncur menuju Pelabuhan Balohan. Kapal yang kami tumpangi benar-benar nyaman dan cepat, berbeda dengan kapal-kapal sebelumnya yang terbuat dari kayu dan siapa saja bisa langsung masuk tanpa perlu tiket. Pemandangan yang indah, perbukitan dan laut menyatu dalam satu *landscape*. Hal ini menjadikan perjalanan tidak terasa lama. Benar saja, sebelum jam 09.00 WIB tim peneliti sudah mendarat di pelabuhan disambut oleh anak anak yang berenang di sekitar kapal, berharap uang yang ditaburkan penumpang dari kapal. Perjalanan kali ini berbeda dengan bentang alam pada episode sebelumnya (Breueh, Lhoong, Seulawah), kali ini terasa lebih landai dan nyaman (Gambar 9.6).

Sekitar jam 09.00 WIB tim tiba di kantor BPS dan sudah ditunggu oleh Koseka. Salah satu yang menjadi kendala terbesar adalah kurangnya personel di wilayah Sabang. Jumlah penduduk yang akan disensus tidak sebanding dengan jumlah PPL yang tersedia. Beberapa persyaratan membuat tidak semua calon pendaftar PPL diterima karena mereka harus memiliki ponsel dengan spesifikasi tertentu. Tidak semua pemuda mampu menyanggupi persyaratan tersebut.

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.6 Tim Regsosek Pulau Aceh Bersama Tim Peneliti dan Penanggung Jawab Lapangan (Cek Mus Kab Aceh Besar)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun demikian, BPS dari Sabang akan berusaha semaksimal mungkin. Dalam *trackrecord*-nya, Pak A (Inisial) menyatakan bahwa pada sensus-sensus sebelumnya, Kota Sabang selalu target terpenuhi di atas 95% dari populasi. Hal ini yang tetap harus dijaga sebagai sebuah prestasi tersendiri di tengah keterbatasan yang ada.

Sabang sebagai sebuah kota administrasi memiliki karakteristik yang cukup unik. Warga masyarakatnya merupakan perpaduan etnis, bahasa, dan agama yang berbeda. Karakteristik masyarakat yang cukup beragam ini menjadikan Sabang sebagai salah satu kota yang dinamis. Sarana dan prasarana di Sabang pun cukup cukup baik. Dari pantauan observasi di lapangan, jalan-jalan raya yang ada di Sabang tampak bagus dan rapi. Sepanjang jalan kota menuju titik 0 (nol) kilometer juga sangat bagus. Infrastruktur jaringan informasi juga cukup baik. Hampir di setiap sudut tempat, terdapat sinyal yang baik dari dua *provider* yang berbeda. Di kota ini juga terdapat daerah Pecinan. Dalam prosesnya terdapat sebuah pola pendataan yang khas di wilayah ini. Toko-toko di wilayah ini akan tutup pada jam 13.00 WIB sampai 17.00 dan buka lagi setelah magrib. Artinya, pendataan harus mengikuti ritme dan pola pada kawasan tersebut. Terdapat juga kawasan (X) yang merupakan kawasan *keras*, seseorang petugas harus memiliki mental kuat untuk turun ke daerah ini. Seorang PPL yang diwawancarai R (inisial) sering dipanggil dengan panggilan tertentu yang bagi sebagian orang merupakan ungkapan dan pernyataan kasar. Perlu ada pendekatan khusus dan penempatan terhadap PPL di lapangan.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah mengenai beberapa varian data/aplikasi yang diusulkan pada saat sensus berlangsung. Bahkan, ketika pencacahan terhadap kawasan/individu selesai, data susulan yang dibutuhkan baru tiba. Protes dari PPL sempat dilayangkan, tetapi kemudian bisa diatasi secara baik oleh semua pihak. Diskusi kali ini dilakukan secara bergilir dan dadakan di kantor BPS Kota Sabang, tetapi cukup lengkap, mulai dari 2 Koseka, 2 PML dan 2 PPL. Diskusi ini dilakukan sampai kira-kira jam 13.00 WIB. Setelah usai dari kantor BPS, kami mengamati kondisi real di lapangan. Kurang lebih satu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jam melintasi kota Sabang, tak terasa sampai ujung dan menyentuh titik kilometer 0 (nol) Indonesia. Tak lupa tim juga menyempatkan untuk meminum es kelapa muda sambil memandangi samudra luas Samudra Hindia. Tim peneliti kembali ke kapal feri tepat jam pukul 16.00 WIB, perjalanan pulang ke Banda Aceh diiringi hujan yang cukup deras dan pukul 17.30 WIB sampai di Pelabuhan Ulee Lheue.

Berbagai episode perjalanan lapangan ini memberikan gambaran bahwa untuk melakukan pencacahan, diperlukan perjuangan yang tidak mudah. Berbagai wilayah baik perkotaan dan pedesaan memiliki tantangan yang berbeda. Pada wilayah perkotaan, gerak mobilitas warga sangat cair dan fleksibel sehingga membutuhkan kejelian dan kesabaran petugas PPL. Pada wilayah pedesaan, terutama pada wilayah yang sulit seperti di kepulauan dan pegunungan juga membutuhkan kondisi fisik yang prima. Pemahaman akan geografis dan budaya masyarakat juga menjadi penting. Langkah strategis dan efektif yang dilakukan oleh BPS untuk para petugas lapang adalah dengan mengutamakan warga yang berdomisili pada wilayah yang akan dicacah menjadi prioritas rekrutmen. Jika tidak ada warga di domisili tersebut yang mendaftar baru, akan direkrut petugas lapang dari wilayah sekitar. Dengan pemahaman geografis, historis, dan budaya ini diharapkan mampu membuat kinerja menjadi efektif dan aman bagi petugas lapangan.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi: Dari Nasional Ke Lokal

Sebagai sebuah proyek nasional, proses bisnis survei memiliki mekanisme yang ketat dan kaku. Berbagai perencanaan strategis dan operasional sudah disiapkan secara matang oleh para teknokrat, ahli statistik, dan pengambil kebijakan. Proses *top down* ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Maksud dan tujuan dari pusat perlu diterjemahkan secara baik oleh pelaksana di level kabupaten hingga desa.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 ini secara sederhana bisa dimaknai sebagai proses mencatat tentang pola dan tata kehidupan sosial ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Karena merupakan proses mencatat ulang (meregistrasi), kegiatan ini sama halnya seperti pelaksanaan sensus penduduk yang sudah dilaksanakan sebelumnya (terakhir pada 2020). Karena dengan sensus penduduk, banyak pihak yang mempertanyakan kenapa ada Regsosek, kalau sebelumnya sudah ada sensus penduduk, yang jaraknya belum terlalu lama?

Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien (Gambar 9.7). Data Regsosek juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Regsosek penting untuk segera

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.7 Pencacahan PPL dengan Kepala BPS Aceh Besar kepada Bupati Aceh Besar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dilakukan karena masih terbatasnya cakupan data sosial ekonomi penduduk yang ada, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh program dan layanan kepada masyarakat (BPS, 2022).

Program Regsosek ini digagas Kementerian PPN/Bappenas. Salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan data dasar tentang kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia yang sangat penting dalam upaya melakukan reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Jadi, tidak heran jika pertanyaan yang dilontarkan dalam blanko pencacahan di Regsosek ini banyak berkaitan dengan kondisi (dan status) sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat.

Dalam skema perlindungan sosial di Indonesia, bantuan sosial adalah satu alat negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya warga negara yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut situs BPS, data Regsosek ini setidaknya mencakup data: 1) kondisi sosio-ekonomi demografis, 2) kepemilikan aset, 3) kondisi sanitasi air bersih, 4) kondisi perumahan, 5) kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, 6) informasi geospasial, 7) tingkat kesejahteraan, dan 8) informasi sosial ekonomi lainnya (BPS, 2022).

Ada beberapa pihak juga mempertanyakan jika program ini (Regsosek) itu dari Kementerian PPN/Bappenas, mengapa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengapa tidak langsung saja Bappenas yang melaksanakan? Iya, BPS sebagai salah satu lembaga negara dengan tugas utamanya adalah dalam bidang penyediaan data statistik nasional. Di samping itu, BPS memiliki jaringan langsung terkait pendataan sampai ke masyarakat bawah (desa/kelurahan) dengan sebutan sebagai Mitra Statistik. Jadi, BPS ini merupakan salah satu lembaga/badan pemerintah vertikal yang memiliki jalur perintah (komando vertikal) sampai tingkat kabupaten/kota, bahkan hingga ke kecamatan-kecamatan. Di tingkat kecamatan, BPS memiliki SDM representasi yang biasa disebut dengan Koordinator Statistik Kecamatan (Koseka, dahulu diistilahkan dengan Mantri Statistik).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Nilai positif dari pelaksanaan Regsosek adalah sebagai upaya untuk memastikan epistemologi dan aksiologi data untuk kesejahteraan masyarakat. Secara epistemologis, instrumen, konsep, dan variabel yang digunakan untuk menghasilkan data sudah dirumuskan secara matang. Kolaborasi antara petugas organik dan non organik BPS sebagai motor dan pelaksana Regsosek berjalan cukup apik. Petugas PPL dan PML yang merupakan warga lokal menjadi nilai positif dalam mendata. Warga lokal dianggap memiliki pengetahuan dan cara yang tepat dalam mendapatkan data di lapangan. Pada kawasan pedesaan dan lokasi tertentu membutuhkan sebuah pendekatan khusus yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. PPL lokal memiliki pengetahuan kapan, dimana, dan suasana yang tepat dalam mendata. Di kawasan Aceh dengan karakteristik pedesaan, waktu yang tepat untuk melakukan pendataan adalah di waktu sore dan malam hari. Pada pagi dan siang hari, sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan masih berladang dan pergi kesawah. Pada lokasi pesisir di wilayah Aceh juga memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Secara umum masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir memiliki suara dan sikap yang lebih tegas dibandingkan masyarakat pegunungan. Pada kawasan tertentu, terdapat kawasan yang bahaya untuk didatangi oleh warga asing. Strategi yang dilakukan adalah dengan menugaskan seseorang warga lokal yang memahami lokasi dan kebiasaan warga di lokasi tersebut.

Berbagai tantangan dihadapi dalam mendata. secara umum ada dua tantangan utama, yakni tantangan teknis dan kultural. Secara teknis banyak keluhan dari PPL dan PML mengenai variabel tambahan di tengah pendataan dan pencacahan data. Penggunaan *geotagging* juga memiliki kendala di kawasan-kawasan yang tidak memiliki akses sinyal yang bagus. Secara kultural, petugas PPL harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Regsosek ini. Secara umum masyarakat memiliki pandangan bahwa pada saat pendataan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dilakukan, maka akan segera turun bantuan dari pusat. Tantangan lainnya adalah mengenai luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kawasan Aceh Bbesar yang membentang dari Pegunungan Seulawah sampai dengan kepulauan Breueh di perbatasan laut lepas Samudra Hindia. Bentang tanah yang luas memiliki berbagai tantangan yang sangat luar biasa.

E. Makna dan Harapan dalam Mendata

Regsosek kali ini memiliki jutaan makna dan harapan bagi seluruh insan masyarakat Indonesia, entah itu dari kalangan elit atau dari kalangan rakyat biasa. Sebuah momentum untuk saling kolaborasi dan kerja sama membangun bangsa. Pemaknaan terhadap proses pendataan sensus penduduk atau Regsosek tahun 2022 disikapi beragam oleh berbagai kalangan.

Secara politis, banyak yang menduga dan mencurigai ini berkaitan dengan kepentingan politis praktis tertentu. Bagi masyarakat awam dan masyarakat kelas bawah, proses pendataan mengisyaratkan akan segera datang bantuan dari pemerintah. Beberapa diantaranya, bahkan mendatangi kantor BPS karena setelah disensus, bantuan tak kunjung datang. BPS sebagai eksekutor lapangan tentu memiliki berbagai tantangan dan hambatan, tetapi pengalamannya selama lebih dari 5 dekade dalam menyensus tentu akan memberi pengalaman dan strategi yang jitu.

Sesuai dengan tema sensus BPS tahun ini, "Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi: Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat." Oleh karena itu, isu yang paling penting untuk ditangkap adalah isu mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat kelas bawah atau yang biasa dikatakan sebagai masyarakat miskin menjadi salah satu target utama pendataan dalam sensus Regsosek kali ini. Data dari BPS Aceh Besar (2021) pada triwulan pertama, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 60.260 orang (14,05%), bertambah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sekitar 560 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 yang jumlahnya 59.700 orang (13,84%).

Angka kemiskinan ini menarik untuk ditelisik lebih jauh sebagai upaya pemanfaatan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Isu mengenai kemiskinan menjadi pembahasan yang paling krusial, sensitif, tetapi selalu aktual untuk dibahas di warung kopi sampai dengan meja parlemen. Petugas lapangan pun sangat memahami mengenai isu ini dan sangat berhati hati dalam mencacah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada proses pendataan di lapangan PPL cukup berhati-hati untuk menanyakan hal-hal yang terkadang dianggap sensitif bagi masyarakat. Secara umum dari pengamatan dan wawancara di lapangan, proses sensus penduduk masih diartikan sebagai pintu masuk bantuan kepada masyarakat. Paradigma ini yang terus berkembang dan diproduksi dalam alam bawah sadar masyarakat.

Secara kultural, masyarakat yang kami kunjungi rata-rata memiliki etos kerja yang tinggi. Pada masyarakat nelayan, mereka bahkan berhari-hari sanggup bekerja di lautan lepas. Hal yang menarik mengenai etos kerja kultural, di dalam kapal nelayan dengan kapal yang relatif kecil sudah tersedia listrik. Nelayan ini membawa beras, *magic jar*, telur , air, dan persediaan lainya. Konon ada yang sampai satu mingguan di tengah laut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita memiliki etos kerja dan harapan tinggi untuk menghidupi keluarga. Hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan dimaknai sebagai sebuah perjuangan, terutama untuk keluarga. Secara kultural dan mikro, terutama pada seseorang yang sudah berkeluarga, maka dia harus bertanggung jawab dengan keluarga dan memberikan rezeki yang halal. Di lapangan, sebenarnya lebih dibutuhkan mengenai sarana dan fasilitas mendasar. Kebutuhan pangan, sumber daya listrik, infrastruktur transportasi, kesehatan, telekomunikasi, dan sekolah perlu mendapatkan perhatian terutama pada masyarakat yang hidup di kepulauan atau wilayah terluar Indonesia. Harapan masyarakat tidak jauh pada kebutuhan dasar ini. Pada konteks sensus, peneliti

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berharap akan terbit berbagai kebijakan strategis untuk masyarakat umum dan khususnya pada masyarakat yang tergolong membutuhkan bantuan khusus, sebagaimana tampak dalam Gambar 9.8.

Bagi *stakeholder* makro, data dimaknai sebagai penunjuk jalan dan arah kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang. Perlindungan sosial menjadi isu prioritas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat penting antara Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data ini kelak akan dirumuskan program dan kebijakan serta layanan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bergabungnya enam kementerian/lembaga dalam satu konteks sensus, merupakan sebuah makna yang perlu disikapi secara optimisme. Pada beberapa era sebelumnya, data antar kementerian/ lembaga sering kali berbeda sehingga terdapat tumpang tindih dalam merancang dan melaksanakan sebuah program. Pemaknaan terhadap

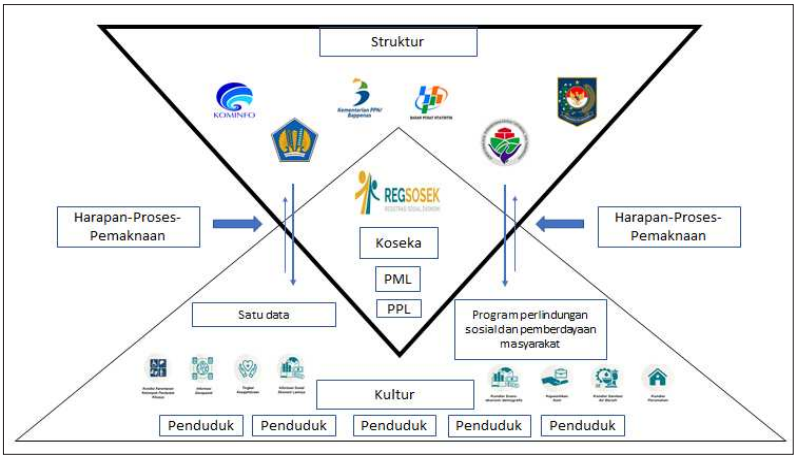

Gambar 9.8 Regsosek: Antara Pemaknaan dan Harapan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tujuan dan data tunggal memberi jalan efisiensi dan tepat sasaran bagi masyarakat, semoga. Data tunggal dan padu sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Struktur negara (pemerintah) melalui perpanjangan tangan kementerian/lembaga memiliki kuasa untuk membuat berbagai program kepada masyarakat. Pada sisi yang lain program (struktur) ini berhadapan (*vis a vis*) kultur masyarakat (penduduk). Hal ini yang sering kali tidak ada titik temu (belum) antara harapan pemerintah dengan keinginan penduduk. Melalui serangkaian kerja sama antar-*stakeholder* pemerintah ini, penulis optimis bahwasanya satu data tunggal ini nanti benar-benar memberikan harapan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari serangkaian pelaksanaan sensus ini.

Masyarakat memiliki pemaknaan yang beragam mengenai proses pendataan di lapangan. Sebagian masih beranggapan bahwa ini merupakan proses administrasi negara yang penting untuk dilakukan. Sebagian lagi memaknai dengan sikap apatis, dari hasil wawancara dengan PPL beberapa warga ogah-ogahan dan beberapa ada yang menghindar ketika didata. Beberapa masyarakat sudah menduga dan mencium ada kepentingan politis karena sudah mendekati pemilu. Sebagian masyarakat memaknai pendataan ini sebagai jalan masuk bantuan, beberapa diantaranya mengakui dan menganggap dirinya miskin agar segera mendapat limpahan bantuan langsung. Mungkin hanya sedikit dari beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan semacam ini mampu membangun dan menyejahterakan mereka. Kami peneliti belum mampu mempresentasikan dan menabulasikan jumlah-jumlah persepsi masyarakat mengenai sensus Regsosek kali ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan lainya.

Satu data tapi beragam makna. Mungkin itu ungkapan yang cukup relevan untuk menggambarkan sensus Regosesek tahun 2022. Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, tentu menjadi tantangan sendiri terutama bagi tim pelaksana di lapangan. Bagi petugas PPL, hajatan sensus selalu di nanti nanti kedatangannya karena dari hasil pekerjaan ini mereka mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup besar. Dari sejauh pengetahuan peneliti, PPL memiliki kedisiplinan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang tinggi dan juga semangat kerja yang militan. Sebuah *track record* baik yang coba diukir oleh PPL ini diharapkan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya akan dipanggil lagi dalam hajatan akbar sensus penduduk nasional.

F. Dukungan Kelembagaan Lokal

Keberhasilan pelaksanaan Regsosek tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya para pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat sampai ke hilirnya. Untuk tingkat pusat, tentunya koordinasi intensif diantara pemangku di tingkat pusat, antarkementerian/lembaga negara dan inter-kementerian/lembaga negara, sudah pasti. Berlanjut ke tingkat provinsi, bersama gubernur sebagai kepala daerah provinsi beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait (dinas dan badan di daerah). Di tingkat kabupaten/kota, adalah dengan Kepala Daerah Bupati atau Walikota, beserta jajarannya, yaitu dinas dan badan terkait.

Di Kabupaten Aceh Besar pun demikian adanya. Dukungan dari pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten, kcamatan, sampai tingkat *gampong* (Desa) pun terlihat sumbangsihnya. Mulai

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.9 Pencacahan PPL kepada Warga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari pemerintah daerah (penjabat bupati), sampai ke tokoh-tokoh masyarakat dalam satuan lingkungan setempat (SLS), bisa kepala desa (*Keucik*) hingga ketua RT. Di beberapa wilayah (*gampong*) yang dikunjungi, terkadang kami berpapasan dan bercengkrama dengan para Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (Polri). Mereka berdua ini yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat di desa (*gampong*).

Kebetulan, tim berkesempatan bertemu dengan Penjabat Bupati Aceh Besar, Bapak Muhammad Iswanto. Waktu itu, kami bertemu dengan Bapak Muhammad Iswanto ditemani Kepala BPS Kabupaten Aceh Besar (Bapak Irnanto). Di sini kami melihat sekaligus menyaksikan secara langsung bagaimana proses pencacahan Regsosek kepada tokoh masyarakat, orang nomor satu di Kabupaten Aceh Besar. Proses wawancara tidak berlangsung lama, sekitar 30 menit. Kemudian, Penjabat bBupati menyampaikan ucapan terima kasih dan juga dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan Regsosek ini, artinya bahwa pemerintah daerah setempat yaitu dalam hal ini adalah perintah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung kegiatan Regsosek. Bahkan dalam sambutannya, Penjabat Bupati juga menyampaikan bahwa beliau sudah memberikan arahan kepada segenap unsur di Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung Regsosek ini.

Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 122.497 KK, yang tersebar di 13 kecamatan, dengan tenggat waktu pencacahan selama satu bulan (harus tuntas dalam tempo 30 hari), merupakan sebuah amanah yang tidak mudah. Kenyataan ini sebuah kerja dan usaha besar dan berat (Gambar 9.9). Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak, sangatlah diperlukan. Untuk menjawab amanah ini, BPS Kabupaten Aceh Besar mengerahkan tidak kurang 29 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), 144 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan 539 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang setiap hari tertungkus lumus, dan berjibaku mengumpulkan data dari pagi hingga malam hari.

Kebetulan kami juga berkesempatan mengunjungi salah satu dusun, di wilayah pegunungan, Seulanga nama dusunnya, dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

jumlah kepala keluarga sebanyak 28 KK. Dusun Seulanga berjarak satu sampai dua jam perjalanan dari ibu kota kabupaten, Jantho. Dari kota kabupaten menuju Dusun Seulanga dapat ditempuh dengan jalan darat menggunakan kendaraan roda empat, walau harus melewati hutan, sungai, dan juga kebun penduduk. Dusun Seulanga ini merupakan bagian dari wilayah *Gampong*/Desa Pancakubu, bersama dua dusun lainnya, yaitu Dusun Matahari dan Dusun Keupula. Dusun Matahari dihuni oleh kurang lebih 26 KK, sedangkan Dusun Keupula dihuni oleh enam kepala keluarga. Di Dusun Seulanga kami berkesempatan melihat dari dekat pencacahan yang dilakukan oleh PPL setempat. Dukungan pemangku kepentingan pada tingkat paling bawah pun kami rasakan di sini, yaitu dukungan dari tokoh masyarakat setempat. Kami diterima oleh salah satu tokoh masyarakat dan dipersilakan menunggu sementara PPL melakukan wawancara pencacahan.

Tim peneliti berkesempatan berbincang ringan dengan Pak Hendrik, yang kebetulan adalah paman dari PPL di Dusun Seulanga ini, saudari Kiki (Kiki Andriyani). Pak Hendrik pun mengutarakan jika pihak *gampong* melalui *keucik* (kepala desanya), Ibu Mayasari, sangat mendukung Regsosek ini. Bahkan, dukungan juga datang dari Babinsa dan Babinkamtibmas di Desa Panca. Keucik, Babinsa, Babinkamtibmas, kepala dusun, ketua-ketua RT pun serempak mendukung Regsosek ini dengan saling mengingatkan kepada para warganya bahwa akan datang petugas untuk pencacahan, mohon diterima dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kunjungan perjalanan kami ke Dusun Seulanga, Desa Panca, Kecamatan Lembah Seulawah ini kami mulai dari Kantor BPS Kab Aceh Besar di Jantho. Kami diantar oleh Bang Bahagia (Baha), adalah Mitra Statistik BPS Aceh Besar, juga Kak Mairona, Koseka Kecamatan Lembah Seulawah, dan Kak Rahmatun, PML Lembah Seulawah.

Dukungan kelembagaan terhadap Regsosek di Wilayah Aceh juga dijumpai pada saat kami berkunjung ke Pulau Weh, pulau di ujung paling barat Republik ini, tepatnya di Sabang. Hasil diskusi dan perbincangan bersama para Koseka di Sabang dan beberapa PML dan PPL yang lain menyatakan bahwa bahwa Babinsa dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Babinkamtibmas ini perannya sangat besar dalam kelancaran Regsosek di wilayah Sabang. Khususnya di Kota Sabang, terkadang dijumpai warga yang sepertinya tidak berkenan untuk didatangi dan dilakukan wawancara pencacahan. Walaupun sebelum kunjungan pencacahan dilakukan, pihak PPL dan Koseka setempat telah menyampaikan rencana kunjungannya, hari kapan jam berapa. Namun, pada saat kunjungan, warga (sengaja) tidak ada di rumah.

Setelah diadakan kunjungan ulang berkali-kali, akhirnya mereka mencoba menggandeng Babinsa atau Babinkamtibmas untuk bersama-sama mendatangi rumah warga yang beberapa kali kunjungan selalu tidak dapat ditemui. Dengan kunjungan bersama Babinkabtimas, akhirnya tim pencacah bisa bertemu dan melakukan wawancara pencacahan dengan yang bersangkutan. Beberapa kasus semacam ini misalnya dapat ditemukan di wilayah Sabang Kota, demikian ungkap Bang Adil, Koseka Kota Sabang.

Selama eksplorasi singkat di Pulau Weh, tepatnya di Kota Sabang, untuk melihat dari dekat proses Regsosek kawan tim Kota Sabang, kami difasilitasi oleh Pihak Badan Pengusaha Kota Sabang (BPKS). Sebelumnya, salah satu Deputi BPKS, Bapak Zamzam[1], memang menjanjikan jika tim peneliti akan berkunjung dan melihat proses Regsosek di Kota Sabang. Beliau (Pak Zamzam) membantu semampunya, misalnya untuk urusan akomodasi dan transportasi. Akhirnya, selama melihat proses Regsosek di Kota Sabang kami diantar oleh salah seorang karyawan BPKS, yaitu Bang Randa (Randa Pratama). Dukungan selama kami di Pulau Weh ini juga menunjukkan bahwa secara kelembagaan, institusi yang ada di Kota Sabang juga turut serta mensukseskan kegiatan Regsosek di Kota Sabang.

1 Perkenalan kami dengan Bapak Zamzam terjadi saat Tim berkunjung ke Pulau Aceh (Pulau Beureuh). Dimana pada saat itu kami menginap dua malam di penginapan milik BPKS. Perkenalan dan perbincangan seputar Regsosek bersama Pak Zamzam pada dua malam selama di penginapan juga menjadikan ketertarikan tersendiri bagi Pak Zamzam tentang seputar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bahkan, dengan lebih bersemangat, Pak Zamzam sangat berkeinginan untuk menjalin kerja sama dengan BRIN untuk mengembangkan Wilayah Kota Sabang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

G. *Life Story* Pendata: Suatu Pembelajaran Baik

Gelombang tsunami meluluhlantakkan Pulau Breueh pada tahun 2004. Gelombang ini berasal dari barat arah pulau, dari Ssamudra Hindia. Konon katanya sekitar 70% penduduk Pulau Breuh dinyatakan hilang dan meninggal dunia akibat peristiwa alam ini. Diperkirakan hanya sekitar 30% jumlah penduduk yang bertahan hidup. Pak R (inisial) kira-kira berusia 80-an tahun merupakan bagian dari yang terselamatkan dari sapuan gelombang tsunami. Selama di Pulau Breueh kami berjumpa dalam dua kali kesempatan yang tidak disengaja. Pertama tim peneliti berjumpa pada saat saya mengikuti tim PPL menyisir rumah warga untuk melakukan pencacahan. Pada saat melakukan pencacahan di Pulau Breueh tak kurang dari lima rumah dikunjungi.

Terdapat hal yang menarik dalam kunjungan kali ini. Sebagian besar penduduk yang ditemui untuk melakukan pencacahan lebih banyak warga yang berusia lanjut. Mungkin banyak penduduk yang berusia muda sedang pergi berlayar atau bekerja. Hal ini belum terlalu banyak didalami karena keterbatasan waktu. Perjumpaan yang kedua adalah pada saat kami jalan-jalan pagi dan *ngopi* di sebuah warung kopi di bibir Pantai Lempuyang. Beliau mengutarakan bahwa pulau ini luluh lantak disapu air bah kala itu. Warga terpaksa hanya mengandalkan beberapa sumber daya yang ada untuk bertahan, seperti ubi dan singkong yang dibakar. Bantuan pun juga baru tiba setelah waktu satu minggu pasca terjadinya tsunami.

Pak R sebagai penyintas tsunami dan juga merupakan salah satu tokoh yang dituakan di Pulau Breueh seolah mewakafkan hidupnya untuk masyarakat Breueh. Dari hasil diskusi singkat, beliau bersedia memberikan waktu tenaga dan pikirannya untuk masyarakat Pulau Breueh. Beliau juga menceritakan bahwa dua tahun pasca kejadian gelombang tsunami, kapalnya digratiskan untuk melayani rute Pulau Breueh ke Banda Aceh dan tanpa memungut bayaran dari masyarakat. Hal ini dilakukan karena pada waktu tersebut masyarakat memiliki keterbatasan yang sulit dalam bidang ekonomi. Kondisi pendapatan juga belum stabil pasca terjadinya gelombang tsunami yang dahsyat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

itu. Pak R merupakan sosok warga yang kami kunjungi pada saat Regsosek dan menjadi salah satu cerminan masyarakat Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan asas gotong royong (Gambar 9.10).

Pak R masih memiliki harapan bahwa beberapa potensi lokal di Pulau Breuh dapat dimaksimalkan. Potensi pohon dan buah kelapa yang sangat banyak tumbuh di pulau ini mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pak R menuturkan bahwa pada era dahulu hampir seluruh pulau ini ditumbuhi oleh pohon kelapa karena surplus buah kelapa dijual sampai ke Banda Aceh. Hal yang menjadi ironis pada saat ini justru warga di Kecamatan Aceh Pulo yang membeli kelapa dan minyak kelapa dari daratan Sumatra. Potensi-potensi lokal yang sederhana seperti ini yang seharusnya mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Keluarga yang menarik untuk diliput salah satunya berada di pinggir Pantai Sanay. Setelah menunggu kira-kira satu jam di depan rumahnya, kita satu tim belum juga mendapatkan penduduk tersebut. Padahal, waktu juga sudah menjelang magrib, waktu yang biasa untuk para petani pulang ke rumahnya. Namun, sayang kami belum mendapatkan data langsung dari si empunya. Kami hanya bertemu Pak Kadus yang kebetulan menyusul kita di rumah penduduk tersebut.

Hal yang menarik adalah bahwa rumah ini menjadi satu satunya rumah yang masih berdiri (didirikan) di kawasan Pantai Sanay yang sebelumnya luluh lantak karena hantaman tsunami. Dilihat dari bentuk dan bahan rumah, sangatlah unik. Rumah ini hampir seluruhnya terbuat dari bambu dan kayu dengan bentuk rumah panggung, kira kira seluas 3×5 meter. Sumur pun juga sederhana dengan mengandalkan timba manual yang dikelilingi dinding bambu setinggi sekitar 2 meter. Rumah ini dikelilingi tambak udang dan hanya kira-kira 100 meter dari bibir pantai. Sebuah lokasi yang sebenarnya sudah dihimbau untuk dihindari sebagai sebuah pemukiman penduduk. Jalan untuk menuju ke rumah ini juga jalan tanah dan tidak beraspal, tetapi bisa dijangkau dengan mobil kendaraan roda empat.

Kisah menarik dari penduduk yang dicacah dari Lembah Seulawah adalah bahwa warga di sini sebagian besar merupakan trans

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.10 Salah Satu Korban Tsunami Aceh Tahun 2004

dari Jawa. Jarak antar rumah di kawasan Dukuh Panca Kubu ini cukup jauh, rata-rata jaraknya di atas 100 meter. Warga di sini juga memiliki kebun yang cukup luas, rata rata warga memiliki tanaman buah-buahan seperti durian dan rambutan. Warga yang kami cacah juga rata-rata memiliki peliharaan hewan ternak seperti ayam, bebek, dan kambing. Dalam perjalanan menuju *Gampong* Panca Kubu ini, sering kali dijumpai sapi-sapi di pinggir jalan. Sapi tersebut dibebaskan untuk mencari makanan sendiri. Di beberapa titik bisa dijumpai kandang sapi yang berada tepat di pinggir jalan, pada sore hari secara tertib mereka kembali bersama-sama ke kandang. Sebelum menanyakan jumlah kepala keluarga kepada PPL, kami sudah menduga bahwa jumlah KK di sini sangatlah sedikit. Pada saat melakukan jumatan di masjid, jemaah masjid bagi pria desa tak lebih dari satu saf, dan kurang dari 40 jemaah. Dari dua rumah penduduk yang didatangi, kedua rumah itu memiliki anak kecil di bawah lima tahun. Keluarga di kawasan *gampong* itu sangat kooperatif, dalam beberapa kali kesempatan saya meminta izin untuk memfoto kondisi rumah yang sederhana, tetapi tuan rumah sama sekali tidak keberatan.

Kisah heroik dapat disimak dari tiga perempuan yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Malingge. Saya berjumpa dengan 4

Buku ini tidak diperjualbelikan.

guru sekolah dasar pada saat menyebrangi kapal. Kebetulan kami duduk di belakang kapal dan cukup lama mengobrol mengenai Pulo Aceh. Tanpa membutuhkan waktu panjang, saya terdeteksi sebagai orang asing dan bukan warga asli. Mungkin dari gaya bahasa dan mimik saya yang tidak terbiasa menyebrangi lautan. Beberapa diantara guru sekolah dasar ini sudah didata oleh Regsosek, sisanya belum. Perjuangan yang cukup berat dilalui oleh satu rombongan guru ini. Berdasarkan penuturan beliau, disampaikan bahwa mereka berempat sedang melakukan tes urine untuk memperpanjang masa sebagai guru kontrak. Setiap kali perpanjangan kontrak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Terkadang syarat tersebut tidaklah mudah untuk dipenuhi mengingat sarana dan prasarana yang ada di Pulo Aceh sangatlah terbatas.

Sinyal untuk komunikasi saja tidak ada, berbagai akses informasi yang dibutuhkan pun tentu akan sulit didapatkan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah karena mereka harus ke Banda Aceh dan harus menginap. Kapal dari Pulo Aceh ke Banda Aceh hanya satu kali pemberangkatan, artinya seseorang tidak bisa pulang pergi dari Pulo ke Banda Aceh. Pada saat dimintai nomor ponsel untuk saya kunjungi ke kediamannya, beliau mengeluarkan nomor yang ada pada kartu perdana. Beliau mengatakan, di sana tidak ada sinyal percuma meminta nomor ponsel. Seketika saya terdiam mendengar beberapa cerita dari seorang guru kontrak di kepulauan.

H. Kisah Lain: Keluarga Subjek Data

Pada bagian ini, kami ingin menyampaikan kisah lain masih seputar kegiatan Regsosek di wilayah Aceh. Kisah ini didapatkan dari Pak Tasdik (Tasdik Ilahmudin), BPS Provinsi Aceh, yang kebetulan sudah melakukan beberapa kunjungan di kabupaten/wilayah lain di luar Kabupaten Aceh Besar dan Pulau Weh, Kota Sabang (Gambar 9.11). Menarik untuk disampaikan, agar rangkaian narasi emik pelaksanaan Regsosek di wilayah (Provinsi) Aceh ini dapat terwakilkan. Salah satu contoh kisahnya adalah perjalanan Regsosek di Cok Langit,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

merupakan bagian wilayah dari Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus-salam .

Wilayah ini ditinggali para pendatang yang mayoritas berasal dari Nias, dengan jumlah kurang lebih 14 keluarga. Perjalanan menuju pemukiman Cok Langit dapat ditempuh kurang lebih 1 jam dari pusat desa. Posisi wilayah yang berada di puncak pegunungan mengharuskan petugas menggunakan motor trail atau mobil *offroad* jika ingin menuju wilayah ini. Namun, karena saat itu musimnya sering turun hujan, menuju wilayah Cok Langit membutuhkan usaha lebih, terlebih harus mendaki jalanan yang berlumpur dan licin.

Ketika Petugas Regsosek melakukan pendataan ke tempat ini, wilayah Cok Langit, ada beberapa hal yang ditemukan. Pertama, warga yang tinggal di sini, kehidupannya sangat sederhana, hanya menggunakan listrik dari tenaga tata surya. Namun demikian, di tempat ini tetap memiliki akses jaringan internet dengan menggunakan android, walaupun hanya sebagian wilayah saja. Kedua, penduduk di Cok Langit ini tidak banyak aset primer yang dimiliki, tetapi kebanyakan mereka memiliki pekerjaan, yaitu di bidang perkebunan dan hortikultura, seperti kelapa sawit, jengkol, karet, dan tanam cabai. Masyarakat di Cok Langit ini, sebagian memiliki kebun sendiri, atau

Sumber: Google Maps

Gambar 9.11 Peta Aceh Besar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Eko (2022)

Gambar 9.12 Wajah-wajah Penuh Harapan Anak-anak Cok Langit Aceh

menjadi buruh di ladang orang lain. Ketiga, anak-anak yang tinggal di Cok Langit ini sebagian besar tidak bersekolah (Gambar 9.12). Mereka lebih banyak bekerja di ladang, untuk membantu orang tua atau bekerja untuk mendapatkan nafkah (sebagai buruh ladang). Keempat, masyarakat di Cok Langit, tidak banyak yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Dalam kaitan Regsosek ini, petugas meminta bantuan kepada salah seorang warga sebagai penerjemah saat melakukan wawancara pencacahan. Kelima, di Cok Langit tidak tersedia pasar atau tempat untuk melakukan jual beli ataupun tukar tambah komoditas maupun barang-barang kebutuhan lain. Jika ingin melakukan kegiatan jual beli, harus keluar dari pemukiman Cok Langit.

Satu hal perlu juga menjadi catatan bahwa pada saat Regsosek ini berlangsung, wilayah di Aceh Tengah mengalami musim hujan yang relatif besar, bahkan beberapa daerah terjadi bencana banjir, seperti di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan beberapa wilayah Aceh lainnya. Kondisi cuaca dan bentang alam Aceh (khususnya wilayah pegunungan) sudah bisa menggambarkan bagaimana usaha yang harus dicurahkan dalam memperoleh data untuk keperluan Regsosek ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. Mengikat Individu dalam Tugas Negara

BPS sebagai lembaga penanggung jawab Regsosek secara strategis dan teknis memiliki beban tugas yang tidak mudah. Sebagai tugas yang krusial, kegiatan survei membutuhkan energi dan tenaga yang besar. Pada konteks hulu, kebijakan strategis, instrumen survei, SDM, anggaran, dan sinergi antar-*stakeholder* sudah disiapkan secara optimal. Berbagai tarikan kepentingan politis dan ego sektoral kementerian/lembaga negara terjadi pada proses perencanaan Regsosek. Tarik ulur kepentingan ini memiliki dampak mundur dan mepetnya persiapan teknis di lapangan. Proses hulu yang belum sepenuhnya optimal, memiliki dampak pada pelaksanaan di hilir. Petugas teknis di lapangan harus melaksanakan kegiatan pencacahan pada waktu yang relatif mepet, cukup berbeda dengan pola sensus sebelumnya yang memiliki perencanaan dan sosialisasi yang matang. Koseka, PML, dan PML menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas. Pelimpahan tugas dari pusat harus dilaksanakan sebaik mungkin. Perpanjangan negara pada level kecamatan dan desa ini diikat oleh tugas negara yang tidak mudah.

Pada konteks empiris di lapangan, terjalin kerja sama yang padu antara mesin organik dan non organik BPS. Mesin organik BPS merupakan pegawai internal BPS yang memiliki tugas mengkoordinir dan melaksanakan Regsosek, sedangkan petugas non organik adalah petugas eksternal BPS yang berasal dari unsur masyarakat. Petugas non organik pada umumnya bukan orang baru di lingkungan BPS. Rata-rata petugas non organik memiliki kerja sama dengan durasi lebih dari 10 tahun. Pengorganisasian kerja secara cepat dan tepat menjadi ciri khas ala BPS. Tempo sosialisasi yang cepat serta pelaksanaan pencacahan dengan durasi waktu 30 hari menjadi tantangan tersendiri. Waktu pencacahan juga dilakukan pada musim hujan, hal ini sedikit banyak memiliki tantangan tersendiri. PML dan PPL sebagai ujung tombak merupakan mesin penggerak yang paling krusial. Sebagai eksekutor lapangan, PML dan PPL dituntut untuk mencacah tidak hanya cepat tetapi juga harus jeli. Tuntutan dan ikatan tugas negara ini memberikan berbagai pengalaman manis sekaligus pahit. Berbagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pengalaman dalam mengolah data, finansial dan jaminan kerja menjadi pengalaman manis bagi petugas PPL dan PML. Pada sisi lain, mendapat penolakan dari masyarakat sampai sakit tifus menjadi pengalaman pahit bagi petugas di lapangan. Tugas yang mengikat ini menghasilkan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Secara umum target BPS mencapai 80-an persen dari 100 persen pencapaian data meskipun ada berbagai ketimpangan nasional antarprovinsi dan antarkabupaten karena persoalan geografis, infrastruktur, dan akses teknologi. Pelaksanaan Regsosek pada tahun 2022 menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi *stakeholder*. Ini adalah kali pertama berbagai kementerian dan lembaga negara berkolaborasi dalam merumuskan konsep, variabel, dan indikator untuk sebuah survei nasional. Meskipun ada berbagai kekurangan dan kelemahan di berbagai sektor, hal ini bukan sinyal untuk menghentikan upaya untuk menghasilkan data bersama. Berbagai monitoring dan evaluasi perlu dilakukan sebagai sebuah tugas bersama yang bukan hanya mengikat individu dan masyarakat, tetapi juga mengikat stakeholder untuk melakukan kolaborasi bersama untuk mencapai kesejahteraan negara dan bangsa.

J. Penutup

Pelaksanaan Regsosek dilakukan selama satu bulan, sedangkan waktu peneliti di lapangan hanya kurang dari tujuh hari. Artinya, lebih banyak yang peneliti tidak ketahui dibandingkan apa yang sudah diketahui. Meskipun selama di lapangan peneliti berusaha semaksimal mungkin mengambil data dari suara, pandangan dan bahkan dari *hati*. Bak seorang perempuan, begitu juga mengenai riset (etnografi?), yakni bukan apa yang dia katakan, tetapi lebih pada hal yang tak terucap. Untuk memahami bagaimana data di produksi, peneliti dituntut lebih berempati, peka, dan memahami (*verstehen*). Untuk memahami pelaksanaan Regsosek ini, diperlukan sebuah seni, khususnya seni untuk memahami.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perencanaan/kegiatan sejenis ini sering kali hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Masyarakat umum kurang mengetahui data ini untuk apa dan untuk siapa. Hal ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan langkah yang sudah dilewati dan rencana yang akan datang. Tugas kita semua selanjutnya adalah bahwa bagaimana sebuah program kegiatan itu dimiliki semua anak bangsa (*sense of belonging*) oleh petugas lapang dan rakyat (penduduk). Dengan adanya rasa memiliki, akan didapatkan dampak yang lebih produktif, dengan berasaskan keadilan dan kesejahteraan inklusif. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana agar masyarakat merasa memiliki program-program dari pemerintah? Merasa memiliki data dan yang lebih penting adalah memiliki kesejahteraan itu sendiri. Kenyataan ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

Penelitian ini memberikan 2 rekomendasi secara teknis. Pertama, pentingnya sebuah peta *mapping* kawasan sebagai *output* pendataan. Peta visual sangat dibutuhkan untuk mengetahui kawasan mana yang menjadi prioritas pembangunan. Kedua, secara teknis sosialisasi mengenai Regsosek perlu dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang agar masyarakat mengetahui maksud dan waktu pencacahan. Pada konteks desa di Indonesia, sosialisasi dengan melibatkan kepala dusun dan kepala rukun tetangga (RT) menjadi efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

BPS Provinsi Aceh. (2021). *Jumlah penduduk miskin (Ribu jiwa) 2021*. https://aceh.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html

BPS. (2022). *Satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Diakses pada 18 November, 2022, dari https://www.bps.go.id/Regsosek/

Feeney, G., & Feeney, S. (2019). On the logical structure of census and survey questionnaires. *Genus*, *75*(1), 19. doi:10.1186/s41118-019-0065-y

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Google. (t.t). [Lokasi Kabupaten Aceh Besar]. Diakses pada 20 November, 2022, dari https://www.google.com/maps/place/Aceh

Kirkwood, M. K., Hanley, A., Bruinooge, S. S., Garrett-Mayer, E., Levit, L. A., Schenkel, C., Seid, J. E., Polite, B. N., & Schilsky, R. L. (2018). The state of oncology practice in America, 2018: Results of the ASCO practice census survey. *Journal of Oncology Practice*, *14*(7), 412–420. doi.org/10.1200/JOP.18.00149

Buku ini tidak diperjualbelikan.

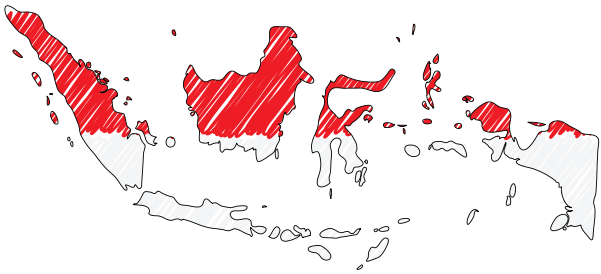

#10

Tanah Bertuah Negeri Beradat: Kabupaten Serdang Bedagai

Ririn Purba & Fedrickson Haradongan

A. Menyatu dalam Data: Sebuah Pengantar

Serdang Bedagai, sebuah wilayah kabupaten yang diambil dari dua wilayah kesultanan yang pernah berkuasa di daerah ini, yakni Kesultanan Serdang dan Padang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah 1.900,22 kilometer persegi, terbagi dalam 17 kecamatan, 237 desa, dan 6 kelurahan (Gambar 10.1). Kabupaten Serdang Bedagai banyak didiami oleh penduduk dari beragam etnis/suku bangsa, agama, dan budaya. Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 657.490 jiwa (150.281 keluarga) dengan kepadatan penduduk rata-rata 346 jiwa per kilometer persegi. Keragaman budaya di wilayah ini terlihat dari keberadaan berbagai suku, antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Jawa, Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Minangkabau, Banjar, Aceh, Nias, dan Tionghoa-Indonesia.

R. Purba,* & F. Haradongan
*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: riri006@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Purba, R., & Haradongan, F. (2023). Tanah bertuah negeri beradat: kabupaten serdang bedagai. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (347–386). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c712 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber: Google Maps

Gambar 10.1 Kabupaten Serdang Bedagai

Kegiatan perdana Regsosek tahun 2022 adalah langkah inisiasi dari pemerintah untuk melihat fluktuasi perubahan tingkat kesejahteraan di masyarakat yang dijabarkan ke dalam satu data riil tentang struktur masyarakat secara nasional. Data riil ini akan dijadikan sebagai data kunci untuk mengintegrasikan seluruh program pemerintah yang bertemakan perlindungan sosial, kesejahteraan, dan pemberdayaan (ekonomi) masyarakat. Metodenya hampir serupa dengan sensus penduduk, hanya subjek pendataan meliputi seluruh kepala keluarga di daerah kabupaten/kota.

Persiapan BPS Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyambut penugasan kegiatan Regsosek 2022 boleh dikatakan cukup solid. Dengan waktu persiapan yang singkat, rangkaian pendataan keluarga per keluarga pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dapat berjalan optimal walaupun terdapat beberapa hambatan karena pengaruh kondisi alam. Strategi awal yang diupayakan oleh Bapak Herman, S.E., M.Si., selaku Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai adalah mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi ke sejumlah instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang, mulai dari Bapak Bupati Deli Serdang yang menyambut baik kegiatan Regsosek ini dengan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk turut berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini di masyarakat, satuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pengamanan daerah (Kodam/Kodim dan Polres setempat), organisasi suku dan budaya, dan seluruh satuan perangkat kecamatan/kelurahan/desa.

Langkah selanjutnya, menyiapkan kekuatan personil petugas lapangan. Basis petugas lapangan adalah Mitra BPS aktif, yaitu satuan personil yang sudah direkrut BPS untuk menunjang setiap kegiatan BPS di suatu wilayah. Pada kegiatan besar tertentu (seperti pendataan Regsosek) biasanya jumlah petugas lapangan yang diperlukan sangat banyak sehingga dilakukan proses rekrutmen untuk menjadi mitra baru untuk petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan dimulai dari tingkat Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), hingga Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Proses rekrutmen petugas lapangan dilakukan oleh BPS Kabupaten Serdang Bedagai secara selektif dan sistematis melalui seleksi khusus. Setelah terseleksi, mitra baru tersebut akan dikontrak dan dibina dari BPS Pusat. Khusus petugas lapangan pada jenjang tingkat Koseka, rekrutmen diprioritaskan bagi internal pegawai BPS, yang disebut dengan istilah Koseka organik.

Pelaksanaan pendataan Regsosek tahun 2022 di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai ditargetkan rampung dalam kurun waktu 1 bulan (15 Oktober s.d 14 November). Target pendataan pada wilayah ini adalah 17 kecamatan dengan jumlah keluarga (status kawin) sekitar 150.281. Untuk menuntaskan misi ini, tak kurang dari 31 Koseka (25 organik, 6 non organik), 217 PML dan 868 PPL disiapkan oleh BPS Kabupaten Serdang Bedagai. Jumlah dan komposisi tersebut menandakan terdapat lebih dari 1.000 petugas lapangan menyebar dari pusat wilayah hingga pelosok Serdang Bedagai untuk mendata setiap keluarga dengan berbagai status. Dalam lorong kecil, observasi kami bersama petugas lapangan, terdapat kisah kehidupan yang memiliki makna khusus baik cerita mendalam dari responden keluarga saat wawancara ataupun kisah hidup beberapa teman petugas lapangan (PPL dan PML). Di lapangan, peran PPL sangat vital bak jangkar kapal yang turun ke dasar laut saat berlabuh, mereka adalah petugas lapangan yang turun hingga ke lokasi sempit dan terpencil.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saat kami berkeliling bersama di lapangan, sering kali bertemu dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung (saat kegiatan berlangsung bertepatan dengan musim hujan) yang bisa membuat genangan air di sekitar wilayah pendataan. Dengan kondisi ini, menjadi kendala karena *delay* pendataan keluarga akan semakin meningkat. Selain karena terjadi tundaan pendataan wawancara keluarga, cuaca hujan juga dapat memengaruhi kinerja petugas PPL dan PML karena kestabilan jaringan internet untuk proses input/unggah datanya ke *server* pusat. Kendala lainnya adalah hasil pendataan yang berbeda pada tingkat desa/kecamatan terkait pendataan warga miskin. Perbedaan data kemungkinan terjadi karena beberapa hal, seperti belum adanya proses *updating* data secara berkala pada tingkat desa/kecamatan terkait keluarga miskin dan belum dilakukan integrasi/penyesuaian data sosial ekonomi antarunit/instansi dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Melalui kegiatan pendataan awal Regsosek ini diharapkan adanya suatu *record* data yang memuat kondisi sosial dan ekonomi warga pada suatu wilayah yang dapat dijadikan data acuan bagi para instansi/*stakeholder* terkait. Pada isu tertentu, misalnya kemiskinan ekstrem, pendataan Regsosek ini dapat dijadikan rujukan basis data keluarga miskin yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat.

B. Bentang Alam Tersulit

Tepat pukul 08.00 pagi, dari kota Medan kami melakukan perjalanan menuju wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Perjalanan darat Medan—Sergai dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam lewat jalan tol. Sepanjang tol perjalanan menuju Sergai, pemandangan dominan yang dijumpai adalah lahan perkebunan kelapa sawit di sisi kiri dan kanan jalan tol. Sekitar 1 jam berlalu, kami tiba di Sergai dan bertemu dengan Pak Iwan beserta Pak Majid selaku Koseka organik pada kegiatan Regsosek ini. Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi sekaligus berdiskusi panjang lebar tentang inti kehadiran yang bermaksud untuk melihat dan menyelami kegiatan pendataan di lapangan. Hasil diskusi mengantarkan kami bertemu kepada beberapa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

petugas PML dan PPL di lapangan, lokasi sekitar wilayah Kecamatan Sei Rampah.

Dengan berbekal penjelasan dan arahan dari Koseka, petugas PML dan PPL secara kooperatif memberikan informasi keluarga yang akan mereka wawancara pada hari itu. Maka, bergeraklah kami semua bersama-sama untuk menuju rumah keluarga yang akan diwawancara. Sebelum menuju lokasi keluarga, Pak Iwan dan rombongannya mengajak kami untuk santap siang sejenak di warung makan khas daerah Sergai. Kondisi hari saat itu agak mendung (beruntung belum hujan), dalam perjalanan kami menuju lokasi keluarga menjadi terhambat karena genangan air (banjir) sekitar 30—40 cm sedang melanda lokasi tersebut (Gambar 10.2). Walaupun banjir ini tidak sampai menyebabkan putusnya konektivitas antar desa, tetapi akses ke lokasi keluarga cukup menyulitkan kami dan para petugas lapangan. Kami bersama petugas lapangan tidak menyerah dan yakin di mana ada kesulitan pasti ada jalan.

Setelah berjalan kaki melewati banjir (sekitar 15 menit), kami tiba di lokasi keluarga yang akan diwawancara dengan petugas PPL. Kami bertemu dengan kakek tua sebagai perwakilan keluarga. Usia

Sumber: Ririn (2022)

Gambar 10.2 Koseka BPS Serdang Bedagai, BRIN, PPL, BPS Pusat, BRIN, Kepala TU Serdang Bedagai, dan PML (Kiri ke Kanan)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kakek ini adalah 70 tahun dan masih bekerja sebagai juru parkir di pasar. Kakek tua yang didata ini banyak berkeluh kesah dan berbagi harapan ke petugas lapangan seputar masalah bantuan sosial saat diwawancarai. Selesai wawancara, kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada kakek tua, sembari menguatkan harapan kakek tua akan adanya program bantuan sosial yang lebih baik.

1. Desa Bengkel: Pusat UMKM Serdang Bedagai

Hari berikutnya, kami pergi mengunjungi lokasi lainnya, yaitu Desa Bengkel. Lokasi desa ini berada di jalan nasional lintas Sumatra, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara. Posisi desa yang berada di jalan lintas menjadikan desa ini tempat persinggahan (*rest area*) para pengendara dan penumpang kendaraan kala itu (Gambar 10.3).

Dahulu, sebelum tahun 2017, sepanjang jalan nasional desa ini ramai dengan kios oleh-oleh jajanan khas masyarakat desa. Jajanan khas yang dijual merupakan produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) milik masyarakat desa setempat. Produk unggulan yang paling khas dan melimpah dari desa ini adalah dodol. Oleh-oleh dodol dari desa ini sudah cukup popular di kalangan pengendara dan penumpang kendaraan yang melintas karena kualitas dan rasanya yang unik (Gambar 10.4). Selain dodol, jajanan favorit khas lainnya yang sering dijadikan buah tangan adalah aneka keripik

Sumber: Google Maps (2022)

Gambar 10.3 Peta Lokasi Desa Bengkel

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.4 Salah Satu UMKM yang Masih Bertahan

(keripik pisang, keripik ubi, keripik sukun, dll.), aneka buah olahan, dan kerupuk.

Namun, kondisi saat ini sudah berbeda jauh. Kios-kios jajanan khas sepanjang jalan nasional di desa bengkel nampak sepi dan lengang sejak beroperasinya jalan tol Medan—Tebing Tinggi (Gambar 10.5). Sebagian besar pengendara mobil dan penumpangnya tidak lagi melewati ruas jalan nasional Desa Bengkel karena lebih memilih rute pada ruas jalan tol yang dapat menghemat waktu perjalanan. Situasi ini mengakibatkan penurunan aktivitas penjualan oleh-oleh yang terjadi pada sebagian warga desa bengkel yang berprofesi sebagai pedagang usaha (UMKM). Oleh-oleh jajanan khas desa ini akhirnya sepinya pembeli. Hal tersebut juga berdampak pada perekonomian sebagian warga desa dan ada peningkatan angka pengangguran karena banyak kios oleh-oleh yang tutup.

Hasil wawancara kami kepada salah satu pemilik kios (Bu Halimah), mengatakan kalau dulu (sebelum adanya tol Medan-Tebing Tinggi) omzet penjualan dodol bisa mencapai 5 juta rupiah per hari, tapi sekarang ini jauh dari itu, paling maksimal hanya 500 ribu rupiah per hari. Ibu dari lima anak ini mengatakan kondisi usahanya cukup berat, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti biaya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.5 Beberapa UMKM di Rruas Jalan Desa Bengkel yang Gulung Tikar

sekolah dan kebutuhan sehari-hari, dia juga harus menggaji dua orang karyawan yang bekerja di kiosnya. Kini, harapan Bu Halimah dan warga desa yang berprofesi sebagai pedagang UMKM adalah bagaimana solusi menghidupkan kembali penjualan produk unggulan dodol desa bengkel agar kembali menjadi oleh-oleh favorit yang diingat kembali dapat diperoleh dari desa ini.

C. Menelisik Awal Kesemestaan Data di Negeri Beradat

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tingkat desa/kelurahan. Kegiatan survei Regsosek akan menjaring sejumlah informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain pekerjaan, kepemilikan aset (rumah dan kendaraan), kondisi informasi keluarga, dan informasi sosial ekonomi lainnya.

Hasil data Regsosek ini akan mengungkap data sosial ekonomi terbaru yang lebih perinci dan nyata karena pendataan yang dilakukan adalah secara menyeluruh (Sabang sampai Merauke) per kepala keluarga dalam kurun waktu satu bulan. Data makro Regsosek (yang disertai foto dan *tagging* lokasi) akan menjadi data acuan seluruh lembaga pemerintah dalam membuat sistem/program perlindungan sosial kepada masyarakat. Posisi program Regsosek saat ini akan memperkuat program-program perlindungan sosial lainnya yang sudah ada sehingga dimungkinkan terjadinya integrasi (penyatuan) menjadi data acuan untuk menghindari dualisme atau lebih versi data.

Program perlindungan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan celah (*gap*) sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Saat ini, meskipun memiliki banyak program perlindungan sosial, tetapi target dan dan segmentasinya kadang kala masih salah sasaran dan kurang tepat. Nah, untuk itu kehadiran program Regsosek kali ini akan menjadi data acuan yang akan diandalkan seluruh lembaga pemerintah dalam membuat semua jenis sistem/program perlindungan sosial kepada masyarakat.

Hasil data Regososek akan memecahkan permasalahan bantuan sosial antara lain akurasi target yang masih sangat rendah, sasaran setiap program yang berbeda-beda, pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima, kelompok demografi lanjut usia dan difabel yang jarang mendapat perhatian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan. Untuk itu dengan hadirnya program Regsosek, nantinya akan terjadi pembaharuan data acuan (yang valid dan terintegrasi) secara lengkap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan berkala tentang keberadaan jumlah penduduk yang tingkat kesejahteraannya buruk.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Ketika kami mendampingi petugas lapangan dalam mendata (wawancara) ke beberapa keluarga, disambut dengan bermacam pikiran/pandangan dari sejumlah tuan rumah. Terdapat dua jenis pikiran/dugaan dari kalangan keluarga. Bagi kalangan keluarga menengah ke bawah, arah pemikiran mereka menganggap bahwa proses pendataan kali ini akan menandakan adanya semacam bantuan sosial yang akan mereka terima. Sinyal akan pemikiran ini semakin menguat ketika kami dan petugas lapangan disambut dengan hangat dan terbuka dalam setiap wawancara pertanyaan. Agak berbeda dengan kalangan menengah ke atas, sorot wajah tuan rumah yang didatangi untuk pendataan, begitu datar dan terkesan ingin cepat berlalu. Artinya, dua perbedaan pikiran ini bisa mengindikasikan tingkat kepentingan dan harapan Regsosek di selang kelas masyarakat.

Sosialisasi pelaksanaan Regsosek di masyarakat sudah dilakukan optimal, baik melalui media massa, elektronik, pesan digital (WA, *text*, *e-mail*), dan papan pengumuman. Namun, tafsir masyarakat akan Regsosek kenyataannya masih berbeda. Kenyataan ini sebetulnya bukan menjadi masalah yang besar karena hal ini tergantung dari pengaruh kepentingan Regsosek terhadap harapan masyarakat dalam pendataan kali ini. Penekanan makna Regsosek dari sisi pemerintah sudah jelas, mendata semua keluarga nusantara yang berfokus pada kondisi sosial ekonomi. Sementara pada kalangan masyarakat, pendekatan pemaknaan Regsosek ini lebih ke arah dugaan pertanyaan apa kepentingannya untuk keluarga, adakah harapan/keuntungan bagi keluarganya. Dari dua dugaan pertanyaan tadi, maka akan terbentuk cara pandang masyarakat dalam memaknai Regsosek ini.

Makna lebih dalam dari sebuah program Regsosek adalah mengenai pertumbuhan dan perubahan sosial masyarakat. Pertumbuhan diartikan sebagai peningkatan kemampuan setiap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

keluarga (masyarakat dibawah rata-rata) untuk berkembang minimal menjadi standar, tidak hanya sekadar mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup (pokok) semata. Perubahan mengandung makna bahwa suatu keluarga harus bersikap adaptif dan antisipatif dalam menghadapi tuntutan kondisi dan situasi yang berbeda, dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksi atau tidak. Artinya, pada kondisi darurat, suatu keluarga seyogianya memiliki kemampuan manajemen bertahan hidup yang layak.

Bagaimana makna Regsosek ini dapat bernilai dan menjadi perhatian (harapan) bagi setiap kalangan masyarakat (keluarga). Mengacu pada sistem pemerintahan (demokrasi) di negara ini, berarti mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, program/pengembangan pembangunan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Dengan kata lain, setiap perencanaan program pemerintah (termasuk Regsosek) dapat melibatkan partisipasi/keikutsertaan masyarakat. Ada tiga hal keuntungannya, yaitu 1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, 2) masyarakat akan lebih mudah memercayai kegiatan atau program pendataan jika mereka terlibat secara langsung, mulai dari proses persiapan dan perencanaan karena masyarakat akan lebih mengetahui mengapa didata sehingga akan lahir rasa memiliki terhadap program pendataan yang akan dilaksanakan, dan 3) masyarakat dapat aktif memantau dan saling berbagi informasi program pendataan dengan masyarakat lainnya di lingkungan setempat.

Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam Regsosek tentu dibutuhkan dan betul sudah dilakukan. Bentuk implementasinya adalah adanya proses rekrutmen tenaga petugas lapangan (PPL, PML, dan Koseka). Namun, bagaimana (tanda) menilai komposisi keterlibatan unsur masyarakat dalam program

Buku ini tidak diperjualbelikan.

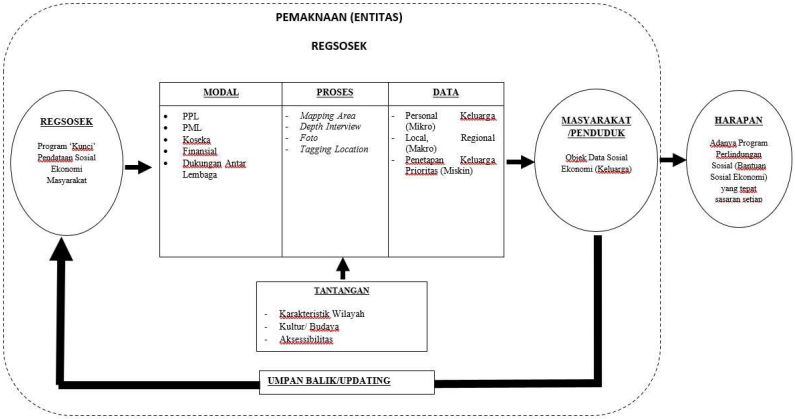

Gambar 10.6 Skema Pemaknaan (Entitas) Regsosek (2022)

Regsosek sudah optimal atau belum. Salah satu tandanya adalah melihat tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan program pendataan ini.

Pemaknaan (entitas) Regsosek (Gambar 10.6) sebaiknya memiliki konsep sistematis yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan, mulai dari nama program, modal (sumber daya), proses (cara dan strategi), *goal* (data sosek keluarga), dan target program. Program pendataan Regsosek adalah langkah awal (kunci) untuk membangun dan mengintegrasikan seluruh program pemerintah yang bertemakan perlindungan sosial, kesejahteraan dan pemberdayaan (ekonomi) yang menargetkan masyarakat (penduduk) sebagai objek datanya. Dalam pelaksanaannya, komponen (modal) utama yang menjadi tombak program pendataan ini (selain anggaran) adalah petugas lapangan (PPL, PML, dan Koseka), yang mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder/lembaga pemerintah terutama di daerah. Proses (strategi) pendataan oleh petugas lapangan dilakukan melalui beberapa rangkaian proses, yaitu pembagian peta wilayah kerja petugas lapangan, wawancara kondisi sosek keluarga, foto bangunan, dan *tagging* lokasi. Hasil pendataan yang lengkap, data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sosek per keluarga, naik dan disusun ke dalam skala tingkat wilayah dari desa/kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi. Selanjutnya, adalah penetapan keluarga prioritas (miskin) sesuai kriteria sosek untuk dijadikan sasaran (*demand*) program bantuan sosial.

Masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai proses pendataan di keluarganya. Bagi sebagian masyarakat menengah ke atas beranggapan bahwa Regsosek merupakan proses pendataan yang sifatnya formalitas kegiatan yang tidak berpengaruh kepada mereka. Para PPL yang mewawancara terkadang disambut dengan acuh (sikap kurang senang) karena mungkin dianggap tidak ada kepentingannya dengan mereka. Berbeda dari kalangan masyarakat bawah, memaknai pendataan ini sebagai harapan untuk mendapatkan bantuan. Petugas lapangan yang akan mendata dan mewawancara mereka rata-rata berkomunikasi dengan hangat dan terbuka, bahkan dalam kondisi/keadaan yang serba terbatas. Informasi dari Kepala Dusun III Kecamatan Perbaungan, Bapak Martono, mengatakan bahwa pendataan warga miskin di dusunnya sudah dilakukan mandiri dan dilaporkan secara berkala ke tingkat kecamatan. Namun hasil aliran bantuan sosial masih diberikan kepada data keluarga yang sama yang kadang telah mengalami perubahan sosial ekonomi yang baik. Sistem umpan balik (*updating*) belum terintegrasi dengan baik melalui perubahan data warga miskin yang berkala dari tingkat dusun, desa, kecamatan, dinas hingga ke pusat. Mungkin sebagian kecil kalangan masyarakat yang menilai bahwa kegiatan semacam ini mampu membangun sosial ekonomi sesama masyarakat dan bermanfaat bagi sesama.

Karena keterbatasan waktu dan hal lainnya, tim peneliti memang belum mampu sepenuhnya menggambarkan dan menggali lebih dalam persepsi-persepsi masyarakat mengenai pendataan Regsosek kali ini. Namun, setidaknya kami telah berjuang dan mengoptimalkan hasil temuan kami di lapangan selama kurun waktu satu minggu. Kami berharap, temuan-temuan yang didapatkan dalam Regsosek ini dapat bernilai bagi para pembacanya dan memberikan nilai tambah/

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masukan pada kegiatan Regsosek mendatang (sensus pendataan lainnya).

Ragam makna Regsosek yang tersirat. Meski terlalu singkat waktu kebersamaan, mungkin untuk saat ini, ungkapan itulah yang dapat kami sampaikan untuk pandangan awal di kegiatan perdana Regsosek tahun 2022 ini. Dengan persiapan singkat dan seketika, tentu menjadi misi dan tantangan yang berat bagi penyelenggara, khususnya petugas yang turun ke lapangan.

E. Negeri Beradat, Pendukung Utama Pendataan

Pendataan Regsosek yang sangat singkat yaitu hanya berkisar satu bulan saja tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen di dalamnya yang dapat mempermudah pendataan. Kabupaten Serdang Bedagai yang masyarakatnya sangat majemuk juga membuat para petugas lapangan harus melakukan berbagai pendekatan yang berbeda agar hasil pendataan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. BPS sebagai lembaga vertikal tentu juga harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah setempat dan berbagai elemen masyarakat agar mudah diterima sebab BPS memiliki tanggung jawab pendataan baik itu sensus nasional dan survei.

Sebelum dimulainya pendataan Regsosek, Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan pendekatan melalui siaran radio. Bapak Herman selaku pimpinan di BPS Kab. Serdang Bedagai bersama dengan Bapak Iwan selaku Pranata Komputer Madya di BPS Serdang Bedagai menciptakan sebuah *jingle* yang dinyanyikan bersama para pegawai di lingkungan BPS Serdang Bedagai (Sergai) lalu kemudian disebar melalui kanal youtube, instagram dan facebook unit kerja tersebut. *Jingle* tersebut juga diputar sebanyak lima kali setiap harinya di radio daerah setempat untuk mengingatkan warga masyarakat Sergai bahwa pentingnya pendataan Regsosek ini. Lantunan lagu dan musik ini menjadi tanda semangat dari para petugas dan pentingnya partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan Regsosek 2022. Berikut judul lagu dan lirik lagunya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

"Bersama Pasti Sukses"

Oleh: BPS Serdang Bedagai

Ayo sukseskan pendataan registrasi sosial ekonomi

Ayo sukseskan pendataan registrasi sosial ekonomi

Untuk menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo

Rapatkan barisan dan derap langkah

Kobarkan semangat pengabdian

Demi masa depan bangsa negara dan data berkualitas untuk Indonesia maju

Bersama pasti sukses, bersama pasti sukses, bersama pasti sukses

Yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo yo ayo ayo

Lirik lagu tersebut memiliki filosofi sebagai penyemangat para petugas di lapangan dan juga sebagai media sosialisasi kepada masyarakat bahwa Regsosek ini sangat berguna untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan demi masa depan negara yang lebih maju. Memutar lagu ini secara berkala tentu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih peka tentang pentingnya data. Selain itu, dengan diputarnya *jingle* ini juga untuk mengingatkan masyarakat apakah rumahnya sudah didata oleh petugas atau belum.

Kemudian, jaringan yang telah dibangun oleh Bapak Herman dengan pemerintah daerah juga menjadi salah satu alasan dapat terlaksananya Regsosek di Kabupaten Serdang Bedagai dengan lancar. Sebelum Regsosek berjalan, Kepala BPS Sergai telah bersurat kepada Bupati Serdang Bedagai dan DPRD Serdang Bedagai agar dapat membantu dalam menyosialisasikan pentingnya kegiatan pendataan ini. Pada awal pendataan, Bupati Sergai mengunggah foto di akun Facebook pribadinya dan menuliskan penjelasan tentang pentingnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kegiatan Regsosek ini. Selain itu, beliau juga mengajak masyarakat untuk percaya pada para petugas karena para petugas melakukan pendataan itu bukan semata-mata menjadi seonggok laporan tak berguna, tetapi akan dijadikan sebagai basis data agar Indonesia lebih maju. Maraknya penipuan dan pinjaman *online* memang membuat banyak masyarakat yang waspada dalam memberikan informasi terkait keluarganya dan hal inilah yang diantisipasi Bupati Serdang Bedagai. Dengan memberikan contoh bahwa mereka bersedia didata petugas Regsosek, diharapkan dapat menjadi contoh awal bagi masyarakat untuk dapat menerima petugas jika datang ke rumah masing-masing penduduk.

Selain mendekati para pemimpin lokal, pimpinan BPS Serdang Bedagai juga mendekati berbagai elemen di masyarakat, contohnya adalah perkumpulan Tionghoa, perkumpulan pengusaha, Gapensi, partai politik, dan lainnya. Pak Herman membangun relasi tersebut secara informal lebih dahulu, yaitu dengan mengikuti kegiatan pertemuan para anggota yang dilaksanakan secara rutin. Mendekati pimpinan-pimpinannya menurutnya akan mempermudah langkahnya agar diterima oleh para anggotanya. Bapak Herman memahami betapa pentingnya membangun jaringan dari berbagai elemen dan kalangan di masyarakat karena dukungan dari mereka juga sangat berguna dalam pelaksanaan pengumpulan data.

> "Kalau kita sudah pegang kepalanya, nanti mudah itu dekat dengan anggotanya. Kita itu cari kepalanya dan pastikan dia nanti membawahi massa yang banyak pula. Kita mengundang pimpinannya sebagai pembicara, otomatis nanti para anggotanya akan mendengar, itu penting. Saya juga dekat itu dengan ketua perkumpulan Tionghoa supaya kita juga bisa diterima oleh masyarakat Tionghoanya." (Wawancara dengan Pak Herman, 4 November 2022)

Pak Herman membangun modal sosial yang dapat memudahkan para petugas BPS agar dapat diterima oleh masyarakat. Beliau menyadari bahwa ia sebagai pimpinan juga memiliki tugas untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

membuka akses agar para anggotanya mendapatkan kemudahan selama di lapangan. Modal sosial yang terdiri atas kepercayaan (t*rust*), aturan (*norm*), dan jaringan (*network*) telah dibangun oleh pimpinan BPS Sergai jauh sebelum kegiatan terlaksana (Putnam, 1993). Memanfaatkan modal sosial ini juga nyatanya sangat berguna ketika petugas mengalami penolakan dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika petugas di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami penolakan dari masyarakat Tionghoa setempat. Masyarakat tidak mengizinkan rumahnya dan keluarganya didata oleh para petugas dengan alasan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah selama ini dan menganggap pendataan ini hanyalah omong kosong belaka.

Menindaklanjuti hal tersebut, para petugas melakukan antisipasi sesuai dengan SOP yang ada, tetapi pada akhirnya pimpinan BPS menggunakan modal sosial untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jaringan dan kepercayaan yang telah dibangun oleh pimpinan BPS dengan ketua perkumpulan Tionghoa akhirnya membuka jalan agar petugas dapat diterima oleh masyarakat. Pak Herman menghubungi langsung ketua perkumpulan Tionghoa agar dapat membantu melunakkan hati masyarakat terkait pendataan Regsosek di beberapa daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami penolakan dari etnis Tionghoa. Dalam waktu singkat, para petugas akhirnya dapat diterima oleh masyarakat untuk melakukan pendataan setelah dikoordinir oleh ketua perkumpulan masyarakat Tionghoa. Dukungan dari para ketua-ketua elemen di masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan Regsosek di Serdang Bedagai.

Dukungan para pihak terlihat dari hadirnya BPS Serdang Bedagai, kelembagaan sosial, adat dan perwakilan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan memantau pelaksanaan Regsosek (Gambar 10.7). Kemudian, perangkat desa yakni kepala desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat juga tak kalah pentingnya dalam mensukseskan kegiatan Regsosek di Serdang Bedagai. Pak Indra Fajar selaku kepala desa di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, juga turut aktif dalam menggerakkan masyarakatnya agar

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.7 Dokumentasi saat melakukan FGD bersama BPS Serdang Bedagai.

bersedia didata oleh para petugas Regsosek. Desa Bengkel yang masyarakatnya sangat majemuk yakni terdiri dari multi-etnis dan suku ini juga menjadi sebuah keunikan tersendiri. Selain itu, Desa Bengkel juga merupakan ikon Kabupaten Serdang Bedagai karena merupakan pusat UMKM oleh-oleh yang sempat tersohor sebelum terkena dampak pembangunan tol Medan—Tebing dan COVID-19.

Pendataan Regsosek ini menjadi hal yang diharapkan dapat memperbarui data-data masyarakat setempat sebab banyak masyarakat yang terdampak pembangunan tol dan juga COVID-19. Desa Bengkel yang dulunya selalu dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan dan disinggahi untuk membeli oleh-oleh ini sejak 2019 mengalami penurunan omzet sebagai dampak tol Medan—Tebing. COVID-19 juga semakin meningkatkan pengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat yang memiliki UMKM. Penurunan omzt yang sangat signifikan membuat banyak pengusaha yang akhirnya gulung tikar. Menurut Pak Indra, dalam pendataan Regsosek ini sudah diawali

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan berbagai tahapan bersama dengan BPS Kabupaten Serdang Bedagai sebelum para enumerator mulai melakukan pendataan ke setiap rumah (Gambar 10.8). Kesadaran pentingnya data yang valid membuat pemerintah desa juga ikut terlibat di dalamnya. Kepala dusun juga akan terlibat mengarahkan para petugas terkait batas wilayah karena Desa Bengkel memang cukup unik karena desa ini berada di pinggir jalan dan sekitar jalan yang mana hanya berjarak sekitar 100 meter dari jalan lintas Sumatra. Artinya, jika sudah lebih dari 100 meter, maka bukan lagi bagian dari Desa Bengkel.

> "Di desa kami ini ada tradisi yang dilakukan untuk memperkuat silaturahmi saat maulid Nabi yaitu Aru Banjar. Karena di desa ini banyak suku Banjar, kegiatan datang ke rumah penduduk dan makan-makan itu dilaksanakan setiap Sabtu-Minggu dan itu jadwalnya masih ada sampai Januari agar semua penduduk Banjar kebagian rumahnya dijadikan tempat pelaksanaan Aru Banjar." (Wawancara dengan Pak Indra 2 November 2022)

Foto: Fedrickson (2022)

Gambar 10.8 Dokumentasi dengan Kepala Desa Bengkel, Bapak Indra (Memakai Topi)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tradisi Aru Banjar yakni makan-makan di rumah penduduk suku Banjar dengan menu ayam, tetapi dimasak dengan berbagai jenis masakan khas suku Banjar ini juga dijadikan sebagai sarana untuk menyosialisasikan pentingnya pendataan Regsosek. Hal ini dilakukan supaya masyarakat setempat tidak takut untuk didata oleh para petugas. Selain itu, Bapak Ponimin selaku tokoh masyarakat yang kerap dijadikan panutan di desa Bengkel juga aktif untuk mengajak masyarakat agar bersedia didata oleh para petugas BPS. Beliau yang merupakan pensiunan guru dan telah mengajar sejak tahun 1974 di desa Bengkel membuatnya dikenal oleh banyak masyarakat di desa Bengkel, bahkan Kepala desa dan beberapa kepala dusun di desa Bengkel merupakan mantan muridnya semasa dulu. Oleh karenanya, nasihat dan arahan dari Pak Ponimin kerap sekali menjadi acuan masyarakat untuk bertindak.

> "Kalau sehabis salat dari masjid, saya sering nanya apa sudah didata atau belum. Tidak usah takut didata karena saya sudah didata, gitu saya bilang, Mbak." (Wawancara dengan Pak Ponimin, 2 November 2022)

Beranjak ke desa yang berbeda yakni Desa Kota Galuh di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mayoritas penduduknya merupakan etnis Tionghoa. Pendataan Regsosek ini juga membuat aparat desa harus terjun aktif dalam menyosialisasikan pada masyarakat agar bersedia didata. Hal ini terjadi karena ada penduduk yang tidak bersedia didata karena beranggapan setiap pendataan itu tidak diperlukan karena mereka tidak pernah mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, Bapak Martono selaku Kepala Dusun IV Desa Kota Galuh ini kadang harus datang ke rumah penduduk dan membujuk mereka agar bersedia didata. Bapak Martono bahkan ikut juga menjelaskan betapa pentingnya pendataan Regsosek ini demi basis data agar tidak ada lagi tumpang tindih data di pusat maupun daerah.

> "Siapa sih yang mau miskin? Itu yang saya tekankan ke penduduk di sini. Kalau bisa ya kita semua kayalah, tapikan pasti ada aja

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang miskin dan layak menerima bantuan, tapi nyatanya datanya tidak ada di pusat. Itu saya jelaskan supaya masyarakat tau kalau data ini nanti dipakai, supaya bantuan itu tepat sasaran karena yang didata bukan cuma yang miskin tapi juga orang kaya." (Wawancara dengan Pak Martono, 2 November 2022)

Bapak Martono (Gambar 10.9) menyadari bahwa bantuan dari pemerintah yang datang saat pandemi Covid-19 sering sekali tidak tepat sasaran. Beliau mengatakan bahwa data yang ada di pusat sudah tidak dapat dikategorikan layak terutama banyaknya masyarakat yang terimbas Covid-19. Menurutnya, perputaran ekonomi masyarakat di dusunnya sudah banyak berubah, jika yang dulunya miskin saat didata sekitar 4–5 tahun yang lalu, maka belum tentu miskin di masa sekarang begitu juga sebaliknya dengan yang didata kaya pada sekitar 4–5 tahun yang lalu.

"Di dusun saya ini, Mbak, banyak itu orang-orang yang tiba-tiba kaya. Misalnya, anggaplah dia merantau kerja ke luar negeri sana, *awakpun* (sayapun) gak tau dia entah kerja apa-apa di sana. Pulang-pulang dia, dibangun rumahnya, baguslah ekonominya, tapi mungkin dulu dia pas didata, ya miskin. Nah, datanglah ini bantuan dari pusat, dia yang udah kaya sekarang masih dapat bantuan, kan gak cocoklah begitu. Ada juga yang dulu kaya, pas Covid ini dijualnyalah semua barang-barang berharganya, jatuh miskinlah dia, tapi karena dulu didata dia berkecukupan, ya gak dapat dia bantuan itu. Sudah basilah itu data di pusat, gak cocok lagilah sama situasi masyarakat sekarang." (Wawancara dengan Pak Martono, 2 November 2022)

Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan ketua-ketua dari berbagai elemen masyarakat nyatanya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan Regsosek di Kabupaten Serdang Bedagai. Jaringan yang dibangun oleh BPS Serdang Bedagai dan tercipta atas dasar kepercayaan antara satu sama lain mengikat masyarakat hingga akhirnya bersedia untuk didata oleh para petugas Regsosek ketika datang ke rumah masing-masing. Modal

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Fedrickson (2022)

Gambar 10.9 Dokumentasi Pak Martono (Kaos Hitam)

sosial, yakni jaringan dan kepercayaan inilah yang menjadi fondasi kuat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPS terkait pendataan. Pada kenyataannya, BPS memiliki berbagai kegiatan sensus sehingga hubungan dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, ketua-ketua dari berbagai elemen di masyarakat juga harus tetap dipupuk dan dirawat dengan baik demi keberlangsungan pendataan yang benar, valid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara.

F. *Life Story* Pendata

Menjadi petugas Regsosek memiliki tantangannya sendiri, selain harus menyesuaikan kondisi cuaca yang tidak menentu, situasi dan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, mereka juga harus mencoba menyesuaikan diri dengan tingkat emosional penduduk yang tidak dapat ditebak dengan mudah. Penolakan demi penolakan yang harus diatasi dengan baik demi data untuk Indonesia yang lebih baik. Harus berusaha untuk professional di tengah gempuran situasi dan kondisi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang tak menentu, mencoba memaknai setiap proses pendataan bukan hanya untuk negara namun dapat dijadikan sebagai refleksi dalam menjalani hidup kedepannya.

Habibah adalah salah satu PPL BPS Kab. Serdang Bedagai di Dusun III dan IV, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Beralamat di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berusia 38 tahun dengan pendidikan terakhir SMA, Habibah merupakan seorang *single parent* yang membesarkan dua orang anaknya yang masih kelas 6 SD dan kelas 1 SD. Dipercayakan menjadi seorang petugas lapangan, setelah melalui seleksi merupakan hal yang sangat disyukuri olehnya. Menurutnya, keterlibatannya menjadi ladang rezekinya untuk menafkahi keluarganya.

> "Saya ikut Regsosek ini dikasih tahu teman, Bu. Saya disuruh teman untuk daftar, ikuti tahapan-tahapannya dan alhamdulilah saya lolos, Bu. Senang sekali saya bisa lolos." (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Sejak bercerai dengan suaminya sekitar empat tahun lalu, Habibah memacu dirinya untuk tetap produktif dan menghasilkan uang demi menghidupi anak-anaknya. Membesarkan anak seorang diri tanpa ada bantuan dari mantan suaminya membuatnya harus memutar otak untuk selalu memiliki pekerjaan agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Kerap sekali ia menangis dan meratapi jalan hidupnya yang cukup berat. Sebelumnya, Habibah sempat menjadi *baby sitter* untuk anak dari adik sepupunya dengan gaji kurang lebih Rp1.000.000,00. Beliau juga sempat bekerja di jalan tol Medan—Tebing Tinggi dan kerap sekali pulang tengah malam, tetapi karena pergantian pimpinan proyek, dia tidak lagi ikut bekerja. Ibu Habibah tidak pernah memilih-milih pekerjaan, menurutnya yang penting adalah menghasilkan uang dan halal.

> "Penuh perjuangan membesarkan anak-anak, Bu. Semua saya kerjakan, Bu, untuk bisa menghidupi anak. Jadi buruh pabrik,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kerja di tol, apalagi di tol itu kadang pulang sampai malam ya, Bu. Kadang saya sambil nangis sambil kerja, semua demi anak-anak. Jadi, apapun pekerjaan saya terima aja yang penting bisa untuk menghidupi anak-anak. Demi anak itu aku harus kuat." (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Menjadi petugas lapangan dalam kegiatan Regsosek memang pertama sekali bagi Ibu Habibah. Sebelumnya, ia memang pernah melakukan kegiatan survei, yaitu melakukan pendataan dari desa terkait jumlah lansia, jumlah wanita hamil. Beliau juga pernah menjadi enumerator dari beberapa lembaga swasta yang melakukan survei politik dan pernah juga menjadi petugas lapangan atau petugas survei KB. Sempat mendapatkan perhargaan dari KB sebagai orangtua hebat, tetapi rumah tangganya tidak dapat bertahan setelahnya dan ia cukup menyayangkan hal tersebut. Ia tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Beliau berharap rezekinya selalu lancar karena saat ini hanya dia yang dapat menghidupi anak-anaknya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa walaupun seorang *single parent* dan memiliki dua orang anak yang masih sekolah, keluarganya belum pernah mendapat bantuan sekalipun. Akan tetapi, menurutnya itu tidak masalah karena rumahnya adalah jenis rumah permanen, sehingga mungkin tidak layak jika harus menerima bantuan. Ibu Habibah lebih bahagia jika ia tetap aktif bekerja karena ia masih muda dan tidak ingin dikasihani.

"Saya gak pernah itu dapat bantuan, entah itu PKH atau apalah. Pernah ada yang mendata ke rumah, tapi katanya rumah saya ini bagus, ya gak lah perlu bantuan. Lagian saya juga masih muda, Bu. Mending saya mencari. Yang penting kita sehat, rezeki lancar." (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Terlibat sebagai petugas Regsosek, Ibu Habibah menyadari pentingnya pendataan ini karena kelak akan berhubungan erat dengan satu data yang sekiranya akan digunakan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam pemberian bantuan. Selama ini, kerap sekali bantuan yang diberikan pada masyarakat tidak tepat sasaran dan menimbulkan protes dan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Oleh

Buku ini tidak diperjualbelikan.

karenanya, Ibu Habibah memberikan perhatiannya secara penuh agar ia sebagai ujung tombak dalam pendataan dapat berjalan dengan baik dengan data yang valid.

Melakukan pendataan juga bukan berarti tanpa tantangan. Ibu Habibah yang ditugaskan sebagai PPL di dusun III dan dusun IV, Desa Kota Galuh harus selalu melakukan bermacam pendekatan jika berhadapan dengan masyarakat yang tentunya memiliki tingkat emosi yang berbeda-beda. Selain itu, dusun tersebut juga didominasi oleh etnis Tionghoa dan beliau sering merasakan penolakan berulang dari keluarga yang sama. Perlakuan tidak menyenangkan seperti tidak diizinkan masuk ke dalam rumah dan juga diusir lantaran dianggap tidak penting oleh masyarakat yang hendak didata. Selain tantangan dari masyarakat, ia juga harus menghadapi kondisi lingkungan yang mana hewan seperti anjing berkeliaran. Ibu Habibah harus menghadapi pengalaman dikejar anjing ketika melakukan pendataan.

> Itu keluarga yang kemarin itu, Bu. Ddia agak menolak. Sudah berapa kali saya kunjungi itu, Bbu. Katanya lagi gak ada, entah yang kemanalah, nanti sajalah lagi. Pening kali kepalaku, lah. Sudah lima kali saya ke situ, Bu. (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Untuk mengatasi hal-hal yang sulit, Ibu Habibah akan berkoordinasi dengan PML jika sudah mengalami dua kali penolakan. Namun, jika setelah berkoordinasi dengan PML masih tetap ditolak, mereka akan segera menghubungi Koseka agar turut bertindak. Hal ini sesuai dengan arahan yang mereka terima ketika mengikuti pelatihan Regsosek selama dua hari. Melakukan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku dan tetap berjuang agar dapat mendapatkan data yang valid dari setiap keluarga di lokasi dimana dirinya ditugaskan oleh BPS Kabupaten Serdang Bedagai. Ibu Habibah menyadari bahwa ia harus selalu melakukan berbagai pendekatan yang berbeda-beda di lokasi dimana ia ditugaskan karena bukan hanya perbedaan etnis yang harus dihadapi, melainkan juga perbedaan kelas sosial yang mana si kaya dan yang mana si miskin.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 10.10 Ibu Habibah, PPL Dusun III-IV, desa Kota Galuh
Foto: Ririn, 2022

Berhadapan dengan status sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, Ibu Habibah (Gambar 10.10) merefleksikan yang ditemukannya selama di lapangan. Kerap kali ia bertemu dan mendata masyarakat yang sangat miskin dan menguras emosinya. Beliau menyadari betapa pentingnya profesionalitas saat bekerja dan harus tetap melaksanakan pendataan dengan baik dan sesuai kaidah yang berlaku. Tak ayal jika ia sering merasa bersalah karena kerap mengeluh dengan kehidupannya yang juga sebenarnya sangat berat karena harus menjadi *single fighter* untuk menghidupi keluarga kecilnya.

> "Bagaimana ya saya jelaskan, Bu. Kadang saya ketemu yang miskin kali, yang rumahnya pun udah enggak layak hunilah, makan pun yang penting ada aja itu pun susah. Kadang saya pikir, kok saya masih ngeluh? Ternyata ada yang lebih susah dari saya, gitu Bu. (Wawancara dengan Habibah, 5 November 2022)

Bergerak dari kenyataan di lapangan, Ibu Habibah kerap menemukan fakta bahwa masih banyak keluarga yang berada di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

garis kemiskinan dan sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Pendataan yang dilakukan melalui Regsosek ini diharapkan dapat menjadi basis data untuk semua lembaga dan kementerian dalam pemberian bantuan agar tepat sasaran. Oleh karenanya ibu Habibah memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh selama pendataan agar data yang ia temukan juga menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid.

Beralih ke petugas lainnya yaitu Ibu Sariana yang kerap dipanggil Ibu Ana (46 tahun) adalah tamatan SMK dan merupakan Koseka non organik Kecamatan Perbaungan. Beralamat di komplek Serdang Indah, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga sempat menjadi kader posyandu, menjadi petugas KPPS, dan KPMD. Beliau juga pernah bekerja di LSM dari tahun 1998—2001. Ibu Sariana memiliki tiga orang anak, yakni 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Kedua anak laki-lakinya kini sudah bekerja, sedangkan anak bungsunya masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Sebelumnya, anak pertamanya pernah diajak bekerja sebagai petugas *entry* data dalam sensus penduduk nasional. Setelahnya, anak pertamanya tersebut mencari pekerjaan yang lebih menetap dan kini bekerja di Sulawesi, begitu juga anaknya yang kedua akhirnya ikut dengan abangnya (anak pertama) dan bekerja di perusahaan yang sama. Walaupun masih tamatan SMK, anak-anak Ibu Sariana bersemangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah menamatkan pendidikan SMK di Serdang Bedagai, mereka segera merantau dan bekerja agar dapat menabung untuk pendidikannya kelak.

Menjadi Koseka non organik dalam kegiatan Regsosek menjadi hal yang cukup membanggakan baginya karena sebelumnya beliau juga pernah menjadi petugas pencacah dan pengawas lapangan dalam kegiatan-kegiatan BPS. Ibu Ana mengikuti semua tahapan seleksi untuk menjadi petugas Regsosek dan menurutnya semua tahapan yang ia lalui sangat transparan. Walaupun ia pernah menjadi petugas sensus penduduk nasional di tahun 2000, tahun 2010 dan tahun 2020,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengikuti tahapan seleksi adalah sebuah keharusan walaupun dirinya telah menjadi mitra BPS selama bertahun-tahun.

> "Saya itu ikut seleksi, bu. Enggak ada itu istilah anak tiri, anak kandung hanya karena saya udah pernah kerja di BPS, gitu Bu. Mekanisme yang sudah ada harus tetap dilalui, justru kalau enggak ikut daftar *online* itu ya enggak akan jadi kerjanya." (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

Ibu Sariana memahami bahwa tugasnya menjadi seorang Koseka tidaklah rumit, tetapi kerap sekali dia harus turut serta dalam pekerjaan PPL dan PML di lapangan. Membawahi 9 orang PML memiliki tantangan tersendiri baginya. Setiap petugas memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda sehingga berpengaruh juga dalam cara para petugas ketika berhadapan dengan masyarakat. Penolakan yang dialami oleh petugas juga menjadi tanggung jawab Ibu Ana sebab ia harus menjamin diterimanya para petugas ketika melakukan pendataan. Berbekal pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi mitra BPS, Ibu Ana selalu memberikan nasehat dan jalan keluar kepada para anggotanya agar kegiatan tetap dapat berjalan. Sering sekali Ibu Ana harus turut serta dalam kegiatan pendataan ke rumah penduduk ketika PPL dan PML ditolak berulang kali sehingga Bu Ana harus ikut menjelaskan kepentingan mereka para petugas BPS dan kegunaan data itu kelak.

> "Kan setiap orang itu beda-beda pemahamannya, Bu. Kadang yang ini cakapnya bagus, tapi yang ini kurang. Jadi saya sering bilang kalau kerja itu *barengan* aja. Minimal dua oranglah sekali jalan. Misal, dusun A sudah selesai, ya sudah mereka bisa lanjut ke dusun B, biar berkawan saja, gitu Bu. Kan nanti jadi cepat selesainya." (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

BPS yang dalam periode tahun dengan akhiran angka 0, 3, 6 selalu melakukan sensus nasional, Ibu Ana sudah memahami sedikit banyaknya pola yang terjadi di masyarakat ketika dilakukan pendataan. Bantuan sosial adalah salah satu hal yang selalu terbesit di masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ketika para petugas datang untuk mendata. Menyiasati hal ini, Ibu Ana selalu menekankan kepada anggotanya agar tidak membahas tentang dana bantuan karena persepsi masyarakat nanti dapat beranggapan bahwa pendataan ini sudah pasti menjamin akan diberikannya bantuan pada keluarga. Walaupun kenyataannya bahwa data ini salah satunya digunakan jadi basis data untuk pemberian bantuan, Ibu Ana tidak ingin menebar harapan palsu sebab ia menyadari bahwa tugas mereka hanya mendata, sedangkan bagaimana data itu nanti akan digunakan adalah kembali ke pemangku kepentingan.

Saat melakukan pendataan, Ibu Ana sering kali menekankan kepada para anggotanya untuk profesional dan mengikuti hati nuraninya. Jika dalam pendataan ada keluarga yang mengaku miskin, nyatanya tidak, mereka harus melakukan pendataan apa adanya. Menghadapi masyarakat yang status sosialnya berbeda antara data dari pemerintah desa dan fakta di lapangan. Sebelum turun ke lapangan, mereka melakukan verifikasi yang mana ada dua jenis. Pertama, sudah ada data kesejahteraan berupa *prelist* (jumlah KK kurang dari 400 dalam satu dusun). Kedua adalah data kosong (jumlah KK lebih dari 400 dalam satu dusun). Jika untuk *prelist*, mereka akan langsung menanyakan pada kepala dusun terkait kesejahteraan tiap keluarga, sedangkan untuk data yang kosong, ditanya juga kepada kepala dusun. Akan tetapi, kepala dusun tidak selalu menghafal setiap keluarga dan belum diverifikasi oleh kepala dusun. Ibu Ana dan anggotanya bergerak ke lapangan menggunakan data tersebut. Sesuai SOP, mereka berhak untuk memverifikasi apakah penduduk yang tidak terdata oleh kepala dusun tersebut sangat miskin, miskin, mampu, dan sangat mampu. Data yang diberikan oleh pemerintah desa kerap bertentangan dengan temuan di lapangan. Mengenai hal itu, Ibu Ana dan anggota akan tetap menulis data sesuai temuan di lapangan.

> "Yang berat itu kalau kita harus melakukan *geotagging* karena harus berdasarkan pendapat kadus. Jadi miris, Bu. Nanti kalau Ibu lihat nanti rumahnya gedong-gedong, tapi menurut kadus dia susah, tapi ya sudah gak masalah saya pikirkan karena kan nanti

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari foto pemerintah bisa menilai dia layak atau enggak menerima bantuan. Saya sebenarnya bangga, saya senang karena pakai foto, kalau hanya data kan pemerintah gak tau, tapi kalau foto nanti pemerintah bisa tau dia layak atau enggak." (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

Menjadi petugas dalam kegiatan Regsosek ini, Ibu Ana juga menemukan kenyataan bahwa dalam penetapan masyarakat susah dan tidak susah masih berdasarkan nepotisme. Para petugas umumnya akan menukar data yang sebelumnya didapat dari kepala dusun. Jika data yang sebelumnya susah, tapi kenyataannya sangat susah, mereka akan mengubahnya. Namun, berbeda dengan data yang diberikan miskin, kenyataannya mampu, mereka akan tetap menulisnya miskin dengan melakukan *geotagging* apa adanya.

"Kalau kenyataannya dia senang, tapi dibuat kadus dia nomor 2, kami biarkan saja. Enggak peduli kami, Bu, yang penting kami foto, kan foto nanti membuktikan. Namun, misalnya kata kadus dia susah, ternyata di lapangan sangat susah ya kami tukar bu. Kalau didata cuma susah, tapi tanpa difoto ya mana tahu orang kalau mereka susah, kami tukar. Anggap saja misalnya data yang enggak diverifikasi kadus. Karena enggak semua data yang di-*prelist* itu ada, pasti ada aja rumah tangga baru. Jadi, kami yang berhak untuk memberi label tingkat kesejahteraannya." (Wawancara dengan Ibu Ana, 05 November 2022)

Selama melakukan pendataan, Ibu Ana dan anggotanya sering merasa terbebani saat berhadapan dengan warga yang sangat miskin dan miskin, tetapi tidak mendapat dana bantuan, baik dari pemerintah desa dan pemerintah pusat. Ibu Ana menyadari bahwa jika ia bertindak dengan memberikan informasi ke pusat seperti *command center* yang disediakan oleh Kementerian Sosial RI saat melakukan pendataan Regsosek, beliau mengkhawatirkan akan adanya gesekan antara pemerintah desa dengan para petugas BPS. Sementara, BPS dan para anggotanya kerap sekali melakukan sensus dan survei yang mana harus sering berkoordinasi dengan pemerintah desa.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bertahun-tahun menjadi mitra BPS, Ibu Ana menyadari bahwa mereka hanya bertugas untuk mencari dan menyediakan data, bukan untuk mengintervensi kinerja pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Beliau berharap, tugas pendata BPS kelak diberikan wewenang untuk melakukan pelaporan jika memang menemukan fakta temuan di lapangan. Masyarakat yang sangat layak untuk segera menerima bantuan agar segera dapat ditindak lanjuti oleh para instansi terkait. Beliau juga berharap data yang mereka temukan di lapangan dapat digunakan dengan bijaksana oleh para pemangku kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.

G. *Life Story* Keluarga Fokus Data

1. Kakek Zulkifli dan Nenek Fatmawati

Bau menyengat menusuk tatkala kami berada di depan sebuah rumah yang diarahkan oleh salah satu Koseka BPS, yaitu Ibu Tina. Rumah yang berada di pinggir jalan lintas nasional ini dapat dikategorikan sangat tidak layak huni. Bermacam barang rongsokan ditumpuk di teras rumah, atap bolong, sedangkan di dalam rumah juga kondisinya tergenang banjir (Gambar 10.11). Musim hujan memang menjadi musuh utama bagi mereka yang atap rumahnya setengah langit dan setengah seng berkarat. Terlihat dua orang tua renta duduk di antara tumpukan barang rongsokan sedang diwawancarai oleh seorang petugas PPL. Sesekali si kakek tersenyum dan tertawa sambil mengusap dagunya sementara si nenek terlihat sendu. Setelah selesai, si petugas izin untuk melakukan *tagging* foto ke dalam rumah, si ibu mengarahkannya untuk memakai sepatu bot agar tidak tergelincir dan basah karena kondisinya memang masih tergenang. Si kakek hanya tersenyum ketika kami mulai menyapa dan mengatakan maksud kehadiran kami ke gubuknya yang menjadi tempatnya berteduh dari sengat matahari dan dinginnya hujan. Walaupun, rumah tersebut tidak dapat dikategorikan untuk dapat menahan panas dan dingin.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kakek tua itu bernama Zulkifli Saleh (69 tahun) dan si nenek bernama Fatmawati (58 tahun) yang telah tinggal di Dusun II, Desa Bengkel sejak tahun 1999. Kakek Zulkifli lahir di Medan dan merupakan keturunan suku Jawa-Aceh, sedangkan nenek Fatmawati lahir di Desa Bengkel dan merupakan keturunan suku Banjar. Mereka memiliki tiga orang anak laki-laki, yang pertama bernama Fauzin (menikah) dan kini tinggal di desa yang sama, tetapi dusun berbeda. Anak kedua bernama Ismail Marzuki (belum menikah) yang tinggal bersama dengan mereka di rumah tersebut dan anak ketiga (bungsu) bernama Alfajar (menikah) tinggal di Tebing Tinggi. Rumah yang mereka tinggali saat ini merupakan rumah bebas sewa dalam artian mereka bebas memberikan harga sewa berapa saja kepada pemilik rumah. Walaupun rumah ini sebenarnya tidak dapat dikategorikan rumah layak huni, mereka masih berusaha memberikan biaya sewa sekitar Rp4.000.000,00 per tahun kepada pemilik rumah. Sebelumnya, pemilik rumah mematok harga sewa rumahnya, tetapi menyadari dengan pasar yang sudah sangat berubah, penghasilan yang semakin tidak menentu, pemilik rumah akhirnya mengizinkan kakek Zulkifli untuk menetap dan mempersilakan mereka untuk tinggal menurut mereka, asalkan diberi tempat saja sudah layak disyukuri.

Di masa mudanya, kakek Zulkifli merupakan perantau. Sempat pergi merantau ke Jakarta, Aceh, dan Palembang, bekerja serabutan, kakek Zulkifli pada akhirnya memilih pulang dan kembali ke Sumatra Utara. Kakek kelahiran Medan yang merupakan keturunan Jawa-Aceh ini sebelumnya bekerja sebagai pedagang bersama dengan istri. Mereka menyediakan bahan pokok di depan rumahnya dan berjualan kerupuk dan dodol ke pasar-pasar di daerah Medan dan Binjai. Menggunakan betor (becak motor), mereka akan berangkat ke Medan di saat subuh untuk mengejar waktu karena jarak dari desa Bengkel menuju Medan berkisar 2 jam sementara jam aktif pasar juga terbatas. Mereka tidak memiliki kios sehingga mereka hanya menjajakan saja kepada para pembeli yang datang ke pasar. Dari pasar satu ke pasar lainnya, begitu hingga sore sebelum kembali ke rumahnya di Desa Bengkel.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Foto: Ririn (2022)

Gambar 10.11 Kondisi Atap Rumah Warga

> "Jadi di mana pasar, kami mencoba menjajakan apa yang kami jual. Namun, lama-lama gak tahan juga saya kan karena bawa becak, jauh tiap harilah. Sekitar 50 km ada, yang paling dekat Amplaslah. Dari sanalah nanti ke mana-mana gitu, ke pasar-pasar mana yang ramai, ke Kampung Lalang, ke Binjai, ujung ke ujunglah. Perbatasan kota Medanlah sudah." (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 2 November 2022)

Namun lama-kelamaan, bapak Zulkifli mulai letih dan merasa tidak sanggup jika tiap hari berangkat ke Medan membawa bentornya dan menjajakan jajanan khas Desa Bengkel. Akhirnya, kakek Zulkifli memilih untuk berhenti berdagang ke daerah Medan dan Binjai. Sempat ditawarkan untuk menetap di Binjai oleh saudara istrinya agar ekonomi mereka dapat lebih baik melihat pangsa pasar di Binjai juga lebih baik daripada Desa Bengkel sejak pembangunan tol dan akibat pandemi, tetapi kakek Zulkifli menolak dan memilih menetap di Desa Bengkel.

> "Ada itu kakak bilang, keluarga ibunya, sudah kalau gak, pindah aja ke mari (sini). Mereka itu mau bantu. Buka usaha sajalah di sini kalau sudah agak bagus, sewa rumah di sini. Kalau di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

> Bengkel sudah enggak memungkinkan, *ngapain* dipertahankan lagi? Jadilah ini kami hidup, dapat sehari makan sehari, mending kalian ke sinilah. Itulah dibilang kakak supaya kami termotivasi untuk pindah ke Binjai." (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 2 November 2022)

Keadaan pasar yang selalu fluktuatif, keadaan tubuh yang sudah renta, pada masa senjanya, kakek dan nenek ini masih harus tetap menggerakkan tubuh rentanya untuk mencari nafkah demi menghidupi mereka dan anaknya yang saat ini masih tinggal bersama. Sebelumnya, anaknya tersebut memiliki usaha kios pulsa. Namun, karena kondisi pasar yang tak menentu dan ditambah dengan hantaman dari pandemi, kios tersebut akhirnya bangkrut, sedangkan kakek Zulkifli dan istri hanya menjual bensin ketengan untuk bertahan hidup.

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, kakek Zulkifli dan nenek Fatmawati belum menerima bantuan dari pemerintah daerah. Sebelumnya, mereka sempat mendapat bantuan sosial tunai (BST) dari pusat pada Januari—Agustus 2021, tetapi setelahnya mereka tidak lagi mendapat bantuan, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Survei dan pendataan sering dilakukan ke rumah kakek Zulkifli, tetapimenurutnya pendataan itu sudah dilakukan sejak pemerintahan desa sebelumnya hingga pemerintahan desa yang baru. Pendataan berulang ini ternyata tidak membantu sama sekali karena ketika dana bantuan cair, mereka tidak mendapat. Tentu saja hal ini menjadi sorotan yang sangat kontras melihat kondisi kakek Zulkifli dan nenek Fatmawati sebenarnya sangat miskin dan butuh bantuan. Mereka tidak tahu kegunaan Regsosek karena pendataan berulang, tidak kebagian bantuan membuat mereka menganggap bahwa pendataan ini hanya formalitas saja. Ingin mengadu juga tidak tahu ke siapa dan melalui prosedur seperti apa.

> "Pernah itu kadus datang mendata, katanya untuk bantuan, tapi yang lain udah dapat, kami ya enggak dapat. Kami tanya kenapa enggak dapat, katanya nama kami enggak keluar, ya sudahlah,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mungkin ada yang lebih layak dapat kan?" (Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 2 November 2022)

Beranjak ke pemerintah desa setempat, sekretaris desa yang saat itu berada di kantor karena kepala desa sedang kuliah ke Medan menyatakan bahwa pendataan memang dilakukan oleh kepala dusun. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bagaimana kondisi spesifik semua masyarakat di Desa Bengkel. Terkait kondisi BLT-DD yang digelontorkan dari dana desa, sebelumnya sudah dilakukan musyawarah desa terkait siapa yang berhak menerima bantuan dana desa.

"Oh begini itu, Bu. Kita memang kalau *ngasih* bantuan itu kita enggak mau ada yang sampai berulang kali dapat. Kalau kondisi bapak itukan sudah dapat BST. Jadi BLT kami alihkan ke keluarga yang lain. Kalau bapak itu nggak dapat BST lagi harusnya lapor ke kadus. Harusnya kalau data bapak itu udah ada di kami, bapak itu bisa dapat BLT tahun ini." (Wawancara dengan Sekretaris Desa Bengkel, 3 November 2022)

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Gambar 10.12 Kondisi Rumah Tergenang Banjir

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kami tidak memiliki kapasitas untuk mengintervensi kinerja pemerintah desa. Selain itu, kami sadar bahwa pendataan Regsosek adalah untuk menyediakan basis data agar dapat digunakan pemerintah. Melihat kondisi keluarga kakek Zulkifli yang memprihatinkan, kami hanya dapat memberitahukan langsung kepada pemerintah desa agar segera melakukan tindak lanjut. Hal ini untuk meminimalisir jika langsung menghubungi *command center* Kementerian Sosial yang dikhawatirkan akan ada gesekan antara pemerintah desa dengan BPS Kabupaten Serdang Bedagai yang memfasilitasi kami ke Ddesa Bengkel. "Baik Bu, terima kasih sudah diinfokan, mungkin ini akan segera ditindak lanjuti oleh desa," jelas Sekretaris Desa Bengkel.

Setelah dijelaskan perihal maksud pendataan Regsosek, kakek Zulkifli dan istri memiliki harapan besar agar sekiranya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan mendapatkan perhatian pemerintah. Mereka yang sudah tua dan renta, badan tidak sekuat dulu sementara mengharap pada keluarga juga tidak selalu ada karena kenyataan bahwa keluarga mereka yang lain juga memiliki kesulitannya sendiri. Kakek Zulkifli dan keluarga berharapan bahwa pendataan yang sering berulang ke gubuk mereka (Gambar 10.12) bukan hanya untuk seonggok data yang tidak ditindaklanjuti seperti sebelumnya sebab negara yang baik adalah negara yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

2. Bapak Johan

Beralih kepada keluarga yang berbeda yang tinggal di Dusun IV, desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dialah Bapak Johan, seorang keturunan Tionghoa (69 tahun) yang bekerja sebagai pengangkut batu. Beliau tidak tamat SD, tetapi beliau pernah bekerja sebagai jasa servis elektronik ketika merantau ke Jakarta dan Palembang sebelum akhirnya pulang ke Sumatra Utara dan tetap menjalankan usahanya saat ini. Usaha yang dimilikinya tepat berada di sebelah rumahnya begitu juga kendaraan-kendaraan yang beliau gunakan untuk mengangkut batu dan pasir tersusun rapi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di halaman parkiran usahanya. Masuk dalam kategori keluarga yang mampu, beliau merasa bahwa dirinya secara pribadi tidak memiliki keluhan terhadap pemerintah karena pada dasarnya, beliau merasa tidak pernah meminta bantuan secara spesifik.

> "Saya enggak ada keluhan untuk pemerintah. Buat apa mengeluh, toh saya enggak pernah minta bantuan, kecuali saya minta dibantu, tapi tidak ditolong barulah bisa mengeluh. Saya aja diizinkan bisa pake KUR, kalau enggak dikasih, ya bagaimana cari modal buat usaha ini? (Wawancara dengan Bapak Johan, 2 November 2022)

Terkait dengan pendataan Regsosek, Bapak Johan ternyata adalah salah satu keluarga yang sulit ditaklukkan dalam artian petugasnya datang berulang kali, tetapi beliau tidak bersedia untuk didata. Hal ini tentu saja membuat PPL yang bertugas harus melakukan pendekatan yang berbeda hingga harus berkoordinasi dengan PML dan Koseka. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Habibah (PPL) bahwa dirinya datang hingga lima kali untuk dapat mewawancarai Pak Johan dan hal ini juga kerap ditemuinya di keluarga lainnya di dusun yang sama. Ibu Ana selakuk Koseka, akhirnya meminta tolong kepada Kepala Dusun, Pak Martono, untuk dapat membujuk masyarakatnya agar bersedia didata. Kebetulan Bapak Johan juga merupakan paman dari Kepala Dusun sehingga mampu membuka jalan agar petugas diterima oleh mereka.

Pendataan yang berulang, tetapi tidak jelas terkait tindak lanjutnya menjadi alasan beberapa keluarga tidak bersedia didata. Maraknya kasus penipuan pinjaman *online* juga membuat banyak masyarakat waspada. Takut akan seringnya data tersebar tanpa izin oleh sang pemilik. Sering sekali kepala dusun harus terlibat untuk mendatangi warganya agar bersedia didata oleh para petugas. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kadus, Bapak Martono. Beliau pernah melakukan *update* data sesuai himbauan dari pusat terkait nama-nama yang berhak untuk menerima bantuan. Beliau sebagai kadus tentu mengenal masyarakatnya sehingga beliau melakukan *updating* data

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melalui web dan aplikasi yang telah dianjurkan. Namun kenyataannya, walaupun sudah meng-*update* data, data penerima bantuan masih sama dengan data sebelumnya sebelum melakukan *updating* data. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab juga mengapa banyak masyarakat menjadi malas untuk didata bahkan sering beralasan aneh-aneh jika petugas datang ke rumahnya.

Disinggung soal harapannya terhadap basis data, Bapak Johan berharap pendataan ini dapat membantu masyarakat karena selama ini sering sekali orang yang layak menerima bantuan justru tidak menerimanya sama sekali. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa negara ini menjamin perlindungan sosial juga masih rendah terutama setelah dihantam pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap pemasukan keluarga. Jika sudah ada basis data, diharapkan selalu ada *updating* yang memudahkan para pemangku kebijakan agar sekiranya setiap kebijakan yang mereka keluarkan tepat sasaran. Terutama terkait seringnya kebocoran data, harapan Bapak Johan juga agar data-data yang sudah diberikan oleh keluarga Indonesia dapat dipergunakan dengan bijaksana dan dijaga sebaik-baiknya.

H. Membawa Kemiskinan dalam Data Solid: Penutup

Pendataan Regsosek di Kabupaten Serdang Bedagai secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terjadi selain karena memang nama BPS cukup familiar di tengah-tengah masyarakat, peran pimpinan dalam menebar jaring-jaring sosial kepada pemerintah daerah juga pihak swasta. Kendala yang kerap dihadapi oleh para petugas adalah kondisi cuaca yang tak menentu, banjir, lokasi yang sulit diakses karena jalan yang berlumpur, jaringan internet yang tak memadai di beberapa desa, dikejar-kejar binatang. Selain itu, para petugas juga kerap mendapatkan penolakan oleh masyarakat dan hal ini bukanlah hal baru lagi terutama di daerah kecamatan Pantai Cermin yang mana ada desa didominasi oleh etnis Tionghoa. Serdang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bedagai selain menjadi salah satu daerah yang memiliki keragaman etnis masyarakat, juga berbatasan dengan berbagai daerah. Hal ini juga kerap menjadi masalah karena membuat petugas mengalami kesulitan jika harus mendata masyarakat yang berbatasan dengan kecamatan dan kabupaten lain.

Dukungan kelembagaan dan kepercayaan yang dibangun oleh BPS sejak dahulu setidaknya mampu memberi jalan keluar ketika petugas di lapangan mengalami kesulitan. Selain itu, rekrutmen yang dilakukan oleh BPS juga menjadi peluang bagi para petugas baik para *fresh graduate* hingga ibu rumah tangga. Menambah penghasilan dan menambah pengalaman menjadi hal yang diharapkan dari kegiatan Regsosek ini. BPS juga menjaga relasinya dengan para mitranya sehingga beberapa petugas yang terlibat dalam kegiatan Regsosek ini merupakan para petugas yang sebelumnya sudah pernah ikut serta dalam kegiatan BPS seperti sensus nasional.

Temuan-temuan di lapangan oleh para petugas memberikan secercah pandangan terkait pendataan dimana mereka berharap jika BPS tidak hanya menjadi penyedia data, jika mereka memang menemukan kondisi yang miris di lapangan, mereka berharap diberikan kesempatan untuk melakukan pelaporan segera. Survei berulang yang dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga nyatanya tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kerap kali masyarakat yang sebenarnya sangat layak justru tidak pernah tersentuh oleh bantuan. Hal ini terjadi karena hak-hak mereka sebagai WNI dalam pencatatan sipil juga tidak terpenuhi seperti KK, akta lahir, KTP, dan BPJS, sedangkan dalam kepengurusan bantuan kerap kali pemerintah mewajibkan ketersediaan data tersebut. Namun kembali lagi, hal inilah yang menjadi keunikan selama pendataan Regsosek sebab setiap kementerian dan lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait perlu ditingkatkan karena dalam kegiatan Regsosek ini, BPS telah menyediakan datanya. Data ini dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan masyarakat dan sekiranya para *stakeholder* dapat segera

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanggap dalam menggunakannya untuk Indonesia maju. Seperti harapan Indonesia Emas 2045 tentang kekuatan ekonomi dunia, maka salah satu hal utama yang harus dibenahi adalah sistem perlindungan dan jaminan sosial warga negaranya.

Daftar Pustaka

Kemenangan, A. N. (2020, 6 Juli). R*eformasi Sistem perlindungan sosial Indonesia*. Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Anggaran. https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia

Putnam, R. D. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American of Prospect*, *13*, 35.

Google. (t.t). [Lokasi Desa Bengkel]. Diakses pada 20 November, 2022, dari https://www.google.com/maps/place/Bengkel,+Perbaungan,+Serdang+Bedagai+Regency

Google. (t.t). [Lokasi Kabupaten Serdang Bedagai]. Diakses pada 20 November, 2022, dari https://www.google.com/maps/place/Serdang+Bedagai+Regency,+North+Sumatra diakses 20 November 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

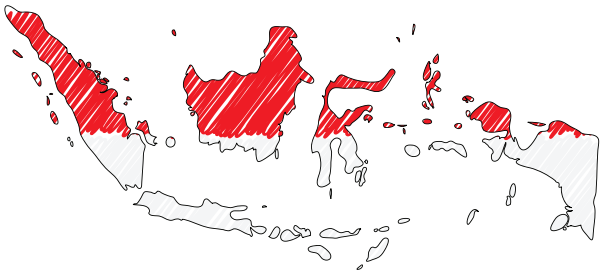

#11

Jejaring Makna dan Impresi Nilai: Merajut Simpul Pembelajaran Regsosek

Dian Karinawati Imron

Jejaring makna menarasikan bahwa setiap temuan pelaksanaan Regsosek dari seluruh bab mengantarkan pada berbagai makna yang ternyata saling terhubung. Menariknya, ada impresi nilai yang hadir dari proses pendataan, petugas pendataan, dan masyarakat yang terdata. Jaringan makna dan impresi nilai dari Regsosek di sembilan lokasi dirangkum dalam bab ini. Rangkuman pembelajaran pelaksanaan Regsosek pada buku seri ini mengangkat ragam temuan. Ada temuan yang serupa seri sebelumnya, ada pula temuan baru yang melengkapi catatan pembelajaran pelaksanaan Regsosek.

Temuan di lapangan menunjukkan nyatanya *rintangan bentang alam* dan kondisi cuaca. Petugas pendata tidak jarang menghadapi rintangan medan yang menatang, jalan tanpa aspal, jalan curam, menyeberangi laut, menyusuri sungai, dan melintasi hutan. Ada

D. K. Imron
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: dian073@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Imron, D. K. (2023). Jejaring makna dan impresi nilai: merajut simpul pembelajaran Regsosek. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (387–391). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c713 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang melakukan pendataan saat terang, ada pula yang mendata di malam hari. Derasnya hujan dan genangan banjir juga tampak dalam pengalaman pendata. Proses pendataan tetap dilakukan petugas pendata menyiratkan nilai kesungguhan dan komitmen dalam pendataan. Pengalaman ini menuntun perhatian terhadap keamanan dan keselamatan pendata.

Situasi sosial dan potensi konflik juga menjadi aspek yang perlu dicermati para pihak. Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya kecurigaan, penolakan berkali-kali dan kejadian konflik pada lokasi pendataan. Mitigasi risiko dapat dipetakan bersama oleh penanggung jawab lapang, petugas pendataan, dan pemerintah lokal setempat.

Aspek selanjutnya mengenai *dukungan kelembagaan struktural dan kultural*. Kelembagaan pemerintah memegang peran krusial sebagai penghubung para pihak mulai dari tingkat daerah hingga desa. Pemerintah juga berupaya melengkapi kebutuhan administrasi secara kelembagaan untuk pendukung pendataan. Namun, kesulitan menjangkau perusahaan muncul sebagai salah satu kendala yang masih ditemui. Selain kelembagaan struktural, kelembagaan kultural turut berpartisipasi menyosialisasikan kegiatan dengan menyertakan figur pemerintah dan tokoh budaya hingga membuat *jingle* lagu. Namun, pada beberapa daerah, sosialisasi belum menyentuh kelembagaan sosial dan kultural di tingkat lokal. Proses sosialisasi pendataan di masa mendatang diharapkan dapat menjangkau lingkungan terdekat masyarakat dan menyentuh aktivitas keseharian masyarakat, seperti hajatan budaya, pengajian, dan kegiatan sosial. Partisipasi berbagai pihak dalam memperkenalkan Regsosek menandai hadirnya nilai kepedulian pemangku kepentingan yang terlibat.

Mekanisme pendataan Regsosek patut diapresiasi dengan temuan pelaksana pendataan lapangan, mitra lokal, dan pemerintah lokal mengangkat prinsip gotong royong dalam menyelesaikan target pendataan dalam waktu yang singkat. Harapannya, mekanisme pendataan di masa mendatang dapat tetap terbuka dalam menerima masukan perbaikan terkait isu teknis dan substansi. Temuan lapang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mengemukakan tantangan: 1) jaringan komunikasi telepon dan internet; 2) foto rumah (terkhusus toilet), dan 3) kepemilikan dokumen identitas. Pengalaman pendataan mengungkapkan kendala bukan hanya jaringan internet, melainkan juga jaringan komunikasi telepon. Kemudian, foto kondisi toilet mendapatkan penolakan karena dianggap sebagai privasi. Pengalaman ini memberikan masukan mengenai pendekatan pendataan dengan isu sensitif sebagai bahasan pelatihan. Selanjutnya, temuan adanya warga yang tidak memiliki dokumen identitas resmi seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Petugas pendata dapat menjadi penghubung dengan pemerintah setempat untuk turut membantu mengatasi hambatan tersebut.

Penggalian data aset muncul sebagai isu yang cukup sering terjadi saat pendataan. Masyarakat masih banyak yang tidak terbuka mengenai kepemilikan aset, bahkan ada pula yang menutup-nutupi informasi. Alasan yang terungkap ialah karena khawatir tidak mendapat bantuan. Pendataan Regsosek kemudian jadi disalahartikan sebagai tanda akan adanya bantuan. Selain kekhawatiran, sebagian masyarakat juga menjadi resisten terhadap pendataan. Secara lugas masyarakat mengekspresikan ketidaksepakatan atas beberapa pendataan yang dialami di masa lampau. Pendataan berulang, tidak adanya pelibatan masyarakat dalam diskusi publik, dan ketidakjelasan pemanfaatan data merupakan catatan-catatan pembelajaran bagi pihak terkait. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya keterampilan *probing* dalam wawancara dan keterampilan memahami situasi. Menariknya, sebagian petugas pendata secara natural memiliki keterampilan tersebut. Pelibatan mitra pendata lokal merupakan hal istimewa karena menunjukkan nilai kepercayaan, kolaborasi, dan inklusivitas.

Isu kepemilikan aset terkait dengan kendala *justifikasi dan indikator kemiskinan*. Kepemilikan aset warga tidak mudah untuk dijustifikasi saat dihadapkan pada ragam realitas ekonomi, sosial, dan personal masyarakat. Pekerja migran misalnya, tidak memiliki pekerjaan setelah kembali dan pendapatan bekerja di luar negeri dihabiskan untuk membangun rumah dengan kategori baik bahkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mewah, tetapi minim barang dan potensial memiliki hutang. Kemudian, perantau di perkotaan dengan pendapatan minim, tetapi memiliki aset di kampung halaman. Realitas ini menjadi aspek yang dicermati hati-hati oleh ketua RT dan pendata. Pendata dapat dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis situasi sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dapat membangun batasan kehati-hatian dalam pertanyaan.

Resistensi masyarakat menandai pentingnya proses sosialisasi dan edukasi dengan bahasa dan perspektif lokal. Hal ini *urgent* karena terkait persepsi dan kepercayaan terhadap pendataan. Sosialisasi di masa mendatang diharapkan dilakukan melalui dialog-dialog terbuka, melibatkan kelembagaan sosial dan adat, memitigasi resistensi, dan potensi konflik baik sosial dan politik serta mengedepankan komunikasi dua arah sehingga dapat meluruskan bias data yang terlampau menjadi suatu kesalahpahaman. Perhargaan untuk pendata dan para pihak yang telah mengenalkan manfaat data kepada masyarakat. Terlebih, menjadikan *melek data* sebagai bagian dari transformasi pengetahuan masyarakat yang sejatinya milik siapa saja.

Kisah keluarga terdata melengkapi perjalanan penarasian Regsosek. Keluarga-keluarga itu adalah sebagian masyarakat yang tidak pernah terdata sebelumnya, merasa terasing karena perhatian pemerintah tidak pernah sampai. Ada yang tinggal di rumah dengan ukuran 5x5 meter persegi, ada yang tinggal di wilayah padat penduduk, dan ada pula yang tanpa sarana sanitasi. Nilai apa kiranya yang menggambarkan pengalaman hidupnya? Pembaca mungkin telah menyebutkan jawaban. Kisah keluarga terdata adalah potret pemangku kepentingan yang belum disuarakan. Perjalanan penarasian Regsosek memberikan kesempatan suara-suara itu sampai kepada pihak yang bertanggung jawab.

Pendataan Regsosek merupakan tujuan fundamental yang transformatif. Didasarkan pada pijakan ilmiah, dilekatkan dengan nilai sosial, dan diikat dalam cita-cita perubahan. Muaranya terhubung dengan Satu Data Indonesia. Pelaksanaan Regsosek yang diceritakan dalam sudut pandang emik berdasarkan konteks sosial budaya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lokal setempat menjadi pembelajaran para pihak untuk menjawab, siapa sesungguhnya yang mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, bagaimana komitmen penyelenggaraanya, dan sejauh mana kegiatan ini mencapai tujuannya. Jawabannya diharapkan bukan sepihak melainkan multipihak. Buku ini menggambarkan proses bisnis pelaksanaan Regsosek secara emik, terlebih membawa pembaca untuk melihat langsung situasi masyarakat secara nyata, kondisi lingkungan tempat masyarakat hidup, mendengarkan suara masyarakat yang sejatinya merupakan target utama dari seluruh pelayanan negara. Semoga simpul-simpul narasi Regsosek memperkenalkan ragam makna dan nilai dibalik pendataan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

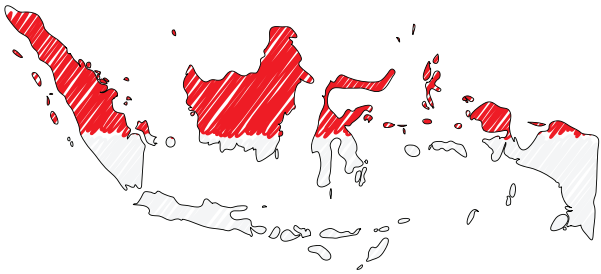

Lampiran Biodata Kepala BPS Kabupaten/Kota

Kepala BPS Kota Balikpapan

Dr. Mustaqim, S.ST., S.E., M.Si., adalah Kepala BPS Kota Balikpapan yang menjabat sejak tahun 2021. Ia lahir di Pati pada tanggal 8 Desember 1977. Beliau menamatkan studi S-1 Ekonomi di Universitas Gorontalo tahun 2006, S-2 Statistik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2009, dan menyelesaikan S-3 Statistik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 2020. Sebelum diangkat sebagai Kepala BPS Kota Balikpapan, jabatan yang pernah beliau emban adalah sebagai Kasie IPDS BPS.

Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau

Oo Suharto menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Pulau Pisang sejak tahun 2020. Latar belakang pendidikan adalah sarjana sains terapan (S.ST) dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta 2000–2001 dan ahli madya statistik dari Akademi Ilmu Statistik Jakarta 1993–1997. Pengalaman kerja sebelumnya adalah Kepala BPS Kabupaten Murung Raya (Maret 2014–April 2016); Kepala Seksi Statistik Industri BPS

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Provinsi Kalimantan Tengah (November 2012–Februari 2014); Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data BPS Provinsi Kalimantan Tengah (Januari 2010–Oktober 2012); Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Barito Selatan (Agustus 2007–Desember 2009); Staf Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Barito Selatan (Desember 2001–Juli 2007); dan Staf Seksi Integrasi Pengolahan Data BPS Provinsi Kalimantan Tengah (Desember 1997–November 2001).

Kepala BPS Kabupaten Mempawah

Bapak Munawir, S.E., M.M., lahir di Pontianak pada 3 Agustus 1969. Beliau mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di BPS sejak tahun 1992. Sebelumnya, beliau menamatkan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) pada tahun 1992. Setelah itu, melanjutkan ke pendidikan setingkat S-1 dan lulus tahun 1996. Gelar magister diperoleh pada tahun 2009 bidang manajemen. Jabatan yang pernah diemban, antara lain staf Seksi Statistik Ketahanan Sosial (2001), Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi (2001), Kepala BPS Sekadau (2011), Kepala BPS Ketapang (2014), dan Kepala BPS Mempawah (2021). Penghargaan yang pernah diraih, yaitu Satyalencana Karya Satya 10 Tahun (2009) dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2015).

Kepala BPS Kabupaten Sampang

Bapak Agus Puji Raharjo, S.Si., M.M.A., mulai bertugas di BPS Kabupaten Sampang sejak tanggal 29 Agustus 2022. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Kepala BPS Kabupaten Lamongan tahun 2020 dan Kota Kediri tahun 2021. Pada tahun 2016 menjabat Kepala Bidang Statistik Produksi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian tahun 2012 menjabat Kepala BPS Kabupaten Belitung. Beliau berlatar pendidikan pendidikan S-1 Statistik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor tahun 1996 dan terakhir S-2 Agribisnis dari UPN "Veteran" Jawat Timur, Surabaya tahun 2009.

Kepala BPS Kota Surakarta

Totok Tavirijanto lahir di Magelang pada tanggal 19 April 1965. Beliau menamatkan pendidikan D-3 di Akademi Ilmu Statistik pada tahun 1987 dan S-1 di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1993. Beliau menjabat sebagai Kepala Statistik Industri BPS Klaten pada tahun 1998–2000; Kepala Statistik Pertanian BPS Boyolali 2000–2001; Kepala Statistik Produksi BPS Boyolali 2001–2002; Kepala Statistik Pertanian BPS Provinsi Jawa Tengah 2003–2008; Kepala BPS Kabupaten Wonogiri 2009–2011; Kepala Bidang Statistik Produksi Provinsi Jawa Tengah 2011–2019; dan Kepala BPS Kota Surakarta 2019–sekarang.

Kepala BPS Kabupaten Indramayu

Ono Margiono, S.Si., M.M., lahir di Jakarta 13 Mei 1966, memulai pengalamannya mengenal data sejak bergabung sebagai bagian dari BPS RI. Pada tahun 2012 beliau mendapat amanah sebagai Kepala BPS Kabupaten Kuningan kemudian pada tahun 2018 sebagai Kepala BPS Kabupaten Cirebon dan tahun 2021 sebagai Kepala BPS Kabupaten Indramayu. Bagi beliau, kepemimpinan dan adaptasi terhadap perubahan merupakan kunci untuk mendukung kelancaran kegiatan pendataan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan

Arif Rahman Maulana, S.Si., M.M., lahir di Malang tanggal 4 Februari 1971. Beliau menempuh pendidikan di Akademi Ilmu Statistik Jakarta pada tahun 2000, S-1 Fakultas MIPA, Prodi Statistika di Universitas Terbuka pada tahun 2002 dan studi S-2 Program Studi Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen SDM di Universitas Bandar Lampung tahun 2014. Beliau menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Gorontalo Utara pada 2019–2022 dan Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2022.

Kepala BPS Aceh Besar

Irnanto Rusli, S.T., M.M., adalah Kepala BPS Kabupaten Aceh Besar. Lahir di Banda Aceh, 31 Juli 1966. Lulusan SMA Muhammadiyah Banda Aceh. Menamatkan pendidikan S-1 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Abulyatama Aceh (Unaya), sedangkan S-2 di PPS Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Jabatan yang pernah diemban, antara lain Kasi Statistik Pertanian BPS Aceh, Kabid Statistik Produksi BPS Aceh, dan Kepala BPS Aceh Besar 2019–sekarang.

Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Herman, S.E., M.Si., kelahiran Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kecamatan Lubuk Pakam Provinsi Sumatra Utara ini diangkat sebagai Kepala BPS Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 4 Januari 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala BPS Kota Medan sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 3 Januari 2019. Bapak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Herman menerima dengan ramah kedatangan para peneliti dari KSDK-BRIN. Selain itu beliau juga sempat turut ke lapangan ketika kami mewawancarai informan, beliau memfasilitasi peneliti KSDK untuk melakukan diskusi bersama para Koseka di lingkungan BPS Serdang Bedagai. "Bangun jaringan dan relasi seluas-luasnya karena kita tidak tahu kapan kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Pupuk kepercayaan dan mempertahankan profesionalitas. Kinerja kami dapat kami buktikan, silahkan uji validitas, BPS Serdang Bedagai menjadi salah satu kabupaten yang mampu bersaing," pesannya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

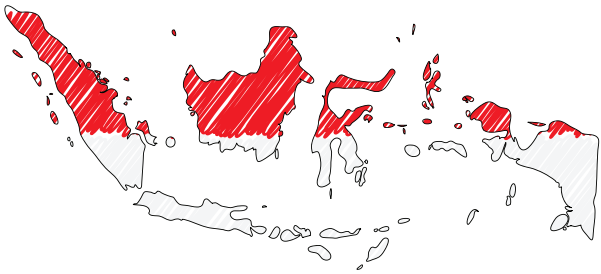

Glosarium

Agraris	:	pertanian atau tanah pertanian; cara hidup petani.
Agroekologi	:	disiplin akademik yang mempelajari proses ekologi yang diterapkan pada sistem produksi pertanian.
Awak	:	kebanyakan masyarakat di Sumatra Utara mengartikannya sebagai "saya".
Bantuan Langsung Tunai	:	program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
Bantuan Sosial	:	pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Basis Data	:	kumpulan data yang terorganisir, umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer.
BLT-DD	:	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga atau individu yang membutuhkan, biasanya dalam situasi darurat atau dalam kondisi ekonomi yang sulit.
BST	:	Bantuan Sosial Tunai adalah program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah untuk membantu sekitar 10 juta keluarga miskin penerima manfaat yang terdampak pandemi COVID-19.
Command center	:	suatu tempat atau lokasi untuk menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan cepat dalam mendukung atau merespons kejadian penting.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dana Desa	:	dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	:	data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
Door to door	:	mengunjungi secara langsung dari rumah ke rumah.
Emik	:	pengkajian sudut pandang dari subjek yang diteliti, baik kelompok masyarakat ataupun para petugas pendata (Petugas Pendataan Lapangan/PPL dan Petugas Pemeriksaan Data Lapangan/PML); penelitian yang sepenuhnya mengkaji perspektif spesifik pada karakter sosial budaya (*social-cultural specificity*) setempat
Enumerator	:	petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pengumpulan data.
Entitas	:	sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik
GAPENSI	:	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
Geotagging	:	data dan informasi geografis yang direkam dalam suatu sistem informasi digital yang berupa metadata.
Geohistoris	:	geografi kesejarahan; ilmu yang mempelajari tentang sejarah di suatu wilayah geografis.
Geospasial	:	aspek keruangan yang dapat menunjukan, lokasi, bentuk, letak dan lokasi suatu obyek yang berada di permukaan bumi.
Global Positioning System (GPS)	:	sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta informasi mengenai waktu, secara kontinu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca, kepada banyak orang secara simultan.
Impresi	:	kesan; efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran atau perasaan.
Indeks	:	rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu.
Indikator	:	sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan.
Inflasi	:	dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks Kesejahteraan	:	suatu indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
Intensifikasi	:	perihal meningkatkan hasil produksi yang lebih massif.
Interopera-bilitas		berasal dari kata *interoperability* yang terdiri dari 3 kata, yaitu *inter* yang artinya antar (beberapa hal), *operate* yang artinya bekerja, dan *ability* yang artinya kemampuan/kebisaan. Jadi, kemampuan bekerja antar beberapa hal atau dalam bahasan ini berarti kemampuan untuk dapat dioperasikan bersama oleh berbagai *stakeholders*.
Invasi ruang	:	proses perebutan ruang di pinggiran perkotaan terjadi sebagai imbas dari perebutan alat-alat produksi.
Jalan lintas	:	lintasan, jalan atau rel kereta api di titik atas tanggul yang melintasi tempat rendah, atau basah, atau sepotong air.
Jaminan Sosial	:	salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Kampung Kumuh	:	permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Kedhaton	:	penyebutan untuk bagian dalam keraton yang hanya dihuni oleh Raja.
Kelindan	:	diambil kosakatanya dari kabel penghubung roda mesin. Maknanya suatu putaran siklus yg saling terhubung antara satu dengan lainnya.
Kilang	:	instalasi industri tempat minyak bumi dimurnikan menjadi produk yang lebih berguna dan yang dapat diperdagangkan.
Koseka	:	Koordinator Sensus Kecamatan.
KPMD	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Kuesioner	:	alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis.
Lembaga Dewan Adat	:	perkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai wadah perkumpulan Pewaris Dinasti Mataram Karaton Surakarta Hadiningrat telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham RI.
Liberalisme	:	aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Livelihood system	:	sistem mata pencaharian yang bersesuaian dengan sumber daya lingkungan setempat.
Maritim	:	berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.
Migran	:	orang yang melakukan perpindahan tempat tinggal dari suatu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat lainnya (negara dan sebagainya).
Ngalap Berkah Ndalem	:	Suatu proses yang dianggap dapat mendatangkan berkah, *ngalap* berkah di Jawa biasanya ditemui di pesantren dan di kalangan kerajaan.
PBDT		Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial.
Perahu klotok		alat transportasi sungai yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari bahan kayu keras seperti ulin (*Eusideroxylon swageri*) dan digerakkan menggunakan mesin kendaraan roda empat berbahan bakar solar.
Persentase	:	bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen.
PML	:	Petugas Pemeriksaan Lapangan.
PPL	:	Petugas Pendataan Lapangan.
PPLS	:	Pendataan Program Perlindungan Sosial yang bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data rumah tangga sasaran bantuan langsung tunai, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Orang Miskin (Raskin), dan program-program lainnya.
Prelist	:	daftar nama warga yang diberikan kepada petugas lapangan untuk diwawancarai dan diverifikasi dengan ketua RT/SLS pada saat kegiatan Regsosek berlangsung.
Proxy mean test	:	Metode memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain.
Rasio	:	Perbandingan suatu angka yang memiliki keterkaitan.
Registrasi	:	Pengumpulan data yang dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu untuk penduduk yang ada.
Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Revolusi Industri	:	perubahan yang besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang atau jasa.
Sanitasi	:	upaya yang dilakukan seseorang untuk menjamin kondisi lingkungan yang sehat dan bersih. Kebersihan tersebut dapat dilihat pada lingkungan sekitar, mulai dari kualitas air, udara, hingga tanah.
Sawer	:	meminta uang kepada penonton atau penonton memberi uang kepada pemain (pada pertunjukan keliling, seperti kuda kepang, topeng); menebarkan uang, beras, dan sebagainya kepada undangan oleh pengantin.
Sensus	:	penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
Sinuwun	:	sebutan untuk baginda raja atau yang dimuliakan.
SLS	:	Satuan Lingkungan Setempat; Lingkungan Rukun Tetangga (RT)
Stunting	:	gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional.
Survei	:	teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data.
Tubuh sosial	:	kategori organik dan atomik yang dilekatkan pada individu-individu tertentu.
Transplosi	:	perluasan mendadak dari pertumbuhan penduduk masyarakat kota.
Tunawisma	:	sebutan untuk individu atau sekelompok orang yang tidak mempunyai tempat tinggal (rumah); gelandangan.
Unifikasi	:	dikendalikan, diarahkan, atau dilembagakan dari tingkat atas struktur perusahaan; Melanjutkan dengan memecahkan aspek-aspek umum yang besar (sebagai suatu masalah) menjadi konstituen-konstituen yang lebih kecil dan lebih perinci: bekerja dari yang umum ke yang khusus.
Urbanisasi	:	perpindahan penduduk dari desa ke kota; meliputi proses yang menyebabkan suatu area menjadi lebih urban.
Urban sprawl	:	perluasan pengembangan kawasan terbangun yang mengakibatkan kepadatan bangunan maupun penduduk yang rendah, perkembangan yang menyebar/tidak saling terintegrasi, ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi, serta perkembangan wilayah terbangun ini berada di kota pinggiran (*urban fringe*).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Variabel	:	faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan.
Wilkerstat	:	Wilayah kerja statistik untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

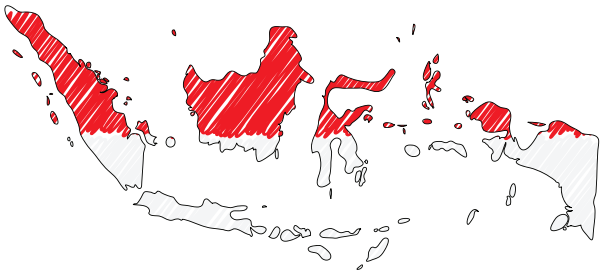

Tentang Editor

M. Alie Humaedi

Lahir di pedesaan pesisir Cirebon pada tahun 1976. Beliau menempuh Pendidikan S-1 Tafsir Hadits dan program magister pertamanya di Jurusan Hubungan Antaragama, IAIN Sunan Kalijaga. Beliau melanjutkan program doktor di bidang Antropologi Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seiring studi S-3, ia juga lulus dari magister keduanya di bidang Kajian Budaya, Universitas Sanata Dharma. Beliau menjadi *livelihood investigator* pada lembaga-lembaga nasional dan internasional yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan. Beliau bergabung menjadi peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2008.

Pada usia 36 tahun, ia telah menduduki jabatan Peneliti Ahli Utama IV/e bidang kajian budaya dan telah dikukuhkan sebagai professor riset pada tanggal 14 Mei 2020. Selain aktivitasnya di LIPI, ia pernah menjabat sebagai *Deputy Director Social Culture and Public Awareness, Asia Pacific Center for Ecohydrology* UNESCO (2016–2017), *Lead Researcher* Kebencanaan Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk urusan kemanusiaan (UNOCHA, 2007–2008), *external*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

evaluator untuk program Penataan Wilayah di Desa-desa Adat Maluku (AustraliaAid, 2016), *external eevaluator* untuk program *International Moslem Aid* (2015), peneliti program Netherland Institute voor Livelihood dan Pemberdayaan Sosial-Ekonomi di Aceh pada Christian Aid (2006). Pada tahun 2021, ia mendapatkan penghargaan Satyalencana Wirakarya Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia dalam bidang "Pemajuan Kebudayaan Daerah". Pada tahun 2022, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (KSDK) bersamaan dengan integrasi fungsional peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia dapat dihubungi di KSDK-BRIN, Gedung Sasana Widya Sarwono (SWS) Lt. VI, Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta. *E-mail*: humaedi2014@gmail.com.

Dian Karinawati Imron

Lahir di Bontang, Kalimantan Timur. Dian menyelesaikan studi S-1 Sastra Inggris tahun 2013 di Universitas Hasanuddin dan S-2 Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2016 di Universitas Gadjah Mada. Dian memiliki minat pada topik kesusastraan, kesejahteraan sosial, bahasa Isyarat Indonesia, *community development* dan *Corporate Social Responsibility*. Dian mendapatkan kesempatan mempelajari kebudayaan multikultural di *Iowa State University.* Dian terlibat dalam penelitian *Organizational Capacity Assessment* PT Pertamina EP Subang, asesmen program *Smart Village* Kemendesa PDTT dan asistensi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Kementerian KLHK. Dian bergabung sebagai peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022. *E-mail*: dian073@brin.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Agus Pramono

Lahir di Surabaya, Jawa Timur. Agus menamatkan studi S-1 Ilmu Politik dan S-2 Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga. Bekerja di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS sejak 2011 dan menekuni minat studi terkait statistik sosial dan politik. Agus terlibat dalam berbagai penyusunan indeks bersama Kementerian/Lembaga, seperti Indeks Demokrasi Indonesia, bersama Kemenkopolhukam, Bappenas, dan Kemendagri kemudian Indeks Penilaian Integritas bersama KPK, Indeks Risiko Terorisme bersama BNPT, dan survei terkait pencucian uang dan pembiayaan tindak pidana terorisme bersama PPATK. Pengalaman penelitian lain berupa penugasan dari BPS untuk melakukan kajian tentang suku bangsa bersama ISEAS Singapore (2013–2014) dengan *output* buku dan beberapa jurnal internasional. Selain penyusunan indeks dan penelitian, sejak tahun 2015 beraktivitas sebagai dosen tidak tetap di sekolah kedinasan BPS (STIS). Di luar BPS, Agus terlibat dalam penulisan buku yang diterbitkan Pusat Studi HAM Universitas Airlangga dan Airlangga University Press, serta menulis kolom di surat kabar Kompas. *E-mail*: aguspram@bps.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

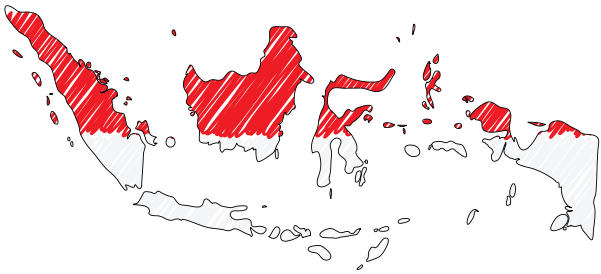

Tentang Penulis

Nurbaety Setram

Seorang peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Riwayat Pendidikan D-3 Statistik di Akademi Ilmu Statistik Jakarta. Memperoleh gelar S-1 Statistika di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S-2 Agribisnis Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum menjadi peneliti BRIN, penulis adalah peneliti pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta. *E-mail*: nurb003@brin.go.id.

Lindawati

Seorang peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia memperoleh gelar S-1 Psikologi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2008 dan S-2 Manajemen di Universitas Mercu Buana tahun 2016. Sebelum menjadi peneliti BRIN, penulis adalah peneliti di Pusat Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bidang peminatannya meliputi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kebijakan publik, inovasi sektor publik, kesejahteraan sosial, gender dan *equality*, manajemen sumber daya manusia, manajemen proyek, dan manajemen strategis. *E-mail*: lind014@brin.go.id.

Rosita Novi Andari

Seorang peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (KSDK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2022. Lahir di Pati pada November 1986. Sebelumnya, beliau merupakan Peneliti Ahli Muda di Pusat Pelatihan dan Pengembangan-Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jatinangor, Sumedang. Beliau menempuh pendidikan S-1 di Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dan S-2 Kebijakan Publik di Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Padjajaran tahun 2018. Selain menjadi peneliti, juga sebagai editor bersertifikat di Syiah Kuala University Press (2021-sekarang); editor/*reviewer* pada *Jurnal Wacana Kinerja*, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan ASN Lembaga Administrasi Negara/Puslatbang PKASN LAN (201–sekarang). Fokus penelitian antara lain sosial, kebijakan publik, administrasi publik, manajemen pemerintahan daerah dan desa, dan pembangunan dan kesejahteraan sosial desa. Scopus ID: 57205455658. *E-mail*: rosi014@brin.go.id.

Kurnia Suci Indraningsih

Seorang peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022. Sebelumnya, bekerja di Direktorat Bina Prasarana, Dirjen Perikanan (1987–1991). Pada tahun 1991 hingga Maret 2022 bekerja pada Pusat Sosial

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, sebagai peneliti sosial ekonomi pertanian. Gelar S-1 Perikanan diraih tahun 1986 kemudian S-2 Sains Komunikasi Pembangunan dan Pedesaan tahun 2002, dan S-3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan pada tahun 2010 dari Institut Pertanian Bogor. *E-mail*: kurn028@brin.go.id.

Eliana Sidipurwanty

Lahir pada tahun 1963, merupakan peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022. Kepakaran penelitian beliau yaitu kebijakan publik dan kebijakan agraria. Beliau menempuh studi S-1 di Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta dan S-2 Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) tahun 2003. Pengalaman penelitian beliau terkait dengan topik agraria, tata ruang, dan pertanahan. *E-mail*: elia001@brin.go.id.

Yumantoko

Lahir di Kebumen, Februari 1987. Pendidikan S-1 diselesaikan pada Jurusan Sosiologi, Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Pada tahun 2021, ia menyelesaikan S-2 di jurusan dan universitas yang sama yaitu Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pengalaman karirnya dimulai ketika menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Balai Penelitian Kehutanan Mataram, Kementerian Kehutanan, pada tahun 2010. Pada tahun 2014, tempat kerja berubah nama menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau bergabung sebagai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2021. Isu yang dikaji selama ini adalah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, kebijakan kehutanan, sosial ekonomi kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Publikasinya dapat dilihat di Google Scholar (https://scholar.google.co.id/citations?user=wP7iruEAAAJ&hl=id). *E-mail*: yumantoko@brin.go.id.

Nyi R. Irmayani

Seorang peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas (KSDK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1968. Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta tahun 1992 dan Jurusan Psikologi Sosial, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002. Fokus penelitian, antara lain Survei Korban Narkoba di Kalangan Remaja; Peranan Pranata Sosial dalam Menangani Masalah Narkoba di Kalangan Remaja; Kajian Pengembangan Model Kemitraan Dunia Usaha; Program Keluarga Harapan, pemetaan SDM kesejahteraan sosial, dan penyuluh sosial masyarakat. Pernah terlibat dalam survei kekerasan terhadap anak, bekerja sama dengan UNICEF, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) USA, Kementerian Negara untuk Pemberdayaan Anak dan Perempuan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung pada tahun 2013, serta survei kesejahteraan sosial dasar pada tahun 2015. Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/ detail.uri?authorId=57956596800. *E-mail*: nyir001@brin.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pratiwi

Penulis tertarik terhadap riset-riset sosiologi dan kebijakan publik bermula pada tahun 2006 sejak bergabung dalam divisi riset Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balairung UGM. Selain itu, penulis juga pernah memenangkan beberapa pendanaan penelitian dan menjadi asisten dan penerjemah bagi kegiatan lapangan bersama *Graduate School of International Development*, Universitas Nagoya selama menjadi mahasiswa S-1 Sosiologi UGM. Pada tahun 2010, ia bergabung di Lembaga Administrasi Negara sebagai peneliti dan telah memfasilitasi riset-riset untuk legislasi di daerah, program reformasi birokrasi di daerah, dan ratusan inisiasi inovasi pelayanan publik. Pada 2017 hingga 2019, penulis mendapatkan beasiswa *Asian Development Bank-Japan Scholarship Program* untuk melanjutkan jenjang studi *Master of Arts in Public Policy* khususnya kebijakan sains, teknologi, dan inovasi di National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Jepang. Sejak 1 Maret 2022, penulis bergabung menjadi salah satu periset di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Publikasi dan kontak penulis dapat ditilik pada https://orcid.org/0000-0002-9633-7729. *E-mail*: prat005@brin.go.id.

Rachmini Saparita

Seorang peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas BRIN. Sebagai peneliti ahli utama di bidang sosial ekonomi pertanian, banyak tulisannya tentang kesejahteraan masyarakat tani, pengentasan kemiskinan, dan sistem inovasi pertanian, khususnya di wilayah jauh dan terpencil. Beberapa publikasinya dapat dikunjungi di https://scholar.google.com/ citations?user=z4VeS0oAAAAJ&hl=en. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: rsaparita@gmail.com; dan rach001@brin.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nuzul Solekhah

Saat ini adalah seorang peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas BRIN. Penulis tertarik dengan tema kesejahteraan sosial dan relasinya dengan isu gender, marginalitas, dan transformasi sosial. Beliau juga tertarik dengan topik perubahan sosial yang berkaitan dengan disrupsi teknologi. Beberapa publikasi beliau dapat dikunjungi melalui laman berikut https://scholar.google.com/citations?user= E4lBwNYAAAAJ&hl=en. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: nuzulsoleka@gmail.com

Nurul Hilmiati

Menyelesaikan studi S-2 Kedokteran Hewan di University of Queensland, Australia pada tahun 2004 dan studi S-3 di Jurusan Komunikasi untuk Perubahan Sosial, di University of Queensland, Australia pada tahun 2013. Beliau merupakan praktisi komunikasi pembangunan partisipatif. Berpengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan dan peluang partisipatif untuk inisiatif penelitian dan pengembangan, serta memberikan pelatihan untuk asisten lapangan, penyuluh dan petani. Memiliki latar belakang dan pengalaman yang kuat dalam merancang dan mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan penyerapan inovasi dan pengembangan kelembagaan untuk pengembangan masyarakat. Beliau merupakan peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022. Pengalaman beliau, meliputi peningkatan produksi ternak dan penghidupan petani kecil dalam sistem pertanian berbasis tanaman di Indonesia (didanai ACIAR) dan pengembangan usaha ternak skala kecil di Timor Leste (didanai ACIAR), serta peningkatan sistem penggemukan sapi potong berbasis legum pohon hijauan di Indonesia Timur dan Australia Utara. *E-mail*: nuru053@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Habibullah

Peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional mulai tahun 2022. Lahir di Ogan Ilir, Sumatra Selatan tahun 1979. Lulusan S-1 Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003 dan S-2 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia tahun 2011. Beberapa hibah penelitian didapatkan, seperti PT Surya Citra Televisi (SCTV), Percik Salatiga (penelitian politik lokal), PT Pertamina, dan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H (penelitian lingkungan). Sebelum bergabung di BRIN, Habibullah adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI (2006-2021). Fasilitator desa di Komunitas Konservasi Indonesia KKI-Warsi Jambi pada Program *Habitat and Resources Management for The Kubu* (2003-2005) dan PT Phapros, Tbk (2006). Ikut terlibat dalam pengelolaan jurnal, seperti *Sosio Konsepsia, Sosio Informa, ASEAN Social Work Journal,* dan *Julips. E-mail*: habi003@brin.go.id

Slamet Rahmat Topo Susilo

Seorang peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1968. Lulusan S-1 dari Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1996 dan S-2 Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia tahun 2013. Fokus penelitian terkait pengembangan masyarakat desa, transmigrasi, dan daerah tertinggal. Kajian yang pernah dilakukan, seperti *A Study of Village Development Planning in East Belitung Regency*, Kolaborasi Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) dan Distrik Membangun–Membangun Distrik dalam Pemberdayaan Masyarakat, dan Strategi Intervensi Penguatan Badan Usaha Milik Desa. Optimalisasi Manfaat Dana Desa dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Mendukung Perekonomian Desa di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Desa Wisata Membangun Desa Dengan Memanfaatkan Potensi Budaya. Membangun Kultur Orang Desa Melalui Promosi Desa Wisata. Scopus ID: 57215093677. *E-mail*: slam024@brin.go.id

Ririn Purba

Seorang peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (KSDK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lahir di Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Menamatkan Pendidikan S-1 Antropologi Sosial di Universitas Sumatra Utara (USU) pada tahun 2018. Ketertarikannya pada isu-isu sosial budaya, kewirausahaan sosial, media, dan perubahan sosial. *E-mail*: ririnpurba2@gmail.com, Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user= ihvufboAAAAJ&hl=id, Orcid ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid= 0000-0001-6498-465X. *E-mail*: riri006@brin.go.id

Fedrickson Haradongan

Lahir di Jakarta, 27 September 1986. Beliau menyelesaikan S-1 di STT TELKOM, Bandung, pada tahun 2009. Pada tahun 2010–2021, bergabung sebagai peneliti di Kementerian Perhubungan. Menamatkan Pendidikan S-2 pada Program Studi Sistem dan Teknik Transportasi, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2014. Sejak Januari 2022 sampai saat ini, telah bergabung sebagai peneliti BRIN di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (KSDK). Menjadi penulis dalam beberapa jurnal nasional dan internasional. Fokus riset, antara lain transportasi jalan (konektivitas antar wilayah), angkutan pedesaan, perencanaan sistem transportasi massal, *supply and demand*, dan perencanaan produksi (*sustainable system). E-mail*: fedr001@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Badrun Susantyo

Lahir pada 20 Agustus 1967 di Sragen. Seorang peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menyelesaikan pendidikan S-1 untuk bidang Ilmu Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Menamatkan pendidikan S-2 dari Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2001. Menyelesaikan pendidikan S-3 pada bidang keilmuan *Social Development/Social Work* pada *School of Social Science*, Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Malaysia. Sebelum menekuni dunia riset sebagai seorang peneliti BRIN, penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos. Juga sempat menjadi staf pengajar di STKS Bandung (sekarang Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung), dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (SGD). *E-mail*: badrun.susantyo@brin.go.id

Eko Wahyono

Lahir di Boyolali, 2 September 1989. Menamatkan pendidikan S-1 pada Jurusan Sosiologi, Universitas Sebelas Maret tahun 2011, menamatkan S-2 pada Prodi Sosiologi di Universitas Indonesia pada tahun 2014, dan menyelesaikan S-3 pada Prodi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2020. Menjadi penulis dalam berbagai jurnal nasional dan internasional. Ketertarikan dan keahlian riset, seperti masyarakat pedesaan, migrasi, masyarakat digital, sosiologi ekonomi, sistem penghidupan masyarakat, dan pembangunan sosial masyarakat. Beliau bergabung sebagai peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022. *E-mail*: ekow005@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

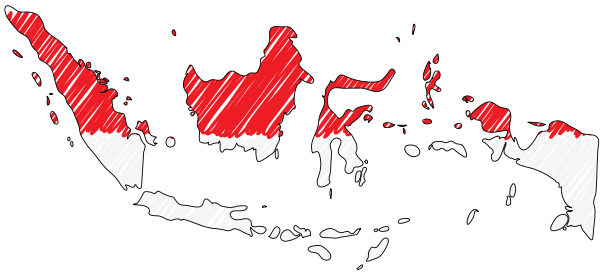

Indeks

Aceh, 3, 18, 19, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 328, 330, 331, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 380, 404, 412
Agraris, 18, 229, 395
Agroekologi, 230, 395

Badrun Susantyo, 20, 307, 423
Balikpapan, 2, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 401
Bantuan Langsung Tunai, 6, 78, 196, 395
Bantuan sosial, 7, 37, 39, 47, 51, 52, 76, 77, 94, 111, 113, 118, 119, 139, 149, 150, 151, 159, 165, 166, 178, 184, 217, 249, 283, 289, 290, 303, 328, 329, 354, 357, 358, 361, 375, 382, 395

Command center, 378, 384

Dadap, 231, 232, 233, 234, 239, 248, 252, 253, 264
Dana desa, 149, 160, 161, 383
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 396
Desa Cantik, 286, 287
Dharma Tanjung, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 144, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 166
Dian Karinawati Imron, 18, 21, 229, 389, 412
Distribusi, 4, 79, 114, 152, 162

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Eko Wahyono, 20, 307, 423
Eliana Sidipurwanty, 15, 93, 417
Emik, 1, 13, 14, 23, 53, 93, 127, 169, 229, 273, 307, 349, 389, 396
Enumerator, 11, 215, 367, 372

Fedrickson Haradongan, 20, 349, 422
Food Estate, 54
Forum Konsultasi Publik, 107, 271

Geografis, 1, 15, 16, 24, 33, 54, 95, 97, 100, 118, 125, 129, 135, 158, 275, 327, 346, 396
Geospasial, 8, 128, 179, 329
Geotagging, 211, 214, 283, 292, 330, 377, 378
GPS, 173, 283, 396

Habibullah, 18, 273, 421
Heterogen, 108
Hortikultura, 55, 59, 343
Hybrid, 14
Ibu kota negara, 230, 235
Indeks kesejahteraan, 171
Indramayu, 3, 17, 18, 43, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 246, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 259, 265, 268, 270, 271, 272, 403
Interoperabilitas, 183

Jaminan sosial, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52, 223, 388

Kampung Harmoni, 175, 176, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 208, 223, 224
Kampung kumuh, 196
Kelembagaan Adat, 198
Kelembagaan Sosial, 36, 78, 150, 198, 251, 287
Kemiskinan, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 26, 82, 94, 103, 127, 129, 139, 148, 153, 154, 158, 164, 165, 183, 184, 203, 204, 229, 230, 235, 237, 238, 252, 260, 274, 280, 306, 329, 331, 332, 333, 352, 357, 363, 375, 384, 386 391, 419
Keraton Surakarta, 177, 198, 199, 200, 201
Kurnia Suci Indraningsih, 15, 53, 416

Lampung, 3, 18, 19, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

294, 295, 299, 300, 301, 305, 306, 404
Lembaga Dewan Adat, 199, 397
Life Story, 41, 47, 80, 87, 255, 263, 301, 339, 370, 379
Lindawati, 14, 23, 26, 27, 28, 34, 37, 40, 48, 49, 50, 415
Livelihood system, 398

M. Alie Humaedi, 1, 14, 23, 53, 93, 127, 169, 229, 273, 307, 349, 389, 411
Maritim, 18, 229, 398
Mempawah, 2, 15, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 113, 115, 116, 119, 124, 125, 126, 402
Musim hujan, 75, 88, 194, 231, 344, 345, 352
Musim kemarau, 88, 231

Nametag, 259
Nurbaety Setram, 14, 23, 415
Nurul Hilmiati, 18, 229, 420
Nuzul Solekhah, 17, 169, 420
Nyi R Irmayani, 16, 127

Organisasi Perangkat Daerah, 24, 126, 186, 281

Pangan, 55, 103, 125, 131, 165, 240, 332
Pangkoh Hulu, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 79, 80, 83, 85, 87, 91
Pekerja migran Indonesia, 229, 236, 255, 260, 271, 272
Pekerja Migran Indonesia, 17, 237, 263
Perikanan, 136, 416, 417
Perkebunan, 16, 19, 26, 27, 46, 51, 55, 59, 61, 95, 98, 235, 277, 279, 312, 343, 352
Pertanian, 7, 8, 12, 16, 19, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 86, 88, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 129, 130, 134, 135, 158, 160, 172, 179, 212, 231, 232, 255, 279, 322, 395, 417, 419, 420
Petugas Pemeriksaan Lapangan, 2, 10, 31, 55, 116, 187, 208, 242, 280, 308, 398
Petugas Pendataan Lapangan, 2, 10, 31, 55, 116, 138, 180, 187, 210, 242, 280, 308, 336, 351, 396, 398
Populasi, 4, 5, 6, 170, 172, 226 308, 326
Pratiwi, 16, 127, 133, 135, 137, 146, 156, 159, 419
Proxy mean test, 398
Pulang Pisau, 15, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 90, 91, 92, 401

Rachmini Saparita, 17, 169, 419
Revolusi Industri, 399
Ririn Purba, 20, 349, 422
Rosita Novi Andari, 15, 53, 416

Sampang, 2, 16, 17, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 155, 162, 166, 167, 402
Satu data Indonesia, 13, 29, 63, 76, 90, 183, 190
Semanggi, 169, 173, 174, 175, 176, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224
Sensus Penduduk Long Form, 209, 210
Serdang Bedagai, 3, 20, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 373, 375, 384, 386, 388, 404, 405
Server, 282, 352
Slamet Rahmat Topo Susilo, 18, 273, 421
Struktur Penceritaan, 13
Stunting, 166, 399
Surakarta, 3, 17, 169, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 397, 403, 416
SUSENAS, 85, 148, 274, 283, 399

Topografi, 56, 215, 308

Urbanisasi, 16, 169, 174, 194, 204, 224
Urban sprawl, 170

Wilkerstat, 57, 81, 104, 105, 255, 283, 290, 292, 400

Yumantoko, 15, 93, 96, 101, 102, 120, 130, 132, 417

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat

Mencatat UNTUK MEMBANGUN NEGERI

Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi

Cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas memiliki banyak karaktersitik, baik demografis, geografis, termasuk sosial budaya. Melalui program Registrasi Sosial Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI tahun 2022, narasi permasalahan yang terjadi menggunakan pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menceritakan kondisi aktual di lapangan.

Saking banyak permasalahan dan luas cakupan wilayah yang diamati, termasuk bagaimana para petugas dan peneliti di lapangan memecahkannya, narasi-narasi tersebut dipecah menjadi dua seri. Selain itu, pertimbangan ruang lingkup pembahasan dan alat ikat yang memadai, membuat Jilid 1 maupun Jilid 2 tetap saling berhubungan.

BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.go.id

DOI 10.55981/brin.777

ISBN 978-623-8052-95-0
9 786238 052950